



Transformation Towards a Resilient and Sustainable Diversified Agribusiness

PT Perkebunan Nusantara I

Penjelasan Tema

Theme Explanation

Transformasi Menuju Agribisnis Terdiversifikasi yang Tangguh dan Berkelanjutan

Transformation Towards a Resilient and Sustainable Diversified Agribusiness

PT Perkebunan Nusantara I secara konsisten melanjutkan proses transformasi strategis menuju model agribisnis yang terdiversifikasi, tangguh, dan berkelanjutan. Transformasi ini merupakan respons proaktif terhadap dinamika global, termasuk volatilitas pasar komoditas, perubahan iklim, serta peningkatan tuntutan konsumen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, Perusahaan mengedepankan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, digitalisasi proses bisnis, dan efisiensi produksi berbasis inovasi teknologi. Diversifikasi usaha juga dilakukan melalui pengembangan lini bisnis baru yang bernilai tambah tinggi, seperti agroindustri hilir dan energi terbarukan, guna mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas utama.

Dalam seluruh prosesnya, PTPN I menekankan pentingnya integrasi aspek keberlanjutan, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, demi memastikan ketahanan usaha jangka panjang serta kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan fondasi transformasi ini, PTPN I menempatkan diri sebagai pelaku agribisnis nasional yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab, serta mampu menciptakan nilai bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.

PT Perkebunan Nusantara I has consistently continued its strategic transformation process towards a diversified, resilient, and sustainable agribusiness model. This transformation is a proactive response to global dynamics, including commodity market volatility, climate change, and increasing consumer demands for socially and environmentally responsible business practices.

As part of this transformation, the Company prioritizes the optimization of natural resource management, the digitalization of business processes, and production efficiency driven by technological innovation. Business diversification is also pursued through the development of high value-added new business lines, such as downstream agroindustry and renewable energy, to reduce reliance on a single primary commodity.

Throughout the entire process, PTPN I emphasizes the importance of integrating sustainability aspects across economic, social, and environmental dimensions to ensure long-term business resilience and meaningful contributions to sustainable development. With this transformational foundation, PTPN I positions itself as an adaptive, innovative, and responsible national agribusiness player capable of creating shared value for all stakeholders.



Daftar Isi

Table of Contents

2	Penjelasan Tema Theme Explanation	02	Profil PTPN I PTPN I Profile
4	Daftar Isi Table of Contents	58	Informasi Umum PTPN I General Information of PTPN I
6	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Highlights	61	Riwayat Singkat PTPN I Brief History of PTPN I
8	Kegiatan Korporasi Corporate Activities	62	Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Company Vision, Mission, and Values
16	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certificates	64	Struktur Organisasi Organizational Structure
30	Sambutan Direktur Utama Message from the President Director	66	Wilayah Operasional Operational Areas
36	Strategi Keberlanjutan PTPN I PTPN I Sustainability Strategy	67	Kegiatan Usaha dan Pasar yang Dilayani Business Activities and Markets Served
01	Tentang Laporan Ini About This Report	68	Produk dan Jasa Products and Services
40	Standar Laporan Reporting Standards	71	Pasar yang Dilayani Market Share
41	Prinsip Pelaporan Reporting Principles	72	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi List of Subsidiaries and Associated Entities
42	Cakupan dan Batasan Laporan Report Scope and Boundaries	73	Keanggotaan Dalam Asosiasi Membership in Associations
42	Siklus, Periode Pelaporan, dan Pernyataan Penggunaan Reporting Cycle, Reporting Period, and Statement of Use	03	Kinerja Ekonomi dalam Mendukung Transformasi Agribisnis Economic Performance in Supporting Agribusiness Transformation
42	Penyajian Ulang Informasi Restatement of Information	76	Kinerja Ekonomi Perusahaan Economic Performance of the Company
43	Verifikasi oleh Pihak Independen Verification by Independent Parties	80	Bantuan Finansial dari Pemerintah Financial Assistance from the Government
43	Aksesibilitas dan Mekanisme Umpan Balik Accessibility and Feedback Mechanism	82	Dana Pensiun dan Kesejahteraan Retirement and Welfare Fund
44	Proses Penentuan Topik Material Material Topic Determination Process	83	Manajemen Rantai Pasokan Supply Chain Management
46	Daftar Topik Material List of Material Topics		
49	Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement		

04 Kinerja Lingkungan yang Bertanggung Jawab Responsible Environmental Performance

- 92 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Policy
- 94 Manajemen Energi
Energy Management
- 98 Relevansi Perubahan Iklim dan Industri Perusahaan
Relevance of Climate Change to the Company's Industry
- 106 Manajemen Emisi
Emission Management
- 114 Manajemen Air dan Efluen
Water and Effluent Management
- 121 Manajemen Limbah
Waste Management
- 126 Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Hutan
Biodiversity and Forest Conservation
- 140 Penilaian Lingkungan Pemasok
Supplier Environmental Assessment

05 Kinerja Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Social Performance for Empowerment and Welfare

- 144 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Development
- 165 Berkontribusi terhadap Masyarakat
Contribution to the Community
- 178 Tanggung Jawab Kepada Pelanggan
Responsibility to Customers

06 Kinerja Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Performance

- 190 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
Good Corporate Governance (GCG)
- 194 Struktur dan Komposisi Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Composition
- 198 Proses Nominasi, Kriteria dan Pemilihan Organ Tata Kelola Perusahaan
Nomination Process, Criteria, and Appointment of Corporate Governance Organs
- 199 Proses Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Evaluation Process of the Board of Commissioners and Board of Directors
- 200 Struktur Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance Structure
- 204 Kebijakan Remunerasi
Remuneration Policy
- 208 Manajemen Risiko
Risk Management
- 212 Kode Etik
Code of Conduct
- 217 Kebijakan Hak Asasi Manusia
Human Rights Policy
- 218 Kebijakan Antikorupsi dan Antigratifikasi
Anti-Corruption and Anti-Gratification
- 225 Kebijakan Konflik Kepentingan
Conflict of Interest Policy
- 225 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
Compliance with Laws and Regulations
- 226 Kompas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable Development Goals Compass
- 228 Indeks Standar GRI dan Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
GRI Standard Index and Financial Service Authority (OJK) Reference
- 251 Lembar Umpan Balik
Feedback Sheet

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Highlights

Kinerja Ekonomi [B.1.b, B.1.e]

Economic Performance



Pendapatan (Jutaan Rupiah)

Revenue

(Millions Rupiah)

2024 15.169.619

2023* 18.227.610

2022 20.497.886

* Penyajian kembali data

* Restatement of data

100% Pemasok Perusahaan merupakan Pemasok Lokal dengan Nilai Kontrak pada tahun 2024 sebesar Rp1.423.187 Juta Rupiah*

100% of the Company's Suppliers are Local Suppliers, with Contract Values Totaling Rp1,423,187 Million in 2024*

* Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

* The work contract value is as stated in the Letter of Appointment for Goods/Services Provider (SPPBJ).

Kinerja Lingkungan [B.2.a, B.2.b]

Environmental Performance



Konsumsi Energi (Gigajoule)

Energy

Consumption

(Gigajoule)

2024 1.065.017

2023 843.060

2022 1.492.300



Penggunaan Air (m³)

Water Usage

(m³)

2024 6.802.184

2023 24.644.000

2022 48.000.000



Jumlah Emisi GRK* (Ton CO₂eq)

Total GHG Emissions (Ton CO₂eq)

2024 203.030

2023 483.727

2022 564.400

* Cakupan 1 dan 2 | Scope 1 and 2

Kinerja Sosial [B.3]

Social Performance



Kepuasan Pelanggan (Persentase)

Customer Satisfaction (Percentage)

2024 88,21

2023 84,56

2022 83,00



Jumlah Jam Pelatihan Karyawan (Jam)

Total Employee Training Hours (Hours)

2024 378.765

2023 416.098

2022 508.289



Jumlah Karyawan (Orang)

Total Employees (People)

2024 39.409

2023 44.759

2022 48.860



Jumlah Karyawan Perempuan (Orang)

Total Female Employees (People)

2024 5.116

2023 5.840

2022 6.617

Realisasi Penyaluran Dana TJSL pada tahun 2024 sebesar

Rp9,30 Miliar

The Realization of CSR Fund Distribution in 2024 Amounted to **Rp9.30 Billion**

Kegiatan Korporasi

Corporate Activities

Selama tahun pelaporan, PTPN I secara aktif melaksanakan berbagai inisiatif kegiatan baik di dalam maupun di luar lingkup Perusahaan.

Throughout the reporting year, PTPN I actively implemented a range of initiatives, both within the Company and in external engagements.

4-5 Januari 2024 | January 4-5, 2024



Komitmen Anti Penyuapan Regional 3

Anti-Bribery Commitment Declaration in Regional 3

Regional 3 melaksanakan audit resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh PT TUV Nord Indonesia di Semarang. Kegiatan ini dihadiri *Board of Regional Management* dan tim SMAP sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjaga integritas dan tata kelola antikorupsi.

Regional 3 conducted an ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System recertification audit with PT TUV Nord Indonesia in Semarang. The audit was attended by the Board of Regional Management and the SMAP team as part of the Company's commitment to integrity and anti-corruption governance.

12 Januari 2024 | January 12, 2024



Kolaborasi Strategis PTPN I dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk Ketahanan Pangan

Strategic Collaboration of PTPN I and the North Sumatra Provincial Government for Food Security

Direktur Utama, Direktur Hubungan Kelembagaan, Region Head, dan SEVP Business Support PTPN I mengunjungi Gubernur Sumatera Utara di Medan. Kunjungan ini menegaskan kolaborasi strategis antara PTPN I dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk mendukung pengembangan industri perkebunan dan ketahanan pangan.

The President Director, Director of Institutional Relations, Region Head, and SEVP Business Support of PTPN I visited the Governor of North Sumatra in Medan. The visit reaffirmed strategic collaboration between PTPN I and the Provincial Government to support plantation industry development and national food security.

9 Januari 2024 | January 9, 2024



Penanaman 1.300 Pohon

Planting of 1,300 Trees

Regional 5 melaksanakan penanaman 1.300 pohon di Kebun Gunung Jambi sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis jangka panjang dan mendukung program penghijauan di wilayah operasional Perusahaan.

Regional 5 planted 1,300 trees at Gunung Jambi Plantation as part of its commitment to environmental conservation. The activity is expected to deliver long-term ecological benefits and support the Company's reforestation program within its operational areas.

22-26 Januari 2024 | January 22–26, 2024



Sosialisasi Whistleblowing System di Regional 4

Whistleblowing System Socialization in Regional 4

Regional 4 menyelenggarakan sosialisasi *Whistleblowing System* (WBS) di Surabaya sebagai bagian dari penguatan GCG dan pengendalian internal. Kegiatan ini diikuti oleh unit kerja dan anak perusahaan di wilayah Regional 4 untuk mencegah pelanggaran terkait keuangan, operasional, keselamatan kerja, dan reputasi.

Regional 4 conducted a Whistleblowing System (WBS) socialization session in Surabaya as part of efforts to strengthen GCG and internal control. The session was attended by work units and subsidiaries in the Regional 4 area to prevent violations related to finance, operations, occupational safety, and corporate reputation.

12 Februari 2024 | February 12, 2024



Penyaluran Bantuan Banjir di Demak

Flood Relief Distribution in Demak

Regional 3 melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Desa Ketanjung, Kabupaten Demak. Bantuan diserahkan langsung oleh SEVP Operation sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

Regional 3, through the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) program, provided assistance to flood-affected communities in Ketanjung Village, Demak Regency. The aid was delivered directly by the SEVP of Operation as a demonstration of the Company's concern for disaster victims.

5 Maret 2024 | March 5, 2024



Donor Darah Rutin

Routine Blood Donation

Regional 5 menggelar kegiatan donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas di lingkungan Perusahaan.

Regional 5 organized a routine blood donation drive as a form of social responsibility and tangible contribution to blood supply needs, while also nurturing a spirit of solidarity within the Company.

14 Maret 2024 | March 14, 2024



Peresmian Pabrik Minyak Makan Merah oleh Presiden RI

Inauguration of the Red Cooking Oil Mill by the President of Indonesia

Presiden RI meresmikan Pabrik Minyak Makan Merah di Kebun Tanjung Garbus, Pagar Merbau, hasil kerja sama PTPN Group dan Kemenkop UKM. Pabrik ini mendukung ketahanan pangan nasional dengan kapasitas olah 10 ton CPO per hari dan kontribusi terhadap pengentasan *stunting*.

The President of the Republic of Indonesia inaugurated the Red Cooking Oil Plant at Tanjung Garbus Estate, Pagar Merbau, a collaboration between PTPN Group and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The plant supports national food security with a processing capacity of 10 tons of CPO per day and contributes to efforts to reduce *stunting*.

26 Maret 2024 | March 26, 2024



Pencegahan Penggarapan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN I

Prevention of Cultivation on PTPN I's HGU (Right to Cultivate) Land

Regional 1 melalui Kebun Sei Semayang melakukan antisipasi terhadap potensi penggarapan liar di lahan HGU pasca panen. Penjagaan intensif dilakukan oleh tim keamanan bersama Serikat Pekerja untuk menjaga aset Perusahaan dari klaim sepihak.

Regional 1, through Sei Semayang Plantation, took preventative action against potential illegal land encroachment on HGU areas post-harvest. The security team, supported by the Labor Union, conducted intensified patrols to protect the Company's assets from unauthorized claims.

1 April 2024 | April 1, 2024



Hilirisasi dan Revitalisasi Industri oleh PTPN Group

Downstreaming and Industrial Revitalization by PTPN Group

PTPN Group bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI menggelar sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Palembang terkait hilirisasi sawit dan revitalisasi industri gula. Kegiatan ini menekankan pentingnya integrasi PTPN Group selaras dengan arahan Presiden RI terkait ketahanan pangan, diantaranya swasembada gula nasional dan pemenuhan kebutuhan minyak nabati.

PTPN Group, in collaboration with the Directorate General of Regional Financial Development of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, conducted a PSN (National Strategic Project) socialization in Palembang, focusing on palm oil downstreaming and sugar industry revitalization. The event emphasized the importance of PTPN Group's integration in line with the President's directives on food security, including national sugar self-sufficiency and the fulfillment of vegetable oil needs.

13 Mei 2024 | May 13, 2024



Kolaborasi Pemerintah dan Karyawan dalam Penguatan Hubungan Industrial

Government-Employee Collaboration in Strengthening Industrial Relations

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, mengunjungi Regional 1 pada 13 Mei 2024. Kunjungan membahas sinergi manajemen dan karyawan dalam membangun Perusahaan yang berkelanjutan. Acara dihadiri Direktur Utama PTPN I dan jajaran manajemen serta perwakilan serikat pekerja.

The Deputy Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, Mr. Afriansyah Noor, visited Regional 1 on May 13, 2024. The visit focused on synergy between management and workers to build a sustainable Company, and was attended by the President Director of PTPN I, executives, and union representatives.

14 Mei 2024 | May 14, 2024



Kolaborasi PTPN I dan Ethical Tea Partnership (ETP) dalam Program Our Tea Our Voice (OTOV)

PTPN I and ETP Collaboration in OTOV Program

Regional 2 berkolaborasi dengan Ethical Tea Partnership (ETP) dalam program Our Tea Our Voice (OTOV) di Bandung. *Workshop* ini melibatkan LAHA dan Kaliyanamitra, membahas kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, dan keberanian berpendapat sebagai upaya memperkuat peran perempuan di sektor perkebunan.

Regional 2 collaborated with the Ethical Tea Partnership (ETP) in the Our Tea Our Voice (OTOV) program in Bandung. The workshop, held with LAHA and Kaliyanamitra, focused on gender equality, women's leadership, and the courage to speak up in efforts to empower women in the plantation sector.

12 Juni 2024 | June 12, 2024



High Level Meeting Pengendalian Inflasi dan Iklim

High Level Meeting on Inflation and Climate Control

Regional 5 mengikuti forum strategis *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi Daerah dan Rapat Koordinasi La-Niña 2024 di Kebun Banjarsari. Kegiatan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

Regional 5 participated in the strategic forum *High Level Meeting* on Regional Inflation Control and the 2024 La-Niña Coordination Meeting at Banjarsari Plantation. The event strengthened cross-sector synergy in controlling inflation and anticipating the impact of climate change on the agricultural and plantation sectors.

19-21 Juni 2024 | June 19-21, 2024



Sosialisasi dan Awareness Integrated Management System (IMS)

Integrated Management System (IMS) Socialization and Awareness Program

Regional 7 mengadakan sosialisasi *Integrated Management System (IMS)* dan pelatihan ISO 9001, ISO 14001, serta SMK3 pada 19-21 Juni 2024. Kegiatan ini memperkuat pemahaman penanggung jawab IMS terkait sistem manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja.

Regional 7 organized an Integrated Management System (IMS) socialization and training on ISO 9001, ISO 14001, and OHSMS from June 19-21, 2024. This initiative enhanced IMS PICs' understanding of quality, environmental, and occupational health and safety management systems.

10 September 2024 | September 10, 2024



Training of Trainers dan Social Mapping

Training of Trainers dan Social Mapping

Regional 2 menyelenggarakan *Training of Trainer* dan *Social Mapping* di Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas instruktur internal dan pemetaan sosial guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara inklusif.

Regional 2 organized a Training of Trainers and Social Mapping session in Gunung Mas, Bogor Regency. The training was designed to enhance the capacity of internal instructors and support inclusive organizational development through social mapping.

19-20 November 2024
November 19-20, 2024



Pelatihan Manajemen Risiko

Risk Management Training

Regional 5 bersama PT LPP Agro Nusantara menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko di Kebun Wonosari, Lawang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta dalam mengelola risiko, mendukung tata kelola perusahaan yang baik, serta meningkatkan keberlanjutan operasional bisnis.

In collaboration with PT LPP Agro Nusantara, Regional 5 conducted a risk management training at Wonosari Plantation, Lawang. The program aimed to deepen participants' understanding of risk management, support good corporate governance, and improve operational sustainability.

27 November 2024 | November 27, 2024



Dukungan PTPN I dan PTPN IV dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Support from PTPN I and PTPN IV for the Uninhabitable House Renovation Program (RTLH)

PTPN I dan PTPN IV memberikan bantuan renovasi 15 rumah tidak layak huni (RTLH) di Lampung Selatan melalui program TJSL. Inisiatif ini mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat peran sosial Perusahaan dalam pembangunan daerah.

PTPN I and PTPN IV provided renovation assistance for 15 uninhabitable houses (RTLH) in South Lampung through their CSR program. This initiative supports extreme poverty alleviation, improves community living standards, and reinforces the Company's social role in regional development.

6 Desember 2024 | December 6, 2024



Penyerahan Bantuan Banjir di Kabupaten Sukabumi

Distribution of Flood Relief Aid in Sukabumi Regency

Regional 2 memberikan bantuan kepada 165 jiwa korban banjir di Kebun Cikaso, Kabupaten Sukabumi. Evakuasi dilakukan ke lokasi aman dan bantuan segera disalurkan sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam penanggulangan bencana.

Regional 2 provided assistance to 165 flood victims at Cikaso Plantation, Sukabumi Regency. Evacuation was carried out to safe zones and aid was promptly delivered as part of the Company's disaster response commitment.

18 Desember 2024 | December 18, 2024



Bantuan Bibit Kopi di Sleman dan Kulon Progo

Coffee Seedling Assistance in Sleman and Kulon Progo

Regional 3 memberikan bantuan 1.000 bibit kopi ke wilayah Sleman dan Kulon Progo. Bantuan ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani lokal serta memperkuat kontribusi Perusahaan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah sekitarnya.

Regional 3 provided 1,000 coffee seedlings to the Sleman and Kulon Progo areas. The support aims to improve local farmer productivity and strengthen the Company's contribution to regional economic and social development.

18 Desember 2024 | December 18, 2024



Program TJSL Hari Disabilitas Internasional

CSR Program for International Day of Persons with Disabilities

Regional 1 memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan menyerahkan 10 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Medan. Bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan kelompok rentan.

In observance of International Day of Persons with Disabilities, Regional 1 donated ten wheelchairs to people with disabilities in Medan. The assistance was distributed through the North Sumatra Provincial Social Affairs Office, reflecting the Company's commitment to accessibility and vulnerable groups' welfare.

19 Desember 2024 | December, 19 2024



Donor Darah dan Pembagian Sembako

Blood Donation and Basic Food Distribution

Regional 5 menggelar kegiatan Donor Darah Rutin dan pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kegiatan ini bertujuan membantu kebutuhan darah dan meringankan beban ekonomi masyarakat prasejahtera melalui distribusi bantuan paket sembako.

Regional 5 held a routine blood donation and food aid distribution event as part of its social responsibility. The initiative aimed to support blood supply needs and ease the economic burden of underprivileged communities through the provision of food packages.

20 Desember 2024 | December, 20 2024



Penanaman Mangrove dan Terumbu Karang

Mangrove and Coral Reef Planting Program

Regional 7 menanam 1.000 pohon mangrove dan menanam terumbu karang di Teluk Lampung dan Pandan, Pesawaran, untuk mendukung ekosistem pesisir, kesejahteraan nelayan, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan Unit Selam ITERA sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap keberlanjutan alam.

Regional 7 planted 1,000 mangrove trees and coral reefs in Teluk Lampung and Pandan, Pesawaran, to support coastal ecosystems and fishers' welfare. The activity, in collaboration with ITERA Diving Unit and local communities, promoted environmental awareness and sustainability.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certificates

Penghargaan Awards



Penghargaan MUSRENBANG Provinsi Sumatera Utara

MUSRENBANG Award of North Sumatra Province



Kategori | Category

Penghargaan atas Peran Serta Sebagai Perwakilan Mitra CSR Sumatera Utara
Participation Award as Representative of CSR Partners of North Sumatra

Penyelenggara | Organizer

Provinsi Sumatera Utara | North Sumatra Province

Tanggal | Date

8 Maret 2024 | March 8, 2024



Indonesia Best 50 CSR Brand Equity Awards 2024

Indonesia Best 50 CSR Brand Equity Awards 2024



Kategori | Category

Piala Emas untuk "CSR"
Gold Award for "CSR"

Penyelenggara | Organizer

The Iconomics

Tanggal | Date

7 Mei 2024 | May 7, 2024



Sertifikat Apresiasi sebagai Mitra Penanaman 1.000 Pohon Mangrove

Certificate of Appreciation – Partner for Planting 1,000 Mangrove Trees



Kategori | Category

Mitra Penanam 1.000 Pohon Mangrove di Hutan Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur
Partner for Planting 1,000 Mangrove Trees at Wonorejo Forest, Surabaya, East Java

Penyelenggara | Organizer

Ekowisata Mangrove | Mangrove Ecotourism

Tanggal | Date

13 Desember 2024 | December 13, 2024



Nusantara CEO Awards 2024

Nusantara CEO Awards 2024



Kategori | Category

Top 5 CSR Brand Equity 2024
Top 5 CSR Brand Equity 2024

Penyelenggara | Organizer

The Iconomics

Tanggal | Date

17 Desember 2024 | December 17, 2024



SNI Award-National Quality Award of Indonesia 2024

SNI Award-National Quality Award of Indonesia 2024



Kategori | Category

Produk Industri Agro
Agro Industry Product

Penyelenggara | Organizer

Badan Standardisasi Nasional (BSN)
National Standardization Agency (BSN)

Tanggal | Date

21 November 2024 | November 21, 2024



Penghargaan Paritrana

Paritrana Award



Kategori | Category

Perusahaan Skala Besar Terbaik Bidang Perkebunan
The Best Large Scale Company in the Plantation Sector

Penyelenggara | Organizer

BPJS Ketenagakerjaan | BPJS Employment

Tanggal | Date

11 Agustus 2024 | August 11, 2024

Sertifikasi Certificates



Sertifikat SNI untuk Produk SIR 10 dan SIR 20 dari Pabrik Karet Cikumpay

SNI Certificate for SIR 10 and SIR 20 Rubber Products from Cikumpay Rubber

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
LSPro PPMB

Masa Berlaku | Validity Period
24 September 2020 – 23 September 2024
September 24, 2020 – September 23, 2024



Sertifikat ISO 22000:2018 ID 1015 untuk Pabrik Malabar, Kertamanah, dan Santosa

ISO 22000:2018 Certificate ID 1015 for Malabar, Kertamanah, and Santosa Factories

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT SGS Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
13 Juli 2021 – 9 Maret 2024
July 13, 2021 – March 9, 2024



Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Pabrik Karet Miramare

ISO 9001:2015 Certificate for Miramare Rubber Factory

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT Sucofindo Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
6 September 2021 – 5 September 2024
September 6, 2021 – September 5, 2024



Sertifikat ISO 9001:2015 ID 507 untuk Pabrik Walini, Dayeuhmanggung, dan Ciater

ISO 9001:2015 Certificate ID 507 for Walini, Dayeuhmanggung, and Ciater Factories

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT SGS Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
11 November 2021 – 11 November 2024
November 11, 2021 – November 11, 2024





Sertifikat Halal untuk seluruh Pabrik Teh di bawah lingkup PTPN I Regional 2

Halal Certificate for all Tea Factories under PTPN I Regional 2

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
BPJPH

Masa Berlaku | Validity Period
9 Desember 2021 – 9 Desember 2025
December 9, 2021 – December 9, 2025



Sertifikat SMK3 untuk Kebun Batulawang

OHSAS (SMK3) Certificate for Batulawang Plantation

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT DMS

Masa Berlaku | Validity Period
13 Mei 2022 – 13 Mei 2025
May 13, 2022 – May 13, 2025



Sertifikat Rainforest Alliance (RA) untuk unit kebun: Sedep, Talunsantosa, Purbawindu, Malabar, Kertamanah, Pasirmalang, Rancabolang, Rancabali, Sinumbra, Cisaruni, dan Dayeuhmanggung

Rainforest Alliance (RA) Certificate for plantation units: Sedep, Talunsantosa, Purbawindu, Malabar, Kertamanah, Pasirmalang, Rancabolang, Rancabali, Sinumbra, Cisaruni, and Dayeuhmanggung

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
ECOCERT

Masa Berlaku | Validity Period
26 Januari 2023 – 11 April 2024
January 26, 2023 – April 11, 2024



Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Pabrik Karet Cikumpay

ISO 9001:2015 Certificate for Cikumpay Rubber Factory

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT Sucofindo Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
30 Maret 2023 – 15 Januari 2026
March 30, 2023 – January 15, 2026





Sertifikat ISO 14001:2015 untuk Pabrik Karet Cikumpay
ISO 14001:2015 Certificate for Cikumpay Rubber Factory



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT Sucofindo Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
30 Maret 2023 – 15 Januari 2026
March 30, 2023 – January 15, 2026



Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Pabrik Karet Jalupang
ISO 9001:2015 Certificate for Jalupang Rubber Factory



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT Sucofindo Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
11 April 2023 – 15 Januari 2026
April 11, 2023 – January 15, 2026



Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Pabrik Karet Batulawang
ISO 9001:2015 Certificate for Batulawang Rubber Factory



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT Sucofindo Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
8 Mei 2023 – 15 Januari 2026
May 8 2023 – January 15, 2026



Sertifikat ISO 9001:2015 ID 638 untuk Pabrik Karet Cikaso dan Cibungur
ISO 9001:2015 Certificate ID 638 for Cikaso and Cibungur Rubber Factories



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT SGS Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
14 Agustus 2023 – 26 Juni 2026
August 14, 2023 – June 26, 2026



Sertifikat ISO 9001:2015 ID 507 untuk Pabrik Walini

ISO 9001:2015 Certificate ID 507 for Walini Factory



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT SGS Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
12 November 2024 - 12 November 2027
November 12, 2024 - November 12, 2027



Sertifikat ISO 9001:2015 ID 617 untuk Pabrik Cisaruni, Rancabolang, dan Talun

ISO 9001:2015 Certificate ID 617 for Cisaruni, Rancabolang, and Talun Factories



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT SGS Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
19 Desember 2024 - 26 Oktober 2026
December 19, 2024 - October 26, 2026



Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Pabrik Miramare

ISO 9001:2015 Certificate for Miramare Factory



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT SGS Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
5 November 2024 - 5 September 2027
November 5, 2024 - September 5, 2027



Sertifikat Halal

Halal Certificate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
Majelis Ulama Indonesia (MUI) | Indonesian Ulema Council (MUI)

Masa Berlaku | Validity Period
17 Januari 2022 – 17 Januari 2026
January 17, 2022 – January 17, 2026



Sertifikasi SNI untuk Kopi Banaran

SNI Certification for Banaran Coffee



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

Kementerian Perindustrian | Ministry of Industry

Masa Berlaku | Validity Period

12 Mei 2022 – 11 Mei 2025
May 12, 2022 – May 11, 2025



Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI

Certificate of Conformity for SPPT SNI



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

TUV Nord Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period

26 Januari 2024 – 10 Januari 2027
January 26, 2024 – January 10, 2027



Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara IX

Anti-Bribery Management System Certificate for the Head Office of PT Perkebunan Nusantara IX



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

TUV Nord Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period

26 Januari 2024 – 10 Januari 2027
January 26, 2024 – January 10, 2027



Sertifikat Penggunaan Tanda SNI

Certificate of SNI Mark Usage



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

Kementerian Perindustrian | Ministry of Industry

Masa Berlaku | Validity Period

6 September 2024 – 5 September 2028
September 6, 2024 – September 5, 2028



Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi ISO 17025:2017

Testing and Calibration Laboratory Management System ISO 17025:2017



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

Komite Akreditasi Nasional (KAN) | National Accreditation Committee (KAN)

Masa Berlaku | Validity Period

31 Agustus 2020 – 19 April 2025

August 31, 2020 – April 19, 2025



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Occupational Health and Safety Management System (SMK3)



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

Kementerian Ketenagakerjaan | Ministry of Manpower

Masa Berlaku | Validity Period

9 Juni 2023 – 9 Juni 2026

June 9, 2023 – June 9, 2026



ISO 9001:2015 untuk Pabrik Karet Rosela Baru

ISO 9001:2015 for Rosela Baru Rubber Factory



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period

6 January 2024 - 5 Januari 2027

January 6, 2024 - January 5, 2027



Sertifikat Halal No. ID35410000007230220 untuk Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan

Halal Certificate No. ID35410000007230220 for Plants and Processed Plant Products



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Halal Product Assurance Organizing Agency

Masa Berlaku | Validity Period

2 Desember 2024 | December 2, 2024



Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 untuk penerapan sistem di Kantor Pusat PTPN XII

Anti-Bribery Management System Certificate ISO 37001:2016 for implementation at PTPN XII Head Office



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
TUV Nord Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
26 Januari 2021 – 25 Januari 2024
January 26, 2021 – January 25, 2024



Sertifikat Sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) untuk Teh Hitam CTC No. 014/MS HACCP/2021

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System Certificate for CTC Black Tea No. 014/MS HACCP/2021



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
Komite Akreditasi Nasional (KAN) | National Accreditation Committee (KAN)

Masa Berlaku | Validity Period
26 Juli 2021 – 28 Agustus 2024
July 26, 2021 – August 28, 2024



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0013/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Pasewaran

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0013/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Pasewaran Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0012/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Pancursari

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0012/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Pancursari Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0011/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Sungai Lembu

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0011/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Sungai Lembu Estate

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0010/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan Thin Brown Crepe (TBC) – Kebun Gunung Gambir

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0010/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) and Thin Brown Crepe (TBC) – Gunung Gambir Estate

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0009/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Kalirejo

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0009/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kalirejo Estate

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0008/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan Thin Brown Crepe (TBC) – Kebun Kotta Blater

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0008/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) and Thin Brown Crepe (TBC) – Kotta Blater Estate

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025





**Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0007/UK/En untuk produksi
Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Zeelandia**

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0007/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Zeelandia Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



**Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0006/UK/En untuk produksi
Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan Thin Brown Crepe (TBC) – Kebun Tretes**

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0006/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) and Thin Brown Crepe (TBC) – Tretes Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



**Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0005/UK/En untuk produksi Ribbed
Smoked Sheet (RSS) dan Thin Brown Crepe (TBC) – Kebun Sumber Tengah**

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0005/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) and Thin Brown Crepe (TBC) – Sumber Tengah Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



**Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0004/UK/En untuk produksi
Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Renteng**

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0004/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Renteng Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0003/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Banjarsari
ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0003/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Banjarsari Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0002/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Kalisanen
ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0002/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kalisanen Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 9001:2015 No. 121579/A/0001/UK/En untuk produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Kebun Glantangan
ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0004/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) – Renteng Estate



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
PT URS Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
22 April 2022 – 21 April 2025
April 22, 2022 – April 21, 2025



Sertifikat ISO 27001:2013 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ISO 27001:2013 Certificate for Information Security Management System



Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
Komite Akreditasi Nasional (KAN) | National Accreditation Committee (KAN)

Masa Berlaku | Validity Period
12 Desember 2022 – 11 Desember 2025
December 12, 2022 – December 11, 2025



Sertifikasi Halal untuk PTPN VII Unit Pagaram (Kategori Produk Minuman dengan Pengolahan)

Halal Certification for PTPN VII Pagaram Unit (Processed Beverage Product Category)

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Halal Product Assurance Organizing Agency

Masa Berlaku | Validity Period
5 September 2023 | September 5, 2023



Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 untuk penerapan di seluruh proses bisnis Kantor Pusat PTPN VII

ISO 9001:2015 Certificate No. 121579/A/0005/UK/En for the manufacture of Ribbed Smoked Sheet (RSS) and Thin Brown Crepe (TBC) – Sumber Tengah Estate

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
TUV NORD Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
20 Desember 2023 – 27 Desember 2026
December 20, 2023 – December 27, 2026



Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 untuk penerapan di seluruh proses bisnis Kantor Pusat PTPN XIV

Anti-Bribery Management System Certification ISO 37001:2016 for implementation across all business processes at the Head Office of PTPN XIV

Badan Sertifikasi | Certificate Issuer
TUV NORD Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
14 Januari 2021 – 13 Januari 2024
January 14, 2021 – January 13, 2024





Sambutan **Direktur Utama** [GRI 2-22] [A.1] [D.1] [F.1]

Message from the President Director



Teddy Yunirman Danas

Direktur Utama
President Director

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Perkebunan Nusantara I (selanjutnya disebut “PTPN I” atau “Perusahaan”) dapat menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024, yang menandai penerbitan edisi kedua. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas serta refleksi dari komitmen Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam setiap pengambilan keputusan.

Pada laporan tahun ini, kami menyampaikan capaian kinerja serta inisiatif strategis berkelanjutan yang telah dirancang dan dijalankan sepanjang tahun 2024. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang transparan mengenai upaya Perusahaan dalam mengelola dampak operasional secara menyeluruh, serta kontribusi kami terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). PTPN I terus berupaya memperkuat praktik-praktik keberlanjutan terbaik di seluruh lini bisnis guna memastikan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan visi Perusahaan untuk “Menjadi perusahaan agribisnis terdiversifikasi yang unggul dan berdaya saing global”, kami terus mendorong transformasi menyeluruh yang mencakup penguatan tata kelola, efisiensi operasional, inovasi digital, dan pengembangan portofolio bisnis berbasis keberlanjutan. Fokus utama kami adalah menciptakan keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Kami menyadari bahwa keberlanjutan adalah sebuah perjalanan jangka panjang yang memerlukan sinergi, konsistensi, dan komitmen dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjalin kolaborasi yang konstruktif demi mendukung pertumbuhan agribisnis Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan [E.5]

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan bagi sektor agribisnis nasional, termasuk bagi Perusahaan. Fluktuasi pasar global, perubahan iklim, serta kebijakan keberlanjutan dari pasar ekspor menjadi faktor eksternal yang menuntut adaptasi dan inovasi. Menghadapi situasi ini, PTPN I mengedepankan strategi

Dear respected stakeholders,

We extend our highest gratitude to God Almighty for His blessings and grace, which have enabled PT Perkebunan Nusantara I (hereinafter referred to as “PTPN I” or “the Company”) to publish the 2024 Sustainability Report, marking the release of our second edition. This report serves as a demonstration of our accountability and a reflection of the Company’s commitment to conducting plantation operations in a sustainable manner by integrating environmental, social, and governance (ESG) principles into every decision-making process.

In this year’s report, we present our performance achievements and strategic sustainability initiatives that have been designed and implemented throughout 2024. This report is prepared to provide transparent information on the Company’s efforts in comprehensively managing operational impacts, as well as our contributions to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). PTPN I continuously strives to strengthen the implementation of best sustainability practices across all business lines to ensure the creation of long-term value for all stakeholders.

In pursuit of the Company’s vision to “Become a leading and globally competitive diversified agribusiness company,” we continue to drive a comprehensive transformation encompassing the strengthening of governance, operational efficiency, digital innovation, and the development of a sustainability-driven business portfolio. Our primary focus is to create a balance between achieving strong economic performance and fulfilling our social and environmental responsibilities. We recognize that sustainability is a long-term journey that requires synergy, consistency, and commitment from all parties. Therefore, we invite all stakeholders to continue fostering constructive collaboration in support of a resilient, inclusive, and sustainable agribusiness sector in Indonesia.

Opportunities and Challenges [E.5]

The year 2024 has been a challenging period for the national agribusiness sector, including for the Company. Global market fluctuations, climate change, and evolving sustainability policies in export markets have emerged as external factors requiring adaptation and innovation. In response, PTPN I has prioritized an integrated

transformasi terintegrasi yang berfokus pada efisiensi operasional, percepatan digitalisasi, dan penguatan inisiatif keberlanjutan.

Sektor karet nasional menghadapi tantangan struktural akibat dominasi tanaman tidak produktif dan terbatasnya peremajaan. Meski demikian, peningkatan harga komoditas global serta reaktivasi fasilitas produksi, seperti Pabrik Karet Cikaso, menjadi katalisator pemulihan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani. Di sisi lain, industri teh dan kopi nasional juga menghadapi tekanan, terutama dari sisi produktivitas dan akses pasar. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi teh dalam negeri serta tren peningkatan permintaan global terhadap kopi spesialti dan organik membuka peluang strategis yang patut dioptimalkan. Untuk komoditas kakao, tantangan menurunnya pasokan domestik dan meningkatnya ketergantungan terhadap bahan baku impor mendorong kebutuhan akan revitalisasi sektor hulu dan penguatan kapasitas industri pengolahan dalam negeri.

Merespons dinamika tersebut, PTPN I menempatkan penguatan hilirisasi, efisiensi proses bisnis, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Transformasi yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk mendorong kinerja ekonomi, tetapi juga untuk memperluas nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan adaptif dan kolaboratif, Perusahaan meyakini bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dapat terus dijaga di tengah tantangan yang terus berkembang.

Strategi Keberlanjutan [A.1] [E.1] [F.1]

Perusahaan terus memperluas inisiatif strategis melalui diversifikasi usaha yang mencakup pengembangan agrowisata, hortikultura, serta kemitraan jangka panjang dengan pelaku industri teh dan kopi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini tidak hanya memperkuat portofolio bisnis berbasis komoditas berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar wilayah operasional Perusahaan. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan tekad PTPN I dalam menciptakan nilai bersama yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, PTPN I telah merumuskan strategi keberlanjutan berbasis prinsip ESG yang terintegrasi dalam seluruh proses bisnis. Strategi ini difokuskan untuk mendorong seluruh unit kerja dalam menanggapi isu-isu material yang telah diidentifikasi

transformation strategy focused on operational efficiency, accelerated digitalization, and the strengthening of sustainability initiatives.

The national rubber sector is facing structural challenges due to the dominance of unproductive trees and limited replanting efforts. Nevertheless, the rise in global commodity prices and the reactivation of production facilities, such as the Cikaso Rubber Factory, have served as catalysts for productivity recovery and increased farmer income. On the other hand, the national tea and coffee industries are also under pressure, particularly in terms of productivity and market access. However, the growth in domestic tea consumption and the rising global demand for specialty and organic coffee present strategic opportunities that should be fully leveraged. For the cocoa commodity, challenges such as declining domestic supply and increasing dependence on imported raw materials underscore the urgent need to revitalize the upstream sector and strengthen the capacity of the domestic processing industry.

In response to these dynamics, PTPN I has positioned downstream strengthening, business process efficiency, and the adoption of digital technology as key strategies to ensure business sustainability. The transformation efforts are not only aimed at driving economic performance but also at expanding value creation for society, the environment, and all stakeholders. Through an adaptive and collaborative approach, the Company is confident that sustainable growth can be maintained amid evolving challenges.

Sustainability Strategy [A.1] [E.1] [F.1]

The Company continues to expand its strategic initiatives through business diversification, including the development of agro-tourism, horticulture, and long-term partnerships with tea and coffee industry players at both national and international levels. This approach not only strengthens a commodity-based sustainable business portfolio but also creates inclusive economic opportunities for communities surrounding the Company's operational areas. This collaborative approach reflects PTPN I's commitment to creating shared value that strikes a balanced integration of economic, social, and environmental aspects.

As part of its commitment to building a responsible and sustainable business, PTPN I has formulated a sustainability strategy based on ESG principles, which are integrated across all business processes. This strategy is focused on encouraging all business units to address material issues identified through the materiality

melalui proses penilaian materialitas. Isu-isu lingkungan menjadi prioritas utama, dengan cakupan pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK), efisiensi penggunaan energi, konservasi dan pengelolaan air, pengelolaan limbah, serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Sebagai upaya penguatan implementasi strategi, pada tahun 2024 PTPN I secara aktif mendorong efisiensi sumber daya melalui digitalisasi pemantauan lingkungan, seperti sistem pemantauan cuaca otomatis, pengawasan suhu dan kelembaban berbasis *Internet of Things* (IoT), serta riset pengembangan biofuel dari biji karet sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, praktik pertanian yang ramah lingkungan juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperbesar jejak lingkungan.

Untuk memastikan strategi keberlanjutan berjalan secara konsisten dan terukur, Perusahaan melalui Divisi Manajemen Risiko & Sustainability yang memiliki mandat untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja keberlanjutan secara berkala dan transparan, memastikan bahwa seluruh kebijakan dan inisiatif keberlanjutan yang diterapkan selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional, kebijakan ESG BUMN, serta standar keberlanjutan global. Dengan pendekatan ini, PTPN I menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan.

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Sepanjang perjalanannya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, PTPN I mampu mencatatkan kinerja yang terintegrasi, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dari sisi ekonomi, Perusahaan berhasil menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2024 dengan total pendapatan yang dibukukan mencapai Rp15.169.619 juta.

Pada aspek lingkungan, PTPN I terus menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dengan mengadopsi standar sistem manajemen mutu dan memperoleh berbagai sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim, Perusahaan secara bertahap mengalihkan sebagian konsumsi energinya ke sumber energi terbarukan. Salah satu inisiatif strategis yang dijalankan adalah pengembangan riset biofuel berbasis biji karet, yang diharapkan dapat menjadi alternatif energi ramah lingkungan serta mendorong pemanfaatan sumber daya perkebunan secara optimal.

assessment process. Environmental issues are a top priority, encompassing the management of greenhouse gas (GHG) emissions, energy efficiency, water conservation and management, waste management, and the protection of biodiversity in the vicinity of the Company's operational areas.

As part of efforts to strengthen strategy implementation, in 2024 PTPN I actively promoted resource efficiency through the digitalization of environmental monitoring. This includes the deployment of automated weather monitoring systems, IoT-based temperature and humidity surveillance, as well as research into the development of biofuel from rubber seeds as a renewable energy source. In addition, environmentally friendly agricultural practices continue to be enhanced through the use of digital technologies aimed at increasing productivity without expanding the environmental footprint.

To ensure that the sustainability strategy is implemented consistently and in a measurable manner, the Company, through the Risk Management & Sustainability Division, which is mandated to monitor, evaluate, and report sustainability performance regularly and transparently, ensures that all sustainability policies and initiatives are aligned with national regulations, the SOEs' ESG policies, and global sustainability standards. Through this approach, PTPN I reaffirms its commitment to continuously enhancing sustainability performance and generating a positive impact on the environment, society, and corporate governance.

Sustainability Performance Achievements

Throughout its sustainability journey, PTPN I has achieved integrated performance across economic, environmental, social, and governance dimensions. From an economic standpoint, the Company successfully prepared its consolidated financial statements for the 2024 fiscal year, recording total revenue of Rp15,169,619 million.

On the environmental front, PTPN I continues to demonstrate a strong commitment to creating a positive environmental impact by adopting quality management system standards and obtaining various nationally and internationally recognized certifications. As part of its contribution to climate change mitigation, the Company is gradually shifting a portion of its energy consumption to renewable energy sources. One of the key strategic initiatives undertaken is the development of biofuel research based on rubber seeds, which is expected to serve as an environmentally friendly energy alternative and promote the optimal utilization of plantation resources.

Langkah ini mendukung agenda global penurunan emisi GRK dan memperkuat transisi menuju sistem energi berkelanjutan. Di samping itu, PTPN I juga melaksanakan berbagai inisiatif lain seperti pengurangan timbunan limbah, penerapan pengelolaan air yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah operasional, serta program penghijauan untuk mendukung konservasi lingkungan. Seluruh upaya tersebut mencerminkan tanggung jawab dan keseriusan Perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan secara konsisten.

Pada aspek sosial, PTPN I menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil dan inklusif, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dalam bidang ketenagakerjaan, Perusahaan memastikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja diterapkan secara konsisten, disertai dengan pemberian upah yang sesuai ketentuan perundang-undangan, penyediaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan.

Selain itu, Perusahaan juga menjalankan berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dirancang sejalan dengan regulasi Kementerian BUMN dan standar ISO terkait keberlanjutan. Atas upaya tersebut, PTPN I memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain Indonesia Best 50 CSR Brand Equity Awards 2024 serta Nusantara CEO Awards 2024 yang diterima oleh Regional 4 dari The Iconomics. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi nyata dan konsistensi PTPN I dalam mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Sementara pada aspek tata kelola, penguatan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tetap menjadi salah satu prioritas utama Perusahaan. Komitmen ini tercermin dari pencapaian skor GCG kategori "Sangat Baik" sebesar 88,67 berdasarkan hasil penilaian oleh BPKP dan PTPN Group, yang menunjukkan konsistensi PTPN I dalam menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses bisnis. Selain itu, penguatan tata kelola risiko dan akuntabilitas lingkungan juga diwujudkan melalui penerapan sistem pengawasan berbasis *dashboard* serta *early warning system* untuk mendeteksi dan merespons potensi gangguan operasional secara lebih cepat dan terukur.

This initiative supports the global agenda for reducing GHG emissions and reinforces the transition toward a sustainable energy system. In addition, PTPN I has implemented various other initiatives, including waste reduction, sustainable water management, biodiversity protection within its operational areas, and reforestation programs to support environmental conservation. These efforts reflect the Company's responsibility and strong commitment to consistently upholding sustainability principles.

In the social aspect, PTPN I demonstrates a strong commitment to implementing fair and inclusive labor practices while creating added value for communities surrounding its operational areas. In the area of employment, the Company ensures the consistent application of non-discrimination and equal opportunity principles, supported by the provision of wages in accordance with applicable laws and regulations, implementation of training and competency development programs, and the creation of a safe and healthy working environment for all employees.

Furthermore, the Company carries out various community empowerment initiatives through its Corporate Social Responsibility (CSR) programs, which are designed in accordance with the regulations of the Ministry of SOEs and relevant ISO sustainability standards. As a result of these efforts, PTPN I received several prestigious awards, including the Indonesia Best 50 CSR Brand Equity Awards 2024 and the Nusantara CEO Awards 2024 presented to Regional 4 by The Iconomics. These awards serve as a testament to PTPN I's tangible contributions and consistent efforts in promoting sustainable social development.

In terms of governance, strengthening the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles remains one of the Company's top priorities. This commitment is reflected in the achievement of a "Very Good" GCG score of 88.67, based on the assessment conducted by BPKP and PTPN Group, demonstrating PTPN I's consistent adherence to transparency, accountability, and integrity in all business processes. In addition, the Company has strengthened risk governance and environmental accountability through the implementation of a dashboard-based monitoring system and an early warning system, enabling faster and more measurable detection and response to potential operational disruptions.

Apresiasi

Kami meyakini bahwa keberlanjutan bukan sekadar strategi, melainkan nilai dasar yang membentuk setiap kebijakan, program, dan proses pengambilan keputusan Perusahaan. Oleh karena itu, pencapaian yang diraih selama tahun 2024 tidak lepas dari dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemegang saham, mitra kerja, masyarakat, serta seluruh karyawan PTPN I yang telah memberikan kontribusi terbaiknya.

Atas nama Direksi, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas kepercayaan, kerja sama, dan komitmen yang telah terjalin selama ini. Kami optimis, dengan semangat kolaborasi dan prinsip keberlanjutan yang terus dijaga, PTPN I dapat terus melangkah maju untuk mewujudkan masa depan agribisnis Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Appreciation

We firmly believe that sustainability is not merely a strategy, but a core value that underpins every policy, program, and decision-making process within the Company. The achievements recorded throughout 2024 would not have been possible without the support and synergy of various stakeholders, including the government, shareholders, business partners, local communities, and all employees of PTPN I who have contributed their best efforts.

On behalf of the Board of Directors, we extend our highest appreciation and gratitude to all parties for the trust, collaboration, and unwavering commitment extended to us. We remain optimistic that, with a spirit of collaboration and a steadfast commitment to sustainability principles, PTPN I will continue to advance toward a resilient, inclusive, and globally competitive future for Indonesia's agribusiness sector.

Jakarta, 5 Agustus 2025 | Jakarta, August 5, 2025
Atas nama Direksi, | On behalf of the Board of Directors,



Teddy Yunirman Danas
Direktur Utama | President Director

Strategi Keberlanjutan

PTPN I ^[A.1]

PTPN I Sustainability Strategy



To become a diversified agribusiness company that is superior and globally competitive

Economic Performance for National Growth

Technology Leadership

Energize Investment

Economic and Social
Value for Indonesia

Talent Development

Business Model
Innovation

Value Propositions

PTPN I's Sustainability Key Performance

S

People

E

Planet

G

Prosperity

Diversity, Equity & Inclusion

Health & Safety

Learning & Development

Labor & Industrial Relations

Community Involvement and
Rights

Community Empowerment

Biodiversity & Conservation

Water and Energy Use
Efficiency

Decarbonization
(GHG Emissions & NRE)

Environmental Management
System

Business Excellent
Framework

GCG Principles & Risk
Management

Supplier Standardization

Traceability and Supply
Chain Management

Corporate Value (AKHLAK)

Compliance on Integrated Management System

PTPN I menetapkan visi menjadi perusahaan agribisnis terdiversifikasi yang unggul dan berdaya saing global dengan kinerja ekonomi yang berkontribusi bagi pertumbuhan nasional. Strategi keberlanjutan Perusahaan dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan), dan *Prosperity/Governance* (Kemakmuran & Tata Kelola), yang terintegrasi dalam nilai perusahaan AKHLAK serta kepatuhan pada sistem manajemen terintegrasi.

Melalui ketiga pilar tersebut, strategi keberlanjutan PTPN I berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Seluruh inisiatif ini sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), serta memperkuat posisi Perusahaan sebagai perusahaan agribisnis yang unggul, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PTPN I has set a vision to become a diversified agribusiness company that is excellent and globally competitive, with economic performance that contributes to national growth. The Company's sustainability strategy is built on three main pillars: People (Social), Planet (Environment), and Prosperity/Governance (Prosperity & Governance). These pillars are integrated into the corporate values of AKHLAK and aligned with compliance to an integrated management system.

Through these three pillars, PTPN I's sustainability strategy focuses on creating balanced economic, social, and environmental value. All initiatives are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and strengthen the Company's position as a leading agribusiness enterprise that is globally competitive and makes a tangible contribution to sustainable development in Indonesia.

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi ERIN | Socialization of ERIN Application Use



01

Tentang Laporan Ini

About This Report





Tentang Laporan Ini

PTPN I menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Prinsip ini tercermin melalui penyampaian informasi terkait pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas usaha, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, PTPN I menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal 66 ayat 2c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan menyampaikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan.

Penerbitan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra pemasok, karyawan, pemegang saham, regulator, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat umum, mengenai langkah-langkah yang diambil Perusahaan dalam mendukung tercapainya bisnis yang berkelanjutan. Di samping itu, laporan ini juga menunjukkan kontribusi PTPN I terhadap program nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). [A.1]

Laporan Keberlanjutan ini disajikan dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, untuk memastikan jangkauan informasi yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan. Seluruh data kinerja keberlanjutan disajikan berdasarkan metode pengukuran yang mengikuti standar internasional, sementara informasi keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Standar Laporan

Laporan ini disusun untuk menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan transparansi kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara nasional dan internasional. Perusahaan mengadopsi *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* serta GRI 13 untuk Sektor Pertanian, Akuakultur, dan Perikanan sebagai rujukan utama dalam pelaporan. GRI merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global dengan struktur pelaporan yang jelas dan metodologi yang transparan. Selain itu, Perusahaan juga merujuk pada kerangka *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017.

About This Report

PTPN I upholds the principle of transparency in all operational activities. This principle is reflected in the disclosure of information related to the management of impacts arising from business activities, encompassing economic, environmental, and social aspects. As a tangible demonstration of this commitment, PTPN I publishes the 2024 Sustainability Report, which serves not only as a communication tool for stakeholders but also as a fulfillment of Article 66 paragraph 2c of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which mandates companies to report the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Annual Report.

The publication of this report aims to provide comprehensive information to all stakeholders, including customers, supply chain partners, employees, shareholders, regulators, national and local governments, as well as public, regarding the Company's efforts to support the achievement of sustainable business practices. In addition, this report highlights PTPN I's contribution to national programs, particularly in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). [A.1]

This Sustainability Report is presented in both Indonesian and English to ensure broader information accessibility for all stakeholders. All sustainability performance data are presented using measurement methods aligned with international standards, while financial information refers to the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and is stated in Rupiah, unless otherwise specified.

Reporting Standards

This report is prepared to ensure transparency, accountability, and performance disclosure to all stakeholders, in alignment with nationally and internationally recognized sustainability reporting standards. The Company adopts the *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* and GRI 13 for the Agriculture, Aquaculture, and Fishing Sectors as its primary reporting framework. GRI is the most widely used sustainability reporting standard globally, known for its clear structure and transparent methodology. In addition to GRI, the Company also refers to the *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)* framework and Indonesia's Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017.

Prinsip Pelaporan

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini didasarkan pada delapan prinsip pelaporan yang tercantum dalam GRI 1: Landasan 2021, yaitu sebagai berikut:

Reporting Principles

The preparation of this Sustainability Report is based on the eight reporting principles outlined in GRI 1: Foundation 2021, as follows:

Akurasi Accuracy	Laporan keberlanjutan menyajikan informasi yang akurat dan detail sehingga penilaian dampak Perusahaan dapat dilakukan. The sustainability report presents accurate and detailed information to enable a thorough assessment of the Company's impacts.
Keseimbangan Balance	Laporan keberlanjutan memuat informasi yang seimbang tentang dampak positif dan negatif kinerja Perusahaan dengan cara netral dalam penyajiannya. The sustainability report provides a balanced view of the Company's positive and negative impacts, presented in a neutral and objective manner.
Kejelasan Clarity	Laporan keberlanjutan menyajikan informasi yang dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan. The sustainability report presents information that is easily understandable and accessible to stakeholders.
Keterbandingan Comparability	Laporan keberlanjutan menyajikan informasi yang dipilih, disusun, dan dilaporkan secara konsisten sehingga dapat dilakukan analisis terhadap perubahan dampak Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. The sustainability report presents information that is selected, compiled, and reported consistently, allowing for the analysis of changes in the Company's impacts over time.
Kelengkapan Completeness	Perusahaan menyediakan informasi yang memadai agar dapat menilai dampak Perusahaan selama periode pelaporan. The Company provides sufficient information to enable an assessment of its impacts over the reporting period.
Konteks Keberlanjutan Sustainability Context	Laporan keberlanjutan memuat informasi mengenai dampak Perusahaan dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. The sustainability report includes information on the Company's impacts within the broader context of sustainable development.
Ketepatan Waktu Timeliness	Laporan keberlanjutan melaporkan informasi secara rutin dan tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan. The sustainability report presents information on a regular and timely manner to enable information users to make informed decisions.
Keterverifikasian Verifiability	Informasi yang tersaji telah melalui serangkaian proses pengelolaan informasi sehingga dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan. The information presented has undergone a series of data management processes to ensure stakeholders is verifiable and reflects both the quality and materiality of the disclosures provided.

Cakupan dan Batasan Laporan

Pada laporan ini, PTPN I menyampaikan kinerja keberlanjutan mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk periode pelaporan 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Ruang lingkup pelaporan mencakup seluruh unit operasional dari delapan regional Perusahaan, dengan data keuangan yang telah dikonsolidasikan. Data tahun 2023 dan 2024 mencerminkan kondisi setelah penggabungan entitas, sedangkan data tahun 2022 disajikan dalam bentuk simulasi penggabungan guna keperluan perbandingan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan konsisten atas perkembangan kinerja Perusahaan dari waktu ke waktu.

[GRI 2-2]

Tidak terdapat perbedaan antara entitas dalam laporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan dalam laporan ini, karena seluruh entitas yang dilaporkan secara finansial juga tercakup dalam pelaporan keberlanjutan. Hal ini memastikan konsistensi dalam pelaporan dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja keberlanjutan Perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam pelaporan ini tidak memerlukan penyesuaian terhadap kepentingan minoritas, karena seluruh entitas dalam ruang lingkup laporan berada di bawah kendali penuh PTPN I. [GRI 2-2]

Siklus, Periode Pelaporan, dan Pernyataan Penggunaan

PTPN I telah melaporkan informasi yang dikutip pada Indeks Konten GRI untuk periode dari 1 Januari – 31 Desember 2024 “Sesuai dengan Standar GRI”. Laporan ini diterbitkan pada Agustus 2025, bersamaan dengan publikasi laporan tahunan, untuk memastikan keselarasan waktu antara informasi keberlanjutan dan finansial yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. [GRI 2-3]

Penyajian Ulang Informasi

Dalam rangka menjaga validitas dan konsistensi informasi yang disampaikan, PTPN I mencantumkan keterangan "penyajian kembali" pada data atau informasi yang mengalami pernyataan ulang dari laporan sebelumnya. Penyajian kembali dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan status entitas yang tercakup dalam laporan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pada laporan ini, penyajian kembali dilakukan karena perubahan status Regional 6 yang sebelumnya merupakan unit operasional penuh PTPN I menjadi entitas Kerja Sama Operasional (KSO). Meskipun tidak memengaruhi pengambilan keputusan secara signifikan, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen PTPN I untuk menjamin keterbandingan, keandalan, dan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan. [GRI 2-4]

Report Scope and Boundaries

In this report, PTPN I presents sustainability performance across economic, environmental, and social aspects for the reporting period from 1 January to 31 December 2024. The reporting scope covers all operational units across the Company's eight regional areas, with financial data presented on a consolidated basis. Data for 2023 and 2024 reflect post-merger conditions, while 2022 data are presented as a simulated consolidation for comparative purposes. This approach aims to provide a comprehensive and consistent view of the Company's performance over time. [GRI 2-2]

There is no difference between the entities covered in the financial statements and those included in the sustainability report, as all entities reported financially are also covered in the sustainability disclosures. This ensures consistency in reporting and provides a comprehensive overview of the Company's sustainability performance. The reporting approach applied does not require adjustments for minority interests, as all entities within the reporting scope are fully controlled by PTPN I. [GRI 2-2]

Reporting Cycle, Reporting Period, and Statement of Use

The Company has reported information referenced in the GRI Content Index for the period from January 1 to December 31, 2024, in accordance with the GRI Standards. This report was published in August 2025, alongside the annual report, to ensure timing alignment between the sustainability and financial information disclosed to stakeholders. [GRI 2-3]

Restatement of Information

To ensure the validity and consistency of the information presented, PTPN I labels any data or information that has been restated from previous reports with a "restatement" note. Restatements are made to reflect changes in the status of entities covered in the report, including environmental, social, and governance aspects. In this report, restatement was carried out due to a change in the status of Regional 6, which shifted from being a fully operational unit under PTPN I to a Joint Operation (KSO) entity. Although this change does not have a significant impact on decision-making, it is undertaken as part of PTPN I's commitment to ensuring comparability, reliability, and transparency in sustainability reporting. [GRI 2-4]

Verifikasi oleh Pihak Independen

GRI mendorong pelaksanaan penjaminan (*assurance*) eksternal oleh pihak independen guna meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keberlanjutan. Namun, pada periode pelaporan tahun 2024, PTPN I belum menggunakan jasa penyedia *assurance* eksternal. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan teknis dan kesiapan proses pelaporan internal. Meskipun belum dilakukan penjaminan eksternal, seluruh informasi dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi internal secara menyeluruh, yang dikoordinasikan oleh Divisi Manajemen Risiko & Sustainability, serta ditinjau oleh unit-unit terkait. Dalam proses tersebut, eksekutif senior turut dilibatkan untuk memastikan akurasi, relevansi, dan integritas data yang disampaikan. Hasil laporan juga dilaporkan kepada manajemen puncak sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian internal. [GRI 2-5] [G.1]

Aksesibilitas dan Mekanisme Umpan Balik

PTPN I membuka akses seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan dan pengguna informasi keberlanjutan untuk mengunduh Laporan Keberlanjutan melalui situs resmi Perusahaan di www.ptpn1.co.id. Perusahaan juga mendorong partisipasi aktif melalui penyampaian saran, tanggapan, maupun masukan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan pada periode berikutnya. PTPN I mencatat tidak adanya umpan balik yang diterima pada periode laporan sebelumnya sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilaksanakan. Setiap umpan balik yang diterima akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Tanggapan dapat disampaikan kepada Perusahaan melalui saluran komunikasi yang tersedia berikut ini: [GRI 2-3] [G.3]

Verification by Independent Parties

GRI encourages the use of external assurance by independent parties to enhance the transparency and credibility of sustainability reports. However, for the 2024 reporting period, PTPN I has not engaged an external assurance provider. This decision was based on technical considerations and the readiness of the internal reporting process. Despite the absence of external assurance, all information in this report has undergone a thorough internal verification process coordinated by the Risk Management & Sustainability Division and reviewed by the relevant units. Senior executives were also involved in the process to ensure the accuracy, relevance, and integrity of the reported data. The final report was submitted to top management as part of the Company's internal oversight and control mechanisms. [GRI 2-5] [G.1]

Accessibility and Feedback Mechanism

PTPN I ensures broad access for stakeholders and users of sustainability information by making the Sustainability Report available for download through the Company's official website at www.ptpn1.co.id. The Company also encourages active participation through the submission of suggestions, feedback, or input as a contribution to improving the quality of future reports. PTPN I recorded no feedback received during the previous reporting period, and therefore no follow-up actions were taken. Any feedback received will be addressed within a maximum of 14 working days. Responses can be submitted to the Company through the following communication channels: [GRI 2-3] [G.3]



Alamat Address

Kantor Pusat

Gedung Agro Plaza Lantai 14
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1
Jakarta Selatan 12950
Jakarta
☎ (+62) 8113-3333-214
✉ corcom@ptpn1.co.id
🌐 www.ptpn1.co.id

Head Office

Agro Plaza Building, 14th Floor
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1
South Jakarta 12950
Jakarta
☎ (+62) 8113-3333-214
✉ corcom@ptpn1.co.id
🌐 www.ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 1

Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa Km. 16
Tanjung Morawa Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
☎ (+62-61) 7940055
✉ skrh_reg1@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 1

Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa Km. 16
Tanjung Morawa Deli Serdang 20362
North Sumatra
☎ (+62-61) 7940055
✉ skrh_reg1@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 2

Jl. Sindangsirna No.4
Bandung 40153
Jawa Barat
☎ (+62-22) 2038966
✉ skrh_reg2@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 2

Jl. Sindangsirna No.4
Bandung 40153
West Java
☎ (+62-22) 2038966
✉ skrh_reg2@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 3

Jl. Mugas Dalam Atas
Semarang 50243
Jawa Tengah
☎ (+62-24) 8414635
✉ skrh_reg3@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 3

Jl. Mugas Dalam Atas
Semarang 50243
Central Java
☎ (+62-24) 8414635
✉ skrh_reg3@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 4

Jl. Merak No. 1 - Krembangan Selatan
Surabaya 60175
Jawa Timur
☎ (+62-31) 3524596
✉ skrh_reg4@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 4

Jl. Merak No. 1 - Krembangan Selatan
Surabaya 60175
East Java
☎ (+62-31) 3524596
✉ skrh_reg4@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 5

Jl. Rajawali No. 44
Surabaya 60175
Jawa Timur
☎ (+62-31) 3524893
✉ skrh_reg5@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 5

Jl. Rajawali No. 44
Surabaya 60175
East Java
☎ (+62-31) 3524893
✉ skrh_reg5@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 6 - KSO

Jl. Kebun Baru
Langsa 24415
Aceh
☎ (+62-641) 21701
✉ skrh_reg6@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 6 – Joint Operation

Jl. Kebun Baru
Langsa 24415, Aceh
☎ (+62-641) 21701
✉ skrh_reg6@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 7

Jl. Teuku Umar No. 300
Bandar Lampung 35141
Lampung
☎ (+62-721) 702233
✉ skrh_reg7@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 7

Jl. Teuku Umar No. 300
Bandar Lampung 35141
Lampung
☎ (+62-721) 702233
✉ skrh_reg7@ptpn1.co.id

Kantor PTPN I Regional 8

Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76
Sinrijala - Panakkukang Makassar 90232
Sulawesi Selatan
☎ (+62-411) 444830
✉ skrh_reg8@ptpn1.co.id

PTPN I Regional Office 8

Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76
Sinrijala - Panakkukang Makassar 90232
South Sulawesi
☎ (+62-411) 444830
✉ skrh_reg8@ptpn1.co.id

Proses Penentuan Topik Material [GRI 3-1]

Penilaian topik material menjadi langkah penting bagi Perusahaan dalam mengidentifikasi topik-topik yang menjadi dasar penetapan strategi dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak. Melalui tahapan ini, Perusahaan menetapkan isu-isu *Environmental*, *Social*,

Material Topic Determination Process [GRI 3-1]

Material topics assessment a critical step for the Company in identifying key issues that serve as the foundation for strategy development and decision-making at the top management level. Through this process, the Company determines *Environmental*, *Social*, and *Governance* (ESG)

and Governance (ESG) yang dianggap signifikan terhadap keberlanjutan bisnis, guna mendorong pertumbuhan kinerja Perusahaan yang optimal.

Pada proses penilaian topik material, Perusahaan mengacu pada referensi *GRI Standards Reporting Principles* dan *AA1000 Accountability Principles*. Selanjutnya, peninjauan terhadap topik-topik material ESG yang relevan bagi usaha Perusahaan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Rangkaian proses dalam penetapan dan peninjauan topik material disusun melalui tahapan berikut:

issues considered significant to business sustainability, with the aim of driving optimal the Company's performance growth.

In the material topic assessment process, the Company refers to the GRI Standards Reporting Principles and the AA1000 Accountability Principles. Relevant ESG material topics are then reviewed consistently on an annual basis to ensure alignment with the Company's business priorities. The process of determining and reviewing material topics is structured through the following stages:



Daftar Topik Material [GRI 3-2]

Melalui tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, Perusahaan berhasil menetapkan topik-topik material yang mencakup aspek ESG. Ringkasan topik material tersebut disajikan dalam tabel berikut:

List of Material Topics [GRI 3-2]

Through the previously described stages, the Company has successfully identified material topics covering ESG aspects. A summary of these material topics is presented in the following table:

Aspek ESG ESG Aspect		Topik ESG Material ESG Material Topic	Cakupan Scope	Direksi Penanggung Jawab [GRI 2-13] Responsible Director [GRI 2-13]	Divisi Pelaksana Implementing Division
Lingkungan Environment	1	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Terkait emisi GRK Cakupan 1, 2, 3, rencana dekarbonisasi, pemetaan & mitigasi risiko fisik dan risiko transisi dari perubahan iklim	DH, DO	- DMRS - DKAT
		Greenhouse Gas (GHG) Emissions	Related to GHG emissions Scope 1, 2, 3, decarbonization plans, mapping & mitigation of physical risks and transition risks from climate change		
	2	Penggunaan Energi dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Terkait penggunaan energi dan porsi yang dibangkitkan dari sumber terbarukan di operasi Perusahaan	DH, DO	- DMRS - DKAT
		Use of Energy and Renewable Energy	Related to energy use and portion generated from renewable sources in Company's operations		
	3	Keanekaragaman Hayati dan Konservasi	Terkait praktik-praktik untuk menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi hutan	DO	DKAT
		Biodiversity and Conservation	Related to practices to maintain biodiversity and forest conservation		
	4	Pencegahan dan Manajemen Kebakaran Hutan	Terkait praktik-praktik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	DO	DKAT
		Forest Fire Prevention and Management	Related to forest fire prevention and management practices		
	5	Efisiensi Penggunaan Air	Terkait praktik-praktik penggunaan air secara efisien	DO	DKAT
		Water Usage Efficiency	Related to efficient water usage practices		
	6	Limbah dan Polusi	Terkait pengelolaan limbah dan polusi non-GRK	DS	- DPSB - DOSG
		Waste and Pollution	Related to waste management and non-GRK pollution		

Aspek ESG ESG Aspect		Topik ESG Material ESG Material Topic	Cakupan Scope	Direksi Penanggung Jawab Responsible Director [GRI 2-13]	Divisi Pelaksana Implementing Division
Sosial Social	7	Keberagaman & Inklusi Diversity & Inclusion	Terkait inisiatif keberagaman dan inklusi tenaga kerja Related to workforce diversity and inclusion initiatives	DS	DOSG
	8	Kesehatan & Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety	Terkait praktik kesehatan dan keselamatan kerja Related to occupational health and safety practices	DS	DPSB
	9	Pengembangan Kompetensi Pekerja Employee Competency Development	Terkait praktik-praktik untuk mengembangkan kompetensi karyawan Related to practices to develop employee competencies	DS	DOSG
	10	Praktik Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Employment Practices and Industrial Relations	Terkait komitmen kepada hukum dan praktik ketenagakerjaan Related to commitment to labor laws and practices	DH	DHKL
	11	Keterlibatan dan Hak-hak Masyarakat Lokal Involvement and Rights of Local Communities	Terkait praktik dan komitmen untuk menghormati hak masyarakat lokal & adat dalam operasi Perusahaan sesuai standar hak asasi manusia internasional Related to practices and commitments to respect the rights of local communities & indigenous peoples in the Company's operations in accordance with international human rights standards	DH	DHKL
	12	Pemberdayaan Masyarakat Lokal Local Community Empowerment	Terkait topik pembangunan dan keterlibatan komunitas, serta TJSL Related to community development and engagement topics; as well as CSR	DIRUT	DSPR
Tata Kelola Governance	13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance	Terkait praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Related to Good Corporate Governance practices	DIRUT	DSPI

Aspek ESG ESG Aspect	Topik ESG Material ESG Material Topic	Cakupan Scope	Direksi Penanggung Jawab Responsible Director [GRI 2-13]	Divisi Pelaksana Implementing Division
	14 Keluhan dan <i>Whistleblowing</i>	Terkait sistem pelaporan keluhan atau kasus baik internal maupun eksternal	DIRUT	DSPR
	Complaints and Whistleblowing	Related to complaint or case reporting system both internal and external		
	15 Etika dan Antikorupsi	Terkait sistem pencegahan tindak kecurangan dan korupsi	DIRUT	DSPI
	Ethics and Anti- Corruption	Related to fraud and corruption prevention system		
	16 Kualitas dan Keamanan Produk	Terkait kualitas dan keamanan produk, utamanya pangan	DP	DMPS
	Product Quality and Safety	Related to product quality and safety, especially food		
	17 Kepatuhan ESG Rantai Pasok	Terkait <i>traceability</i> dan kepatuhan pemasok akan praktik ESG	DP	DMPS
	Supply Chain ESG Compliance	Related to traceability and supplier compliance with ESG practices		
	Topik Umum General Topic			
	18 Kontribusi pada Ekonomi Nasional	Terkait kontribusi Perusahaan kepada pertumbuhan ekonomi nasional	DK	DAPJ
	Contribution to the National Economy	Related to the Company's contribution to national economic growth		

Singkatan untuk Direksi penanggung jawab yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. DIRUT: Direktur Utama
2. DO: Direktur Operasional
3. DP: Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen
4. DK: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
5. DS: Direktur SDM dan Teknologi Informasi
6. DH: Direktur Hubungan Kelembagaan

Adapun singkatan untuk Divisi pelaksana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. DSPI: Divisi Satuan Pengawasan Intern
2. DSPR: Divisi Sekretariat Perusahaan
3. DKAT: Divisi Komoditi Kopi dan Aneka Tanaman
4. DMAS: Divisi Manajemen dan Optimalisasi Aset I
5. DMAT: Divisi Manajemen dan Optimalisasi Aset II
6. DMPS: Divisi Manajemen Pemasaran
7. DSTK: Divisi Strategi dan Transformasi Korporasi
8. DAPJ: Divisi Akuntansi dan Perpajakan
9. DPAK: Divisi Perbendaharaan Anggaran dan Keuangan
10. DPSB: Divisi Pengembangan SDM dan Budaya Perusahaan

The following is a list of Responsible Directors and their respective abbreviations:

1. DIRUT: President Director
2. DO: Director of Operations
3. DP: Director of Marketing and Asset Management
4. DK: Director of Finance and Risk Management
5. DS: Director of Human Capital and Information Technology
6. DH: Director of Institutional Relations

The following is a list of implementing divisions and their respective abbreviations:

1. DSPI: Internal Audit Division
2. DSPR: Corporate Secretariat Division
3. DKAT: Coffee and Various Crops Commodity Division
4. DMAS: Asset Management and Optimization Division I
5. DMAT: Asset Management and Optimization Division II
6. DMPS: Marketing Management Division
7. DSTK: Corporate Strategy and Transformation Division
8. DAPJ: Accounting and Tax Division
9. DPAK: Treasury, Budget, and Finance Division
10. DPSB: Human Capital Development and Culture Division

11. DOSG: Divisi Operasional SDM dan General Affair
12. DPTI: Divisi Pengadaan dan Teknologi Informasi
13. DHKL: Divisi Hubungan Kelembagaan dan TJSL
14. DHKM: Divisi Hukum
15. DMRS: Divisi Manajemen Risiko & Sustainability

11. DOSG: Human Capital Operations and General Affairs Division
12. DPTI: Procurement and Information Technology Division
13. DHKL: Institutional Relations and CSR Division
14. DHKM: Legal Division
15. DMRS: Risk Management & Sustainability Division

Pelibatan Pemangku Kepentingan [GRI 2-29] [E.4]

Keberhasilan operasional Perusahaan dan pencapaian kinerja positifnya merupakan hasil dari kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal Perusahaan. Pemangku kepentingan, menurut definisi Perusahaan, mencakup kelompok atau individu yang terpengaruh oleh aktivitas, produk, dan layanan Perusahaan, serta keberadaan pemangku kepentingan juga memengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Kolaborasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan, praktik, dan inisiatif Perusahaan sejalan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hal ini pada akhirnya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Pelibatan pemangku kepentingan difokuskan pada kepentingan inti Perusahaan, yang mencakup tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan menjalin komunikasi yang erat dengan mitra strategis. Proses ini melibatkan upaya Perusahaan untuk memahami dan memenuhi harapan setiap pihak dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa keterlibatan dengan pemangku kepentingan tidak hanya mendukung tujuan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak terkait.

Perusahaan telah mengadopsi pendekatan identifikasi pemangku kepentingan dengan mengacu pada standar AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (SES) 2015 yang diterbitkan oleh konsultan global AccountAbility. Standar ini mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke dalam lima atribut utama, yaitu:

1. **Dependency (D)**
Jika Perusahaan memiliki ketergantungan pada individu atau kelompok, atau sebaliknya.
2. **Responsibility (R)**
Jika Perusahaan memiliki tanggung jawab legal, komersial, atau etika terhadap individu atau kelompok.

Stakeholder Engagement [GRI 2-29] [E.4]

The Company's operational success and positive performance achievements are the result of strong collaboration with both internal and external stakeholders. Stakeholders, as defined by the Company, include groups or individuals who are affected by the Company's activities, products, and services, and whose presence also influences the achievement of the Company's objectives. Collaboration between the Company and its stakeholders plays a critical role in ensuring that corporate policies, practices, and initiatives are aligned with stakeholder expectations and needs, ultimately creating long-term, sustainable value.

Stakeholder engagement is focused on the Company's core interests, which include social responsibility, environmental stewardship, and maintaining close communication with strategic partners. This process involves the Company's efforts to understand and address stakeholder expectations by utilizing available resources appropriately and in compliance with applicable regulations. In doing so, the Company ensures that stakeholder engagement not only supports business objectives but also contributes to sustainable development and fosters harmonious relationships with all relevant parties.

The Company has adopted a stakeholder identification approach based on the AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) 2015, published by the global consultancy AccountAbility. This standard classifies stakeholders according to five key attributes, namely:

1. **Dependency (D)**
When the Company depends on an individual or group, or vice versa.
2. **Responsibility (R)**
When the Company has legal, commercial, or ethical responsibilities toward an individual or group.

3. Tension (T)

Jika individu atau kelompok membutuhkan perhatian segera dari Perusahaan terkait isu ekonomi, sosial, atau lingkungan.

4. Influence (I)

Jika individu atau kelompok memiliki pengaruh terhadap Perusahaan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.

5. Diverse Perspective (DP)

Jika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

Berdasarkan rujukan dan pemetaan tersebut, pemangku kepentingan Perusahaan adalah sebagai berikut:

3. Tension (T)

When an individual or group requires immediate attention from the Company regarding economic, social, or environmental issues.

4. Influence (I)

When an individual or group has the ability to influence the Company or the strategies or policies of other stakeholders.

5. Diverse Perspective (DP)

When an individual or group brings differing viewpoints that can influence a situation and prompt new or previously unconsidered actions.

Based on the referenced framework and stakeholder mapping, the Company's stakeholders are identified as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Basis Penetapan Basis for Identification	Topik dan Isu Utama Key Topics and Issues	Pendekatan Engagement Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Pemegang Saham Shareholders	- Dependency - Responsibility - Tension - Influence - Diverse Perspective	Peningkatan kinerja perusahaan	RUPS	Minimal dua kali setahun
		Improvement of company performance	GMS	Twice a year
		Dukungan pada kepentingan pemegang saham	Laporan kinerja	- Dua kali setahun - Empat kali setahun
Pemerintah Government	- Dependency - Responsibility - Tension - Influence - Diverse Perspective	Support for shareholder interests	Performance Report	- Twice a year - Four times a year
		Kepatuhan terhadap peraturan	Kepatuhan terhadap peraturan	Setiap saat
		Compliance with regulations	Compliance with regulations	Anytime
	- Dependency - Responsibility - Tension - Influence - Diverse Perspective	Kesehatan perusahaan	Kesehatan perusahaan	Setiap saat
		Company health	Company health	Anytime

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Basis Penetapan Basis for Identification	Topik dan Isu Utama Key Topics and Issues	Pendekatan Engagement Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
		Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) Economic contribution to the government (taxes and subsidy usage)	Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) Economic contribution to the Government (taxes and subsidy utilization)	Sesuai ketentuan perpajakan In accordance with tax regulations
Karyawan Employees	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman Conducive, healthy, and safe working environment	• Serikat pekerja • Perjanjian Kerja Bersama • Labor union • Collective labor agreement	• Minimal Munas satu kali setahun • Sesuai kebutuhan • National conferences at least once a year • As needed
		Jenjang karier dan penilaian kinerja yang jelas, setara dan tidak ada praktik diskriminasi Clear career progression and fair performance assessment without discriminatory practices	• Forum tatap muka • Lomba inovasi • Face-to-face forum • Innovation competition	• Minimal empat kali setahun • Satu kali setahun • Minimum four times a year • Once a year
		Pelayanan jasa terbaik Delivery of high-quality services	• <i>Knowledge sharing</i> • Survei kepuasan pegawai • Knowledge sharing • Employee satisfaction survey	• Minimal 1 kali setahun/ unit kerja • 1 kali setahun • Minimal 1 kali setahun/ unit kerja • 1 kali setahun
	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Harga jasa yang bersaing dan efisien Delivery of high-quality services	• Survei kepuasan pelanggan • Program <i>engagement</i> lainnya • Customer satisfaction surveys • Other engagement programs	Sesuai kebutuhan As needed
		Harga jasa yang bersaing dan efisien Competitive and efficient service	Komunikasi melalui media yang tersedia Communication through available media	Sesuai kebutuhan As needed
Konsumen/ Pelanggan Consumers/ Customers	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>			

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Basis Penetapan Basis for Identification	Topik dan Isu Utama Key Topics and Issues	Pendekatan Engagement Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Pemasok Suppliers	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Kepatuhan terhadap peraturan	Kontrak dan perjanjian kerja sama	Sesuai kebutuhan
		Compliance with regulations	Contracts and partnership agreements	As needed
	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Pembayaran tepat waktu	<i>Supplier gathering</i>	Satu kali setahun
		Timely payments	Supplier gatherings	Once a year
		Proses evaluasi yang objektif	Penilaian kinerja pemasok	Minimal satu kali per proyek
		Objective evaluation processes	Supplier performance evaluations	At least once per project
		Hubungan yang harmonis	Kuesioner dan survei	Satu kali setahun
		Harmonious relationships	Questionnaires and surveys	Once a year
		Kepatuhan terhadap peraturan	Kepatuhan terhadap peraturan	Setiap saat
		Compliance with regulations	Compliance with regulations	Anytime
		Kesehatan perusahaan Company health	Kesehatan perusahaan Company health	Setiap saat Anytime
		Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi)	Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi)	Sesuai ketentuan perpajakan
Masyarakat Community	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Hubungan yang harmonis tanpa ada konflik	Kegiatan TJSL BUMN dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Sesuai kebutuhan/ mengikuti ketentuan pemegang saham
		Harmonious relationships without conflicts	SOEs CSR Program	As needed/in accordance with shareholder requirements
	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Dampak negatif terhadap lingkungan	Program bantuan UMK	Sesuai ketersediaan dana
		Negative impact on the environment	SME Assistance Program	Depending on fund availability
		Hubungan yang harmonis	Pelatihan masyarakat	Minimal satu kali setahun
		Harmonious relationships	Community training	At least once a year

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Basis Penetapan Basis for Identification	Topik dan Isu Utama Key Topics and Issues	Pendekatan Engagement Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
		Memperoleh akses informasi yang luas	Forum tatap muka	Sesuai kebutuhan
		Access to extensive information	Face-to-face forums	As needed
Media Massa Mass Media	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Hubungan yang harmonis	Konferensi pers/ siaran pers	Sesuai kebutuhan
		Harmonious relationships	Press conferences/press releases	As needed
	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Memperoleh akses informasi yang luas	Keterbukaan informasi	Satu kali setahun
		Access to extensive information	Information transparency	Once a year
Kelompok Rentan	• <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i>	Persamaan perlakuan dalam layanan dan kesempatan bekerja	Semua bentuk layanan	Setiap saat
Vulnerable Group	• <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i>	Equality of treatment in services and job opportunities	All forms of services	Anytime

PTPN I memandang keterlibatan pemangku kepentingan sebagai elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui kerangka tata kelola yang tersedia serta mekanisme komunikasi yang telah dibangun, Perusahaan mendorong terciptanya dialog yang terbuka dan partisipatif antara Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam isu-isu keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam melibatkan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu ESG, PTPN I melaksanakan dialog dan konsultasi publik secara berkala dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan survei terhadap pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan terkait kinerja ESG, serta menyampaikan pengungkapan kinerja keberlanjutan melalui Laporan Keberlanjutan. PTPN I menyediakan saluran komunikasi melalui situs perusahaan sebagai wadah aspirasi dan lembar umpan balik pada Laporan Keberlanjutan, guna mendapatkan saran, ide, kritik dan tanggapan dari para pemangku kepentingan. [GRI 2-26] [E.4]

PTPN I views stakeholder engagement as a key element of transparent and accountable corporate governance. Through established governance frameworks and communication mechanisms, the Company fosters open and participatory dialogue with shareholders and other stakeholders, particularly on sustainability-related issues. This approach aims to promote responsible and sustainable business practices.

To address ESG-related matters, PTPN I conducts regular stakeholder dialogues and public consultations. The Company also gathers feedback through stakeholder surveys to assess ESG performance and communicates its sustainability achievements through the Sustainability Report. An online feedback channel is provided via the Company's website, offering stakeholders the opportunity to share suggestions, ideas, criticisms, and responses related to the report. [GRI 2-26] [E.4]

Guna mendukung penerapan prinsip keberlanjutan, PTPN I juga secara aktif melibatkan pemangku kepentingan internal melalui berbagai forum untuk bertukar pandangan dan memberikan masukan terkait isu-isu material keberlanjutan yang relevan dengan kegiatan usaha. Umpan balik dikumpulkan melalui berbagai bentuk keterlibatan, seperti rapat internal, pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan asesmen keberlanjutan yang diselenggarakan secara berkala.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi program keberlanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal. Untuk itu, Perusahaan menerapkan berbagai pendekatan untuk melibatkan mereka dalam diskusi, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Pendekatan tersebut meliputi pertemuan atau audiensi dengan pemangku kepentingan eksternal, kerja sama dan kemitraan program keberlanjutan, penanganan isu lingkungan, serta penyediaan media saran seperti program *Agroforestry* dan kanal pengaduan untuk menampung keluhan maupun masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. [GRI 2-26]

PTPN I mengupayakan isu-isu strategis dan masalah penting yang berpotensi berdampak terhadap keberlanjutan usaha, pemangku kepentingan, serta reputasi Perusahaan dikomunikasikan secara langsung kepada badan tata kelola tertinggi, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Komunikasi ini dilakukan secara rutin melalui forum rapat Direksi maupun dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Selama periode pelaporan 2024, seluruh laporan masalah penting disampaikan melalui Divisi Manajemen Risiko & Sustainability, yang secara langsung berada di bawah pengawasan Direktur Hubungan Kelembagaan. [GRI 2-16]

To further support the implementation of sustainability principles, PTPN I actively engages internal stakeholders through various forums to exchange insights and gather input on material sustainability issues relevant to its business operations. Feedback is collected through internal meetings, training sessions, policy socialization events, and periodic sustainability assessments.

At the same time, the success of sustainability programs largely depends on the active participation of external stakeholders. To this end, the Company adopts multiple approaches to involve them in discussions, planning, and decision-making related to sustainability topics. These include meetings or consultations with external stakeholders, partnerships in sustainability programs, environmental issue management, and the provision of feedback channels such as *Agroforestry* programs and complaint mechanisms for communities and other concerned parties. [GRI 2-26]

PTPN I strives to ensure that strategic issues and material matters with potential impacts on business sustainability, stakeholders, and the Company's reputation are communicated directly to the highest governance body, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors. This communication is conducted regularly through Board of Directors meetings as well as Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. During the 2024 reporting period, all reports on material issues were submitted through the Risk Management & Sustainability Division, which operates under the direct supervision of the Director of Institutional Relations. [GRI 2-16]



02

Profil PTPN I

PTPN I Profile





Informasi Umum

PTPN I [C.2]

General Information of PTPN I

 Nama Perusahaan [GRI 2-1] Company Name	PT Perkebunan Nusantara I	
 Status Perusahaan [GRI 2-1] Company Status	Anak Perusahaan <i>Holding</i> Perkebunan Subsidiaries of the Plantation Holding Company	
 Tanggal Penggabungan Merger Date	1 Desember 2023 December 1, 2023	
 Dasar Hukum Penggabungan Legal Basis of Merger	Akta Nomor 09 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penggabungan yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Deed Number 09 dated December 1, 2023, concerning the Merger, drawn up by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta	
 Jumlah Karyawan [GRI 2-7] Number of Employees	39.409 Orang 39,409 People	
 Alamat [GRI 2-1] [C.2] Address	Kantor Pusat Gedung Agro Plaza Lantai 14 Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1 Jakarta Selatan 12950 Jakarta ☎ (+62) 8113-3333-214 ✉ corcom@ptpn1.co.id 🌐 www.ptpn1.co.id	Head Office Agro Plaza Building, 14th Floor Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1 South Jakarta 12950 Jakarta ☎ (+62) 8113-3333-214 ✉ corcom@ptpn1.co.id 🌐 www.ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 1 Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa Deli Serdang 20362 Sumatera Utara ☎ (+62-61) 7940055 ✉ skrh_reg1@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 1 Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa Deli Serdang 20362 North Sumatra ☎ (+62-61) 7940055 ✉ skrh_reg1@ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 2 Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153 Jawa Barat ☎ (+62-22) 2038966 ✉ skrh_reg2@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 2 Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153 West Java ☎ (+62-22) 2038966 ✉ skrh_reg2@ptpn1.co.id

 Bidang Usaha [GRI 2-6] Line of Business	Kantor PTPN I Regional 3 Jl. Mugas Dalam Atas Semarang 50243 Jawa Tengah ☎ (+62-24) 8414635 ✉ skrh_reg3@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 3 Jl. Mugas Dalam Atas Semarang 50243 Central Java ☎ (+62-24) 8414635 ✉ skrh_reg3@ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 4 Jl. Merak No. 1 - Krembangan Selatan Surabaya 60175 Jawa Timur ☎ (+62-31) 3524596 ✉ skrh_reg4@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 4 Jl. Merak No. 1 - Krembangan Selatan Surabaya 60175 East Java ☎ (+62-31) 3524596 ✉ skrh_reg4@ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 5 Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175 Jawa Timur ☎ (+62-31) 3524893 ✉ skrh_reg5@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 5 Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175 East Java ☎ (+62-31) 3524893 ✉ skrh_reg5@ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 6 - KSO Jl. Kebun Baru Langsa 24415 Aceh ☎ (+62-641) 21701 ✉ skrh_reg6@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 6 – Joint Operation Jl. Kebun Baru Langsa 24415, Aceh ☎ (+62-641) 21701 ✉ skrh_reg6@ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 7 Jl. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung 35141 Lampung ☎ (+62-721) 702233 ✉ skrh_reg7@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 7 Jl. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung 35141 Lampung ☎ (+62-721) 702233 ✉ skrh_reg7@ptpn1.co.id
	Kantor PTPN I Regional 8 Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76 Sinrijala - Panakkukang Makassar 90232 Sulawesi Selatan ☎ (+62-411) 444830 ✉ skrh_reg8@ptpn1.co.id	PTPN I Regional Office 8 Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76 Sinrijala - Panakkukang Makassar 90232 South Sulawesi ☎ (+62-411) 444830 ✉ skrh_reg8@ptpn1.co.id
	Bidang agribisnis, agroindustri, dan optimalisasi aset Agribusiness, agroindustry, and asset optimization	



Modal Dasar Authorized Capital

Rp35.700.000.000.000
Rp35,700,000,000,000



Kepemilikan Saham [GRI 2-1] [C.3.d] Share Ownership

Seri A Dwiwarna: 0,00001% Negara Republik Indonesia
Seri B: 10,6% - PT Danantara Asset Management (Persero)
Seri B: 89,4% - PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Series A Dwiwarna: 0.00001% – Republic of Indonesia
Series B: 10.6% – PT Danantara Asset Management (Persero)
Series B: 89.4% – PT Perkebunan Nusantara III (Persero)



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital

Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna atau sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Sebanyak 946.238 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) lembar saham seri B atau seluruhnya sebesar Rp946.238.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.995.757 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) saham seri B atau seluruhnya sebesar Rp7.995.757.000.000,- (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

The Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A Dwiwarna share amounting to Rp1,000,000 (One Million Rupiah), and 946,238 (Nine Hundred Forty-Six Thousand Two Hundred Thirty-Eight) Series B shares, amounting to a total of Rp946,238,000,000 (Nine Hundred Forty-Six Billion Two Hundred Thirty-Eight Million Rupiah).

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) holds 7,995,757 (Seven Million Nine Hundred Ninety-Five Thousand Seven Hundred Fifty-Seven) Series B shares, amounting to a total of Rp7,995,757,000,000 (Seven Trillion Nine Hundred Ninety-Five Billion Seven Hundred Fifty-Seven Million Rupiah).



Perubahan Signifikan [GRI 2-6] [C.6] Significant Changes

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan mengalami beberapa perubahan signifikan yang memengaruhi struktur dan arah strategis organisasi. Salah satu perubahan utama adalah bertambahnya jumlah anak perusahaan dan entitas asosiasi sebagai bagian dari strategi ekspansi dan diversifikasi usaha. Penambahan ini diharapkan dapat memperkuat rantai nilai dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di sektor-sektor prioritas. Salah satu perubahan struktural yang signifikan pada tahun pelaporan ini adalah pengalihan status Regional 6 menjadi entitas Kerja Sama Operasional (KSO). Perubahan ini mencerminkan langkah strategis Perusahaan dalam mengelola aset secara lebih produktif melalui kolaborasi dengan mitra strategis.

Selain itu, Perusahaan juga melakukan penyesuaian terhadap visi dan misi korporasi. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah strategis Perusahaan tetap relevan dan selaras dengan dinamika pasar, tuntutan keberlanjutan, serta harapan para pemangku kepentingan.

Throughout 2024, the Company underwent several significant changes that impacted its organizational structure and strategic direction. One of the key changes was the increase in the number of subsidiaries and associated entities as part of its business expansion and diversification strategy. This addition is expected to strengthen the value chain and support sustainable growth in priority sectors. During the reporting period, PTPN I engaged in several Joint Operations (KSO) and strategic partnerships aimed at optimizing assets and improving operational efficiency. One example is the transformation of Regional 6 into a Joint Operation entity, representing a business partnership in asset management and production activities. These collaborations not only expand the company's business reach but also enhance resource efficiency and productivity.

In addition, the Company has also adjusted its corporate vision and mission. This update was carried out to ensure that the Company's strategic direction remains relevant and aligned with market dynamics, sustainability demands, and stakeholder expectations.

Riwayat Singkat PTPN I

Brief History of PTPN I

PT Perkebunan Nusantara I memiliki sejarah panjang yang berawal dari pengambilalihan kebun milik perusahaan swasta Jepang dan Belanda, yang kemudian dilebur menjadi PPN Kesatuan Aceh melalui Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 1961. Seiring dengan kebutuhan penataan kelembagaan untuk menjaga kinerja perusahaan, statusnya berubah menjadi PT Perkebunan-I (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 dan secara resmi tercatat dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 1981.

Sebagai bagian dari upaya konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan, pada 14 Februari 1996, pemerintah membentuk PT Perkebunan Nusantara I (Persero) melalui penggabungan beberapa entitas usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996. Konsolidasi ini mencakup PT Perkebunan I (Persero), PT Cot Girek Baru (Persero), unit pengembangan PT Perkebunan V (Persero), dan PKS Cot Girek PT Perkebunan IX (Persero), yang seluruhnya memiliki fokus usaha pada komoditas kelapa sawit dan karet. Pembentukan resmi dicatat melalui Akta Pendirian No. 34 tanggal 11 Maret 1996 oleh Notaris Harun Kamil, S.H.

Pada tahun 2023, dilakukan restrukturisasi korporasi melalui penggabungan beberapa entitas, yaitu PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Melalui aksi korporasi ini, PTPN I ditetapkan sebagai entitas yang tetap berdiri dan berfungsi sebagai *subholding* dalam struktur PTPN Group.

Pada tahun 2024, PTPN I memperkuat sinergi bisnis melalui pelaksanaan KSO dengan PTPN IV dan PT SGN sebagai bagian dari strategi optimalisasi sumber daya dan peningkatan kinerja operasional.

PT Perkebunan Nusantara I has a long-standing history that began with the takeover of plantations previously owned by Japanese and Dutch private companies, which were later consolidated into PPN Kesatuan Aceh through Government Regulation No. 142 of 1961. In line with the need for institutional restructuring to maintain company performance, its status was changed to PT Perkebunan-I (Persero) based on Government Regulation No. 14 of 1968 and was officially recorded in Notarial Deed No. 1 dated May 2, 1981.

As part of the consolidation efforts of State-Owned Enterprises (SOEs) in the plantation sector, on February 14, 1996, the government established PT Perkebunan Nusantara I (Persero) through the merger of several business entities, as stipulated in Government Regulation No. 6 of 1996. This consolidation included PT Perkebunan I (Persero), PT Cot Girek Baru (Persero), the development unit of PT Perkebunan V (Persero), and the Cot Girek Palm Oil Mill (PKS) of PT Perkebunan IX (Persero), all of which focused on palm oil and rubber commodities. The official establishment was recorded in Deed of Establishment No. 34 dated March 11, 1996, by Notary Harun Kamil, S.H.

In 2023, a corporate restructuring was carried out through the merger of several entities, namely PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIV into PTPN I. Through this corporate action, PTPN I was designated as the surviving entity and now functions as a subholding within the PTPN Group structure.

In 2024, PTPN I strengthened its business synergy through a Joint Operation with PTPN IV and PT SGN as part of its strategy to optimize resources and enhance operational performance.

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan [GRI 2-23] [C.1]

Company Vision, Mission, and Values



Visi Vision

Menjadi perusahaan agribisnis terdiversifikasi yang unggul dan berdaya saing global

To become a leading and globally competitive diversified agribusiness company



Misi Mission

- Menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggan.
- Meningkatkan kapabilitas proses kerja yang unggul (*operational excellence*) dan pemanfaatan aset yang optimal untuk memberikan imbal hasil (*return*) yang terbaik.
- Menciptakan lingkungan budaya kerja terbaik untuk mewujudkan kontribusi optimal dari setiap karyawan.
- Meningkatkan peran sebagai *agent of development* melalui kegiatan bisnis yang berwawasan lingkungan, dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- Produce high-quality products that meet customer expectations.
- Strengthen operational excellence and optimize asset utilization to generate superior returns.
- Cultivate a high-performance work culture that enables each employee to contribute optimally.
- Enhance the Company's role as an agent of development through environmentally responsible business practices and strong corporate governance.

Catatan:

Perubahan Visi dan Misi Perusahaan telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PTPN I pada bulan Oktober 2024.

Note:

Changes to the Company's Vision and Mission have been approved by the Board of Commissioners and Directors of PTPN I in October 2024.

Nilai Perusahaan Corporate Values

AKHLAK

Amanah Trust

Definisi | Definition :

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Upholding the trust given.

Panduan Perilaku:

Behavioral Guidelines :

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Fulfill promises and commitments.
- Take responsibility for tasks, decisions, and actions.
- Adhere to moral and ethical values.

Kompeten Competent

Definisi | Definition:

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Continuously learning and developing capabilities.

Panduan Perilaku:

Behavioral Guidelines :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Enhance personal competencies to meet everchanging challenges.
- Assist others in learning.
- Complete tasks with the highest quality.

Harmonis Harmonious

Definisi | Definition :

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Caring for and respecting differences.

Panduan Perilaku:

Behavioral Guidelines :

- Menghargai setiap orang atau pun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja.
- Respect every person and their background.
- Willingly help others.
- Foster a positive work environment.

Loyal Loyal

Definisi | Definition :

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

Panduan Perilaku:

Behavioral Guidelines:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- Uphold the good name of fellow employees, leaders, state-owned enterprises (SOEs), and the Nation.
- Willingly sacrifice to achieve greater goals.
- Obey leaders as long as it does not conflict with laws and ethics.

Adaptif Adaptive

Definisi | Definition :

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Continuously innovating and enthusiastically embracing or driving change.

Panduan Perilaku:

Behavioral Guidelines:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.
- Adapt quickly to improve.
- Continuously pursue improvement in line with technological developments.
- Act proactively.

Kolaboratif Collaborative

Definisi | Definition :

Membangun kerja sama yang sinergis.

Building synergistic collaboration.

Panduan Perilaku:

Behavioral Guidelines:

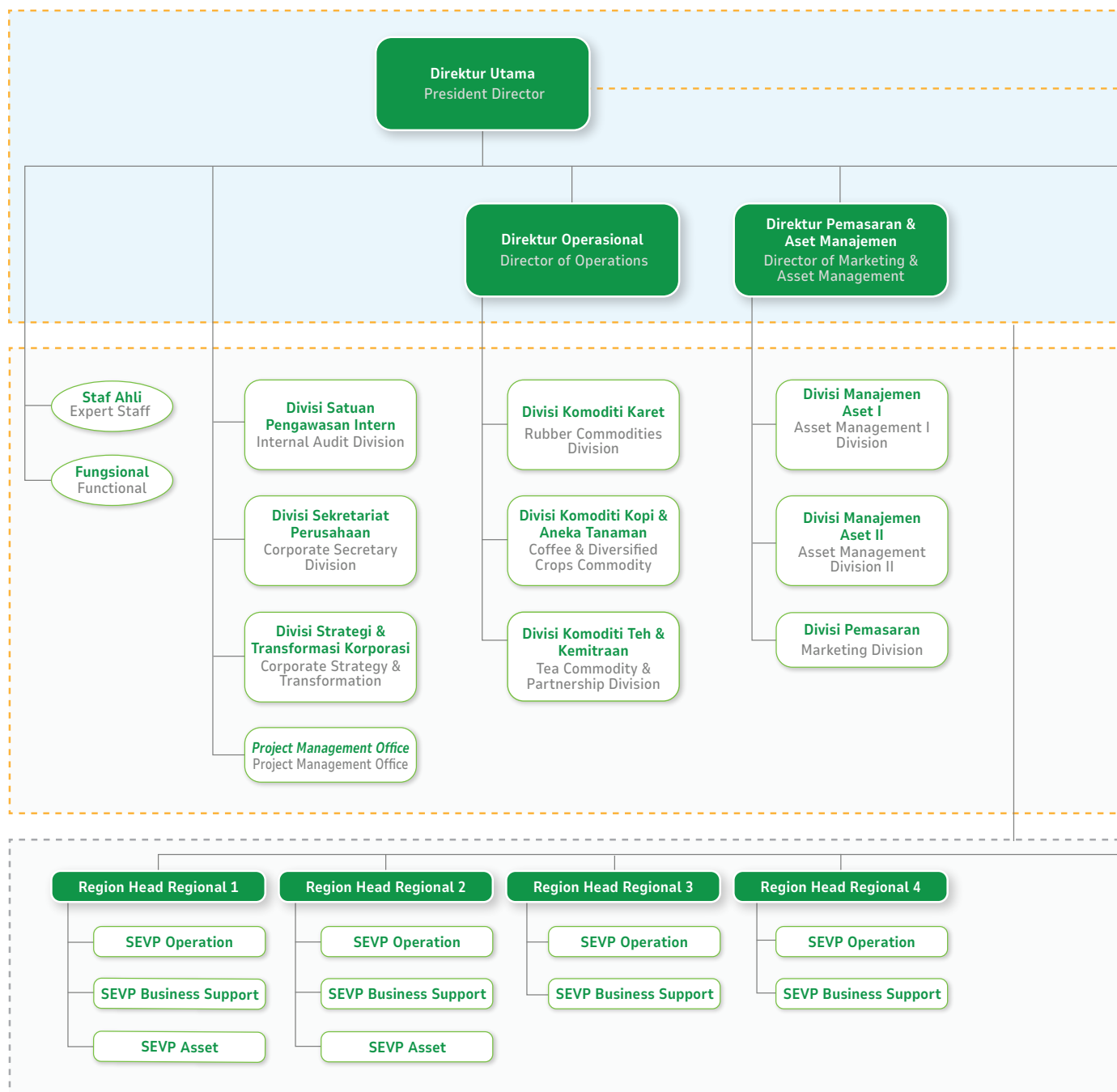
- Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Open opportunities for various parties to contribute.
- Foster collaboration to create added value.
- Encourage the utilization of diverse resources for shared goals.

Struktur Organisasi

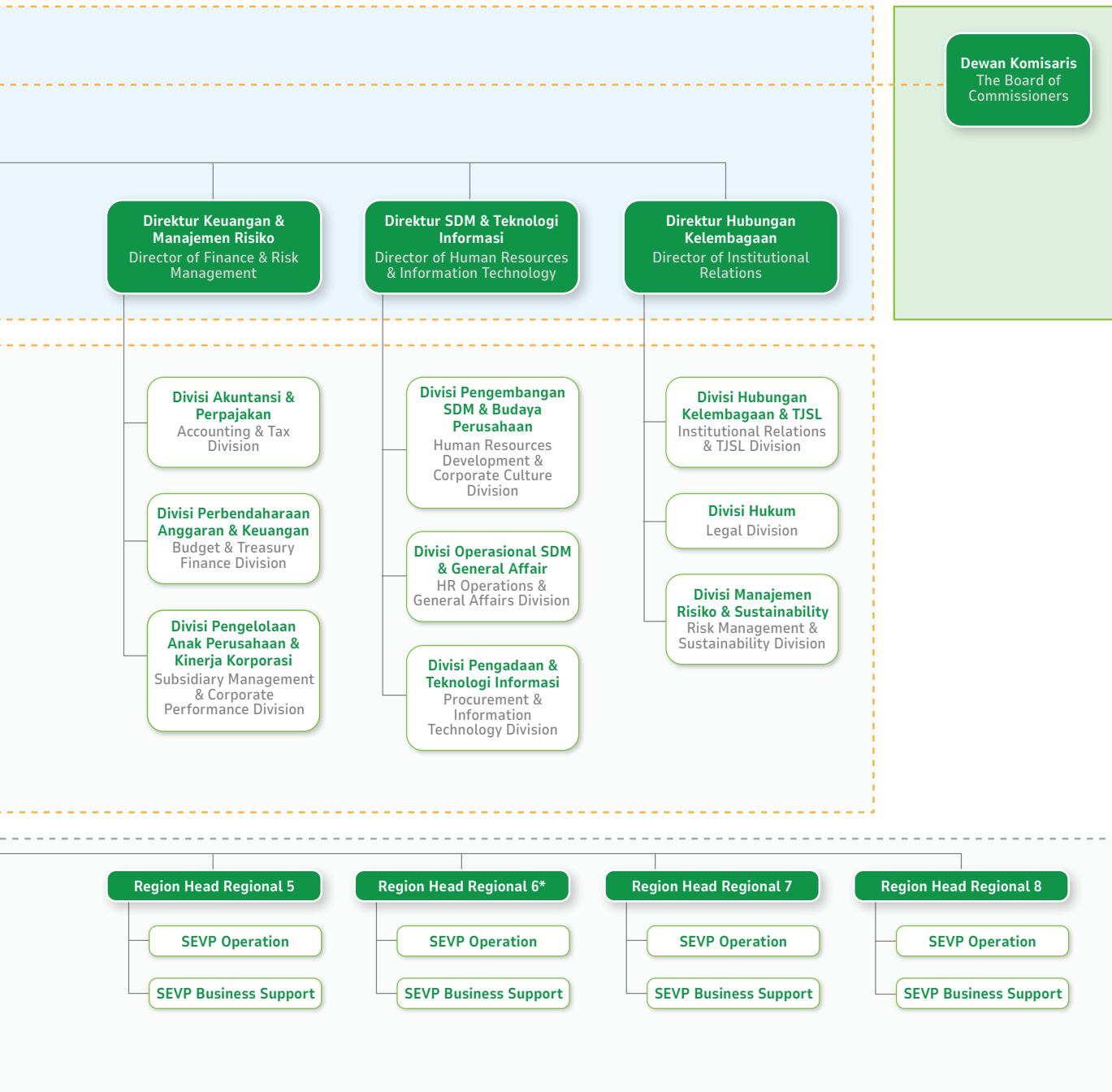
[GRI 2-9]

Organizational Structure

Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2024 mengacu pada Surat Keputusan Direksi PTPN I No. SL-DIRUT/SKPTS/2024.04.01-1 tanggal 30 April 2024. Selanjutnya, pada 13 Desember 2024, Dewan Komisaris PTPN I menyetujui usulan perubahan struktur organisasi melalui Surat Dewan Komisaris No. S-84/DK-PTPN I/XII/2024. Struktur organisasi Perusahaan kemudian diperbarui secara resmi pada 12 Maret 2025 melalui Surat Keputusan Direksi PTPN I No. DPSB-DIRUT.SKPTS.2025.03.12-1 dan berlaku efektif mulai 1 April 2025.



The Company's Organizational Structure as of December 31, 2024 refers to the Board of Directors' Decree of PTPN I No. SL-DIRUT/SKPTS/2024.04.01-1 dated April 30, 2024. Subsequently, on December 13, 2024, the Board of Commissioners of PTPN I approved the proposed organizational restructuring through Commissioners' Letter No. S-84/DK-PTPN I/XII/2024. The revised organizational structure was officially enacted on March 12, 2025 through the Board of Directors' Decree No. DPSB-DIRUT.SKPTS.2025.03.12-1, and came into effect on April 1, 2025.

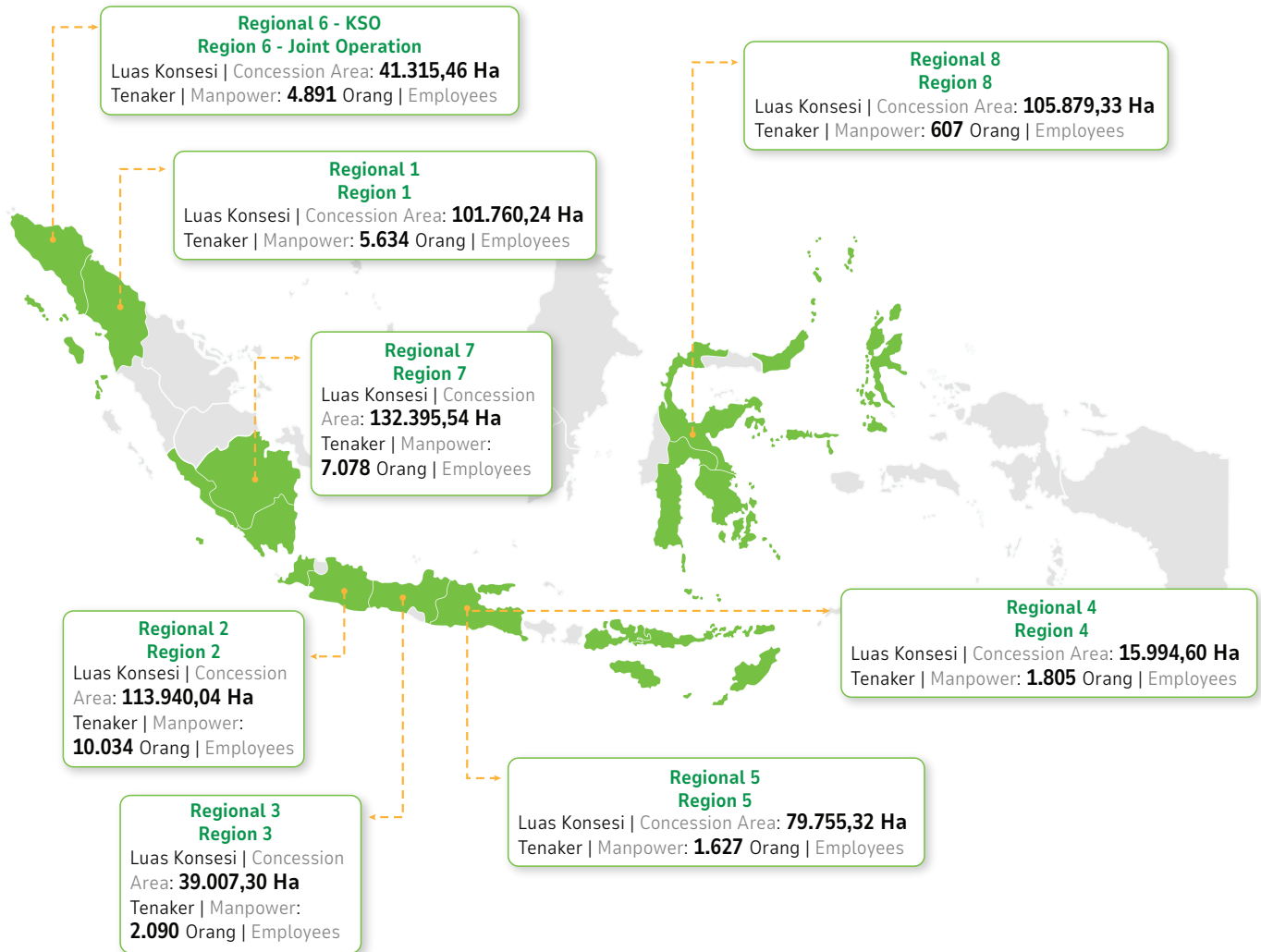


Keterangan | Note:

* Dioperasikan sepenuhnya oleh KSO | Fully operated through Joint Operation

Wilayah Operasional [GRI 2-1] [C.3.d]

Operational Areas



Kegiatan Usaha dan Pasar yang Dilayani [GRI 2-6] [C.4]

Business Activities and Markets Served

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan mengedepankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan produk dan/atau jasa yang berkualitas serta kompetitif. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

Fokus Perusahaan saat ini adalah pengelolaan dan pengembangan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, dan produk turunannya, dengan wilayah operasional yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Selain itu, PTPN I juga mengoptimalkan aset yang dimiliki melalui kerja sama strategis, termasuk pengembangan kawasan industri di lahan-lahan potensial milik Perusahaan yang berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities comprises of agro-business and agro industry and also optimization of the Company's resources to produce high quality and competitive goods and services in order to gain the profits to increase the value of the Company by applying the limited liability Company's principles.

In the implementation, the Company prioritizes the optimization of resource utilization to deliver high-quality and competitive products and/or services. This effort is aimed at creating added value and enhancing the company's performance in a sustainable manner.

The Company is currently focused on the management and development of plantation commodities such as palm oil, rubber, sugarcane, tea, and their derivative products, with operational areas spread across the provinces of Aceh, North Sumatra, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Banten, South Sulawesi, Maluku, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, and Papua. In addition, PTPN I is optimizing its assets through strategic partnerships, including the development of industrial zones on the Company's potential land located in West Java and Central Java.

Produk dan Jasa [GRI 2-6] [C.4]

Products and Services



Karet Rubber

PTPN I memproduksi berbagai jenis karet dari kebun sendiri, antara lain:

- RSS 1 BB, RSS 1 SB, RSS 2, RSS 3, RSS 4: *Ribbed Smoke Sheet* hasil pengeringan dan pengasapan lateks.
- *Cutting*: Potongan karet dengan spesifikasi tertentu.
- SIR 10, SIR 20, SIR 3L: *Standar Indonesian Rubber* untuk berbagai kebutuhan industri.
- Lateks Pekat: Lateks berkadar karet kering tinggi.
- Produk Karet Lainnya: Varian produk berbasis karet lainnya.

Produk karet PTPN I telah memenuhi persyaratan standar mutu untuk dikirim ke berbagai pabrik ban besar seperti Michelin, Goodyear, Bridgestone, Apollo, dan PT Gajah Tunggal Tbk, serta telah tersertifikasi ISO Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

PTPN I produces various types of rubber sourced from its own plantations, including:

- RSS 1 BB, RSS 1 SB, RSS 2, RSS 3, RSS 4: Ribbed Smoked Sheets produced through drying and smoking of latex.
- Cutting: Rubber pieces with specific specifications.
- SIR 10, SIR 20, SIR 3L: Standard Indonesian Rubber for various industrial needs.
- Concentrated Latex: Latex with high dry rubber content.
- Other Rubber Products: Various other rubber-based product variants.

PTPN I's rubber products meet the required quality standards for supply to major tire manufacturers such as Michelin, Goodyear, Bridgestone, Apollo, and PT Gajah Tunggal Tbk. These products are also certified under ISO Quality Management System (QMS) and Environmental Management System (EMS) standards.



Teh Tea

PTPN I memproduksi berbagai jenis teh berkualitas, termasuk teh hitam (orthodox dan CTC), teh hijau, teh putih, dan teh oolong, yang dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Produk teh PTPN I telah tersertifikasi ISO dan Halal, serta memenuhi standar internasional seperti *Rainforest Alliance* dan UTZ. Teh-teh unggulan seperti Walini, Kayu Aro, Goalpara, Butong, Tobasari, Rollaas, dan Ken Tea ditawarkan dalam berbagai bentuk kemasan, baik seduh maupun celup.

PTPN I produces a variety of high-quality teas, including black tea (orthodox and CTC), green tea, white tea, and oolong tea, which are marketed for both domestic and export markets. PTPN I's tea products are ISO and Halal certified, and comply with international standards such as Rainforest Alliance and UTZ. Premium teas such as Walini, Kayu Aro, Goalpara, Butong, Tobasari, Rollaas, and Ken Tea are offered in various packaging formats, including loose leaf and tea bags.



Kopi Coffee

PTPN I memproduksi kopi arabika dan robusta berkualitas tinggi yang diolah menggunakan metode basah (*wet process*) dengan standar *Rainforest Alliance*, Sertifikasi Halal, Praktik Pertanian yang Baik (*Good Agriculture Practice/GAP*), dan Praktik Manufaktur yang Baik (*Good Manufacturing Practice/GMP*). Kopi arabika dikenal sebagai *Specialty Arabica Coffee* dengan merek dagang *Java Coffee*, sementara robusta dipasarkan sebagai *Specialty Robusta Coffee*, keduanya memiliki karakter rasa khas dan memenuhi standar mutu internasional.

PTPN I produces high-quality Arabica and Robusta coffee processed using the wet process, in compliance with Rainforest Alliance standards, Halal Certification, Good Agricultural Practices (GAP), and Good Manufacturing Practices (GMP). Arabica coffee is known as Specialty Arabica Coffee under the Java Coffee brand, while Robusta is marketed as Specialty Robusta Coffee. Both offer distinctive flavor profiles and meet international quality standards.



Kakao Cocoa

PTPN I memproduksi dua jenis utama kakao, yaitu *Kakao Bulk (Forastero)* dan *Kakao Edel (Criollo)*. Keduanya dihasilkan melalui proses fermentasi yang menerapkan standar GAP dan GMP untuk menjamin mutu. *Kakao Bulk* dikenal dengan nama *Java Cocoa* dan memiliki karakter khas untuk pasar massal, sedangkan *Kakao Edel* dipasarkan sebagai *Specialty Java A Light Breaking Cocoa* dengan cita rasa unggulan sebagai *Fine Flavour Cocoa*.

PTPN I produces two main types of cocoa, namely Bulk Cocoa (Forastero) and Fine Cocoa (Criollo). Both are produced through a fermentation process that follows GAP and GMP standards to ensure quality. Bulk Cocoa is known as Java Cocoa and is characterized by its distinctive profile suited for the mass market, while Fine Cocoa is marketed as Specialty Java A Light Breaking Cocoa, renowned for its premium taste as a Fine Flavour Cocoa.



Kelapa sawit Palm oil

Melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara IV, PTPN I mengelola berbagai produk kelapa sawit, yaitu:

- Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil/CPO*): Dihasilkan melalui proses ekstraksi dan pemurnian TBS, digunakan dalam industri pangan, kosmetik, dan bioenergi.
- Inti Sawit (*Palm Kernel/PK*): Biji dari buah kelapa sawit yang diolah lebih lanjut untuk menghasilkan minyak inti sawit.
- Minyak Inti Sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*): Dihasilkan dari ekstraksi inti sawit dan digunakan dalam industri oleokimia seperti produksi sabun, deterjen, dan kosmetik.

Through a Joint Operation with PT Perkebunan Nusantara IV, PTPN I manages various palm oil products, including:

- Crude Palm Oil (CPO): Produced through the extraction and refining of Fresh Fruit Bunches (FFB), used in the food, cosmetics, and bioenergy industries.
- Palm Kernel (PK): The seed of the oil palm fruit, further processed to produce palm kernel oil.
- Palm Kernel Oil (PKO): Extracted from palm kernels, used in the oleochemical industry for products such as soap, detergent, and cosmetics.
- Palm Kernel Meal (PKM): A by-product of PKO extraction, used as animal feed due to its high protein content.
- Fresh Fruit Bunches (FFB): Harvested oil palm fruit, serving as the primary raw material for palm oil production.



Tebu dan Gula Sugarcane and Sugar

Melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Sinergi Gula Nusantara, PTPN I mengelola:

- Gula Kristal Putih (GKP): Produk gula berkualitas tinggi dengan kemurnian tinggi, kadar air rendah, serta standar warna sesuai standar nasional, ditujukan untuk konsumsi rumah tangga dan industri makanan dan minuman. Target produksi sebesar 4,2 juta ton pada tahun 2024, mendukung program swasembada gula nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023.
- Tetes Tebu: Produk sampingan hasil ekstraksi tebu, digunakan dalam industri pakan ternak, fermentasi, dan energi.

Through a Joint Operation with PT Sinergi Gula Nusantara, PTPN I manages:

- White Crystal Sugar: A high-quality sugar product with high purity, low moisture content, and color specifications in line with national standards, and is intended for household consumption as well as the food and beverage industry. The 2024 production target is set at 4.2 million tons, supporting the national sugar self-sufficiency program in accordance with Presidential Regulation No. 40 of 2023.
- Molasses: A by-product of sugarcane extraction, used in the animal feed, fermentation, and energy industries.



Produk Retail Retail Products

Produk retail PTPN I merupakan produk teh, kopi, dan cerutu yang dikemas secara menarik dan diberikan merk yang mencerminkan rasa unik dan khas. Produk retail PTPN I juga menjadi andalan dari PTPN I dimana telah dikenal oleh masyarakat dengan merek Banaran, Java Coffee, Walini, Golden Djawa, dan lain-lain.

PTPN I's retail products include tea, coffee, and cigars, all attractively packaged and branded to reflect their unique and distinctive flavors. PTPN I's retail products also serve as one of its key offerings, widely recognized by the public under well-known brands such as Banaran, Java Coffee, Walini, Golden Djawa, and others.

Pemantauan Kualitas Kopi, Regional 5 | Coffee Quality Monitoring, Region 5



Pasar yang Dilayani

[C.4]

Market Share

Perusahaan secara berkelanjutan melakukan penjajakan terhadap berbagai peluang baru guna mendorong peningkatan kinerja bisnis dan perluasan jangkauan pasar. Sepanjang tahun 2024, distribusi pangsa pasar Perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

The Company continuously explores new opportunities to drive business performance and expand market reach. Throughout 2024, the distribution of the Company’s market share is illustrated as follows:

Komoditas Commodity	Produksi PTPN I PTPN I Production (ton ton)	Produksi Nasional (Perkiraan) National Production (Estimate) (ton ton)	Pangsa Pasar Market Share (%)
Kelapa Sawit Palm Oil	465.307	49.100.000	0,94
Karet Rubber	92.805	1.975.000	4,35
Gula Sugar	3.456.943	2.465.739	5,99
Tetes Molasses	103.276	1.697.310	26,07
Teh Tea	28.449	137.422	20,7
Kopi Arabika Arabica Coffee	384	84.000	0,45
Kopi Robusta Robusta Coffee	1.263	570.000	0,22
Kakao Cocoa	11	703.000	0,0015

Skala Perusahaan

[GRI 2-6] [C.3]

Company Scale

[GRI 2-6] [C.3]

Keterangan Description	2024	2023*	2022
Total Karyawan (Orang) Total Employees (People)	39.409	44.759	48.860*
Pendapatan (Juta Rupiah) Revenue (Million Rupiah)	15.169.619	18.277.610	20.497.886
Beban Pokok Pendapatan (Juta Rupiah) Cost of Revenue (Million Rupiah)	10.755.412	15.239.589	17.010.980
Total Ekuitas (Juta Rupiah) Total Equity (Million Rupiah)	28.158.045	26.442.102	30.546.142
Total Liabilitas (Juta Rupiah) Total Liabilities (Million Rupiah)	29.636.718	49.228.080	42.769.188
Total Aset (Juta Rupiah) Total Assets (Million Rupiah)	78.015.440	75.670.182	73.315.330

*)Penyajian kembali data | Restatement of data

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and Associated Entities

Entitas Anak

Subsidiaries

No.	Nama Perusahaan Company Name	No.	Nama Perusahaan Company Name
1	PT Agro Medika Nusantara (AMN)	9	PT Karya Nusa Tujuh (KNT)
2	PT Berkah Cenning Tebu (BCT)	10	PT Nusa Dua Bekala (NDB)
3	PT Buma Cima Nusantara (BCN)	11	PT Nusa Dua Propertindo (NDP)
4	PT Cut Meutia Medika Nusantara (CMN)	12	PT Mitratani Dua Tujuh (MDT)
5	PT Dasaplast Nusantara (DN)	13	PT Optima Nusa Tujuh (ONT)
6	PT Energi Agro Nusantara (EAN)	14	PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)
7	PT Industri Gula Glenmore (IGG)	15	PT Rolas Nusantara Tambang (RNT)
8	PT Industri Gula Tinanggea (IGT)	16	PT Tembakau Deli Medica (TDM)

Entitas Asosiasi

Associated Entities

No.	Nama Perusahaan Company Name
1	PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis (DMKB)
2	PT Deli Megapolitan Kawasan Industri (DMKI)
3	PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR)
4	PT Agro Sinergi Nusantara (ASN)
5	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)
6	PT Bio Industri Nusantara (BIN)
7	PT Langkat Nusantara Kepong (LNK)
8	PT Nusantara Medika Utama (NMU)
9	PT Nusantara Sebelas Medika (NSM)
10	PT Rolas Nusantara Medika (RNM)
11	PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN)
12	PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)
13	PT Propernas Nusa Dua (PND)

Keanggotaan dalam Asosiasi [GRI 2-28] [C.5]

Membership in Associations

Nama Asosiasi Association Name	Lingkup Scope	Status Keanggotaan Membership Status	
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Indonesian Palm Oil Association (IPOA)	Komoditi Kelapa Sawit Palm Oil Commodity	Anggota Member	
Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Rubber Association of Indonesia	Komoditi Karet Rubber Commodity	Anggota Member	
Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI)	Komoditi Kopi Coffee Commodity	Anggota Member	
Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI)	Komoditi Kopi Coffee Commodity	Anggota Member	
Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) Indonesia Coffee Exporters Association	Ekspor Kopi Coffee Export	Anggota Member	
Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Association of Indonesian Coffee Exporters and Industries	Ekspor Kopi Coffee Export	Anggota Member	
Dewan Teh Indonesia (DTI) Indonesia Tea Board	Komoditi Teh Tea Commodity	Anggota Member	
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Indonesian Employers Association	Pengusaha Entrepreneur	Anggota Member	

03

Kinerja Ekonomi dalam Mendukung Transformasi Agribisnis

Economic Performance in Supporting Agribusiness Transformation





Kinerja Ekonomi Perusahaan

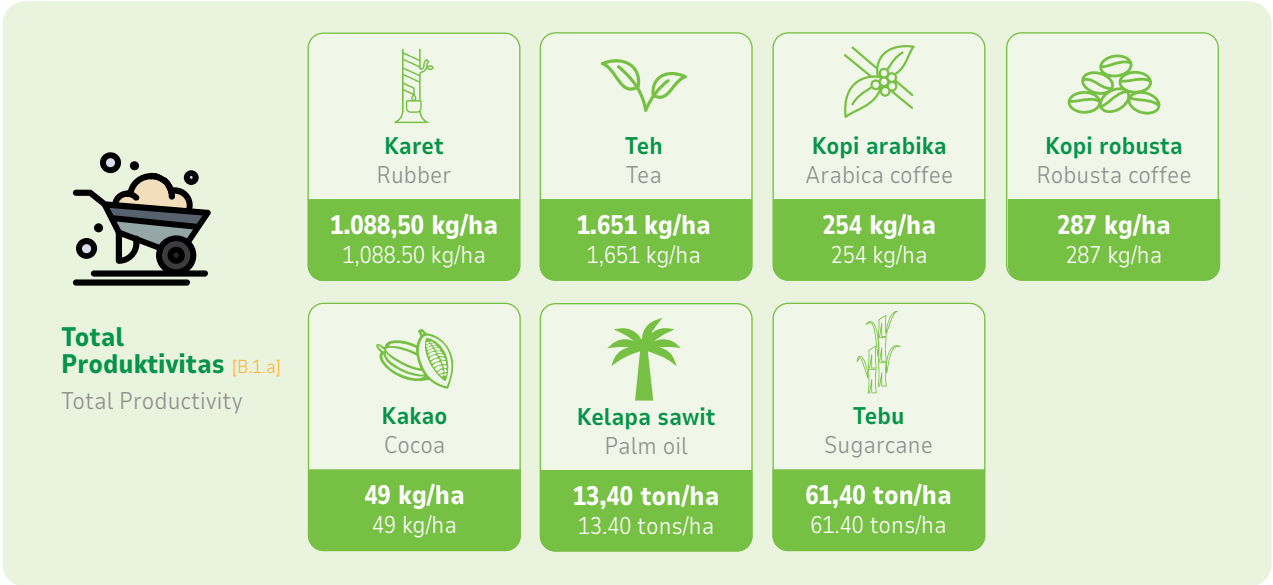
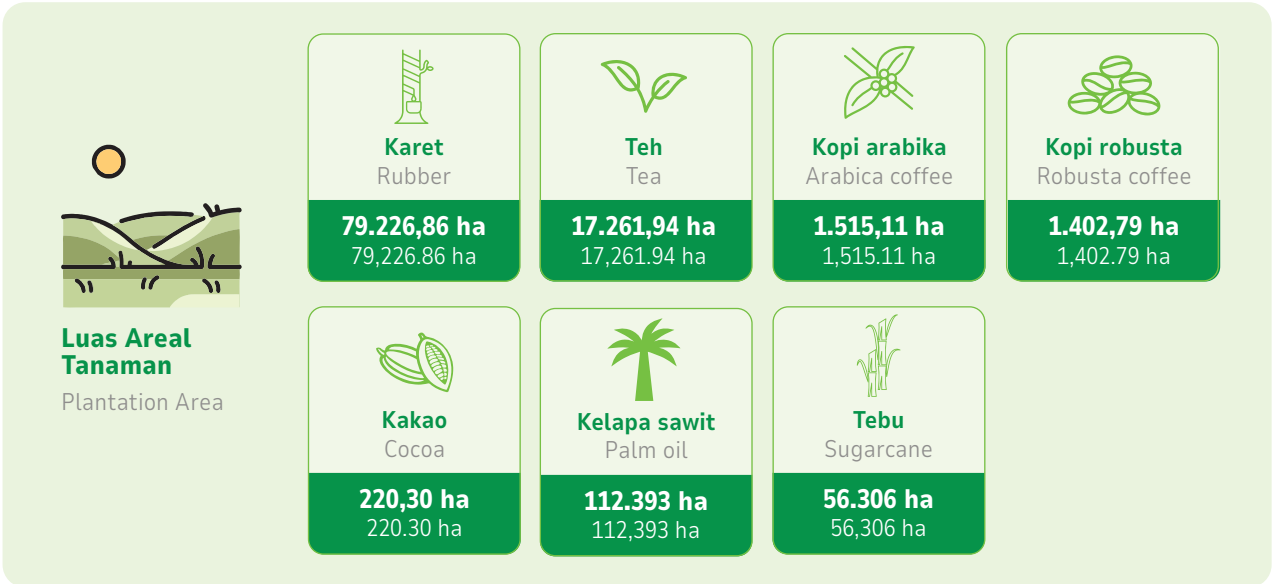
Economic Performance of the Company

Distribusi Nilai Ekonomi

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan berhasil mencatat pencapaian ekonomi yang positif melalui pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif. Keberhasilan ini merupakan hasil dari dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Hingga akhir tahun, Perusahaan tetap konsisten dalam mengelola operasi di komoditas utama, yakni karet, teh, kopi, kakao, kelapa sawit, dan tebu. [\[GRI 3-3\]](#)

Distribution of Economic Value

Throughout 2024, the Company recorded positive economic performance through the effective execution of its operational activities. This achievement reflects the support and collaboration of all involved parties. By the end of the year, the Company remained consistent in managing operations across its main commodities, namely rubber, tea, coffee, cocoa, palm oil, and sugarcane. [\[GRI 3-3\]](#)



Tabel Kinerja Ekonomi (Rp Juta) [GRI 201-1] [B.1.a, B.1.c, F.2, F.3]
Table of Economic Performance (Rp Million)

Uraian Description	2024	2023*	2022
Pendapatan Revenue	15.169.619	18.277.610	20.497.886
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(10.755.412)	(15.239.589)	(17.010.980)
Laba bruto Gross profit	4.414.207	3.038.021	3.486.906
Keuntungan (kerugian) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis Gain (loss) arising from changes in fair value of biological assets	(57.415)	1.714	(140.961)
Beban pemasaran dan penjualan Marketing and selling expenses	(204.701)	(189.759)	(215.262)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(2.760.745)	(2.202.433)	(2.287.782)
Pendapatan operasi lain Other operating income	1.432.037	1.266.823	1.920.756
Beban operasi lain Other operating expenses	(932.927)	(1.073.029)	(1.330.341)
Laba Usaha Operating Profit	1.890.456	841.327	1.433.314
Bagian atas laba bersih asosiasi dan ventura bersama Share of net profit of associates and joint ventures	309.732	212.334	-
Pendapatan keuangan Finance income	395.916	354.847	84.312
Beban keuangan Finance expense	(3.021.430)	(2.791.381)	(1.898.183)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Loss Before Tax Expense	(425.326)	(1.382.873)	(380.556)
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(138.259)	(87.365)	92.072
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Penyesuaian Merging Entities Profit (Loss) for the Year Before Adjustment of Merging Entities	-	-	(288.483)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan - Merging Entities Profit (Loss) for the Year - Merging Entities	-	-	(532.753)
Rugi (Laba) Tahun Berjalan Loss (Profit) of The Year	(563.585)	(1.470.238)	244.270

*)Penyajian kembali data | Restatement of data

Berdasarkan kinerja ekonomi sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyampaikan informasi terkait nilai ekonomi yang dihasilkan, didistribusikan, dan ditahan. Nilai ekonomi yang dihasilkan mencerminkan pendapatan dari kegiatan operasional dan keuangan Perusahaan. Nilai yang didistribusikan mencakup kontribusi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pembayaran pajak, pembelian dari pemasok, serta pendanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Adapun nilai ekonomi yang ditahan merupakan selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dengan nilai yang telah didistribusikan. [GRI 201-1]

Based on the economic performance throughout 2024, the Company presents information on the economic value generated, distributed, and retained. The economic value generated reflects the revenue from the Company's operational and financial activities. The distributed value includes contributions to stakeholders, such as tax payments, procurement from suppliers, and funding for Corporate Social Responsibility (CSR) programs. The retained economic value represents the difference between the economic value generated and the value that has been distributed. [GRI 201-1]

Tabel Distribusi Nilai Ekonomi (Rp Juta) [F.2, F.3, F.4]
Table of Economic Value Distribution (Rp Million)

Uraian Description	2024	2023*	2022
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Economic Value Generated			
Pendapatan bersih Net revenue	15.169.619	18.227.610	20.497.886
Pendapatan keuangan Finance income	395.916	354.847	84.312
Pendapatan operasi lain Other operating income	1.432.037	1.266.823	1.920.756
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (1) Total Economic Value Generated (1)	16.997.572	19.849.280	22.502.955
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed			
Beban pokok pendapatan** Cost of revenue**	10.997.512	15.980.505	17.010.980
Beban pemasaran dan penjualan Marketing and selling expenses	(204.701)	(189.759)	(215.262)
Beban umum dan administrasi*** General and administrative expenses***	(851.581)	(806.142)	(2.287.782)
Beban keuangan Finance expenses	(3.021.430)	(2.791.381)	(1.898.184)
Beban operasi lain Other operating expenses	(932.927)	(1.073.029)	(1.330.341)
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(138.259)	(87.365)	92.073
Pembayaran gaji kepada karyawan Employee salaries and benefits	(2.123.624)	(2.117.262)	(3.039.335)
Pembayaran dividen kepada pemerintah Dividend payments to the government	(338)	(657)	-
Biaya lingkungan Environmental costs	(27.640)	(19.955)	(7.130)

Uraian Description	2024	2023*	2022
Keuntungan (kerugian) atas perubahan wajar nilai aset biologis Gain (loss) from changes in fair value of biological assets	(57.415)	1.714	(140.961)
Laba (rugi) tahun berjalan - <i>merging entities</i> Profit (loss) for the year – <i>merging entities</i>	-	-	(532.754)
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (2) Total Economic Value Distributed (2)	3.639.597	8.896.669	(22.258.685)
Nilai Ekonomi yang Ditahan (1-2) Economic Value Retained (1-2)	20.637.169	28.795.949	244.270

Catatan:

* Penyajian kembali data

** tidak termasuk gaji dan tunjangan karyawan

*** tidak termasuk gaji dan tunjangan karyawan dan biaya lingkungan

Notes:

* Restatement of data

** Excluding employee salaries and benefits

*** Excluding employee salaries and benefits, and environmental costs

Penanaman Tebu, Regional 8 | Sugarcane Planting, Region 8



Bantuan Finansial dari Pemerintah

[GRI 201-4]

Financial Assistance from the Government

Sepanjang tahun 2024, PTPN I memperoleh dukungan pembiayaan dari Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bagian dari upaya penguatan kondisi keuangan. Adapun rincian pencairan dana yang diterima selama tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Throughout 2024, PTPN I received financial support from the Government through the National Economic Recovery (PEN) program as part of efforts to strengthen its financial position. The details of disbursed funds received during 2024 are presented as follows

Tabel Pencairan PEN (dalam Rupiah)
Table of PEN Disbursements (in Rupiah)

Alokasi Regional Regional Allocation	Detail Pencairan Tahap I Disbursement Details Phase I	Detail Pencairan Tahap II Disbursement Details Phase II	Detail Pencairan Tahap III Disbursement Details Phase III	Total Pencairan 2024 Total Disbursement 2024	Total Pencairan hingga 31 Desember 2024 Total Disbursement up to December 31, 2024
Regional 1 Region 1	-	-	-	-	-
Regional 2 Region 2	-	-	-	-	-
Regional 3 Region 3	-	-	-	-	-
Regional 4 Region 4	61.505.002.456	-	-	61.505.002.456	61.505.002.456
Regional 5 Region 5	-	-	-	-	-
Regional 7 Region 7	-	-	-	-	-
Regional 8 Region 8	-	-	-	-	-
Jumlah Total	61.505.002.456	0	0	61.505.002.456	61.505.002.456

Tabel Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) (Rupiah)
Table of Disbursement of State Equity Participation (PMN) (Rupiah)

Alokasi Regional Regional Allocation	Detail Pencairan Tahap I Disbursement Details Phase I	Detail Pencairan Tahap II Disbursement Details Phase II	Detail Pencairan Tahap III Disbursement Details Phase III	Total Pencairan 2024 Total Disbursement 2024	Total Pencairan hingga 31 Desember 2024 Total Disbursement up to December 31, 2024
Regional 1 Region 1	-	-	-	-	-
Regional 2 Region 2	-	-	-	-	-
Regional 3 Region 3	-	-	-	-	427.736.197.236
Regional 4 Region 4	-	-	-	-	1.205.972.113.820
Regional 5 Region 5	-	-	-	-	700.000.000.000
Regional 7 Region 7	8.714.000.001	28.586.880.000	-	37.300.880.001	174.712.743.650
Regional 8 Region 8	-	-	-	-	-
Jumlah Total	8.714.000.001	28.586.880.000	0	37.300.880.001	2.508.421.054.706

Sadapan Getah Karet di Kebun Ngobo, Regional 3
Rubber Tapping at Ngobo Estate, Region 3



Dana Pensiun dan Kesejahteraan

Retirement and Welfare Fund

Perusahaan menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan finansial bagi karyawan dengan melibatkan mereka dalam program pensiun. Pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI). Pendanaan program ini didukung oleh kontribusi Perusahaan sebesar 6,00% dan 6,22% - 11,00% dari gaji dasar tahunan masing-masing karyawan pada tahun tertentu. [GRI 201-3]

The Company reaffirms its commitment to providing financial protection for employees by enrolling them in a pension program. The pension funds are managed by Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI). This program is funded through Company contributions amounting to 6.00% and 6.22%-11.00% of each employee's annual base salary in the respective year. [GRI 201-3]

Sosialisasi dan *Workshop* Manajemen Risiko, Regional 1 Risk Management Socialization and Workshop, Region 1



Manajemen Rantai Pasokan

Supply Chain Management

Dalam mendukung praktik usaha yang berkelanjutan, PTPN I memandang pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan yang menyeluruh hingga ke seluruh rantai pasok. Rantai pasok tidak hanya berperan sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan keberlanjutan Perusahaan. Oleh karena itu, PTPN I melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pasok, termasuk petani kecil dan koperasi mandiri, yang berkontribusi dalam penyediaan bahan baku tambahan secara langsung.

PTPN I terus memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh mitra rantai pasok mematuhi standar keberlanjutan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Hal ini mencakup pencegahan praktik pekerja anak dan pekerja paksa, serta memastikan bahwa bahan baku tidak berasal dari sumber yang merusak lingkungan, seperti pembukaan lahan dengan pembakaran atau kawasan hutan konservasi. Pengawasan dan penilaian secara berkala dilakukan untuk menjaga integritas rantai pasok terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai langkah strategis, PTPN I menerapkan standar ESG yang berlaku secara bertahap di seluruh rantai pasokan. Standar ini diperkuat dengan kebijakan internal serta inisiatif yang dirancang untuk menciptakan rantai pasok yang tangguh, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui penerapan kebijakan yang konsisten, PTPN I berupaya menciptakan kolaborasi jangka panjang dengan mitra usaha guna mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. [GRI 3-3]

In support of sustainable business practices, PTPN I recognizes the importance of applying sustainability principles throughout its entire supply chain. The supply chain not only serves as an operational support system but also plays a vital role in achieving the Company's sustainability goals. Therefore, PTPN I engages various parties within the supply ecosystem, including smallholder farmers and independent cooperatives, who contribute directly to the supply of additional raw materials.

PTPN I continues to strengthen its commitment to ensuring that all supply chain partners comply with sustainability standards, encompassing both social and environmental aspects. This includes the prevention of child labor and forced labor practices, as well as ensuring that raw materials are not sourced from environmentally harmful activities, such as land clearing by burning or from conservation forest areas. Regular monitoring and evaluation are conducted to maintain the integrity of the supply chain in accordance with these principles.

As a strategic step, PTPN I is gradually implementing ESG standards across its entire supply chain. These standards are reinforced by internal policies and initiatives designed to build a resilient, transparent, and responsible supply chain. Through the consistent implementation of its policies, PTPN I aims to establish long-term collaboration with business partners to promote sustainable business practices and deliver added value to all stakeholders. [GRI 3-3]

Jumlah Pemasok Barang dan Jasa (Pemasok)* [GRI 204-1] Number of Goods and Services Suppliers

Keterangan Description	2024	2023	2022
Lokal Local	620	858	1.329
Asing Foreign	0	0	0
Jumlah Total	620	858	1.329

Nilai Kontrak Pekerjaan Pemasok Barang dan Jasa (Rp)** [GRI 204-1]
Contract Value of Goods and Services Suppliers (Rp)**

Keterangan Description	2024	2023	2022
Lokal Local	1.423.187.398.036	2.024.998.248.560	3.457.105.765.565
Asing Foreign	-	-	-
Jumlah Total	1.423.187.398.036	2.024.998.248.560	3.457.105.765.565

Keterangan:

*Pemasok barang dan jasa lokal adalah pemasok yang berdomisili di Indonesia dan Pemasok barang dan jasa asing adalah pemasok yang berdomisili di luar Indonesia.

**Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Notes:

*Local goods and services suppliers are those domiciled in Indonesia, while foreign goods and services suppliers are those domiciled outside Indonesia.

**The contract value as stated in the SPPBJ.

Manajemen Proses Pengadaan [F.26]

PTPN I secara konsisten menerapkan pendekatan bertanggung jawab dalam rantai pasok melalui berbagai inisiatif pengadaan. Inisiatif ini bertujuan memastikan efisiensi, transparansi, serta mendorong praktik bisnis yang etis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: [GRI 3-3, 308-1, 414-1] [13.17.1]

1. ESG Due Diligence

PTPN I memastikan ketersediaan pemetaan lahan dan dokumen legalitas konsesi, serta memperkuat sistem untuk mengintegrasikan pemasok yang menyediakan bahan baku guna menjamin tidak ada penanaman di area yang terlarang.

2. Kriteria ESG di Kontrak Pemasok

Dalam kontrak perjanjian dengan pemasok, PTPN I telah mengintegrasikan Sistem Manajemen Keberlanjutan yang mencakup kriteria hak asasi manusia (HAM). Pada tahun pelaporan, 100% pemasok dan kontraktor telah menyatakan komitmennya untuk mematuhi prinsip-prinsip HAM, yang mencakup, namun tidak terbatas pada: [GRI 408-1, 409-1] [13.16.2, 13.17.2]

- Keselamatan & kesehatan kerja (K3).
- Upah hidup sesuai dengan upah minimum provinsi.
- Larangan pekerja anak dibawah umur.
- Larangan adanya praktik kerja paksa.
- Larangan ibu hamil dan ibu menyusui untuk bekerja di area yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. Pemantauan ESG Pemasok

Perusahaan secara berkala melakukan peninjauan dan audit kinerja keberlanjutan pemasok, baik secara internal maupun eksternal, khususnya terkait aktivitas deforestasi. Melalui proses ini, PTPN I memastikan tidak ada dampak sosial negatif dalam rantai pasok. [GRI 414-2] [F.23]

Procurement Process Management [F.26]

PTPN I consistently applies a responsible approach to its supply chain through various procurement initiatives. These initiatives aim to ensure efficiency, transparency, and promote ethical, environmentally friendly, and sustainable business practices. Several measures undertaken include: [GRI 3-3, 308-1, 414-1] [13.17.1]

1. ESG Due Diligence

PTPN I ensures the availability of land mapping and concession legality documents, while also strengthening systems to integrate suppliers of raw materials in order to guarantee that no planting occurs in prohibited areas.

2. ESG Criteria in Supplier Contracts

In its contractual agreements with suppliers, PTPN I has integrated a Sustainability Management System that includes human rights criteria. In the reporting year, 100% of suppliers and contractors declared their commitment to complying with human rights principles, which include, but are not limited to: [GRI 408-1, 409-1] [13.16.2, 13.17.2]

- Occupational health and safety (OHS).
- Living wages in accordance with the provincial minimum wage.
- Prohibition of child labor.
- Prohibition of forced labor practices.
- Prohibition of assigning pregnant and breastfeeding women to work in areas where hazardous and toxic materials (B3) are used.

3. Supplier ESG Monitoring

The Company regularly conducts reviews and audits of supplier sustainability performance, both internally and externally, with a particular focus on deforestation-related activities. Through this process, PTPN I ensures that no negative social impacts occur within its supply chain. [GRI 414-2] [F.23]

4. Meningkatkan Kinerja Rantai Pasokan

- a. PTPN I menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya bagi pemasok dan kontraktor guna memberikan pemahaman mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan dampak lingkungan.
- b. Perusahaan mendistribusikan limbah organik hasil pengolahan bahan baku kepada pemasok sebagai pupuk ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali dalam proses penanaman ulang. [F.5]
- c. Untuk meminimalkan dampak lingkungan yang signifikan dalam rantai pasok, PTPN I berkomitmen mendukung pemasok dalam menerapkan standar praktik perkebunan terbaik dan berkelanjutan, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip lingkungan dalam operasional bisnis.

Ketertelusuran Produk [F.26]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, PTPN I secara konsisten menerapkan prinsip ketertelusuran (*traceability*) dalam pengelolaan rantai pasok Perusahaan. Ketertelusuran menjadi langkah konkret yang dijalankan PTPN I dalam upaya mengelola dampak lingkungan yang timbul sepanjang siklus pasokan, sekaligus memastikan adanya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dengan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. [GRI 3-3]

PTPN I menyadari sepenuhnya peran dan tanggung jawab dalam menelusuri asal-usul bahan baku. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi ketertelusuran melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kesadaran dan partisipasi para pemasok serta perantara agar turut mengadopsi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

[F.1]

Dalam praktiknya, proses ketertelusuran dilakukan melalui pengumpulan data dari para pemasok di setiap kebun. Proses ini merupakan tahapan penting dalam menjamin transparansi asal-usul bahan baku, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan. Sistem yang diterapkan mengacu pada standar mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional dan internasional. Prinsip ketertelusuran difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kebun tempat bahan baku berasal dan pabrik pengolahan bahan baku.

4. Enhancing Supply Chain Performance

- a. PTPN I conducts training sessions and workshops for suppliers and contractors to provide insights into best practices for managing environmental impacts.
- b. The Company distributes organic waste generated from raw material processing to suppliers as eco-friendly fertilizer, which can be reused in replanting processes. [F.5]
- c. To minimize significant environmental impacts within the supply chain, PTPN I is committed to supporting suppliers in implementing best and sustainable plantation practices, ensuring compliance with environmental principles in their business operations.

Product Traceability [F.26]

As part of its commitment to sustainable development, PTPN I consistently applies the principle of traceability in managing the Company's supply chain. Traceability serves as a concrete step taken by PTPN I to manage environmental impacts throughout the supply cycle, while also ensuring alignment between local economic growth and environmental sustainability and preservation. [GRI 3-3]

PTPN I fully recognizes its role and responsibility in tracing the origin of raw materials. Therefore, the Company is committed to continuously enhancing the implementation of traceability through various strategic approaches, including promoting awareness and encouraging the participation of suppliers and intermediaries in adopting the sustainability standards established by the Company.

[F.1]

In practice, the traceability process is carried out through data collection from suppliers at each plantation. This process is a crucial step in ensuring transparency regarding the origin of raw materials and serves as a foundation for sustainability-oriented decision-making. The system implemented refers to nationally and internationally recognized quality standards and certifications. The traceability principle focuses on two main aspects, namely the plantation where the raw materials originate and the processing plant where they are handled.

PTPN I menyadari pentingnya ketertelusuran bahan baku sebagai bagian dari upaya keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, PTPN I sedang mengembangkan sistem pelacakan digital yang terintegrasi ke dalam aplikasi Digital Farming, yang memungkinkan identifikasi asal produk secara transparan. Untuk bahan baku yang berasal dari kebun milik sendiri, ketertelusuran telah diterapkan hingga tingkat titik asal kebun. Saat ini, PTPN I juga sedang memperluas kemampuan pelacakan ini hingga mencakup pemasok bahan baku, khususnya untuk produk Karet SIR 20. [13.23.1, 13.23.2]

Mayoritas bahan baku yang digunakan PTPN I, seperti komoditas karet, teh, dan kopi, berasal dari kebun inti yang dimiliki langsung oleh Perusahaan dan telah memperoleh sertifikasi Rainforest Alliance, terutama untuk komoditas kopi dan teh. Sementara untuk pembelian bahan baku karet, khususnya SIR 20, meskipun sudah berjalan, sertifikasi standar internasional belum sepenuhnya diterapkan. Sebagai bagian dari komitmen untuk memenuhi persyaratan standar internasional, khususnya regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), PTPN I tengah menjalankan program penguatan sistem ketertelusuran digital. Upaya ini difokuskan agar pelacakan dapat menjangkau hingga kebun pemasok bahan baku karet, sehingga mendukung praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan transparan. [13.23.3, 13.23.4]

Sebagai bentuk keseriusan dalam memenuhi ketentuan dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan, PTPN I juga telah menetapkan sejumlah klausul kepatuhan lingkungan dalam setiap kontrak kerja sama dengan pemasok, yaitu: [GRI 308-1]

1. Berkomitmen untuk mencegah pencemaran lingkungan.
2. Bersedia untuk memberikan akses kepada lembaga sertifikasi bila diperlukan sebagai komitmen pemenuhan prinsip dan kriteria.
3. Berkomitmen untuk tidak melakukan pembakaran untuk membuka areal baru maupun peremajaan (*replanting*).
4. Tidak melakukan pembukaan lahan baru di areal yang bernilai stok karbon tinggi (SKT), nilai konservasi tinggi (NKT), dan di atas lahan gambut.
5. Berkomitmen untuk memastikan bahan baku yang diterima dan dikirimkan berasal dari areal yang memiliki legalitas, bukan berasal dari areal terlarang dan berkomitmen menerapkan sistem maupun ketelusuran untuk sumber bahan baku yang masuk.

PTPN I recognizes the importance of raw material traceability as part of its business sustainability efforts. Therefore, PTPN I is developing an integrated digital tracking system within the Digital Farming application, which enables transparent identification of product origins. For raw materials sourced from the company's own plantations, traceability has been implemented down to the plantation origin level. Currently, PTPN I is also expanding this tracking capability to include raw material suppliers, particularly for the product Rubber SIR 20. [13.23.1, 13.23.2]

The majority of raw materials used by PTPN I, such as rubber, tea, and coffee commodities, come from the Company's directly owned core plantations, which have obtained Rainforest Alliance certification, especially for coffee and tea commodities. Meanwhile, for the purchase of rubber raw materials, particularly SIR 20, although progress has been made, international standard certification has not yet been fully implemented. As part of its commitment to meet international standards, especially the European Union Deforestation Regulation (EUDR), PTPN I is currently running a program to strengthen its digital traceability system. This effort is focused on extending traceability to the plantations of rubber raw material suppliers, thereby supporting more sustainable and transparent business practices. [13.23.3, 13.23.4]

As a demonstration of its commitment to complying with the Company's Environmental Policy and regulations, PTPN I has also established several environmental compliance clauses in every partnership contract with suppliers, including: [GRI 308-1]

1. Committed to preventing environmental pollution.
2. Willing to provide access to certification bodies if necessary as a commitment to meeting principles and criteria.
3. Committed to not conducting burning for clearing new areas or replanting.
4. Not clearing new land in areas with high carbon stock value (HCV), high conservation value (HCV), or on peatland.
5. Committed to ensuring that raw materials received and delivered come from areas with legal status, not from prohibited areas, and committed to implementing systems or traceability for incoming raw material sources.

PTPN I secara konsisten melakukan audit terhadap seluruh pabrik dan kebun yang bertujuan untuk mengetahui asal bahan baku. Audit pemasok juga merupakan bagian dari proses sertifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan. Hasil audit akan dikumpulkan ke dalam data *traceability* dengan mencakup sejumlah informasi yang wajib terpenuhi pemasok. [GRI 308-2]

Saat ini, permintaan data ketertelusuran juga telah mulai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembeli (*buyer*) terhadap transparansi rantai pasok, mencerminkan meningkatnya perhatian pasar terhadap aspek keberlanjutan. [13.23.2]

PTPN I terus menunjukkan komitmen terhadap praktik agribisnis yang berkelanjutan melalui penerapan sistem ketertelusuran internal yang menjadi pondasi dalam memperkuat validitas data asal-usul bahan baku. Capaian tersebut tercermin dalam keberhasilan Perusahaan mencapai 80,00% *traceability to plantation* (TTP) dan 85,71% *traceability to mill* (TTM) pada tahun pelaporan. [GRI 308-1, 308-2]

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan komitmen pada prinsip tata kelola berkelanjutan, PTPN I juga memastikan seluruh anak perusahaan melakukan audit internal secara rutin. Audit ini mencakup penilaian lingkungan serta *due diligence* terhadap pemasok dan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penyedia Barang/Bahan Baku, yang mencakup aspek lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ke depan, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan mekanisme serta sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan menyeluruh dalam hal pelaksanaan ESG *due diligence* dan evaluasi lingkungan secara berkala terhadap seluruh mitra pemasok. [GRI 414-1, 414-2] [F.1]

Upaya Perusahaan dalam menciptakan rantai pasok berkelanjutan terus ditunjang dan ditingkatkan dengan menekankan penerapan praktik-praktik keberlanjutan di rantai pasok Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menetapkan sejumlah target, di antaranya adalah:

1. Meningkatkan *traceability to mill* 100% dan meningkatkan *traceability to plantation* menjadi 100% dan mengukuhkan *traceability* tersebut dengan *assessment* pihak ketiga.
2. Mempertahankan praktik bahwa seluruh (100%) pemasok dan kontraktor menandatangani komitmen akan praktik-praktik keberlanjutan sebagai bagian dari kontrak.
3. Melakukan audit berkala kepada pemasok untuk memastikan kepatuhan akan praktik keberlanjutan

PTPN I consistently conducts audits of all mills and plantations to determine the origin of raw materials. Supplier audits are also part of the certification process conducted by the Company. The audit results are collected into traceability data, which includes a set of information that suppliers must fulfill. [GRI 308-2]

Currently, requests for traceability data have also begun to emerge in order to meet buyers' demands for supply chain transparency, reflecting the market's growing focus on sustainability. [13.23.2]

PTPN I continues to demonstrate its commitment towards sustainable agribusiness practices through the implementation of an internal traceability system, which forms the foundation for strengthening the validity of raw material origin data. This achievement is reflected in the Company's success in reaching 80.00% traceability to plantation (TTP) and 85.71% traceability to mill (TTM) in the reporting year. [GRI 308-1, 308-2]

As a form of compliance with environmental regulations and a commitment to sustainable governance principles, PTPN I also ensures that all subsidiaries conduct regular internal audits. This audit includes environmental assessments and due diligence on suppliers and is conducted based on the Standard Operating Procedures (SOP) for Supplier Evaluation for Goods/Raw Materials, which covers environmental aspects and compliance with applicable regulations. Going forward, the Company is committed to developing a more structured and comprehensive reporting mechanism and system for the implementation of ESG due diligence and periodic environmental evaluations for all supplier partners. [GRI 414-1, 414-2] [F.1]

The Company's efforts to create a sustainable supply chain are continuously supported and enhanced by emphasizing the implementation of sustainability practices across the Company's supply chain. To achieve this, the Company has set several targets, including:

1. Achieving 100% traceability to mill and increase traceability to plantation to 100%, with third-party assessments to validate traceability.
2. Ensure that 100% of suppliers and contractors sign a commitment to sustainability practices as part of their contracts.
3. Conduct regular audits of suppliers to ensure compliance with sustainability practices, prioritizing

tersebut, dengan prioritas kepada *high-risk suppliers* (kurang lebih 20% dari total pemasok) yang akan dimulai di tahun 2025, dimana pada tahun 2030, 100% dari *high-risk suppliers* akan di audit dalam kurun waktu 5 tahun.

high-risk suppliers (approximately 20% of total suppliers), starting in 2025. By 2030, 100% of high-risk suppliers will be audited within a 5-year period.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, PTPN I telah menerapkan berbagai program dan inisiatif, seperti:

To achieve the established targets, PTPN I has implemented various programs and initiatives, such as:

1. Memastikan ketersediaan pemetaan lahan dan dokumen legalitas konsesi PTPN yang terperinci, serta meningkatkan sistem untuk menyertakan pemasok yang memasok bahan baku guna memastikan tidak ada penanaman di area terlarang.
2. Melakukan penilaian terhadap pemasok sesuai dengan standar ESG PTPN sebelum melakukan hubungan bisnis, serta memantau dan mengaudit kinerja keberlanjutan pemasok secara berkala baik secara internal maupun eksternal, terutama mengenai aktivitas deforestasi dan praktik terkait HAM termasuk:
 - a. Kinerja kesehatan dan keselamatan;
 - b. Upah hidup minimum;
 - c. Jam kerja maksimum (40 jam);
 - d. Kebebasan berkumpul dan hak untuk berserikat;
 - e. Tidak ada tenaga kerja anak;
 - f. Kondisi hidup yang dapat diterima;
 - g. Non-diskriminasi;
 - h. Hukuman fisik bagi pekerja; dan
 - i. Pekerja paksa
3. Melanjutkan pembaharuan terhadap sistem pelaporan pemasok dan kontraktor, dan menanggapi 100% aduan terhadap pemasok dan kontraktor terkait kepatuhan prinsip HAM.
4. Melakukan pelatihan kepada pemasok seputar topik keberlanjutan termasuk lingkungan dan HAM, yaitu dengan sosialisasi dan pendidikan intensif terutama kepada petani mandiri, perantara, dan pengepul untuk memastikan bahwa penelusuran atau *traceability* dapat dilakukan.
5. Mensosialisasikan dan mendapatkan komitmen pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kebijakan NDPE yang dipantau langsung oleh Manajerial Bidang Keberlanjutan.
6. Mengembangkan kapabilitas dan kebijakan audit terhadap pemasok dan kontraktor untuk memantau kemajuan resolusi HAM (termasuk memastikan setiap keluhan sedang diatasi oleh PIC masing-masing).
7. Melibatkan pihak ketiga untuk menilai tiap risiko dan kinerja HAM di perkebunan.

1. Ensure the availability of detailed land mapping and concession legality documents for PTPN, as well as enhance the system to include suppliers who provide raw materials, ensuring that no planting occurs in prohibited areas.
2. Conduct assessments of suppliers in accordance with PTPN's ESG standards before entering into business relationships, and regularly monitor and audit the sustainability performance of suppliers both internally and externally, particularly regarding deforestation activities and human rights-related practices, including::
 - a. Occupational health and safety performance;
 - b. Minimum living wage;
 - c. Maximum working hours (40 hours);
 - d. Freedom of association and the right to unionize;
 - e. No child labor;
 - f. Decent living conditions;
 - g. Non-discrimination;
 - h. No physical punishment of workers; and
 - i. No forced labor
3. Continue improving the reporting system for suppliers and contractors, and respond to 100% of complaints related to supplier and contractor compliance with human rights principles.
4. Provide training to suppliers on sustainability topics, including environmental and human rights issues, through awareness programs and intensive education, particularly for independent farmers, intermediaries, and aggregators to ensure traceability can be achieved.
5. Communicate and secure the commitment of suppliers and contractors to comply with the NDPE policy, which is directly monitored by the Sustainability Management Division.
6. Develop audit capabilities and policies for suppliers and contractors to monitor progress in resolving human rights issues (including ensuring that each complaint is being addressed by the designated PIC).
7. Engage third parties to assess human rights risks and performance in the plantations.



04

Kinerja Lingkungan yang Bertanggung Jawab

Responsible Environmental Performance





Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Environmental Management Policy

Dalam pengelolaan lingkungan, PTPN I telah menjadikan sejumlah peraturan dan kebijakan sebagai pedoman dalam menjaga keberlanjutan. Peraturan dan kebijakan tersebut didasarkan pada regulasi yang mencakup: [GRI 3-3]

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), yang diubah dengan UU Ciptaker No 11 Tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap penerapan berkelanjutan, PTPN I tidak hanya berpedoman pada regulasi yang berlaku secara di Indonesia, tetapi juga mengacu pada berbagai sertifikasi nasional dan internasional yang relevan. Hal ini PTPN I lakukan untuk memastikan bahwa operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan standar keberlanjutan yang tinggi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Beberapa sertifikasi yang telah Perusahaan adopsi antara lain:

- ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) adalah standar internasional sebagai upaya Perusahaan untuk memastikan kualitas dan mutu produk guna menjaga kepercayaan pelanggan.
- ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) adalah standar internasional yang membantu Perusahaan

In managing the environment, PTPN I adheres to a number of regulations and policies as guidelines to ensure sustainability. These regulations and policies are based on applicable laws, including: [GRI 3-3]

- Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Law No. 32/2009), amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.
- Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2014 on Industry.
- Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 on Energy.
- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 on the Management of Hazardous and Toxic Waste.
- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 on Environmental Permits.
- Government Regulation No. 20 of 1990 on Water Pollution Control.
- Decree of the State Minister for the Environment No. 111 of 2003 on Guidelines for the Requirements and Procedures for Licensing and Assessment of Wastewater Discharge into Water or Water Sources.
- Regulation of the State Minister for the Environment No. 01 of 2010 on Procedures for Water Pollution Control.

As part of its commitment to sustainable implementation, PTPN I not only follows applicable national regulations but also refers to various relevant national and international certifications. This ensures that the Company's operations are aligned with high sustainability standards and contribute positively to the environment and society. The certifications adopted by the Company include:

- ISO 9001 (Quality Management System): An international standard to ensure the quality and consistency of products in order to maintain customer trust.
- ISO 14001 (Environmental Management System): An international standard that helps the Company

mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasional dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

- *International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)* adalah sertifikasi yang memastikan bahwa produk, seperti bioenergi dan bahan baku pertanian, diproduksi secara berkelanjutan dan memenuhi standar pengurangan emisi karbon serta keberlanjutan lingkungan dan sosial.
- *Rainforest Alliance* adalah sertifikasi untuk keberlanjutan produksi dengan memperhatikan aspek masyarakat sekitar hutan, petani, dan pasar komoditas untuk mendukung keberlanjutan usaha.
- Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yaitu program pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan tujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.
- *ISO 14064 Greenhouse Gas Emission* adalah standar internasional yang digunakan oleh Perusahaan untuk perhitungan, pelaporan, dan verifikasi emisi serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Selain menerapkan berbagai regulasi dan sertifikasi yang relevan, Perusahaan juga menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan. Hal ini tercermin dalam pengelolaan konsumsi energi, emisi, air, limbah cair, serta berbagai jenis limbah dengan mengacu pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). PTPN I berkomitmen untuk terus mengoptimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional, sehingga dapat berkontribusi pada keberlanjutan yang lebih baik.

manage the environmental impacts of its operations and comply with environmental regulations.

- *International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)*: A certification that ensures products such as bioenergy and agricultural raw materials are produced sustainably and meet carbon emission reduction and environmental and social sustainability standards.
- *Rainforest Alliance Certification*: A sustainability certification that supports sustainable production practices, focusing on local forest communities, farmers, and commodity markets.
- *Corporate Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER)*: A supervisory program from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia aimed at encouraging industry compliance with environmental regulations.
- *ISO 14064 Greenhouse Gas Emission* is an international standard used by the Company for the calculation, reporting, and verification of greenhouse gas (GHG) emissions and emission reductions.

In addition to implementing relevant regulations and certifications, the Company also demonstrates its commitment to the environment through environmentally friendly office operations. This is reflected in the management of energy consumption, emissions, water, liquid waste, and various types of waste, guided by the 3R principles (*Reduce, Reuse, Recycle*). PTPN I is committed to continuously optimizing resource efficiency and minimizing the environmental impact of its operational activities, thereby contributing to better sustainability outcomes.

Manajemen Irigasi Pertanian, Regional 8 Agricultural Irrigation Management, Region 8



Manajemen Energi

Energy Management

Energi memegang peranan penting dalam mendukung operasional Perusahaan, sehingga pengelolaannya yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi dampak lingkungan. PTPN I mengandalkan dua jenis energi utama dalam operasionalnya, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penerangan pabrik dan kantor, pengoperasian mesin di pabrik, serta untuk peralatan lainnya seperti mesin pendingin udara dan fotokopi. Di sisi lain, BBM yang digunakan terdiri dari bensin dan solar, yang digunakan untuk mengoperasikan mesin pabrik serta kendaraan operasional. [GRI 3-3]

Energy plays a vital role in supporting the Company's operations; hence, its efficient and sustainable management is key to reducing environmental impact. PTPN I relies on two main types of energy: electricity and fuel (oil-based). Electricity is used for various purposes, including mill and office lighting, machinery operation, and equipment such as air conditioners and photocopiers. On the other hand, fuel, consisting of gasoline and diesel is used to operate mill machinery and company vehicles. [GRI 3-3]

Pengawasan Panel Pabrik, Regional 8
Factory Panel Monitoring, Region 8



Tabel Penggunaan Energi [GRI 302-1, 302-2] [F.6]
Energy Usage Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Energi Terbarukan Renewable Energy [B.1.d]				
Listrik dari PLTBm Electricity from Biomass Power Plants (PLTBm)	GJ	655.340	452.912	1.088.00
Listrik dari PLTBg Electricity from Biogas Power Plants (PLTBg)	GJ	-	27.660	24.200
Listrik dari PLTA Electricity from Hydropower Plants (PLTA)	GJ	2.040	-	-
Total Energi Terbarukan Total Renewable Energy	GJ	657.380	480.572	1.112.200
Energi Non-Terbarukan Non-Renewable Energy				
Listrik PLN Electricity from State Power Company (PLN)	GJ	156.592	164.607	208.500
Bensin Gasoline	GJ	6.045	13.110	11.800
Solar Diesel	GJ	245.000	184.771	159.800
Genset Generator	GJ	-	-	-
Total Energi Non Terbarukan Total Non-Renewable Energy	GJ	407.637	362.488	389.600
Total Energi Total Energy	GJ	1.065.017	843.060	1.492.300
Total % Penggunaan Energi Terbarukan Percentage of Renewable Energy Use	%	62	57	75

Catatan:

1. Biomassa: meteran kWh dari turbin pembangkit/PLTBm (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
2. PLTBg: berdasarkan kWh meter dari generator (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
3. PLTA: diperoleh dari angka kWh meter (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
4. Listrik PLN: diukur dari *flow meter* listrik yang digunakan pada operasional (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
5. Bensin: penggunaan bensin dalam liter yang diperoleh dari data

Notes:

1. Biomass: kWh meter reading from turbine generator/PLTBm (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
2. PLTBg: based on kWh meter from generator (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
3. PLTA: obtained from kWh meter readings (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
4. PLN electricity: measured using electricity flow meters in operations (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
5. Gasoline: gasoline usage in liters obtained from operational data

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan penggunaan energi sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun konsumsi energi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, proporsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi justru menunjukkan tren positif. Bauran EBT meningkat dari 57% pada tahun 2023 menjadi 62% pada tahun 2024.

Intensitas Energi [F.6]

Sebagai bagian dari upaya PTPN I dalam mengukur dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, Perusahaan secara rutin menghitung intensitas energi sebagai indikator kinerja. Intensitas energi dihitung dengan membagi total penggunaan energi yang dikonsumsi Perusahaan dalam satuan GJ (Gigajoule) dengan total volume produk yang dihasilkan dalam satuan ton. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan untuk memantau seberapa efisien energi digunakan dalam setiap unit produk yang dihasilkan, serta mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsumsi energi lebih lanjut. Hasil perhitungan intensitas energi untuk periode ini dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan perkembangan efisiensi energi PTPN I dari waktu ke waktu dan sebagai dasar untuk perencanaan langkah-langkah penghematan energi yang lebih efektif di masa depan. [GRI 302-3]

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Total Penggunaan Energi Total Energy Consumption	GJ	1.065.017	843.060	1.492.300
Total Volume Produk Akhir Total Final Product Volume	Ton	425.460	951.461	1.500.000
Intensitas Energi Energy Intensity	GJ/Ton	2,50	0,89	0,99

Inisiatif Efisiensi Energi [F.7]

Efisiensi operasional merupakan fokus utama dalam memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan Perusahaan. Upaya ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, penerapan inovasi produk, serta pengembangan layanan berkelanjutan yang mendukung profitabilitas jangka panjang. Penghematan bahan bakar juga menjadi perhatian penting, mengingat manfaatnya yang tidak hanya berperan dalam pelestarian sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya produksi. Hal ini pada akhirnya mendukung keberlanjutan lingkungan serta memperkuat kesinambungan usaha PTPN I dalam jangka panjang, sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk menjaga kelestarian alam dan mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas.

In 2024, energy consumption increased by 26% compared to 2023. Despite this significant growth, the share of renewable energy in the overall energy mix continued to show a positive trend. The proportion of renewable energy rose from 57% in 2023 to 62% in 2024, indicating a strong commitment to sustainable and environmentally friendly energy sources.

Energy Intensity [F.6]

As part of its efforts to measure and improve energy efficiency, PTPN I routinely calculates energy intensity as a key performance indicator. Energy intensity is determined by dividing the total energy consumed by the Company (in GJ) by the total volume of products produced (in tons). This approach enables the Company to monitor how efficiently energy is used per unit of product and to identify further opportunities for reducing energy consumption. The energy intensity calculations for the reporting period are presented in the table below, showing the development of PTPN I's energy efficiency over time and providing a basis for planning more effective energy-saving initiatives in the future. [GRI 302-3]

Energy Efficiency Initiatives [F.7]

Operational efficiency remains a key focus in strengthening competitiveness and ensuring the long-term sustainability of the Company. These efforts are achieved through more effective resource management, the implementation of product innovations, and the development of sustainable services that support long-term profitability. Fuel savings are also a priority, as they not only contribute to conserving natural resources but also improve production cost efficiency. Ultimately, this supports environmental sustainability and strengthens PTPN I's long-term business continuity, in line with the Company's commitment to environmental preservation and broader sustainability goals.

Meskipun pada tahun pelaporan Perusahaan belum melakukan perhitungan rinci mengenai pengurangan energi yang diperlukan untuk produk dan layanan, PTPN I tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi energi dalam seluruh operasionalnya. Perusahaan telah menetapkan berbagai inisiatif strategis untuk mencapai tujuan ini, yang mencakup upaya pengelolaan energi yang lebih baik dan penggunaan teknologi yang lebih efisien. Inisiatif ini akan terus dikembangkan untuk memastikan bahwa operasional PTPN I semakin ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. Adapun inisiatif yang telah dilakukan PTPN I antara lain: [GRI 302-4, 302-5]

1. Praktik daur ulang tebu giling dan ampas sebagai bahan bakar untuk suplai listrik dan penggerak mesin pada proses pengolahan.
2. Pemanfaatan *woodchips* untuk *start* olah di pabrik gula sebagai pengganti bahan bakar residu.
3. Pemanfaatan *woodchips* untuk pelayuan dan pengeringan teh di pabrik teh.
4. Pemanfaatan BioCNG pada beberapa pabrik teh sejak tahun 2023.
5. Pemanfaatan listrik dari PLTA/PLTMh di beberapa pabrik teh.
6. Pemanfaatan sisa cangkang dari proses pengolahan pabrik kelapa sawit sebagai bahan bakar pengganti dalam proses pengolahan di Pabrik Karet SIR 20 yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2013. Langkah pertama yang diambil adalah mengganti mesin *dryer* yang semula menggunakan bahan bakar solar dengan mesin yang menggunakan cangkang sebagai bahan bakar alternatif.
7. Menggunakan peralatan elektronik hemat energi, menggunakan lampu, dan piranti elektronik secara efisien dan bertanggung jawab.
8. Melakukan sosialisasi hemat energi dengan pemasangan stiker pengingat yang tersedia di dekat saklar lampu atau mesin.

Although the Company has not yet conducted a detailed calculation of energy reductions required for its products and services during the reporting year, PTPN I remains committed to continuously enhancing energy efficiency across all operations. The Company has established various strategic initiatives to achieve this goal, including improved energy management and the use of more efficient technologies. These initiatives will continue to be developed to ensure that PTPN I's operations become increasingly environmentally friendly, efficient, and sustainable in the future. The initiatives undertaken by PTPN I include: [GRI 302-4, 302-5]

1. Recycling crushed sugarcane and bagasse as fuel for electricity supply and machinery during the processing stage.
2. Utilizing woodchips for initial processing in the sugar mill as a substitute for residual fuel.
3. Utilization of woodchips for withering and drying processes in tea factories.
4. Use of BioCNG in several tea processing facilities since 2023.
5. Use of electricity generated from hydropower plants (PLTA/PLTMh) in several tea factories.
6. Reusing leftover palm oil shell waste as an alternative fuel source in the processing of SIR 20 rubber, gradually implemented since 2013. The initial step involved replacing the dryer machine, which originally operated on diesel fuel, with a unit powered by palm kernel shells as a more sustainable energy source.
7. Using energy-efficient electronic equipment, operating lighting, and electronic devices responsibly.
8. Promoting energy-saving awareness through the installation of reminder stickers near light switches and machinery.

Operator Panel Kendali, Regional 8
Control Panel Operator, Region 8



Relevansi Perubahan Iklim dan Industri Perusahaan

Relevance of Climate Change to the Company's Industry

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendalam, dengan dampak yang luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan berbagai sektor industri, termasuk perkebunan. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi menyebabkan kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, serta ancaman terhadap keragaman hayati dan ekosistem vital. Sektor perkebunan sangat terpengaruh oleh perubahan pola cuaca, seperti suhu ekstrem yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, kekeringan yang lebih lama yang mengurangi ketersediaan air, serta curah hujan yang tidak menentu yang dapat mengganggu jadwal tanam dan panen. Perubahan ini dapat mengurangi hasil panen, merusak kualitas tanaman, dan memperburuk penyebaran penyakit serta hama yang semakin sulit dikendalikan, sehingga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi ketahanan pangan.

Selain itu, sektor perkebunan juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama melalui deforestasi untuk pembukaan lahan baru dan penggunaan pupuk serta pestisida yang berlebihan. Aktivitas ini melepaskan emisi CO₂, N₂O, dan CH₄ ke atmosfer dan memperburuk pemanasan global. Penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan, misalnya, dapat meningkatkan emisi nitrogen oksida yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, untuk memitigasi dampak perubahan iklim, Perusahaan perlu segera beradaptasi dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, penggunaan teknologi efisien dalam irigasi dan pemupukan, serta peningkatan ketahanan tanaman terhadap kondisi iklim yang semakin tidak menentu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dampak perubahan iklim ini akan semakin membebani Perusahaan, mengurangi daya saingnya, dan merugikan ekonomi dalam jangka panjang.

Tata Kelola Perubahan Iklim

PTPN I berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dengan mengelola kinerja di aspek ESG, dengan fokus utama pada pengelolaan risiko perubahan iklim yang diidentifikasi sebagai isu signifikan bagi Perusahaan. Di bawah pengawasan Direksi, Perusahaan

Climate change is a profound global challenge with far-reaching impacts on human life, the environment, and various industrial sectors, including plantations. Human activities such as the burning of fossil fuels, deforestation, and pollution have led to rising global temperatures, extreme weather pattern shifts, and threats to biodiversity and vital ecosystems. The plantation sector is particularly vulnerable to changing weather patterns, including extreme temperatures that hinder plant growth, prolonged droughts that reduce water availability, and unpredictable rainfall that disrupts planting and harvesting schedules. These changes may reduce crop yields, damage plant quality, and exacerbate the spread of diseases and pests that are increasingly difficult to control, leading to higher production costs and reduced food security.

Moreover, the plantation sector contributes to greenhouse gas (GHG) emissions, primarily through deforestation for land clearing and the excessive use of fertilizers and pesticides. These activities release CO₂, N₂O, and CH₄ into the atmosphere, further aggravating global warming. For instance, excessive nitrogen fertilizer use increases nitrous oxide emissions, which are highly harmful to the environment. Therefore, to mitigate the effects of climate change, the Company must promptly adopt sustainable agricultural practices, such as environmentally friendly land management, efficient irrigation and fertilization technologies, and enhancing crop resilience to increasingly unpredictable climate conditions. Failure to properly address these issues will impose further burdens on the Company, reduce its competitiveness, and harm the economy in the long term.

Climate Change Governance

PTPN I is committed to implementing sustainability principles by managing performance in ESG aspects, with a primary focus on climate change risk management, which has been identified as a significant issue for the Company. Under the supervision of the Board of Directors, the

telah menetapkan tujuan dan strategi untuk mengurangi dampak risiko iklim serta menekan emisi yang timbul dari operasional. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam setiap aspek operasional Perusahaan. [GRI 2-12]

Untuk mendukung penerapan strategi keberlanjutan, PTPN I membentuk Divisi Manajemen Risiko & Sustainability yang bertugas memantau dan mengukur kinerja lingkungan, serta melaksanakan strategi pengelolaan risiko perubahan iklim. Perusahaan juga telah menetapkan prosedur pengelolaan perubahan cuaca ekstrem dan dampak lingkungan lainnya, yang memastikan tindakan pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan pemulihan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif. Melalui upaya ini, PTPN I berkomitmen untuk menjaga ketahanan operasional dan memastikan keberlanjutan jangka panjang Perusahaan dalam menghadapi tantangan lingkungan. [GRI 2-13]

Sebagai bentuk pengawasan terhadap risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan, Dewan Komisaris menjalankan perannya dengan memberikan arahan strategis serta memastikan bahwa kebijakan keberlanjutan telah terintegrasi ke dalam rencana kerja Perusahaan. Evaluasi terhadap kinerja keberlanjutan dilakukan melalui audit internal maupun penilaian eksternal, yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam prosesnya, Dewan Komisaris senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan. [GRI 2-12]

Untuk memastikan bahwa Direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material dalam meninjau, memantau, serta membimbing praktik tata kelola, strategi, dan sistem pengendalian internal, PTPN I telah menetapkan kriteria dampak risiko yang mencakup aspek HSSE (*Health, Safety, Security, and Environmental*) serta aspek sosial. Kriteria ini mencakup potensi terjadinya kerusakan lingkungan maupun penurunan skor ESG, sehingga Perusahaan diharapkan mampu mengelola dinamika risiko yang mungkin timbul di masa mendatang. Selain itu, setiap aksi korporasi yang berdampak terhadap keberlanjutan telah diidentifikasi secara komprehensif dalam kerangka pengelolaan risiko berbasis HSSE, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Company has established goals and strategies to mitigate climate-related risks and reduce emissions arising from operations. These efforts aim to minimize environmental impact while improving efficiency and sustainability across all aspects of the Company's operations. [GRI 2-12]

To support the implementation of its sustainability strategy, PTPN I has established a Risk Management & Sustainability Division responsible for monitoring and measuring environmental performance and implementing climate change risk management strategies. The Company has also developed procedures for managing extreme weather changes and other environmental impacts, ensuring that prevention, response, mitigation, and recovery actions are carried out in a coordinated and effective manner. Through these efforts, PTPN I is committed to maintaining operational resilience and ensuring long-term business sustainability in the face of environmental challenges. [GRI 2-13]

As part of its oversight of sustainability-related risks and opportunities, the Board of Commissioners carries out its role by providing strategic direction and ensuring that sustainability policies are integrated into the Company's business plans. The evaluation of sustainability performance is conducted through both internal audits and external assessments, with the results serving as a key consideration in strategic decision-making. Throughout this process, the Board of Commissioners strives to maintain a balance between economic performance and the company's social and environmental responsibilities. [GRI 2-12]

To ensure that the Board of Directors takes material sustainability risks and opportunities into account when reviewing, monitoring, and guiding governance practices, strategies, and internal control systems, PTPN I has established risk impact criteria that include Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) aspects, as well as social considerations. These criteria address the potential for environmental damage and the risk of declining ESG scores, enabling the company to effectively manage future risk dynamics. In addition, every corporate action that may impact sustainability is comprehensively identified within an HSSE-based risk management framework, supporting more responsible and sustainable decision-making.

Strategi dan Manajemen Risiko Perubahan Iklim

PTPN I telah mengembangkan strategi komprehensif untuk mengelola risiko perubahan iklim dengan fokus pada pengurangan emisi GRK, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Perusahaan mengacu pada kerangka rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkapkan informasi terkait risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim. Selain itu, PTPN I secara rutin melakukan analisis risiko perubahan iklim yang spesifik, baik yang terkait dengan risiko fisik seperti cuaca ekstrem, maupun risiko transisi terkait dengan peraturan dan kebijakan lingkungan yang semakin ketat. Berdasarkan rekomendasi TCFD risiko perubahan iklim dibagi menjadi:

Climate Change Strategy and Risk Management

PTPN I has developed a comprehensive strategy to manage climate change risks, focusing on reducing GHG emissions, utilizing renewable energy, and managing resources efficiently. The Company refers to the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) to enhance transparency and accountability in disclosing risks and opportunities associated with climate change. Additionally, PTPN I routinely conducts specific climate risk analyses, addressing both physical risks such as extreme weather and transition risks related to increasingly stringent environmental regulations and policies. According to the TCFD, climate change risks are categorized as follows:



Risiko Fisik Physical Risks

Risiko terkait dampak fisik perubahan iklim dapat dipicu oleh peristiwa yang bersifat sementara (akut) maupun perubahan jangka panjang (kronis).

1. Akut; dan
2. Kronis.

Risks related to the physical impacts of climate change, triggered by both temporary (acute) events and long-term (chronic) changes

1. Acute; and
2. Chronic.



Risiko Transisi Transition Risks

Risiko yang dapat menimbulkan dampak finansial dan reputasi bagi perusahaan terkait perubahan kebijakan, regulasi, teknologi, dan pasar yang mungkin terjadi dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

1. Kebijakan dan legal;
2. Teknologi;
3. Pasar; dan
4. Reputasi.

Risks that could lead to financial and reputational impacts on the Company, associated with changes in policy, regulation, technology, and markets during the transition to a low-carbon economy.

1. Policy and legal;
2. Technology;
3. Market; and
4. Reputation.

Berikut merupakan identifikasi potensi dampak dan risiko perubahan iklim terhadap Perusahaan:

The following table outlines the potential impacts and risks of climate change for the Company:

Risiko Risk	Dampak Potensial Potential Impact	Waktu Time Frame
Risiko Fisik	Kerusakan langsung maupun tidak langsung pada aset termasuk: 1. Operasi, misalnya cuaca ekstrem mempengaruhi produksi, rantai pasokan, kesehatan, dan keselamatan; dan 2. Rantai nilai, misalnya ketersediaan air mempengaruhi sumber dan kualitas bahan baku.	1. Risiko akut sudah terjadi saat ini dan diperkirakan tingkat keparahan dan frekuensi akan meningkat; dan 2. Risiko kronis lebih mungkin terjadi dalam jangka panjang, dalam pertengahan abad dan seterusnya.
Physical Risk	Direct and indirect damage to assets, including: 1. Operations (e.g., extreme weather affecting production, supply chains, health, and safety); and 2. Value chains (e.g., water availability affecting raw material sourcing and quality).	1. Acute risks are currently occurring, with expected increases in severity and frequency; and 2. Chronic risks are more likely to occur in the long term (mid-century onward).
Risiko Transisi	Bergantung pada sifat transisi dan khususnya pada kecepatan transisi. Selain itu, terdapat berbagai tingkat risiko keuangan dan reputasi, termasuk: 1. Pendapatan berkurang karena permintaan dan preferensi konsumen berubah; 2. Peningkatan biaya dalam menjalankan bisnis; 3. Dampak pada nilai aset; dan 4. Keuangan aset berwujud dan tidak berwujud.	Waktu dan kecepatan tidak pasti dan lebih mungkin dalam jangka pendek hingga menengah.
Transition Risk	Depending on the nature and especially the pace of transition, various levels of financial and reputational risks may arise, including: 1. Revenue decline due to changing consumer demand and preferences; 2. Increased operational costs; 3. Impacts on asset value; and 4. Financial risk to tangible and intangible assets.	Timing and pace are uncertain but more likely to occur in the short- to medium-term.

PTPN I telah melakukan penilaian dampak potensial dalam jangka waktu pada setiap potensi risiko dan peluang yang telah diidentifikasi. Jangka waktu tersebut terbagi menjadi:

- Pendek: 0 – 3 tahun
- Menengah: 3 – 5 tahun
- Panjang: >5 tahun

PTPN I telah mengidentifikasi potensi risiko perubahan iklim dan merumuskan strategi mitigasi untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan operasional Perusahaan. Strategi ini mencakup pemantauan penerapan langkah-langkah mitigasi dan transparansi terkait potensi risiko

PTPN I has assessed the potential impacts over the following time horizons for each identified risk and opportunity:

- Short-term: 0–3 years
- Medium-term: 3–5 years
- Long-term: >5 years

PTPN I has identified potential climate risks and formulated mitigation strategies to ensure operational resilience and sustainability. These strategies include monitoring the implementation of mitigation measures and maintaining transparency regarding emerging risks and their impact

baru serta dampaknya terhadap operasional Perusahaan. PTPN I secara aktif mengungkapkan perkembangan terkait risiko iklim dan tindakan mitigasi yang diterapkan, yang mencakup berbagai sektor operasional untuk mengurangi dampak negatif. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, menjaga kelangsungan operasional, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Hasil identifikasi risiko iklim serta aksi mitigasi tersaji dalam tabel berikut: [GRI 3-3] [GRI 201-2] [13.2.1]

on operations. The Company actively discloses progress related to climate risks and mitigation actions, covering various operational sectors to reduce negative impacts. These efforts reflect the Company's commitment to climate adaptation, operational continuity, and long-term sustainability. The identified climate risks and mitigation actions are presented in the following table: [GRI 3-3] [GRI 201-2] [13.2.1]

Risiko Risk	Uraian Description	Jangka Waktu Time Horizon	Dampak Finansial Financial Impact	Aksi Mitigasi Mitigation Action
Risiko Fisik: Kronis Perubahan Pola Cuaca	Risiko yang berdampak pada kualitas hasil panen diakibatkan oleh perubahan pola cuaca.	Pendek ke menengah	- Penurunan pendapatan akibat penurunan kapasitas produksi; dan - Meningkatnya harga pokok penjualan akibat kelangkaan bahan baku.	Membuat rorak atau embung untuk menjaga persediaan air.
Physical Risk: Chronic – Changes in Weather Patterns	Risks affecting crop quality due to changes in weather patterns.	Short to medium term	- Revenue decline due to reduced production capacity; and - Increased cost of goods sold due to raw material scarcity.	Constructing <i>rorak</i> (water infiltration pits) or reservoirs to maintain water availability.
Risiko Fisik: Kronis Kenaikan Suhu	Risiko yang berdampak pada produktivitas tanaman, menyebabkan perubahan masa tanam dan panen, ataupun menyebabkan munculnya hama atau penyakit pada tanaman.	Menengah ke panjang	Penurunan pendapatan akibat penurunan kapasitas produksi.	- Melakukan pengendalian hama terpadu dengan membuat program penanaman tanaman bunga pukul depalan (<i>Turnera subulata</i>) dan bunga air mata pengantin (<i>Antigonon leptopus</i>); dan - Melakukan pengamatan terhadap potensi ledakan populasi hama.
Physical Risk: Chronic – Rising Temperatures	Risks impacting plant productivity, such as changes in planting and harvest periods or emergence of pests and plant diseases.	Medium to long term	Revenue decline due to reduced production capacity.	- Implementing integrated pest control by initiating planting programs of <i>Turnera subulata</i> and <i>Antigonon leptopus</i>; and - Monitoring potential pest population outbreaks.

Risiko Risk	Uraian Description	Jangka Waktu Time Horizon	Dampak Finansial Financial Impact	Aksi Mitigasi Mitigation Action
Risiko Fisik: Akut Cuaca Ekstrem	Risiko yang berdampak pada fasilitas atau kegiatan operasional akibat cuaca ekstrem seperti banjir, angin topan, atau badai.	Pendek ke menengah	Meningkatnya biaya operasional tidak langsung karena kebutuhan mengasuransikan aset perusahaan dari dampak cuaca ekstrem.	- Melakukan simulasi tanggap darurat bencana alam; - Membentuk tim tanggap darurat; dan - Memastikan personel tim tanggap darurat mengikuti pelatihan.
Physical Risk: Acute – Extreme Weather Events	Risks affecting facilities or operations due to extreme weather events such as floods, cyclones, or storms.	Short to medium term	Increased indirect operational costs due to the need for insurance coverage on company assets.	- Conducting emergency response drills for natural disasters; - Establishing an emergency response team; and - Ensuring that emergency response personnel receive proper training.
Risiko Transisi: Perubahan Regulasi	Peningkatan perhatian terhadap iklim secara global, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru untuk aksi iklim.	Pendek	Meningkatnya biaya operasional karena biaya pajak yang lebih tinggi terkait dengan penggunaan energi tidak terbarukan.	- Melakukan program penurunan emisi GRK (pengurangan solar, penghematan listrik, melakukan <i>selective weeding</i>, melakukan penanaman tanaman konservasi); dan - Melakukan substitusi pupuk kimia dengan organik (tandan kosong).
Transition Risk: Regulatory Changes	Due to increased global focus on climate, governments issue new policies and regulations for climate action.	Short term	Increased operational costs due to higher taxes related to the use of non-renewable energy.	- Implementing GHG emission reduction programs (diesel reduction, electricity savings, selective weeding, planting conservation crops); and - Substituting chemical fertilizers with organic fertilizers (empty fruit bunches).
Risiko Transisi: Peningkatan Persyaratan Pelanggan	Risiko yang timbul akibat adanya perubahan preferensi pelanggan ke arah produk rendah emisi.	Pendek	Berkurangnya pendapatan akibat penurunan permintaan barang.	Melakukan perhitungan emisi GRK melalui sertifikasi ISCC
Transition Risk: Increased Customer Requirements	Risks arising from changes in customer preferences toward low-emission products.	Short term	Reduced revenue due to decreased demand for products.	Calculating GHG emissions through ISCC certification.

Risiko Risk	Uraian Description	Jangka Waktu Time Horizon	Dampak Finansial Financial Impact	Aksi Mitigasi Mitigation Action
Risiko Transisi: Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan oleh publikasi negatif atas kegiatan usaha Perusahaan perihal kepatuhan terhadap regulasi perubahan iklim.	Pendek	Meningkatnya biaya operasional tidak langsung untuk menyelesaikan kasus hukum atau publikasi negatif.	Mengimplementasikan seluruh persyaratan prinsip dan kriteria ISCC untuk mengurangi isu negatif terkait dengan perubahan iklim.
Transition Risk: Reputation	Risks caused by negative publicity regarding the Company's compliance with climate change regulations.	Short term	Increased indirect operational costs for resolving legal cases or negative publicity.	Implementing all ISCC principles and criteria to minimize negative issues related to climate change.

Dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang terkait perubahan iklim, Perusahaan juga merujuk pada Profil Risiko Korporat, khususnya kategori Risiko Degradasi Kualitas Lingkungan dan Sosial, di mana perubahan iklim diakui sebagai salah satu pemicu utama. Risiko ini muncul apabila pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan secara berkelanjutan, yang dapat menimbulkan dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang terhadap lingkungan, keberlangsungan operasional perusahaan, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perusahaan telah melaksanakan sejumlah inisiatif, antara lain:

- Himbauan penanaman pohon kepada seluruh regional;
- Monitoring implementasi *Early Warning System* (EWS) melalui *Control Tower Dashboard* (CTD) bersama Holding Perkebunan;
- Instalasi sarana dan prasarana tanggap darurat;
- Pelaksanaan uji kualitas lingkungan sesuai dengan RKL/RPL di masing-masing unit usaha; dan
- Internalisasi *Sustainability Policy* sebagai pedoman pengelolaan risiko dan peluang berkelanjutan.

In identifying and managing risks and opportunities related to climate change, the Company also refers to its Corporate Risk Profile, particularly the category of Environmental and Social Quality Degradation Risk, in which climate change is recognized as a key contributing factor. This risk may arise if natural resources are not managed sustainably, potentially causing both short- and long-term negative impacts on the environment, business continuity, and relationships with stakeholders.

To mitigate these risks, the Company has implemented several initiatives, including:

- Encouraging tree planting across all regional offices;
- Monitoring the implementation of the Early Warning System (EWS) through the Control Tower Dashboard (CTD) in collaboration with the Plantation Holding;
- Installing emergency response infrastructure and equipment;
- Conducting environmental quality testing in accordance with the Environmental Management and Monitoring Plans (RKL/RPL) at each business unit; and
- Internalizing the Sustainability Policy as a guideline for managing sustainability-related risks and opportunities.

Saat ini, Perusahaan belum melakukan penilaian secara rinci terkait implikasi finansial akibat perubahan iklim. Namun, PTPN I menyadari pentingnya hal tersebut dan berkomitmen untuk melakukan analisis kuantitatif yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan iklim, termasuk potensi risiko fisik dan transisi yang dapat mempengaruhi kinerja finansial Perusahaan. Ke depan, Perusahaan akan memprioritaskan aksi mitigasi yang dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan merinci kegiatan yang mendukung implementasi mitigasi tersebut. Dengan langkah-langkah ini, PTPN I bertujuan untuk meningkatkan ketahanan Perusahaan terhadap risiko perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan operasional dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. [GRI 201-2] [13.2.2] [E.5]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, PTPN I merujuk pada PTPN III sebagai *Holding* Perkebunan Nusantara (PTPN Group) dalam merumuskan *roadmap* dekarbonisasi, dengan tujuan untuk mengurangi 48% emisi GRK pada tahun 2030, menggunakan tahun 2021 sebagai *baseline*. Perusahaan memahami pentingnya kontribusi PTPN I terhadap pengurangan emisi global dan telah menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapai target ini. Beberapa langkah yang akan Perusahaan lakukan mencakup: [F.12]

1. Memperluas pembangunan fasilitas dengan teknologi “zero POME” untuk penangkapan emisi metana dari limbah cair POME, di mana biogas yang dihasilkan digunakan untuk pembakaran di boiler (*Co-Firing*), pembangkitan listrik (PLTBg), dan dikompresi menjadi BioCNG.
2. Eksplorasi langkah lain seperti pembangkitan listrik dengan tenaga surya dan angin, penggunaan biodiesel dengan *grade* yang lebih tinggi (B35/B40), elektrifikasi kendaraan operasi, serta investasi peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi proses produksi.
3. Meningkatkan pengelolaan lahan gambut dengan *water management* melalui pembuatan kanal di dalam kebun dan pintu air di sisi luar kebun untuk mengatur ketinggian kedalaman gambut di dalam air.
4. Mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan memanfaatkan TBK dan POME sebagai pupuk organik.

Currently, the Company has not yet conducted a detailed assessment of the financial implications of climate change. However, PTPN I acknowledges the importance of this matter and is committed to conducting more in-depth quantitative analysis regarding the impact of climate change, including potential physical and transition risks that may affect the Company’s financial performance. Moving forward, the Company will prioritize mitigation actions to reduce the negative impacts of climate change and elaborate on activities that support the implementation of such mitigation. Through these efforts, PTPN I aims to enhance corporate resilience against climate-related risks, ensure operational sustainability, and create long-term sustainable value. [GRI 201-2] [13.2.2] [E.5]

As part of its sustainability commitment, PTPN I refers to PTPN III, the parent company of the PTPN Group, in formulating a decarbonization roadmap aimed at reducing 48% of GHG emissions by 2030, using 2021 as the baseline year. The Company recognizes the importance of contributing to global emission reduction and has outlined concrete steps to achieve this target. These include: [F.12]

1. Expanding the development of “zero POME” technology facilities for capturing methane emissions from POME wastewater, where the resulting biogas is used for co-firing in boilers, electricity generation (biogas power plants), and compression into BioCNG.
2. Exploring other initiatives such as solar and wind power generation, use of higher-grade biodiesel (B35/B40), electrification of operational vehicles, and investing in modern equipment to improve production process efficiency.
3. Improving peatland management through water management systems by constructing canals within plantations and installing water gates around the perimeters to regulate peat water levels.
4. Reducing chemical fertilizer use by utilizing empty fruit bunches (EFB) and POME as organic fertilizers.

Manajemen Emisi ^[F.11]

Emission Management

PTPN I menyadari bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) memiliki peran besar dalam pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Kegiatan operasional Perusahaan, seperti pengelolaan perkebunan, pengolahan di pabrik, dan persiapan penggunaan lahan, berpotensi menghasilkan emisi GRK. Selain itu, penggunaan listrik dari jaringan nasional juga turut menyumbang terhadap emisi tersebut. Tak kalah penting, rantai pasok serta perjalanan bisnis karyawan juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK yang perlu mendapatkan perhatian serius. ^{[GRI 3-3] [13.1.1]}

Sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi pengurangan emisi GRK, PTPN I melakukan inventarisasi emisi secara menyeluruh. Inventarisasi ini mencakup emisi GRK dari Cakupan 1 (emisi langsung), Cakupan 2 (emisi tidak langsung dari penggunaan energi), dan Cakupan 3 (emisi tidak langsung lainnya sepanjang rantai nilai perusahaan). Proses perhitungan ini mengikuti metodologi yang ditetapkan dalam *GHG Protocol Corporate Standard* dan *Corporate Value Chain* (Cakupan 3). Dengan langkah ini, PTPN I dapat secara transparan mengungkapkan emisi yang dihasilkan dari seluruh unit operasional Perusahaan serta yang terkait dengan rantai nilai, termasuk karyawan, tamu, dan pemangku kepentingan lainnya.

PTPN I recognizes that greenhouse gas (GHG) emissions significantly contribute to global warming and climate change. One of the impacts is the increased frequency of hydrometeorological disasters in Indonesia. The Company's operational activities, including plantation management, mill processing, and land use preparation, potentially generate GHG emissions. Additionally, the use of electricity from the national grid and emissions from the supply chain and business travel of employees also contribute to the total GHG emissions and require serious attention. ^{[GRI 3-3] [13.1.1]}

As an initial step in formulating its GHG emission reduction strategy, PTPN I has conducted a comprehensive emissions inventory. This inventory includes emissions from Scope 1 (direct emissions), Scope 2 (indirect emissions from energy use), and Scope 3 (other indirect emissions across the value chain). The calculation process follows methodologies outlined in the *GHG Protocol Corporate Standard* and *Corporate Value Chain* (Scope 3). Through this approach, PTPN I aims to transparently disclose emissions from all operational units and related value chain contributors, including employees, visitors, and other stakeholders.

Area Proses Produksi Pabrik, Regional 8
Factory Production Process Area, Region 8



Berikut merupakan rincian cakupan emisi yang telah diinventarisasi Perusahaan: [305-1, 305-2, 305-3] [13.1.2, 13.1.3, 13.1.4]

The following are details of the emission coverage that has been inventoried by the Company: [305-1, 305-2, 305-3] [13.1.2, 13.1.3, 13.1.4]

Cakupan Scope	No	Kategori Category	Contoh Sumber Emisi Example Emission Sources	GRK dilaporkan: Menggunakan unit yang ditentukan Reported GHGs (in specified units)
Cakupan 1 Scope 1	1.1	Emisi langsung dari pembakaran stasioner	Pembakaran bahan bakar, termasuk pembakaran biomassa (harus dihitung secara terpisah, misalnya Generator, boiler, CHP, penggilingan, pengering, dan irigasi)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
		Direct emissions from stationary combustion	Fuel combustion including biomass (to be calculated separately), e.g., generators, boilers, CHP, milling, drying, irrigation	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	1.2	Emisi langsung dari pembakaran bergerak	Pembakaran bahan bakar dari sumber bergerak termasuk pembakaran biomassa (harus dihitung secara terpisah, seperti pengolahan tanah, penaburan, pemanenan, pengangkutan)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
		Direct emissions from mobile combustion	Fuel combustion from mobile sources, including biomass (to be calculated separately), e.g., tilling, sowing, harvesting, transporting	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	1.3	Emisi yang terkait dengan proses langsung	N/A	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
		Direct process-related emissions	N/A	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
	1.4	Emisi <i>fugitive</i> langsung	Emisi GRK yang lepas termasuk kebocoran dari peralatan dan sistem penyimpanan dan pengangkutan, serta kebocoran dari reservoir dan sumur injeksi. Pembuangan/pengolahan limbah yang dihasilkan dalam operasi.	HFC, PFC, CO ₂ e (refrigerator, AC), N ₂ O, CO ₂ e (pupuk), CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e (penguraian anaerobik), CH ₄ , CO ₂ e (pengomposan sampah organik)
		Direct fugitive emissions	GHG emissions include leaks from equipment, storage and transportation systems, as well as from reservoirs and injection wells. They also include the disposal or treatment of waste generated during operations.	HFCs, PFCs, CO ₂ e (refrigerators, AC), N ₂ O, CO ₂ e (fertilizers), CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e (anaerobic decomposition), CH ₄ , CO ₂ e (organic waste composting)
	1.5	Emisi langsung dan serapan dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (<i>Land Use, Land Use Change and Forestry</i> /LULUCF)	Emisi CO ₂ dari konversi: - hutan menjadi lahan peternakan atau lahan pertanian, atau - lahan basah menjadi lahan pertanian	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e
		Direct emissions and sequestration from land use, land-use change and forestry (LULUCF)	CO ₂ emissions from: - forest conversion to livestock or agricultural land - wetland conversion to agricultural land	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ e

Cakupan Scope	No	Kategori Category	Contoh Sumber Emisi Example Emission Sources	GRK dilaporkan: Menggunakan unit yang ditentukan Reported GHGs (in specified units)
Cakupan 2 Scope 2	2.1	Emisi tidak langsung dari listrik impor yang dikonsumsi	Emisi yang dihasilkan dari pembangkitan listrik yang diimpor	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
		Indirect emissions from purchased electricity	Emissions from generation of imported electricity	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
	2.2	Emisi tidak langsung dari energi yang dikonsumsi yang diimpor melalui jaringan fisik (pemanasan, uap, pendinginan, dan udara terkompresi) tidak termasuk listrik	Emisi yang dihasilkan dari pembangkitan uap yang diimpor, pemanasan, pendinginan, dan udara terkompresi.	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
		Indirect emissions from imported energy (excluding electricity) through physical networks (e.g., heating, steam, cooling, and compressed air)	Emissions from generation of imported steam, heat, cooling, and compressed air.	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
Cakupan 3 Scope 3	3.1	Transportasi dan distribusi hulu	Transportasi dan distribusi bahan baku (yaitu barang, jasa yang dibeli atau diperoleh, bahan atau bahan bakar), termasuk transportasi perantara (antar fasilitas) pengangkutan dan distribusi, pergudangan dan penyimpanan, yang terkait dengan pemasok langsung	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
		Upstream transportation and distribution	Transport and distribution of raw materials (goods, services purchased or acquired, materials, fuels), including inter-facility transport, warehousing, storage from direct suppliers	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
	3.2	Transportasi dan distribusi hilir	Transportasi dan distribusi produk yang dijual, termasuk pergudangan dan ritel	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
		Downstream transportation and distribution	Transport and distribution of sold products, including warehousing and retail	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
	3.3	Perjalanan karyawan	Transportasi karyawan dari rumah ke tempat kerja selama tahun pelaporan (dengan kendaraan yang tidak dimiliki atau dioperasikan atau dioperasikan oleh perusahaan pelapor); karyawan yang bekerja dari rumah (telecommuting)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
		Employee commuting	Employee travel from home to workplace during the reporting year (using non-company owned/operated vehicles); telecommuting	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}

Cakupan Scope	No	Kategori Category	Contoh Sumber Emisi Example Emission Sources	GRK dilaporkan: Menggunakan unit yang ditentukan Reported GHGs (in specified units)
	3.4	Transportasi klien dan pengunjung Client and visitor travel	Transportasi ke dan dari pengunjung klien lokasi ke organisasi Travel to and from client sites	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e} CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}
	3.5	Perjalanan bisnis Business travel	Perjalanan bisnis karyawan Employee business travel	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e} CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, CO _{2e}

Metodologi Perhitungan Emisi GRK [GRI 3-3, 305-1, 305-2, 305-3] [13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4]

PTPN I melakukan perhitungan emisi GRK secara teliti dan spesifik, mengacu pada metodologi yang diatur oleh ISO 14054 dan IPCC 2006 mengenai perubahan iklim. Metodologi ini digunakan untuk inventarisasi GRK di tingkat nasional, yang diterbitkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change. Selain pedoman utama tersebut, berbagai referensi tambahan juga diterapkan dalam perhitungan, seperti nilai kalor bersih bahan bakar (*Net Calorific Value/NCV*), kandungan karbon dalam bahan bakar, faktor emisi pada sektor transportasi, dan faktor lainnya yang relevan.

Dalam proses perhitungan, Perusahaan juga memanfaatkan faktor emisi yang dipublikasikan oleh sejumlah otoritas internasional dan nasional, antara lain UK *Defra Emission Factor* (EF 2022), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), khususnya yang berkaitan dengan Pusat Suplai dan Pengelolaan Informasi Lingkungan (Puspijak), serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Selain itu, faktor emisi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai ketenagalistrikan, termasuk data dari agensi lainnya yang terkait, juga turut dipertimbangkan.

Greenhouse Gas (GHG) Emissions Calculation Methodology [GRI 3-3, 305-1, 305-2, 305-3] [13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4]

PTPN I conducts meticulous and specific GHG emissions calculations based on the methodologies outlined in ISO 14054 and the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, issued by the Intergovernmental Panel on Climate Change. In addition to these core guidelines, the Company also incorporates supplementary references, such as the net calorific value (NCV) of fuels, carbon content in fuels, emission factors for the transportation sector, and other relevant factors.

During the calculation process, the Company utilizes emission factors published by several international and national authorities, including the UK Defra Emission Factor (EF 2022), Indonesia's Ministry of Environment and Forestry (KLHK) – particularly through the Centre for Environmental Information Supply and Management (Puspijak) and the Directorate General of Climate Change Control – as well as emission factors from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), especially in relation to electricity generation, and data from other relevant agencies.

Untuk memastikan akurasi data emisi GRK, Perusahaan menggunakan kalkulator GRK yang mengumpulkan informasi operasional dari setiap pabrik dan kebun yang dimiliki. Data yang terkumpul kemudian diproses, dikonsolidasi, dan dihitung oleh masing-masing entitas dalam Perusahaan. Rincian hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

To ensure the accuracy of GHG emission data, the Company employs a GHG calculator that collects operational information from each mill and plantation. The gathered data is then processed, consolidated, and calculated by each respective business unit. The detailed results are shown in the following table:

Tabel Emisi Cakupan 1, 2, dan 3 [305-1, 305-2, 305-3] [13.1.2, 13.1.3, 13.1.4] [F.11]
Scope 1, 2, and 3 Emissions Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Cakupan 1 Scope 1	Ton CO ₂ e	154.882	431.458	444.600
Cakupan 2 Scope 2	Ton CO ₂ e	48.148	52.269	119.800
Total Emisi Cakupan 1 dan 2 Total Scope 1 and 2 Emissions	Ton CO₂e	203.030	483.727	564.400
Cakupan 3 Scope 3				
Transportasi dan distribusi hulu Upstream transport and distribution	Ton CO ₂ e	3.128	10.427	119.800
Transportasi dan distribusi hilir Downstream transport and distribution	Ton CO ₂ e	797	4.094	564.400
Perjalanan karyawan Employee commuting	Ton CO ₂ e	2.705	13.568	564.400
Pengangkutan Limbah yang dihasilkan dalam operasi Waste transportation from operations	Ton CO ₂ e	0,39	186	444.600
Transportasi klien dan pengunjung Client and visitor transport	Ton CO ₂ e	3.221	386	119.800
Perjalanan bisnis Business travel	Ton CO ₂ e	66	136	564.400
Total Emisi Cakupan 3 Total Scope 3 Emissions	Ton CO₂e	9.918	28.798	564.400

PTPN I telah menetapkan *baseline* emisi pada tahun 2021 sebagai acuan untuk menganalisis dan memantau data emisi yang timbul dari operasional Perusahaan. Langkah ini penting sebagai dasar dalam merancang strategi pengurangan emisi yang lebih efektif dan terukur ke depannya. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, PTPN I telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi 48% dari total emisi GRK sampai dengan tahun 2030 yang akan dicapai melalui berbagai inisiatif pengurangan emisi di seluruh lini operasional. [GRI 305-1, 305-2] [13.1.2, 13.1.3]

PTPN I has established 2021 as its baseline year for emissions to analyse and monitor emission data resulting from the Company's operations. This step is essential for developing more effective and measurable emission reduction strategies. As part of its long-term commitment, PTPN I has set an ambitious target to reduce total GHG emissions by 48% by the year 2030, which will be realized through various emission reduction initiatives across all operational lines. [GRI 305-1, 305-2] [13.1.2, 13.1.3]

Pada tahun 2024, Perusahaan berhasil menurunkan emisi cakupan 1 dan 2 sebesar 58% atau setara dengan 280.697 Ton CO₂e dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2021 (*baseline*), emisi GRK juga mengalami penurunan sebesar 324.170 Ton CO₂e atau 61%. Pencapaian ini mencerminkan upaya konkret yang dilakukan oleh PTPN I dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasionalnya, sekaligus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan pengurangan emisi yang berkelanjutan. [GRI 305-5] [13.1.6]

In 2024, the Company successfully reduced Scope 1 and 2 emissions by 58%, equivalent to 280,697 tons of CO₂e compared to 2023. Moreover, compared to the 2021 baseline, GHG emissions were reduced by 324,170 tons of CO₂e, or 61%. This achievement demonstrates PTPN I's concrete efforts to reduce the environmental impact of its operations and shows significant progress toward sustainable emission reduction goals. [GRI 305-5] [13.1.6]

Intensitas Emisi GRK [GRI 305-4] [13.1.5] [F.11]

PTPN I melakukan evaluasi penurunan emisi GRK melalui pengukuran intensitas emisi dengan membagi total emisi GRK Cakupan 1 dan 2 dalam satuan Ton CO₂e dengan total volume produk akhir dalam satuan ton sebagai berikut:

GHG Emissions Intensity [GRI 305-4] [13.1.5] [F.11]

PTPN I evaluates reductions in GHG emissions through emissions intensity measurement by dividing the total Scope 1 and 2 emissions (in tons of CO₂e) by the total volume of final products (in tons), as follows:

Tabel Intensitas Emisi [GRI 305-4, F.11]
Emissions Intensity Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Total Emisi Cakupan 1 dan 2 Total Scope 1 and 2 Emissions	Ton CO ₂ e	203.030	483.727	564.400
Total Volume Produk Akhir Total Volume of Final Products	Ton	425.460	951.461	1.500.000
Intensitas Cakupan 1 dan 2 Scope 1 and 2 Emissions Intensity	Ton CO₂e/ Ton	0,48	0,51	0,38

Inisiatif Pengurangan Emisi GRK [GRI 305-5] [13.1.6] [F.12]

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan, PTPN I terus berupaya untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK. Berbagai langkah yang telah diambil oleh Perusahaan diantaranya:

GHG Emissions Reduction Initiatives [GRI 305-5] [13.1.6] [F.12]

As part of its commitment to sustainability, PTPN I continues to implement various initiatives aimed at reducing GHG emissions. The steps undertaken include:

1. Inventarisasi Emisi

PTPN I melakukan inventarisasi emisi untuk mengidentifikasi area fokus yang dapat memberikan dampak signifikan dalam pengurangan emisi. Pengurangan emisi ini mencakup Cakupan 1, 2, dan 3, yang berkontribusi pada pencapaian komitmen Perusahaan untuk menurunkan emisi secara keseluruhan. PTPN I juga mencatat adanya kontribusi emisi negatif dari sektor *Land Use*, *Land Use Change*, and *Forestry* (LULUCF), yang berasal dari peningkatan

1. Emissions Inventory

PTPN I conducts emissions inventories to identify key focus areas that significantly impact emission reductions. These reductions cover Scopes 1, 2, and 3, contributing to the Company's overall commitment to lowering emissions. The Company also records negative emissions from the Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) sector, derived from increased carbon stocks through plantation land management. These can offset emissions generated

stok karbon akibat pengelolaan lahan perkebunan. Hal ini dapat mengimbangi emisi yang dihasilkan oleh kegiatan operasional, meskipun faktor seperti penanaman.

from operations, although factors such as replanting, tree felling, and land conversion may influence total carbon stock.

Tabel Inventarisasi Emisi LULUCF
LULUCF Emissions Inventory Table

Uraian Description	Unit	2024	2023
Emisi negatif dari LULUCF Negative emissions from LULUCF	Ton CO ₂ e	-1.884.847	-1.836.300

2. Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui PLTA dan Mikrohidro

Perusahaan menginisiasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sistem mikrohidro untuk mendukung kebutuhan operasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil, sejalan dengan upaya dekarbonisasi dan efisiensi energi.

3. Pemanfaatan Bahan Bakar Terbarukan

PTPN I memanfaatkan bahan bakar terbarukan untuk mesin boiler yang mendukung operasional turbin pembangkit listrik pabrik. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dengan penerapan kebijakan *zero burning* dalam penyiapan lahan, baik untuk tanaman baru maupun *replanting*. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan api dalam proses lahan, yang pada gilirannya mengurangi emisi karbon dan melindungi kualitas ekosistem.

4. Pengurangan Emisi dari Operasional

Perusahaan juga berfokus pada pengurangan emisi langsung dari operasionalnya. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah inisiatif logistik hijau untuk mengurangi emisi dari mesin dan kendaraan operasional. Beberapa upaya yang dilaksanakan meliputi penggunaan biodiesel B30 (Biodiesel 30%) pada mobil dinas dan kendaraan berat, serta penerapan kendaraan listrik pada beberapa unit operasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, Perusahaan terus mengevaluasi sistem transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan emisi yang lebih optimal.

5. Kolaborasi dengan Pemasok

PTPN I mendorong pemasok untuk turut serta dalam upaya pengurangan emisi di sepanjang rantai pasok. Dalam hal ini, Perusahaan telah mensosialisasikan prinsip logistik hijau kepada seluruh pemasok dan menginstruksikan penggunaan solar industri berbasis B30 sebagai bahan bakar yang lebih ramah

2. Utilization of Renewable Energy through Hydropower and Micro-Hydro Systems

The company has initiated the use of large-scale hydropower and micro-hydro systems to support operational energy needs while reducing reliance on fossil fuels, in line with its commitment to decarbonization and energy efficiency.

3. Use of Renewable Fuels

PTPN I utilises renewable fuels for boiler engines supporting electricity generation turbines at the mills. This initiative is part of efforts to mitigate environmental impact by implementing a zero-burning policy during land preparation, whether for new planting or replanting. The policy aims to eliminate open burning, thereby reducing carbon emissions and preserving ecosystem quality.

4. Operational Emission Reductions

The Company also focuses on direct operational emissions reduction. One strategy involves adopting green logistics to cut emissions from machinery and vehicles. Key measures include using B30 biodiesel (30% biodiesel blend) in service and heavy-duty vehicles, and adopting electric vehicles in several operational units to reduce fossil fuel dependency. Additionally, the Company continues to evaluate its transport systems to enhance efficiency and optimize emission reduction.

5. Supplier Collaboration

PTPN I encourages its suppliers to participate in emission reduction efforts along the supply chain. The Company has promoted green logistics principles to all suppliers and mandated the use of B30-based industrial diesel fuel as a more environmentally friendly alternative. These efforts aim to extend the

lingkungan. Dengan demikian, diharapkan dampak positif pengurangan emisi karbon dapat meluas ke seluruh jaringan rantai pasok.

Untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan sesuai dengan pedoman ilmiah global, Perusahaan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap target pengurangan emisi GRK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perusahaan mengikuti pedoman dari *Science Based Targets initiative* (SBTi) untuk memastikan bahwa target yang dirumuskan sesuai dengan standar ilmiah internasional.

Emisi Zat Perusak Ozon (ODS) dan Emisi Udara Signifikan Lainnya

Selain pengelolaan emisi GRK, PTPN I berkomitmen untuk mengendalikan pencemaran udara, termasuk gas pencemar konvensional seperti SO_x dan NO_x, serta zat perusak ozon (ODS). Pengendalian ini dilakukan melalui pengujian emisi udara pada fasilitas produksi untuk mengukur parameter SO_x dan NO_x dalam satuan ppm (mL/Nm³). Sebagai bagian dari upaya ini, PTPN I mengacu pada SOP untuk Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Udara, Kebisingan, dan Kebauan, yang memberikan pedoman standar dalam melaksanakan pengujian dan pemantauan kualitas udara secara rutin dan terukur.

Pengujian rutin dilakukan oleh pihak ketiga independen yang telah tersertifikasi, guna memastikan bahwa emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Dengan mengacu pada SOP tersebut, PTPN I memastikan bahwa proses pengelolaan pencemaran udara dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh PTPN I: [GRI 305-7] [13.1.8]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
SO _x	ppm (mL/Nm ³)	1,67	44,33	63,12
NO _x	ppm (mL/Nm ³)	13,4	92,97	131,28

Meskipun PTPN I belum melakukan perhitungan ODS, Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lapisan ozon. Salah satu langkah yang diambil adalah mengganti sistem pendingin udara (AC) yang sebelumnya menggunakan refrigeran berbahaya dengan AC yang menggunakan refrigeran ramah lingkungan. PTPN I kini beralih ke penggunaan refrigeran yang tidak merusak lapisan ozon dan memiliki potensi pemanasan global yang lebih rendah. Langkah-langkah ini mendukung upaya PTPN I dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan dampak negatif terhadap lapisan ozon. [GRI 305-6] [13.1.7]

positive impacts of carbon reduction across the entire supply chain.

To ensure that these measures remain aligned with global scientific guidance, the Company continually evaluates and refines its GHG reduction targets. In this regard, PTPN I adheres to the guidelines of the Science Based Targets initiative (SBTi) to ensure targets are in line with internationally recognized scientific standards.

Ozone-Depleting Substances (ODS) and Other Significant Air Emissions

In addition to managing GHG emissions, PTPN I is committed to controlling air pollution, including conventional pollutants such as SO_x and NO_x, as well as ozone-depleting substances (ODS). This is accomplished through regular air emissions testing at production facilities, measuring SO_x and NO_x parameters in ppm (mL/Nm³). The Company follows its Standard Operating Procedure (SOP) for Air Quality, Noise, and Odour Monitoring and Measurement, which provides standard guidelines for regular and systematic air quality monitoring.

Routine testing is conducted by certified independent third parties to ensure that emissions remain within regulatory thresholds. By adhering to this SOP, PTPN I ensures that air pollution control processes are carried out systematically and in compliance with applicable regulations. The results of recent monitoring activities are shown below: [GRI 305-7] [13.1.8]

Although PTPN I has not yet calculated its ODS, the Company is committed to reducing its impact on the ozone layer. One initiative includes replacing air conditioning (AC) systems that use harmful refrigerants with systems that utilize environmentally friendly alternatives. PTPN I now uses refrigerants that do not harm the ozone layer and have lower global warming potential. These measures support the Company's environmental conservation efforts and contribute to reducing negative impacts on the ozone layer. [GRI 305-6] [13.1.7]

Manajemen Air dan Efluen

[F.8, F.14]

Water and Effluent Management

Risiko dan Dampak Kelangkaan Air

Air merupakan elemen kunci dalam mendukung keberlangsungan kehidupan, termasuk dalam kegiatan usaha PTPN I yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Ketersediaan air yang memadai sangat berperan dalam memastikan kelancaran proses operasional Perusahaan, seperti irigasi tanaman komoditas, serta pemenuhan kebutuhan domestik di lingkungan kerja. Selain itu, air juga merupakan sumber daya penting bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Oleh karena itu, PTPN I menyadari bahwa pengelolaan air yang berkelanjutan tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

[GRI 3-3] [13.7.1]

Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, risiko kelangkaan air menjadi semakin nyata. Perubahan iklim, polusi lingkungan, dan pertumbuhan populasi yang pesat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya penurunan ketersediaan air bersih, khususnya di sektor agribisnis. Data dari International Water Management Institute menunjukkan bahwa sekitar 70% pengambilan air secara global digunakan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan. Di tengah persaingan dengan kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri, dan pelestarian lingkungan, tekanan terhadap sumber daya air menjadi semakin kompleks.

Di Indonesia, perbedaan infrastruktur air dan sanitasi antar wilayah, khususnya di daerah kepulauan, menjadi tantangan dalam mengakses air tawar dan layanan sanitasi yang layak. Urbanisasi yang cepat, pertumbuhan jumlah penduduk, serta ekspansi sektor agribisnis turut memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air bersih. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PTPN I, mengingat keberlanjutan operasional sangat bergantung pada stabilitas pasokan air.

Risks and Impacts of Water Scarcity

Water is a key element in sustaining life and plays a critical role in the business activities of PTPN I, which focuses on the agriculture and plantation sectors. Adequate water availability is essential to ensure smooth operational processes, such as crop irrigation and domestic needs within the workplace. Additionally, water serves as a vital resource for communities surrounding the operational areas. Accordingly, PTPN I recognizes that sustainable water management not only supports operational efficiency but is also closely linked to broader social and environmental sustainability. [GRI 3-3] [13.7.1]

As pressure on natural resources increases, the risk of water scarcity becomes increasingly significant. Climate change, environmental pollution, and rapid population growth are among the primary factors contributing to the decline in the availability of clean water, particularly in the agribusiness sector. According to the International Water Management Institute, approximately 70% of global water withdrawals are used for agriculture and plantations. Amid competing demands for domestic, industrial, and environmental needs, water resources are under increasingly complex pressures.

In Indonesia, disparities in water and sanitation infrastructure between regions—especially in island areas—pose challenges in accessing fresh water and adequate sanitation services. Rapid urbanization, population growth, and the expansion of the agribusiness sector have further intensified pressure on clean water availability. This is a serious concern for PTPN I, as the sustainability of its operations heavily relies on the stability of water supply.

Untuk menilai tingkat risiko kelangkaan air secara objektif, Perusahaan menggunakan Aqueduct Tool yang dikembangkan oleh World Resources Institute (WRI). Alat ini membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah operasional yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kelangkaan air. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa beberapa unit usaha PTPN I, terutama yang berlokasi di Jawa Timur, berada di kawasan dengan risiko tinggi.

Sebagai bentuk respons atas temuan tersebut, PTPN I berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan air yang komprehensif. Rencana ini akan difokuskan pada efisiensi penggunaan air di seluruh rantai operasional, konservasi sumber air lokal, serta peningkatan kesadaran internal terhadap pentingnya pengelolaan air secara berkelanjutan. Di samping itu, Perusahaan juga akan memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem air dan memastikan keberlanjutan pasokan air bagi seluruh pemangku kepentingan.

To objectively assess the level of water scarcity risk, the Company utilizes the Aqueduct Tool developed by the World Resources Institute (WRI). This tool helps identify operational areas with high vulnerability to water scarcity. Based on the analysis, several PTPN I business units, especially those located in East Java are found to be in high-risk zones.

In response to these findings, PTPN I is committed to developing and implementing a comprehensive water management plan. This plan focuses on water-use efficiency across the operational chain, local water source conservation, and enhanced internal awareness of sustainable water management practices. Furthermore, the Company will strengthen collaboration with local stakeholders, including communities and regional governments, to maintain water ecosystem balance and ensure a sustainable supply for all stakeholders.

Pengaturan Irigasi Lahan, Regional 8
Field Irrigation Setup, Region 8



Manajemen Air

Dalam menjalankan operasionalnya, PTPN I sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya air yang berasal dari air tanah dan air sungai. Air digunakan untuk berbagai keperluan penting, mulai dari proses pengolahan hasil perkebunan hingga kebutuhan domestik karyawan. Perusahaan menyadari bahwa sumber air tersebut tidak hanya penting bagi operasional internal, tetapi juga merupakan aset vital bagi masyarakat sekitar dan ekosistem alami. Oleh karena itu, pengambilan air dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, disertai dengan pemantauan berkala untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan Perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. [GRI 3-3, 303-1] [13.7.1, 13.7.2]

Ketersediaan air bersih yang semakin terbatas menjadi perhatian utama Perusahaan, terutama mengingat hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019 yang memproyeksikan bahwa kelangkaan air akan menjadi isu krusial pada tahun 2040. Menyadari urgensi tersebut, PTPN I berkomitmen untuk mengambil bagian aktif dalam mencegah terjadinya krisis air melalui pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, antara lain pelestarian sumber air, penjagaan kualitas air, serta dukungan terhadap akses air bersih, baik di dalam maupun di luar wilayah operasional. Perusahaan juga terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal dalam upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas sumber daya air. Salah satu prinsip yang konsisten dijalankan adalah memastikan bahwa seluruh pengambilan air dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundangan yang berlaku, dengan izin resmi dari otoritas setempat serta pelaporan berkala kepada instansi terkait. [GRI 303-2] [13.7.3]

Dalam praktik operasional, PTPN I menerapkan kebijakan internal berbasis lingkungan yang mengacu pada prinsip dan kriteria keberlanjutan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, Perusahaan menunjuk seluruh Kepala Divisi Komoditi sebagai penanggung jawab pelaksanaan efisiensi penggunaan air, yang berada langsung di bawah pengawasan Direktur Operasional. Struktur tanggung jawab ini memastikan bahwa upaya konservasi air menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. [GRI 303-2] [13.7.3]

Water Management

PTPN I's operations rely heavily on water resources, primarily sourced from groundwater and river water. Water is used for various essential purposes, including processing plantation outputs and meeting employees' domestic needs. The Company understands that these water sources are not only crucial for internal operations but are also vital assets for surrounding communities and natural ecosystems. Therefore, water withdrawal is carried out carefully and responsibly, accompanied by regular monitoring to maintain a balance between operational needs and environmental sustainability. [GRI 3-3, 303-1] [13.7.1, 13.7.2]

The increasing scarcity of clean water is a major concern for the Company, especially in light of the Strategic Environmental Assessment (KLHS) findings in the 2019 Medium-Term Development Plan (RPJM), which project water scarcity to become a critical issue by 2040. Recognizing this urgency, PTPN I is committed to actively preventing a water crisis through efficient and sustainable water resource management.

This commitment is reflected in various concrete actions, including water source conservation, safeguarding water quality, and supporting access to clean water both within and beyond operational areas. The Company also continues to strengthen synergy with stakeholders, such as regional governments, customers, suppliers, and local communities in efforts to preserve and improve water resource quality and sustainability. A key principle consistently upheld is that all water withdrawals must comply with prevailing regulations, with official permits from relevant authorities and regular reporting to regulatory institutions. [GRI 303-2] [13.7.3]

In practice, PTPN I implements an internal environmental policy guided by sustainability principles and criteria. To ensure effective execution, the Company has designated all Commodity Division Heads as responsible for water efficiency implementation, under the direct supervision of the Director of Operations. This accountability structure ensures that water conservation becomes an integral part of daily operational decision-making. [GRI 303-2] [13.7.3]

Penggunaan air Perusahaan dipantau secara ketat dengan metode pencatatan menggunakan *flow meter* guna memastikan bahwa volume air yang digunakan seimbang dengan air yang dibuang. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga membantu dalam pemenuhan standar pelaporan dan transparansi. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pemantauan terhadap intensitas penggunaan air di setiap wilayah operasional, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap kekurangan air dan mengevaluasi dampak dari kegiatan operasional terhadap ketersediaan air lokal. [GRI 303-2, 303-3, 303-4, 303-5] [13.7.3, 13.7.4, 13.7.5, 13.7.6]

The Company's water usage is closely monitored using flow meters to ensure that the volume of water consumed is proportionate to the volume discharged. This approach not only supports efficiency but also facilitates compliance with reporting standards and transparency. Additionally, water usage intensity is monitored at each operational site to identify areas vulnerable to water shortages and to evaluate the impact of operations on local water availability. [GRI 303-2, 303-3, 303-4, 303-5] [13.7.3, 13.7.4, 13.7.5, 13.7.6]

Tabel Penarikan, Penggunaan, dan Pelepasan Air [GRI 303-3, 303-4, 303-5] [13.7.4, 13.7.5, 13.7.6][F.8]
Water Withdrawal, Use and Discharge Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Total Penarikan Air Total Water Withdrawal	m ³	6.802.184	24.644.000	48.100.000
Total Penggunaan Air Total Water Use	m ³	6.802.184	24.644.000	48.100.000
Total Pembuangan Air Total Water Discharge	m ³	6.802.184	24.644.000	48.100.000

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan air pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perpindahan salah satu entitas dari wilayah operasional, yang secara langsung mengurangi kebutuhan air. Selain itu, masing-masing regional juga menetapkan penyesuaian terhadap standar penggunaan air guna meningkatkan efisiensi operasional.

Based on the table above, water consumption in 2024 decreased compared to the previous year. This decline was primarily due to the relocation of one entity from the operational area, which directly reduced water demand. In addition, each regional unit implemented adjustments to their water usage standards to improve operational efficiency.

Tabel Penggunaan Air dan Intensitas Air [GRI 303-5] [13.7.6] [F.13]
Water Usage and Intensity Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Total Penggunaan Air Total Water Use	m ³	6.802.184	24.644.000	48.100.000
Total Produksi (bahan baku) Total Production (raw material)	Ton	2.025.839	4.364.988	15.800.000
Intensitas Penggunaan Air Water Use Intensity	m ³ /Ton	3,36	5,65	3,04

Inisiatif Efisiensi Air

Sebagai perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan, PTPN I berkomitmen untuk meminimalkan dampak terhadap sumber daya air dengan menggunakan air secara lebih efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perusahaan menerapkan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*, dan *Recovery* (4R) dalam pengelolaan air, khususnya dalam proses produksi di pabrik. Selain itu, PTPN I juga menyadari pentingnya penghematan air dalam penggunaan domestik oleh karyawan, seperti di fasilitas kamar mandi. Untuk itu, Perusahaan mengedukasi karyawan mengenai pentingnya penghematan air dengan menempelkan tanda pengingat pada keran yang ada di area tersebut.

Beberapa inisiatif lain yang telah diterapkan oleh PTPN I untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi risiko kelangkaan air antara lain:

1. Menetapkan standar penggunaan air untuk meningkatkan keterstandaran dalam pemanfaatannya.
2. Menyusun ulang rencana pengelolaan air untuk sektor perkebunan dan manufaktur, mencakup penggunaan air dalam budidaya, perawatan kimiawi dan alami, pengolahan, serta penyimpanan air yang sesuai dengan standar peraturan pemerintah.
3. Mengurangi risiko pencemaran air permukaan dan air tanah dengan menghindari penggunaan herbisida atau bahan kimia di sekitar daerah aliran sungai (*riparian areas*).
4. Melaksanakan program penanaman tanaman konservasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari pelestarian lingkungan, yang mencakup perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan.

Efluen [GRI 306-2] [13.8.3]

PTPN I berkomitmen untuk melakukan pengelolaan efluen yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya ini, Perusahaan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap baku mutu pembuangan air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan air limbah yang baik menjadi salah satu prioritas utama dalam operasional Perusahaan, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar.

Untuk memastikan kualitas pengelolaan air limbah, PTPN I mengacu pada SOP untuk Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Air Limbah. Standar operasional prosedur ini memberikan pedoman yang jelas bagi Perusahaan dalam melakukan pengujian dan pemantauan kualitas air

Water Efficiency Initiatives

As a company focused on sustainability, PTPN I is committed to minimizing the impact on water resources through more efficient water usage. To achieve this, the Company applies the principles of Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery (4R) in water management, particularly in mill production processes. Moreover, PTPN I recognizes the importance of water conservation in employee domestic use, such as in restroom facilities. Therefore, the Company educates employees on water conservation by placing reminder signs near faucets in these areas.

Other initiatives undertaken by PTPN I to improve water-use efficiency and mitigate water scarcity risks include:

1. Establishing water usage standards to improve consistency and efficiency in its use.
2. Revising water management plans for the plantation and manufacturing sectors, covering water use in cultivation, chemical and natural treatments, processing, and storage in accordance with government regulations.
3. Reducing the risk of surface and groundwater pollution by avoiding the use of herbicides or chemicals near riparian zones (riverbanks).
4. Implementing conservation planting programs in watershed areas as part of environmental preservation efforts, including protection, maintenance, and sustainable utilization of ecosystems.

Effluents [GRI 306-2] [13.8.3]

PTPN I is committed to managing effluents in accordance with sustainability principles and applicable environmental regulations. As part of this effort, the Company prioritizes compliance with government-mandated wastewater discharge quality standards. Effective wastewater management is one of the Company's top operational priorities, aimed at minimizing adverse impacts on the surrounding environment and ecosystems.

To ensure wastewater quality, PTPN I refers to its Standard Operating Procedures (SOP) for Wastewater Quality Monitoring and Measurement. This SOP provides clear guidance for systematic and structured wastewater testing and monitoring. As part of environmental

limbah secara sistematis dan terstruktur. Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, PTPN I melakukan pengujian kualitas air limbah secara berkala, dengan fokus pada dua parameter utama, yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), yang merupakan indikator penting untuk menilai tingkat pencemaran organik dan kimia dalam air limbah.

Proses pemantauan dan pengujian ini dilakukan di seluruh wilayah operasional Perusahaan untuk memastikan bahwa semua efluen yang dibuang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Hasil pengujian yang dilakukan secara berkala ini menunjukkan bahwa PTPN I terus berupaya untuk menjaga kualitas efluen sesuai dengan baku mutu yang diharapkan. Dengan mencatat jumlah rata-rata BOD dan COD yang dihasilkan, Perusahaan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk lebih mengurangi dampak pencemaran dari limbah cair. Ini adalah bagian dari komitmen PTPN I untuk memastikan bahwa operasionalnya tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam di sekitar wilayah operasional.

responsibility, PTPN I regularly tests wastewater quality, focusing on two key parameters, namely Biological Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) which are critical indicators of organic and chemical pollution levels in wastewater.

These monitoring and testing activities are conducted across all operational areas to ensure that discharged effluents meet the standards set by regulatory authorities. Periodic test results demonstrate PTPN I's ongoing efforts to maintain effluent quality in compliance with the required thresholds. By recording average BOD and COD levels, the Company can identify improvement opportunities and implement necessary actions to further reduce the environmental impact of liquid waste. This is part of PTPN I's commitment to ensuring that its operations are not only efficient but also environmentally responsible and beneficial to community welfare and natural preservation around its operational sites.

Tabel Baku Mutu Air Limbah
Wastewater Quality Standards Table

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
BOD	mg/L	33,57	29,70	31,06
COD	mg/L	105,40	107,64	117,02

Inisiatif Pengelolaan Air Limbah ^[F.14]

Pengelolaan air limbah yang efektif merupakan bagian utama dari upaya Perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan operasional. Sebelum dibuang, Perusahaan menerapkan prosedur yang hati-hati dan terorganisir untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Berikut merupakan merupakan tahap pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh PTPN I:

1. Menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Pada instalasi ini, pengelolaan air limbah dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan zat pencemar yang terkandung dalam air limbah.

Wastewater Management Initiatives ^[F.14]

Effective wastewater management is a core component of the Company's efforts to preserve the environment and support operational sustainability. Prior to discharge, the Company implements careful and structured procedures to ensure that wastewater generated does not pollute the environment. The following are the stages of wastewater management implemented by PTPN I:

1. Utilization of Wastewater Treatment Plants (WWTP)

Wastewater is treated using microorganisms to break down pollutants contained in the wastewater.

2. Penggunaan Kembali Air Hasil Proses Pengolahan
Air yang dihasilkan dari proses pengolahan karet dan gula digunakan kembali setelah diproses dalam kolam IPAL, baik untuk areal perkebunan, seperti produksi dan pengolahan kelapa karet.

3. Pencegahan Kontaminasi Air Buangan
Perusahaan menjaga agar air buangan tidak tercemar oleh limbah dengan membangun sumur resapan untuk limbah MCK (mandi, cuci, kakus), yang tidak dialirkan ke sungai.

4. Penanganan Alat Bekas Menyemprot Pestisida
Perusahaan membuat bak penampung khusus untuk mencuci alat-alat bekas menyemprot pestisida. Air limbah dari proses pencucian ini disaring terlebih dahulu dan dialirkan ke dalam sumur resapan.

5. Melindungi Ekosistem Biota Tanah
Perusahaan berupaya melindungi ekosistem biota tanah yang berkontribusi pada perawatan jangka panjang fungsi dan jasa ekosistem, seperti produksi primer, penyerapan karbon, dan perputaran nitrogen. Hal ini dilakukan dengan pengelolaan limbah air yang benar, sehingga tidak membuang limbah pada tanah.

6. Identifikasi Biota Laut dan Tanah
Perusahaan mengidentifikasi jumlah biota laut dan tanah yang ada di area operasional untuk memastikan bahwa limbah air yang dihasilkan telah dikelola dengan benar dan tidak merusak ekosistem tersebut.

7. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
Proses pengolahan air limbah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kualitas air limbah yang dibuang ke badan air atau sumber air lainnya tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

8. Pencegahan Pembuangan Air Limbah yang Melampaui Batas
Perusahaan mendorong seluruh entitasnya untuk memastikan bahwa pembuangan air limbah tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sesuai regulasi yang berlaku.

9. Alokasi Dana untuk Pengelolaan Air Limbah
Perusahaan mengalokasikan dana yang memadai untuk pembayaran jasa pelayanan pembuangan air limbah, baik untuk induk perusahaan maupun anak perusahaan, guna memastikan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

2. Reuse of Treated Water
Water produced from the rubber and sugar processing is reused after being treated in WWTP ponds, for purposes such as plantation operations, including rubber and coconut processing.

3. Prevention of Effluent Contamination
The Company ensures that effluent is not contaminated by household waste by constructing infiltration wells for bathing, washing, and toilet (BWT) waste, which is not discharged into rivers.

4. Handling of Used Pesticide Spraying Equipment
The Company constructs special containment areas for cleaning equipment used to spray pesticides. Wastewater from this process is first filtered and then directed to infiltration wells.

5. Protection of Soil Biota Ecosystems
The Company strives to protect soil biota ecosystems that contribute to long-term ecosystem functions and services such as primary production, carbon sequestration, and nitrogen cycling. This is achieved through proper wastewater management, thereby preventing direct discharge onto the soil.

6. Identification of Marine and Soil Biota
The Company identifies the number of marine and soil biota within its operational areas to ensure that wastewater has been properly managed and does not harm these ecosystems.

7. Compliance with Wastewater Quality Standards
The wastewater treatment process is carried out to ensure that the quality of discharged wastewater does not exceed the standards set by regulatory authorities.

8. Prevention of Excessive Wastewater Discharge
The Company encourages all of its business units to ensure that wastewater discharge does not exceed the maximum limits permitted under applicable regulations.

9. Budget Allocation for Wastewater Management
The Company allocates adequate funding for wastewater disposal services, both at the holding and subsidiary levels, to ensure proper management in compliance with regulations.

Manajemen Limbah [F.14]

Waste Management

Manajemen Limbah

Meskipun PTPN I terus berupaya menjalankan operasional yang ramah lingkungan, Perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasionalnya tetap menghasilkan limbah, baik cair maupun padat, yang mencakup limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), non-B3, serta air limbah dari penggunaan air bersih. PTPN I memahami bahwa limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, berdampak negatif tidak hanya pada Perusahaan, tetapi juga pada masyarakat dan ekosistem sekitar. [GRI 3-3] [13.8.1]

Sebagai bagian dari komitmen ini, PTPN I mengacu pada peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia serta standar internasional seperti ISO 14001 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan. Pengelolaan limbah dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa semua jenis limbah dikelola dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Beberapa prosedur yang diterapkan oleh Perusahaan meliputi:

- Pedoman Dasar & Instruksi Kerja (PDIK) untuk Pengelolaan Limbah Cair, Limbah B3, dan Limbah Domestik.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pemantauan dan Pengangkutan Limbah B3.

Seluruh upaya pengelolaan limbah berada di bawah pengawasan Direktur Operasional dan menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Karet, Kepala Divisi Komoditi Kopi & Aneka Tanaman, serta Kepala Divisi Komoditi Teh & Kemitraan. Perusahaan secara rutin meninjau kinerja pengelolaan limbah dan polusi, untuk mengukur efektivitas inisiatif yang diterapkan, serta mendorong inovasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan. Data ini tidak hanya digunakan untuk analisis dan evaluasi internal, tetapi juga disampaikan kepada instansi terkait, khususnya lembaga pemerintahan.

Sebagai komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan, PTPN I mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh rantai nilai operasional, mulai dari penanaman benih hingga pemanfaatan limbah hasil produksi. Pendekatan yang digunakan adalah efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular, seperti pemanfaatan limbah organik

Waste Management

Despite PTPN I's continuous efforts to operate in an environmentally friendly manner, the Company acknowledges that its operations inevitably generate waste, both liquid and solid, including hazardous and toxic waste (B3), non-hazardous waste (non-B3), and wastewater from clean water use. PTPN I understands that improperly managed waste can cause pollution and environmental damage, negatively impacting not only the Company but also the surrounding communities and ecosystems. [GRI 3-3] [13.8.1]

As part of this commitment, PTPN I adheres to applicable environmental regulations in Indonesia and international standards such as ISO 14001 on Environmental Management Systems. Waste management is conducted under stringent procedures to ensure all waste types are handled safely and responsibly. Several procedures implemented by the Company include:

- General Guidelines & Work Instructions (PDIK) on Liquid Waste, Hazardous Waste (B3), and Domestic Waste Management.
- Standard Operating Procedures (SOP) on Hazardous Waste (B3) Monitoring and Transportation.

All waste management efforts are overseen by the Director of Operations and are the responsibility of the Heads of Rubber Commodity Division, Coffee & Diversified Crops Division, and Tea Commodity & Partnership Division. The Company routinely reviews the performance of its waste and pollution management initiatives to assess their effectiveness and foster innovation in enhancing environmental performance. This data is used not only for internal analysis and evaluation but also reported to relevant institutions, particularly government agencies.

As part of its commitment to sustainable business practices, PTPN I integrates sustainability principles throughout its operational value chain, from seed planting to the utilization of production waste. The approach emphasizes resource efficiency and a circular economy, including converting organic waste into compost,

menjadi kompos, konversi limbah cair menjadi biogas, serta daur ulang material pendukung.

Sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, PTPN I secara berkala melakukan pemantauan volume limbah yang dihasilkan, serta metode pengelolaan yang diterapkan. Data berikut mencerminkan kinerja pengelolaan limbah Perusahaan selama tahun pelaporan: [GRI 306-1, 306-3, 306-4] [13.8.2, 13.8.4, 13.8.5] [B.2.c] F.13]

transforming liquid waste into biogas, and recycling support materials.

To reflect its commitment to responsible waste management, PTPN I regularly monitors the volume of waste generated and the management methods applied. The following data represents the Company's waste management performance during the reporting year: [GRI 306-1, 306-3, 306-4] [13.8.2, 13.8.4, 13.8.5] [B.2.c] F.13]

Tabel Limbah yang Dihasilkan
Waste Generated Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Limbah B3 Hazardous Waste (B3)	ribu ton thousand tons	9,76	14,16	10,8
Limbah Non-B3 Non-Hazardous Waste	ribu ton thousand tons	54,51	881,60	4.122,5
Total Limbah Total Waste	ribu ton thousand tons	64,27	895,76	4.133,4

Volume limbah yang dihasilkan pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perpindahan salah satu entitas dari wilayah operasional, sehingga aktivitas operasional yang menghasilkan limbah turut berkurang. Kondisi ini berkontribusi pada turunnya total limbah yang dikelola selama tahun berjalan.

The volume of waste generated in 2024 showed a decrease compared to the previous year. This decline was primarily due to the relocation of one entity from the operational area, which led to a reduction in waste-producing activities. As a result, the total volume of waste managed throughout the year also declined.

Untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), PTPN I mengimplementasikan pendekatan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) pada limbah Non-B3. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan serta mendukung kelangsungan operasional Perusahaan. [GRI 306-4, 306-5] [13.8.5, 13.8.6] [F.13]

To reduce the volume of waste disposed to the Final Disposal Site (TPA), PTPN I implements the 3R (*reduce, reuse, recycle*) approach for non-hazardous waste. This initiative aims to minimize environmental impact and support the sustainability of the Company's operations. [GRI 306-4, 306-5] [13.8.5, 13.8.6] [F.13]

Tabel Limbah yang Dikelola
Waste Managed Table

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Penggunaan kembali limbah Non-B3 Reuse of Non-Hazardous Waste	ribu ton thousand tons	53,51	880,60	4.122,5
Limbah Non-B3 yang Dibuang ke TPA Non-Hazardous Waste Disposed to Final Disposal	ribu ton thousand tons	1,00	1,00	-
Persentase Limbah Non-B3 yang Digunakan Kembali Percentage of Reused Non-Hazardous Waste	%	98,17	99,89	100
Limbah Non-B3 yang Dibuang ke TPA Percentage of Non-Hazardous Waste Disposed	%	1,83	0,11	-

Program Pengelolaan Limbah

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial Perusahaan, PTPN I mengambil inisiatif dalam mengelola dampak lingkungan. Dalam hal ini, prosedur pengelolaan limbah menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa operasional Perusahaan tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Langkah-langkah yang diambil PTPN I dalam menerapkan prosedur pengelolaan limbah dan polusi mencakup: [GRI 3-3, 306-2] [13.8.1, 13.8.3]

1. Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 PTPN I mengacu pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021, yaitu:

- Mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan oleh Perusahaan, antara lain oli bekas, aki bekas, kemasan/jerigen bekas bahan kimia (*water treatment*, pestisida), limbah kimia laboratorium (kemasan, bahan kimia kadaluarsa). Limbah elektronik yang tidak terpakai, dan sebagainya.
- Menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga berizin untuk mengelola limbah sesuai dengan standar dan memperkecil kemungkinan kerusakan lingkungan.

2. Pengelolaan Limbah Non-B3

Dalam pengelolaan Limbah Non B3, PTPN I menerapkan 3R (*reduce, reuse, recycle*), antara lain:

- Memanfaatkan cangkang, fiber, dan ampas tebu sebagai bahan bakar *boiler* untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin penghasil energi listrik.
- Mengalokasikan dana untuk jasa pembayaran pengiriman sampah ke tempat pembuangan sampah akhir dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dimana lokasi kantor berada.
- Menerapkan manajemen limbah dengan penerapan konsep produksi bersih (*cleaner production*), antara lain untuk meminimalisir sumber penghasil limbah, penggunaan saluran limbah melalui pipa tertutup, dan penggunaan bahan kimia dengan tingkat bahaya yang lebih rendah.

3. Pengelolaan Limbah Domestik

Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai pengelolaan limbah domestik, termasuk pengiriman sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Dalam hal ini, PTPN I juga telah mengalokasikan dana untuk membayar jasa pengiriman limbah ke tempat pembuangan akhir.

Waste Management Programs

As part of its commitment to sustainability and corporate social responsibility, PTPN I undertakes initiatives to manage environmental impacts. Waste management procedures are a major focus to ensure that the Company's operations are not only efficient but also environmentally responsible. PTPN I's initiatives in implementing waste and pollution management procedures include: [GRI 3-3, 306-2] [13.8.1, 13.8.3]

1. Hazardous Waste (B3) Management

Hazardous waste management at PTPN I refers to the Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021, which includes:

- Identifying B3 waste generated by the Company, such as used oil, used batteries, used chemical packaging/containers (for water treatment, pesticides), laboratory chemical waste (expired materials, packaging), and unused electronic waste.
- Handing over hazardous waste to licensed third parties for processing in accordance with applicable standards, minimizing the risk of environmental damage.

2. Non-Hazardous Waste Management

In managing non-B3 waste, PTPN I applies the 3R principle (*reduce, reuse, recycle*), including:

- Utilizing shells, fiber, and sugarcane bagasse as boiler fuel to produce steam that powers electricity-generating turbines.
- Allocating funds for waste disposal services to final disposal sites in coordination with local government authorities where Company offices are located.
- Implementing waste management using cleaner production concepts to minimize waste sources, such as using closed piping systems for wastewater and selecting less hazardous chemicals.

3. Domestic Waste Management

The Company coordinates with local governments regarding domestic waste management, including waste delivery to final disposal sites. In this regard, PTPN I has allocated funds to pay for waste transportation services.

4. Digitalisasi dan Ekonomi Sirkular

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola limbah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Perusahaan mengadopsi pendekatan digital dalam manajemen limbah melalui implementasi aplikasi *Eco Cycle*. Aplikasi ini dikembangkan untuk mencatat dan memonitor data limbah secara sistematis mulai dari penginputan, pemanfaatan, hingga pendapatan dari hasil penjualan limbah di setiap unit kerja.

Melalui aplikasi ini, proses pengelolaan limbah dilakukan secara berjenjang dan terverifikasi, mulai dari penginputan oleh unit kerja, persetujuan manajerial, hingga validasi oleh regional dan *holding*. Seluruh proses dilakukan secara periodik setiap bulan dan memastikan bahwa setiap data limbah yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pelaporan yang transparan, tetapi juga mendorong optimalisasi nilai tambah dari limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular yang terstruktur dan terdigitalisasi.

4. Digitalization and Circular Economy

As part of efforts to enhance more accountable and sustainable waste management, and in line with the circular economy principles outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029, the Company has adopted a digital approach to waste management through the implementation of the *Eco Cycle* application. This application is designed to systematically record and monitor waste data, including input volumes, utilization, and revenue generated from waste sales at each operational unit.

Through this platform, waste management processes are carried out in a structured and tiered manner—starting from data entry at the unit level, managerial approval, and ending with validation by regional and holding entities. The entire process is conducted on a monthly basis, ensuring that all reported data can be verified and accounted for. This initiative not only supports transparent reporting but also promotes value optimization from waste through a structured and digitized circular economy approach.

Ekonomi Sirkular melalui Pemanfaatan Limbah Menjadi Wood Pellet

Circular Economy through Waste Utilization into Wood Pellet

PTPN I menyadari potensi besar dari sisa hasil produksi dan limbah dalam operasionalnya. Untuk mendukung praktik berkelanjutan, Perusahaan melakukan efisiensi sumber daya, peningkatan daur ulang, pengelolaan susut dan sisa pangan, serta pengembangan produk ramah lingkungan. PTPN I juga memperkuat ekosistem daur ulang melalui aplikasi *Eco Cycle* berbasis *website*, sesuai SKPTS DTSS/SKPTS/21/2025 tentang Tim Kerja Ekonomi Sirkular PTPN Group.

Sebagai bagian dari komitmen ini, PTPN I mengembangkan inovasi pengelolaan limbah dengan memanfaatkan *wood pellet* sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Limbah biomassa berupa cangkang sawit (80%) dan limbah teh (20%) digunakan sebagai bahan baku utama, yang bertujuan mengurangi limbah dan menghasilkan produk bernilai guna untuk operasional Perusahaan.

PTPN I recognizes the significant potential of byproducts and waste generated from its operations. To support sustainable practices, the company focuses on resource efficiency, increased recycling, management of losses and food waste, as well as the development of environmentally friendly products. PTPN I also strengthens its recycling ecosystem through the *Eco Cycle* web-based application in accordance with SKPTS DTSS/SKPTS/21/2025 regarding the Circular Economy Task Force of the PTPN Group.

As part of this commitment, PTPN I has developed an innovative waste management program that utilizes wood pellets as an alternative ecofriendly energy source. Biomass waste consisting of 80 percent palm shell and 20 percent tea waste is used as the primary raw material to reduce waste and create valuable products for the Company's operations.

PTPN I telah memasang instalasi *wood pellet* mandiri di Pabrik Talun (Regional 2) dan Pabrik Jolotigo (Regional 3). Bahan baku meliputi kayu energi seperti kaliandra dan sengan serta limbah potongan teh, yang dimampatkan menjadi *wood pellet*. Penggunaan produk ini menekan pembelian dari luar dan meningkatkan efisiensi energi, khususnya dalam pengeringan dan pelayuan teh.

Uji coba menunjukkan rendemen *wood pellet* mencapai 95%, dengan sebagian besar limbah berhasil dikonversi menjadi bahan bakar alternatif yang efektif. Meskipun tantangan kualitas seperti variasi kadar air masih ada, *wood pellet* ini berpotensi menekan biaya dan mengurangi jejak karbon Perusahaan.

PTPN I terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas *wood pellet* agar lebih stabil, efisien, dan kompetitif. Upaya ini sejalan dengan strategi perusahaan dalam mengurangi emisi GRK serta mendukung praktik industri yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

PTPN I has installed self-produced wood pellet facilities at Talun Factory in Regional 2 and Jolotigo Factory in Regional 3. The raw materials include energy wood species such as kaliandra and sengan as well as tea cuttings which are compressed into wood pellets. Using these pellets reduces the need for external fuel purchases and improves energy efficiency particularly in the drying and wilting processes of tea leaves.

Testing shows that the wood pellets achieve a yield of up to 95 percent with most of the waste successfully converted into effective alternative fuel. Although challenges remain in maintaining consistent quality especially regarding moisture content the wood pellets have strong potential to reduce costs and lower the Company's carbon footprint.

PTPN I continues to develop and improve the quality of its wood pellets to make them more stable efficient and competitive. These efforts align with the company's strategy to reduce greenhouse gas emissions and support sustainable and responsible industrial practices.

Insiden Tumpahan

PTPN I memahami bahwa tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, atau zat berbahaya lainnya dapat memiliki dampak serius terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, Perusahaan sangat berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan bahan atau zat yang berpotensi tumpah. Sepanjang tahun pelaporan, PTPN I tidak mencatat adanya insiden tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, atau zat berbahaya lainnya. Di samping itu, selama tahun 2024, Perusahaan juga tidak menerima pengaduan atau laporan yang bersifat signifikan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan. [F.15] [F.16]

Spill Incidents

PTPN I recognizes that chemical, oil, fuel, or other hazardous substance spills can have serious consequences on environmental quality and human health. Therefore, the Company exercises great caution in managing and handling substances that pose a spill risk. During the reporting year, there were no recorded incidents of chemical, oil, fuel, or other hazardous material spills. Furthermore, throughout 2024, the Company did not receive any significant complaints or reports regarding non-compliance with environmental management regulations. [F.15] [F.16]

Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Hutan [F.9, F.10]

Biodiversity and Forest Conservation

Manajemen Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan fondasi bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ia menopang berbagai fungsi ekosistem, mulai dari penyerapan karbon, penyediaan air bersih, hingga pemeliharaan kesuburan tanah. Keberadaan flora dan fauna yang beragam tidak hanya menjaga stabilitas lingkungan, tetapi juga menyediakan nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan bagi masyarakat. [GRI 3-3] [13.3.1]

Sebagai entitas usaha yang bergerak di sektor agribisnis, PTPN I menyadari bahwa kegiatan operasional Perusahaan, yang mencakup pembukaan lahan dan budidaya tanaman dalam skala besar, memiliki potensi dampak langsung terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan hidup terutama perlindungan terhadap habitat alami dan spesies lokal merupakan salah satu pilar penting dalam kebijakan keberlanjutan Perusahaan. [GRI 304-2] [13.3.3] [F.9]

PTPN I memandang bahwa keberhasilan agribisnis tidak cukup hanya diukur dari produktivitas atau kinerja finansial, melainkan juga dari kemampuan menciptakan harmoni antara aktivitas ekonomi dan kelestarian alam. Untuk itu, Perusahaan terus berupaya menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan, termasuk identifikasi area bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/HCV*), pemantauan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi, terutama isu deforestasi dan konversi lahan gambut, PTPN I telah menerapkan kebijakan NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*). Kebijakan ini menegaskan bahwa PTPN I menolak pembukaan hutan alam dan lahan gambut baru, serta memastikan bahwa proses produksi menghormati hak asasi manusia, hak masyarakat lokal, dan prinsip keadilan sosial. [GRI 3-3] [304-2] [13.3.1] [13.3.3] [13.4.1]

Biodiversity Management

Biodiversity serves as the foundation for sustaining life on Earth. It supports a wide range of ecosystem functions, including carbon sequestration, clean water provision, and soil fertility maintenance. The existence of diverse flora and fauna not only ensures environmental stability but also provides significant economic, social, and cultural value to communities. [GRI 3-3] [13.3.1]

As a business entity operating in the agribusiness sector, PTPN I recognizes that the Company's operational activities, including large-scale land clearing and crop cultivation, have the potential to directly impact biodiversity. Accordingly, environmental preservation, particularly the protection of natural habitats and local species, is a key pillar of the Company's sustainability policy. [GRI 304-2] [13.3.3] [F.9]

PTPN I believes that the success of agribusiness should not be measured solely by productivity or financial performance but also by the ability to create harmony between economic activity and environmental sustainability. The Company continues to implement best practices in environmental management, including identifying High Conservation Value (HCV) areas, monitoring biodiversity, and sustainably managing environmental impacts.

In response to ongoing challenges, particularly deforestation and peatland conversion, PTPN I has implemented a No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy. This policy affirms the Company's stance against clearing natural forests and new peatlands and ensures that production processes respect human rights, the rights of local communities, and principles of social justice. [GRI 3-3] [304-2] [13.3.1] [13.3.3] [13.4.1]

PTPN I telah melakukan berbagai tindakan sebagai wujud komitmen anti deforestasi, seperti:

1. Menerapkan *traceability* terhadap pabrik, kebun, dan pemasok.
2. Menerapkan mekanisme investigasi insiden dan tindakan korektif jika terjadi kasus deforestasi.
3. Mengacu pada prinsip dan kriteria dalam mekanisme pembukaan lahan baru.
4. Mengidentifikasi dan memetakan areal operasional beserta peruntukannya masing-masing, kemudian melakukan pemantauan secara *real-time* melalui *Hotspot Control Dashboard*. Pemantauan ini memanfaatkan data dari berbagai sumber, termasuk SIGAP, SIPONGI, BMKG, serta BRIN (dahulu LAPAN). [13.4.1]
5. Mewajibkan pemasok untuk berpedoman pada Kebijakan Keberlanjutan PTPN I, hal ini juga dituangkan dalam klausul perikatan kerja sama antara pemasok dan PTPN I. [13.4.1]

Dalam beberapa tahun terakhir, Perusahaan berhasil mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam upaya pencegahan deforestasi. Tidak adanya laporan eksternal terkait penebangan hutan menjadi bukti konsistensi Perusahaan dalam menerapkan program anti-deforestasi. Lebih lanjut, seluruh volume produksi PTPN I telah 100% bebas dari penggundulan hutan maupun konversi ekosistem alami. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat PTPN I dalam menjaga kelestarian hutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar, sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusung Perusahaan. [13.4.2, 13.4.4]

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PTPN I memanfaatkan *platform open source* Global Forest Watch untuk melakukan analisis kepatuhan terhadap prinsip Non-Deforestasi. Penggunaan teknologi ini membantu Perusahaan dalam memantau perubahan tutupan hutan secara transparan dan akurat, sekaligus memperkuat integritas data dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat komitmen tersebut, PTPN I saat ini tengah melakukan pengumpulan data petani pemasok, khususnya pada komoditas karet. Data yang dikumpulkan mencakup legalitas lahan dan titik koordinat/*polygon* lokasi perkebunan, yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam sistem Digital Farming milik PTPN I. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penelusuran (*traceability*) produk dari hulu ke hilir, sekaligus memastikan bahwa seluruh rantai pasok karet bebas dari aktivitas deforestasi. [13.4.3, 13.4.5]

PTPN I has undertaken various actions as part of its anti-deforestation commitment, including:

1. Implementing *traceability* systems for mills, plantations, and suppliers.
2. Establishing mechanisms for incident investigations and corrective actions in the event of deforestation cases.
3. Referring to principles and criteria in the process of new land development.
4. Identify and map operational areas along with their designated purposes, followed by real-time monitoring through the *Hotspot Control Dashboard*. The monitoring process leverages data from multiple sources, including SIGAP, SIPONGI, BMKG, and BRIN (formerly known as LAPAN). [13.4.1]
5. Requiring suppliers to adhere to PTPN I's Sustainability Policy, as stipulated in the contractual agreements between the suppliers and PTPN I. [13.4.1]

In recent years, the Company has achieved significant progress in its commitment to environmental sustainability, particularly in efforts to prevent deforestation. The absence of external reports related to forest clearing serves as evidence of the Company's consistent implementation of its anti-deforestation program. Furthermore, 100% of PTPN I's production volume is confirmed to be free from deforestation and the conversion of natural ecosystems. This achievement reflects PTPN I's strong commitment to forest conservation and minimizing negative impacts on surrounding ecosystems, in line with the Company's sustainability principles. [13.4.2, 13.4.4]

As part of these efforts, PTPN I utilizes the open-source platform Global Forest Watch to assess compliance with its No Deforestation principles. This technology supports the Company in monitoring forest cover changes in a transparent and accurate manner, while also strengthening data integrity for environmentally focused decision-making.

As part of its continued commitment, PTPN I is currently collecting data on rubber-supplying farmers. The data includes land legality and geographic coordinates or polygons of plantation areas, which will be integrated into PTPN I's Digital Farming system. This initiative aims to enhance end-to-end product traceability and ensure that the entire rubber supply chain is free from deforestation. [13.4.3, 13.4.5]

Ke depan, PTPN I tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran dan kinerja dalam melindungi keanekaragaman hayati, sebagai bagian dari tanggung jawab Perusahaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan yang lebih luas.

Program Konservasi [GRI 2-25] [F.10]

PTPN I berkomitmen untuk tidak hanya mengimplementasikan kebijakan anti deforestasi, tetapi juga aktif melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati melalui berbagai upaya konservasi hutan yang berkelanjutan. Keberlanjutan merupakan bagian penting dari setiap aspek operasional Perusahaan, baik di dalam maupun di luar area perkebunan. Sebagai bagian dari komitmen ini, PTPN I menjalin kemitraan dengan lembaga konservasi dan komunitas lokal untuk memastikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dilakukan secara menyeluruh dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari pentingnya konservasi habitat alami sebagai langkah untuk menjaga ekosistem yang sehat, serta mendukung kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya. [GRI 3-3]

Pada tahun 2024, PTPN I berhasil melindungi 15,42 ribu hektar area konservasi yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Area-area ini diberi tanda batas atau plang HCV yang jelas untuk memastikan perlindungan yang efektif. Di dalam kawasan konservasi ini, terdapat berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi, termasuk spesies yang terancam punah (RTE), seperti Gaharu, Meranti Kuning, Gajah, Harimau, dan Orangutan. Semua spesies ini tercatat dalam daftar merah IUCN dan dalam daftar *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES), yang menjadi acuan dalam upaya perlindungan Perusahaan. [GRI 304-3, 304-4] [13.3.4, 13.3.5]

Untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi/menghilangkan konversi ekosistem alami, PTPN I telah mengimplementasikan berbagai inisiatif, antara lain: [13.4.1]

1. Penilaian dan Mitigasi Ancaman Lokal

PTPN I secara sistematis menilai potensi ancaman terhadap keanekaragaman hayati di luar kegiatan operasional dan melakukan mitigasi berbasis praktik terbaik untuk meminimalkan dampaknya.

Looking ahead, PTPN I remains committed to enhancing awareness and performance in biodiversity protection as part of its responsibility to maintain environmental balance and support broader sustainability goals.

Conservation Programs [GRI 2-25] [F.10]

PTPN I is committed not only to implementing anti-deforestation policies but also to actively protecting and conserving biodiversity through various sustainable forest conservation efforts. Sustainability is embedded in every aspect of the Company's operations, both within and beyond plantation areas. As part of this commitment, PTPN I collaborates with conservation organizations and local communities to ensure holistic biodiversity protection that positively impacts surrounding populations. The Company recognizes the importance of preserving natural habitats as a key step toward maintaining healthy ecosystems and sustaining the flora and fauna within them. [GRI 3-3]

In 2024, PTPN I successfully protected 15.42 thousand hectares of conservation areas identified as High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) zones, which have been designated as biodiversity protection areas. These zones are marked with clear HCV signposts to ensure effective protection. Within these conservation areas are numerous protected species, including those classified as Rare, Threatened, and Endangered (RTE), such as agarwood, yellow meranti, elephants, tigers, and orangutans. These species are listed in the IUCN Red List and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which serve as key references for the Company's protection efforts. [GRI 304-3, 304-4] [13.3.4, 13.3.5]

To preserve and protect biodiversity and reducing or eliminating the conversion of natural ecosystems, PTPN I has implemented several initiatives, including: [13.4.1]

1. Assessment and Mitigation of Local Threats

PTPN I systematically assesses potential threats to biodiversity beyond its operations and applies best-practice mitigation strategies to minimize impacts.

2. Pemantauan Keanekaragaman Hayati

Tim konservasi PTPN I secara rutin memantau kondisi keanekaragaman hayati di area operasional, mengawasi gangguan terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar, serta melakukan evaluasi intensitas gangguan yang terjadi.

3. Penanaman Pohon untuk Meningkatkan Stok Karbon [F.9]

Sebagai bagian dari upaya peningkatan stok karbon dan mendukung kehidupan keanekaragaman hayati, Perusahaan melakukan penanaman pohon di area perkebunan yang tidak hanya mendukung penyerapan karbon tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.

4. Diskusi dengan Pemangku Kepentingan

PTPN I terlibat aktif dalam diskusi dengan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan studi penilaian dampak sosial di area konservasi, memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan konservasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal.

5. Zona Non-Aplikasi Pestisida dan Penyangga Vegetatif

Perusahaan mempertahankan zona non-aplikasi pestisida dan penyangga vegetatif sesuai dengan standar *Rainforest Alliance* untuk memastikan bahwa kawasan konservasi tetap terlindungi dari dampak penggunaan bahan kimia yang berbahaya.

6. Pelatihan untuk Perlindungan Spesies Terancam Punah

PTPN I menyelenggarakan pelatihan untuk karyawan dan mitra usaha dalam mengidentifikasi dan melindungi spesies terancam punah serta mencegah perburuan atau perdagangan ilegal terhadap satwa liar.

7. Patroli dan Perlindungan Aktif

Perusahaan intensif melakukan patroli dan pemasangan papan himbauan untuk melindungi kawasan NKT dan SKT dari ancaman perburuan liar dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merusak habitat alami.

2. Biodiversity Monitoring

The Company's conservation team regularly monitors biodiversity conditions within operational areas, tracks disturbances to plant and wildlife species, and evaluates the intensity of such disturbances.

3. Tree Planting to Increase Carbon Stocks [F.9]

To enhance carbon stocks and support biodiversity, the Company plants trees in plantation areas that promote carbon absorption and provide habitats for various flora and fauna species.

4. Stakeholder Engagement

PTPN I actively engages with relevant stakeholders to conduct social impact assessments within conservation areas, ensuring that conservation policies and activities align with local community well-being.

5. Pesticide-Free Zones and Vegetative Buffers

The Company maintains pesticide-free zones and vegetative buffers in line with *Rainforest Alliance* standards to protect conservation areas from harmful chemical exposure.

6. Training for Endangered Species Protection

PTPN I conducts training for employees and business partners on identifying and protecting endangered species and preventing poaching or illegal wildlife trade.

7. Patrolling and Active Protection

The Company intensifies patrolling and installs warning signs to safeguard HCV and HCS areas from poaching and other illegal activities that threaten natural habitats.

Konservasi Satwa & Penguatan Ekonomi Hijau [F.9, F.10]

Wildlife Conservation & Strengthening the Green Economy

Pada tahun 2024, PTPN I menginisiasi sebuah program jangka panjang yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara holistik melalui sinergi lintas lembaga dan kolaborasi multipihak. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti dinas pemerintah, BUMN, organisasi non-pemerintah (NGO), serta masyarakat lokal, dan dirancang untuk berjalan secara berkelanjutan dengan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang seimbang.

Inisiatif ini mencakup beberapa kegiatan strategis. Pertama, kegiatan konservasi di kawasan sepadan Sungai Landak dan Taman Nasional Gunung Leuser yang dijalankan dengan prinsip berkelanjutan dan pendekatan *multiyears*, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat peduli lingkungan dan sadar wisata. Kedua, penyediaan areal pakan gajah di kawasan Tangkahan, Kabupaten Langkat, yang dilakukan melalui optimalisasi aset perusahaan yang berbatasan langsung dengan habitat satwa, untuk mendukung konservasi secara konkret. Ketiga, konservasi gajah yang didukung oleh penyediaan sarana pemantauan satwa bekerja sama dengan dinas dan lembaga terkait, bertujuan tidak hanya untuk menjaga kelestarian gajah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial positif bagi masyarakat sekitar tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Keempat, pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan ekowisata, yang mencakup aspek pemasaran, keuangan, dan *hospitality*, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Melalui program ini, PTPN I menunjukkan komitmennya untuk menjadi katalisator dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

In 2024, PTPN I launched a long-term program focused on environmental conservation and holistic community empowerment through cross-institutional synergy and multi-stakeholder collaboration. The program involves various stakeholders such as government agencies, state-owned enterprises (SOEs), non-governmental organizations (NGOs), and local communities. It is designed to be sustainable, aiming to deliver balanced social, economic, and ecological impacts.

This initiative includes several strategic activities. First, conservation efforts are being carried out in the riparian zones of the Landak River and within Gunung Leuser National Park, using a multi-year, sustainable approach that actively involves environmentally conscious and tourism-aware communities. Second, PTPN I is providing elephant feeding areas in the Tangkahan region, Langkat Regency, by optimizing company-owned land adjacent to wildlife habitats to support tangible conservation efforts. Third, elephant conservation is further supported by establishing wildlife monitoring facilities in collaboration with government agencies and institutions, aiming not only to protect elephant populations but also to create positive social and economic benefits for surrounding communities, without compromising forest preservation. Fourth, community training and assistance are provided to support the development of ecotourism, including capacity-building in marketing, finance, and hospitality, to strengthen local competitiveness in sustainable economic ventures.

Through this program, PTPN I reaffirms its commitment to serving as a catalyst for creating a balance between environmental sustainability and the overall improvement of community well-being.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati, PTPN I juga menerapkan pendekatan *High Carbon Value – High Carbon Stock* (HCV-HCS) dalam setiap pembangunan baru. Penilaian terhadap lahan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) dilakukan secara cermat, dan Perusahaan berkomitmen untuk melindungi hutan serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. [13.4.1]

As part of its commitment to biodiversity preservation, PTPN I also applies the High Carbon Value–High Carbon Stock (HCV-HCS) approach in all new developments. Assessments of HCV and HCS land are conducted thoroughly, and the Company remains committed to protecting forests and the biodiversity within them. [13.4.1]

Detail luasan area hutan NKT Perusahaan dapat ditemukan dalam tabel berikut: [GRI 304-1] [13.3.2]

Details of the company's HCV forest area can be found in the following table: [GRI 304-1] [13.3.2]

Wilayah Operasional Operational Region	Luas Area Konservasi (ribu ha) Conservation Area (thousand ha)	Cakupan Daerah/Area Coverage Area(s)
Regional 1 Region 1	2,50	Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang Langkat Regency, Deli Serdang Regency
Regional 2 Region 2	0,86	Kab. Lebak Lebak Regency
Regional 3 Region 3	-	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Kab. Jepara, Kab. Pati Cilacap Regency, Banyumas Regency, Brebes Regency, Pemalang Regency, Pekalongan Regency, Batang Regency, Kendal Regency, Semarang Regency, Karanganyar Regency, Jepara Regency, Pati Regency
Regional 4 Region 4	-	N/A
Regional 5 Region 5	9,63	Banyuwangi, Jember, Ngawi, Kediri, Blitar, Malang, Lumajang, Bondowoso Banyuwangi, Jember, Ngawi, Kediri, Blitar, Malang, Lumajang, Bondowoso
Regional 7 Region 7	-	Kab. Muara Enim, Kab. Lampung Tengah, Kab. Musi Banyuasin Muara Enim Regency, Central Lampung Regency, Musi Banyuasin Regency
Regional 8 Region 8	2,43	Kab. Lawu Timur, Kab. Luwu Utara East Luwu Regency, North Luwu Regency
Total	15,42	

Dalam tahap menentukan area konservasi, PTPN I berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal, termasuk para pakar dan ahli di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati. Proses penentuan area konservasi dilakukan dengan penilaian nilai konservasi yang melibatkan berbagai komponen yang relevan. Pemantauan terhadap kondisi area HCV dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan, dengan menjaga agar tanaman terhindar dari penggunaan bahan kimia. Selain itu, sosialisasi mengenai kawasan dengan NKT juga dilakukan secara rutin, sebagaimana tercantum dalam SOP Pengelolaan dan Pemantauan NKT Perusahaan.

In identifying conservation areas, PTPN I collaborates with both internal and external stakeholders, including conservation and biodiversity experts. The conservation assessment process involves evaluating various relevant conservation value components. Monitoring of HCV conditions is conducted periodically to ensure sustainability, particularly by avoiding chemical use in these areas. Awareness campaigns regarding HCV zones are also routinely carried out as outlined in the Company's SOP for HCV Management and Monitoring.

Beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan antara lain: [GRI 304-3]

Notable Initiatives Undertaken by the Company Include: [GRI 304-3]

1. Mempertimbangkan secara sistematis ancaman lokal terhadap keanekaragaman hayati di luar kegiatan bisnis Perusahaan, serta menetapkan langkah mitigasi berdasarkan praktik terbaik untuk keanekaragaman hayati dalam laporan Penilaian HCV-HCS, SIA, LUCA, dan LURI untuk setiap entitas Perusahaan.
2. Memantau keanekaragaman hayati yang diarahkan oleh tim konservasi (tenaga ahli dan asisten tenaga ahli), dengan didukung dengan penilaian sejawat (*peer review*) untuk memperkuat laporan akhir identifikasi NKT.

1. Systematically identifying local threats to biodiversity beyond business activities and implementing mitigation actions based on best practices. These are documented in the Company's HCV-HCS, SIA, LUCA, and LURI assessment reports for each entity.
2. Conducting biodiversity monitoring led by conservation teams (comprising experts and assistant experts) with peer-reviewed final reports to strengthen HCV findings.

- a. Pemantauan dilakukan mengacu pada kategori NKT di tiap lokasi, yaitu:
 - i. NKT 1, kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi;
 - ii. NKT 2, kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami;
 - iii. NKT 3, kawasan yang mempunyai ekosistem yang langka atau terancam punah;
 - iv. NKT 4, kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami;
 - v. NKT 5, kawasan alam yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal; dan
 - vi. NKT 6, kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.
 - b. Jenis pemantauan berkala yang dilakukan antara lain:
 - i. Pemantauan intensitas gangguan, termasuk bahaya dari kebakaran terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dilindungi dan/atau termasuk dalam Daftar CITES Appendix II dan/atau terancam beserta habitatnya;
 - ii. Pemantauan kondisi keanekaragaman dan kepadatan spesies tumbuhan yang termasuk dilindungi dan/atau termasuk dalam Daftar CITES Appendix II dan/atau terancam; dan
 - iii. Pemantauan kondisi keanekaragaman dan kelimpahan spesies satwa liar yang termasuk dilindungi dan/atau termasuk dalam Daftar CITES Appendix II dan/atau terancam.
 3. Melaksanakan penanaman pohon di dalam area perkebunan Perusahaan untuk meningkatkan stok karbon yang menunjang kehidupan keanekaragaman hayati yang ada pada area perkebunan dan NKT.
 4. Melakukan diskusi dan pendekatan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh-tokoh dan aparat pemerintah lokal, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lain yang dianggap kompeten untuk bekerja sama dari tahap studi penilaian dampak sosial di areal NKT sampai dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan NKT.
 5. Berdasarkan parameter *Rainforest Alliance*, mempertahankan zona non-aplikasi pestisida atau penyangga vegetatif yang terkait dengan semua bidang aktivitas manusia, atau ekosistem alami perairan dan darat.
 6. Memberikan informasi dan pelatihan kepada anggota kelompok dan pekerja agar mampu mengidentifikasi dan melindungi spesies yang terancam dan satwa liar lain. Perusahaan juga memastikan tidak ada perburuan, pembunuhan, pengumpulan, atau perdagangan tumbuhan atau hewan yang terancam punah.
- a. Monitoring is guided by the HCV categories at each location:
 - i. HCV 1: Areas that possess or provide essential support functions for biodiversity, particularly in relation to protected or conservation zone;
 - ii. HCV 2: Landscapes essential for natural ecological processes;
 - iii. HCV 3: Areas with rare or endangered ecosystems;
 - iv. HCV 4: Areas providing essential environmental services;
 - v. HCV 5: Natural area crucial for local communities' basic needs; and
 - vi. HCV 6: Areas important for the cultural identity of local communities.
 - b. Periodic monitoring includes:
 - i. Monitoring disturbance intensity, including fire threats to protected or endangered plant and wildlife species and their habitats listed under CITES Appendix II;
 - ii. Monitoring biodiversity conditions and the density of protected or threatened plant species; and
 - iii. Monitoring the abundance and diversity of protected or threatened wildlife species.
 3. Tree planting within plantation areas to increase carbon stocks and support biodiversity in both plantations and HCV areas.
 4. Engaging stakeholders, such as local leaders, government agencies, NGOs, and other qualified partners throughout the social impact assessment and the implementation of HCV management and monitoring.
 5. Maintaining pesticide-free zones or vegetative buffers per Rainforest Alliance parameters across all human activity areas or natural aquatic and terrestrial ecosystems.
 6. Providing information and training to members and workers on identifying and protecting endangered species and wildlife. The Company ensures that no poaching, killing, harvesting, or trading of endangered flora and fauna occurs.

7. Melakukan kegiatan rehabilitasi di area NKT dengan memperkaya jenis vegetasi yang dapat menjadi sumber pakan satwa liar, terutama satwa liar yang termasuk dalam kategori RTE.
8. Melaksanakan patroli pada area NKT dan SKT untuk melindungi spesies langka, terancam, dan hampir punah, serta ekosistem atau habitat penting dari spesies tersebut dengan memasang papan himbauan yang berisikan larangan untuk melakukan perburuan.
7. Rehabilitating HCV areas by enriching vegetation types that serve as food sources for wildlife, particularly RTE species.
8. Conducting patrols in HCV and HCS areas to protect rare, threatened, and endangered species and their key habitats, supported by warning signs prohibiting hunting.

Penanaman Satu Juta Pohon [B.2.d, F.10]

Planting One Million Trees

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan, pada tahun 2024 PTPN I menginisiasi Program Penanaman 1.000.000 Pohon yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Program ini bertujuan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional Perusahaan.



As part of its long-term commitment to environmental conservation, in 2024 PTPN I launched the One Million Trees Planting Program, which will run through 2029. This program aims to support biodiversity conservation and improve environmental quality around the Company's operational areas.

Program ini tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman semata, namun juga mencakup kegiatan lanjutan seperti pemantauan, penyulaman, dan perawatan pohon secara berkala guna memastikan tingkat keberhasilan yang tinggi dan dampak lingkungan yang optimal. Penanaman dilakukan di area internal maupun eksternal dari konsesi PTPN I, dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial-ekonomi setempat.

Jenis tanaman yang ditanam terdiri dari tanaman konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tanaman produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat, serta tanaman endemik yang bertujuan untuk melestarikan flora lokal.

Dalam pelaksanaannya, PTPN I menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), pemerintah daerah, dan Perhutani. Selain itu, kolaborasi juga melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO) serta pihak swasta, guna memastikan pendekatan multipihak yang holistik dan berkelanjutan.

The program goes beyond tree planting activities, including follow-up efforts such as regular monitoring, replanting, and tree maintenance to ensure high success rates and maximize environmental impact. Planting takes place both within and outside the concession areas of PTPN I, taking into account local ecological and socio-economic considerations.

The types of trees planted include conservation species to help maintain ecosystem balance, productive species that provide long-term economic benefits to local communities, and endemic species aimed at preserving native flora.

In implementing this program, PTPN I has established strategic partnerships with various stakeholders, including the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Watershed Management Agency (BPDAS), local governments, and Perhutani. The initiative also involves collaboration with non-governmental organizations (NGOs) and private sector entities to ensure a holistic and sustainable multi-stakeholder approach.

Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Guna mengurangi dampak lingkungan dan mendukung produktivitas jangka panjang, PTPN I berkomitmen untuk menerapkan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan. Perusahaan menyadari bahwa pertanian dapat memberikan dampak ekologis yang signifikan, seperti erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami. Untuk itu, Perusahaan berusaha secara proaktif untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan tanah, menjaga kualitas air, dan melindungi keanekaragaman hayati di setiap area operasional PTPN I.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Perusahaan telah mengadopsi berbagai program pengelolaan lahan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tetap produktif dan ramah lingkungan. Beberapa inisiatif yang PTPN I jalankan antara lain: [\[GRI 2-25\]](#)

1. Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

Perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan memastikan kawasan-kawasan tersebut dilindungi. Kawasan lindung dan konservasi ini dikelola dengan pengawasan yang ketat, sesuai dengan izin yang diberikan oleh lembaga pemerintah terkait. Pengelolaan yang hati-hati ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem di area yang memiliki nilai konservasi tinggi.

2. Pembatasan Infrastruktur pada Area NKT

Perusahaan berkomitmen untuk tidak membangun jalan, kanal, atau infrastruktur lainnya di area NKT, kecuali jika hal tersebut sangat diperlukan. Setiap pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan kontrol ketat dan prosedur operasi yang jelas, untuk memastikan bahwa dampak lingkungan yang mungkin timbul dapat diminimalkan.

3. Pemeliharaan Tutupan Lahan dan Hutan Spesifik

Perusahaan juga berupaya keras untuk mencegah pengurangan tutupan lahan atau hutan yang memiliki peran ekosistem penting dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) di dalam kawasan Unit Pengelolaan (UP). Pemantauan rutin dilakukan melalui pemetaan dan pemasangan tanda batas di area yang dilindungi, guna menjaga ekosistem tetap sehat dan mengurangi risiko erosi tanah.

4. Kebijakan Zero Burning

Sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap lingkungan, PTPN I telah mengadopsi kebijakan *zero burning*, yaitu tidak menggunakan pembakaran dalam

Sustainable Land Management

To reduce environmental impact and support long-term productivity, PTPN I is committed to implementing sustainable land management practices. The Company recognizes that agricultural activities can significantly affect the environment, including soil erosion, water pollution, and the loss of natural habitats. Therefore, PTPN I proactively strives to raise awareness of soil health, maintain water quality, and protect biodiversity across all its operational areas.

As part of this commitment, the Company has adopted various sustainable land management programs aimed at environmental conservation while ensuring that all operational activities remain productive and environmentally friendly. Several initiatives implemented by PTPN I include: [\[GRI 2-25\]](#)

1. High Conservation Value (HCV) Management

The Company has identified areas with High Conservation Value (HCV) and ensured these areas are protected. These protected and conservation areas are managed under strict supervision in accordance with permits granted by the relevant government authorities. This careful management aims to preserve ecosystems in areas with high conservation importance.

2. Infrastructure Restrictions in HCV Areas

The Company is committed to not constructing roads, canals, or other infrastructure in HCV areas unless absolutely necessary. Any infrastructure development is carried out under strict control and with clearly defined operational procedures to minimize potential environmental impacts.

3. Maintenance of Specific Land and Forest Cover

The Company strives to prevent the reduction of land or forest cover that plays a vital ecological role in the Watershed Areas (DAS) within the Management Unit (UP) territories. Routine monitoring is conducted through mapping and the installation of boundary markers in protected areas to maintain healthy ecosystems and reduce the risk of soil erosion.

4. Zero Burning Policy

As part of its environmental protection efforts, PTPN I has adopted a zero-burning policy, which prohibits the use of fire for land clearing. This policy helps

proses pembukaan lahan. Kebijakan ini membantu mengurangi polusi udara, mencegah kebakaran hutan, dan melindungi kualitas tanah serta keanekaragaman hayati yang ada.

5. Perlindungan Daerah Tangkapan Air

Perusahaan juga memastikan bahwa daerah tangkapan air yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar area operasional PTPN I dilindungi dengan baik. Dengan memasang tanda batas yang jelas, Perusahaan menjaga keberlanjutan sumber daya air yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sekitar.

PTPN I berkomitmen menjaga keberlanjutan produktivitas lahan dengan menerapkan pengelolaan tanah yang berfokus pada peningkatan kesuburan dan kesehatan tanah. Perusahaan telah memiliki rencana pengelolaan tanah yang mencakup berbagai praktik agrikultur berkelanjutan. Di antaranya adalah pengolahan tanah menggunakan garpu/*cultivator* pada areal tanaman teh, aplikasi pupuk organik pada tanaman kopi, serta pembuatan rorak sebagai bagian dari sistem konservasi tanah dan air. [13.5.1]

Dalam pelaksanaannya, PTPN I telah mengidentifikasi beberapa ancaman utama terhadap kesehatan tanah di wilayah operasional, seperti pemadatan tanah, hilangnya bahan organik, dan erosi terutama pada lahan dengan kemiringan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Perusahaan menerapkan langkah-langkah pengelolaan seperti pengolahan tanah konservatif, pemanfaatan bahan organik, dan penggunaan tanaman penutup tanah guna mempertahankan struktur tanah dan mencegah degradasi. [13.5.1]

Penggunaan input pertanian, khususnya pupuk, juga dikelola secara bijak dan berbasis rekomendasi teknis. Aplikasi pupuk anorganik dilakukan berdasarkan hasil analisis hara tanah dan kebutuhan spesifik tanaman, sesuai dengan panduan dari balai penelitian terkait. Selain itu, Perusahaan juga memanfaatkan limbah organik dari kebun sendiri untuk digunakan sebagai pupuk organik, sebagai bentuk efisiensi sumber daya dan pengurangan ketergantungan terhadap input eksternal. [13.5.1]

Sebagai perusahaan milik negara, PTPN I memiliki tanggung jawab untuk mendukung penerapan pertanian berkelanjutan tidak hanya di dalam Perusahaan, tetapi juga di seluruh rantai pasok. Untuk itu, PTPN I menjalankan beberapa program untuk membantu para pemasok dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Program-program ini meliputi:

reduce air pollution, prevent forest fires, and protect soil quality and biodiversity.

5. Protection of Water Catchment Areas

The Company also ensures that water catchment areas, which serve as vital resources for communities surrounding PTPN I's operational zones, are well protected. By installing clear boundary markers, the Company safeguards the sustainability of these water resources, which are crucial for both community welfare and environmental preservation.

PTPN I is committed to maintaining long-term land productivity by implementing soil management practices focused on improving soil fertility and health. The Company has developed a soil management plan that includes various sustainable agricultural practices. These include the use of forks/*cultivators* for soil tillage in tea plantations, the application of organic fertilizers on coffee crops, and the construction of rorak (small trenches) as part of soil and water conservation systems. [13.5.1]

In practice, PTPN I has identified several key threats to soil health within its operational areas, such as soil compaction, loss of organic matter, and erosion—particularly in sloped areas. To address these threats, the Company implements conservation tillage, organic matter utilization, and the use of cover crops to preserve soil structure and prevent degradation. [13.5.1]

The use of agricultural inputs, particularly fertilizers, is also carefully managed based on technical recommendations. The application of inorganic fertilizers is carried out according to the results of soil nutrient analyses and the specific needs of each crop, following guidelines provided by relevant research institutions. In addition, the Company recycles organic waste from its own plantations into organic fertilizer as part of its resource efficiency strategy and efforts to reduce dependency on external inputs. [13.5.1]

As a state-owned enterprise, PTPN I bears the responsibility of promoting sustainable agricultural practices not only within the Company but also throughout its supply chain. To this end, PTPN I runs several programs to support suppliers in adopting sustainable agricultural practices. These programs include:

1. Pelatihan Penggunaan Pestisida yang Bijak

Perusahaan memberikan pelatihan kepada para pemasok tentang penggunaan pestisida yang bijak, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan tanaman. Pelatihan ini disesuaikan dengan praktik terbaik yang ada, sehingga dapat diterapkan secara praktis oleh para petani.

2. Pelatihan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Perusahaan juga memberikan pelatihan kepada petani pemasok mengenai sistem pertanian berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan mereka dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. Pendataan dan Pengawasan terhadap Lahan Pemasok

Perusahaan melakukan pendataan yang teliti dan pengawasan terhadap total lahan yang dikelola oleh pemasok

Dengan berbagai langkah ini, PTPN I bertekad untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan lahan berkelanjutan di sektor pertanian dan perkebunan Indonesia. PTPN I percaya bahwa upaya Perusahaan untuk melestarikan lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk keberlanjutan alam, keanekaragaman hayati, maupun untuk masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

PTPN I berkomitmen untuk terus menjaga momentum ini dan mendorong perubahan positif di sektor industri, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian alam dan keberlanjutan. Dengan kerjasama yang baik dan pelaksanaan yang konsisten, Perusahaan yakin bahwa masa depan yang lebih berkelanjutan akan tercapai, memberikan manfaat tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Penggunaan Pestisida [13.6.1]

Perusahaan memiliki rencana manajemen hama yang dilaksanakan melalui berbagai pendekatan untuk memastikan pengendalian yang efektif sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Rencana tersebut mencakup penerapan *Early Warning System* (EWS) agar pengendalian dilakukan sebelum serangan hama meluas, serta prinsip 5T dalam penggunaan pestisida, yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara aplikasi. Perusahaan juga menyusun Rencana Harian Pengendalian Hama yang memuat informasi mengenai alat yang digunakan, dosis, dan areal yang terserang. Pemilihan jenis pestisida dilakukan berdasarkan jenis hama yang menjadi target, dengan mempertimbangkan efektivitas dan keamanan aplikasi.

1. Training in Responsible Pesticide Use

The Company provides training for suppliers on the responsible use of pesticides to reduce negative environmental impacts and improve crop management effectiveness. This training aligns with best practices, ensuring that farmers can implement them practically.

2. Training in Sustainable Farming Systems

The Company also trains supplier farmers in sustainable farming systems. This training aims to enhance farmers' knowledge and skills in managing their land in an environmentally friendly and sustainable manner.

3. Data Collection and Monitoring of Supplier Land

The Company conducts detailed data collection and monitoring of the total land area managed by its suppliers.

Through these efforts, PTPN I is determined to become a pioneer in sustainable land management in Indonesia's agriculture and plantation sectors. PTPN I believes that its commitment to environmental preservation will generate long-term benefits for nature, biodiversity, and the communities that rely on these natural resources.

PTPN I is committed to maintaining this momentum and driving positive change in the industry by involving local communities in conservation and sustainability efforts. Through strong collaboration and consistent implementation, the Company is confident that a more sustainable future can be achieved, delivering benefits not only for the environment but also for future generations.

Pesticide Use [13.6.1]

The Company has implemented a pest management plan using various approaches to ensure effective control while minimizing negative impacts on the environment and health. The plan includes the application of an *Early Warning System* (EWS) to enable control measures before pest attacks spread widely, as well as the adoption of the 5T principles in pesticide use: the right target, the right type, the right timing, the right dosage, and the right application method. The Company also prepares a *Daily Pest Control Plan*, which provides details on the equipment used, dosage, and affected areas. The selection of pesticide types is based on the targeted pest, with careful consideration of application effectiveness and safety.

Dalam upaya mencegah, mengurangi, atau memulihkan dampak negatif akibat penggunaan pestisida berbahaya, PTPN I membatasi atau melarang penggunaan pestisida yang tergolong sangat berbahaya, memperluas adopsi konsep pengendalian hama terpadu (mengombinasikan metode kimiawi, fisik, dan biologi), serta membangun zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar sungai dan kawasan permukiman untuk mengurangi risiko pencemaran. Perusahaan juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan dua kali setahun yang ditujukan kepada pekerja, mandor, dan asisten. Pelatihan ini mencakup sosialisasi bahaya penggunaan pestisida, pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD), identifikasi hama/penyakit tanaman, dan teknik penggunaan pestisida. [GRI 2-25]

Hingga periode pelaporan, Perusahaan belum melakukan perhitungan volume dan intensitas penggunaan pestisida berdasarkan klasifikasi toksisitas, namun ke depan Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan sistem pemantauan tersebut guna mendukung transparansi dan pengendalian risiko yang lebih baik. [13.6.2]

To prevent, reduce, or mitigate the negative impacts of hazardous pesticide use, PTPN I limits or prohibits the use of highly hazardous pesticides, promotes the adoption of integrated pest management (combining chemical, physical, and biological methods), and establishes buffer zones around rivers and residential areas to minimize the risk of pollution. The Company also conducts regular training sessions twice a year for workers, foremen, and supervisors. These trainings cover awareness of pesticide hazards, the importance of using personal protective equipment (PPE), pest/disease identification, and proper pesticide application techniques. [GRI 2-25]

As of the reporting period, the Company has not yet calculated the volume and intensity of pesticide use based on toxicity classifications. However, moving forward, the Company is committed to developing such monitoring systems to support greater transparency and enhanced risk management. [13.6.2]

Pengaplikasian Herbisida dan Pestisida, Regional 2 Herbicide and Pesticide Application, Region 2



Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan salah satu risiko lingkungan yang paling serius, dengan dampak signifikan terhadap ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Kebakaran tidak hanya merusak habitat alami, tetapi juga mengancam sumber daya yang menjadi tumpuan hidup bagi banyak komunitas. Oleh karena itu, Perusahaan telah menyusun berbagai inisiatif dan langkah mitigasi untuk menekan risiko kebakaran hutan serta dampak yang ditimbulkannya. Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan yang mendalam, PTPN I menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran hutan, di antaranya: [\[GRI 2-25\]](#)

1. Kebijakan Keberlanjutan [\[F.1\]](#)

Perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan yang komprehensif, termasuk kebijakan lingkungan dan komitmen NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*). Komitmen ini memastikan bahwa Perusahaan tidak akan menggunakan pembakaran dalam proses pembukaan lahan, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip yang diatur dalam ISCC. Kebijakan ini mengedepankan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, mencegah kerusakan ekosistem, serta melindungi keanekaragaman hayati.

2. Pedoman Peraturan dan Kepatuhan

PTPN I juga mengikuti Pedoman Permentan LHK No. 5 Tahun 2018 tentang pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa pembakaran. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh operasi Perusahaan dalam membuka lahan tanpa merusak lingkungan.

3. SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Perusahaan telah menyusun dan menerapkan SOP untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di seluruh area operasional. Langkah-langkah preventif yang dilakukan meliputi pemantauan secara rutin melalui menara pantau yang dibangun di setiap kebun serta pembentukan Tim Reaksi Cepat Tanggap Kebakaran. Selain itu, PTPN I juga melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan kebakaran melalui program Masyarakat Peduli Api yang mendirikan regu pemadam kebakaran. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan.

Forest Fire Prevention and Mitigation

Forest fires are one of the most serious environmental risks, with significant impacts on forest ecosystems, biodiversity, and the social welfare of local communities. Fires not only destroy natural habitats but also threaten the resources that many communities depend on for their livelihoods. Therefore, the Company has developed various initiatives and mitigation measures to reduce the risk of forest fires and their associated impacts. As part of its deep commitment to sustainability, PTPN I has implemented several policies to support environmental preservation and prevent forest fires, including: [\[GRI 2-25\]](#)

1. Sustainability Policy [\[F.1\]](#)

The Company has implemented a comprehensive sustainability policy, including environmental regulations and a No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) commitment. This commitment ensures that land clearing is conducted without burning, in compliance with applicable regulations and the principles outlined in the ISCC standard. The policy promotes environmentally friendly land management, prevents ecosystem damage, and protects biodiversity.

2. Regulatory Guidelines and Compliance

PTPN I adheres to the Ministry of Agriculture and Environmental Forestry Regulation No. 5 of 2018 on land clearing and plantation land management without burning. These guidelines serve as a reference for all Company operations in environmentally responsible land development.

3. Forest Fire Prevention and Mitigation SOP

The Company has developed and implemented Standard Operating Procedures (SOPs) for the prevention and mitigation of forest fires across all operational areas. Preventive measures include routine monitoring through watchtowers constructed at each plantation and the establishment of a Rapid Fire Response Team. Additionally, PTPN I involves local communities in fire prevention efforts through the "Community Fire Awareness" program, which forms community-based firefighting brigades. This collaboration enables communities to actively participate in forest fire prevention and response efforts.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan selama tiga tahun terakhir (2022-2024), Perusahaan tidak mencatatkan insiden kebakaran atau deforestasi di area kebun dan lahan operasional. Hal ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan dan upaya mitigasi yang telah diterapkan. Meskipun demikian, Perusahaan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan proses pemantauan dan pelaporan, dengan mengacu pada standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke depan, PTPN I akan terus mendorong kolaborasi dan edukasi dengan masyarakat lokal, memperkuat kesadaran akan pentingnya pencegahan kebakaran hutan, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih baik untuk meminimalkan risiko kebakaran. Komitmen ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Based on evaluations and monitoring over the past three years (2022–2024), the Company recorded no incidents of fires or deforestation in its plantations or operational areas. This outcome demonstrates the effectiveness of the policies and mitigation efforts implemented. Nevertheless, the Company remains committed to continuously improving its monitoring and reporting processes, in accordance with prevailing standards and regulations.

Going forward, PTPN I will continue to promote collaboration and education among local communities, increase awareness of the importance of forest fire prevention, and implement improved mitigation measures to further minimize fire risks. This commitment not only aims to preserve biodiversity but also to ensure that all Company operations align with sustainability principles that support social and environmental well-being.

Pelatihan Pemadaman Kebakaran, Regional 7
Firefighting Training, Region 7



Penilaian Lingkungan Pemasok

Supplier Environmental Assessment

Rantai nilai PTPN I dimulai dari kegiatan budidaya tanaman (hulu), proses produksi dan pengolahan hasil perkebunan (*midstream*), hingga distribusi produk ke pelanggan atau industri pengolahan lanjutan (hilir). Entitas hulu mencakup unit-unit kebun dan pabrik kelapa sawit, pabrik teh, serta fasilitas produksi karet dan gula. Sementara di sisi hilir, Perusahaan melibatkan mitra pengolahan, pedagang besar, dan konsumen industri. [GRI 3-3, 2-6]

PTPN I menyadari bahwa keberlanjutan Perusahaan tidak hanya bergantung pada operasional internal, tetapi juga pada praktik bisnis yang dilakukan oleh pemasok dalam rantai nilai. Oleh karena itu, PTPN I secara aktif melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh para pemasok. PTPN I berkomitmen untuk mengembangkan mekanisme penilaian yang transparan dan efektif terkait dengan ESG *due diligence* serta dampak lingkungan dari kegiatan pemasok. Sebagai bagian dari komitmen ini, PTPN I juga akan membuat laporan berkala yang mencakup hasil penilaian lingkungan kepada seluruh pemasok. [GRI 3-3]

Sebagai langkah konkret, PTPN I telah memulai audit internal sesuai dengan SOP Evaluasi Penyedia Barang/Bahan Baku, yang mencakup evaluasi aspek lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu, Perusahaan juga terus berupaya meningkatkan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasokannya dengan mendorong pemasok untuk mengadopsi standar lingkungan yang lebih tinggi. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemasok berkontribusi pada pencapaian tujuan keberlanjutan Perusahaan, menciptakan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. [GRI 308-1]

Komitmen PTPN I dalam meningkatkan praktik keberlanjutan

1. Mempertahankan Ketelusuran (*traceability*)

PTPN I berkomitmen untuk mempertahankan *traceability* dengan melacak setiap bahan baku yang digunakan dalam proses produksi secara transparan, mulai dari sumber di perkebunan hingga proses produksi. Perusahaan memastikan bahan baku

PTPN I's value chain begins with upstream activities in plantation cultivation, followed by midstream processes involving the production and processing of plantation products, and extends to downstream distribution to customers or further processing industries. The upstream segment includes plantation units and processing facilities for palm oil, tea, rubber, and sugar. On the downstream side, the Company engages with processing partners, bulk traders, and industrial consumers. [GRI 3-3, 2-6]

PTPN I recognizes that the Company's sustainability does not solely depend on internal operations but also on the business practices of suppliers within the value chain. Therefore, PTPN I actively evaluates the environmental impacts generated by its suppliers. The Company is committed to developing transparent and effective assessment mechanisms for ESG *due diligence* and the environmental impacts of supplier activities. As part of this commitment, PTPN I will also issue periodic reports to suppliers containing the results of environmental assessments. [GRI 3-3]

As a concrete step, PTPN I has initiated internal audits based on the SOP for Supplier Evaluation, which includes assessments of environmental aspects and compliance with applicable regulations. In addition, the Company continues to promote improved sustainability practices across its supply chain by encouraging suppliers to adopt higher environmental standards. This commitment aims to ensure that all suppliers contribute to achieving the Company's sustainability goals, creating a more environmentally friendly and sustainable supply chain. [GRI 308-1]

PTPN I's Commitments to Advancing Sustainability Practices

1. Maintaining Traceability

PTPN I is committed to maintaining *traceability* by transparently tracking each raw material used in production, from the plantation source to the production process. The Company ensures that all raw materials are sourced sustainably, free from

yang digunakan berasal dari sumber berkelanjutan, bebas dari deforestasi, dan sesuai dengan standar keberlanjutan. PTPN I juga melibatkan pihak ketiga independen untuk memverifikasi proses ini, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi.

2. Komitmen Praktik Keberlanjutan

Perusahaan mewajibkan seluruh pemasok dan kontraktor (100%) untuk menandatangani komitmen terhadap praktik keberlanjutan sebagai bagian dari perjanjian kerjasama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasokan PTPN I beroperasi sesuai dengan standar keberlanjutan yang telah ditetapkan.

3. Audit Berkala dan Prioritas pada Pemasok Berisiko Tinggi

Untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik keberlanjutan, PTPN I akan melakukan audit secara berkala terhadap pemasok berisiko tinggi, yang mencakup sekitar 20% dari total pemasok Perusahaan. Audit ini direncanakan dimulai pada tahun 2025, dengan target untuk menyelesaikan audit terhadap 100% pemasok berisiko tinggi dalam jangka waktu lima tahun, atau pada tahun 2030. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pemasok Perusahaan memenuhi standar keberlanjutan yang ketat, serta memperkuat upaya PTPN I dalam menciptakan rantai pasokan yang transparan dan bertanggung jawab.

PTPN I berkomitmen untuk memperkuat prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap praktik keberlanjutan di setiap tahap rantai pasok. PTPN I berupaya untuk memastikan bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan dari seluruh operasi Perusahaan tetap minimal dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Melalui pendekatan ini, PTPN I berfokus pada pencapaian keberlanjutan yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. [GRI 308-2] [F.23]

deforestation, and compliant with sustainability standards. PTPN I also engages independent third parties to verify this process to ensure accountability and transparency.

2. Sustainability Commitment from Suppliers

The Company requires all suppliers and contractors (100%) to sign a sustainability commitment as part of their partnership agreement. This ensures that every party involved in PTPN I's supply chain operates in accordance with established sustainability standards.

3. Regular Audits and Prioritization of High-Risk Suppliers

To ensure compliance with sustainable practices, PTPN I will conduct regular audits of high-risk suppliers, representing approximately 20% of the Company's total suppliers. These audits are scheduled to begin in 2025, with a target of completing audits for 100% of high-risk suppliers within five years, or by 2030. This step is intended to ensure that all Company suppliers meet stringent sustainability standards and reinforce PTPN I's efforts to build a transparent and responsible supply chain.

PTPN I is committed to strengthening transparency and compliance with sustainability practices at every stage of the supply chain. The Company strives to ensure that all environmental impacts from the Company's operations remain minimal and are managed responsibly. Through this approach, PTPN I focuses on achieving sustainability that not only meets global standards but also contributes to environmental preservation and community well-being.

[GRI 308-2] [F.23]

05

Kinerja Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance for Empowerment and Welfare





Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Development

PTPN I memandang sumber daya manusia (SDM) sebagai aset strategis dalam mendukung pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu, PTPN I berkomitmen untuk secara berkelanjutan memperkuat kualitas SDM yang kompeten, profesional, dan berdedikasi. Komitmen ini diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh karyawan.

Pengelolaan aspek SDM secara menyeluruh dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas, pengelolaan karier, serta kesejahteraan karyawan. Sementara itu, pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi tanggung jawab bersama Divisi Manajemen Risiko & Sustainability, Divisi Komoditi Karet, Divisi Komoditi Kopi & Aneka Tanaman, serta Divisi Komoditi Teh & Kemitraan. Kolaborasi antar divisi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Perusahaan dijalankan dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan bagi tenaga kerja, sebagai bagian dari komitmen PTPN I terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PTPN I senantiasa berkomitmen untuk mengelola sumber daya manusia secara bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Seluruh kebijakan serta praktik ketenagakerjaan yang diterapkan dirancang untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat, setara, dan terbuka bagi semua pihak. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan merujuk pada ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam mengembangkan praktik SDM, Perusahaan secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keberagaman sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, yang hak-haknya dijamin melalui Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan. Implementasi kebijakan ini diawasi secara langsung oleh Kepala Divisi SDM dengan dukungan dan arahan dari Direktur SDM. [GRI 3-3] [13.15.1]

PTPN I views human resources (HR) as a strategic asset in supporting the achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and long-term goals. Therefore, the Company is committed to continuously enhancing the quality of its workforce to ensure they are competent, professional, and dedicated. This commitment is demonstrated through the fulfillment of labor rights and the creation of a safe, healthy, and supportive work environment for all employees.

Comprehensive HR management is overseen by the Human Resources Division, which is responsible for capacity development, career management, and employee welfare. Meanwhile, the management of occupational health and safety (OHS) falls under the shared responsibility of the Risk Management & Sustainability Division, Rubber Commodity Division, Coffee & Diversified Crops Commodity Division, and Tea Commodity & Partnership Division. This interdivisional collaboration ensures that all operational activities are carried out with a strong focus on employee safety, health, and protection, as part of PTPN I's commitment to sustainability principles.

Human Resource Management

PTPN I remains committed to managing its human resources responsibly, prioritizing fairness, inclusivity, and sustainability. All labor policies and practices are designed to foster a healthy, equitable, and inclusive work environment for all stakeholders. In implementation, the Company refers to national regulations, particularly Law No. 13 of 2003 on Manpower and its amendments in Law No. 11 of 2020 on Job Creation.

In developing HR practices, the Company consistently upholds the values of equality and diversity as mandated by the Universal Declaration of Human Rights (1948). Special attention is also given to vulnerable groups, including persons with disabilities, whose rights are safeguarded under the Company's Human Rights Policy. The implementation of this policy is directly supervised by the Head of the HR Division, with guidance and support from the HR Director. [GRI 3-3] [13.15.1]

PTPN I berkomitmen menerapkan praktik perekrutan yang etis dan adil. Kompensasi pekerja diberikan secara transparan dengan penerapan pembayaran natura secara terbatas dan proporsional. Perusahaan juga memastikan bahwa hubungan kerja dalam rantai pasok dijalankan sesuai kerangka hukum nasional dan standar ketenagakerjaan internasional, termasuk perlindungan sosial, status hubungan kerja yang sah, dan keberadaan kontrak kerja legal. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut ditangani melalui audit rutin, evaluasi mitra, dan mekanisme pengaduan yang terbuka. [13.20.1]

Seluruh proses ketenagakerjaan, mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga penilaian kinerja dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi. Perusahaan memastikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, maupun latar belakang lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta panduan nasional terkait kesetaraan di tempat kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. [GRI 3-3, 405-1] [13.15.1, 13.15.2] [F.18]

Dalam hal kompensasi dan penghargaan, Perusahaan menerapkan sistem berbasis kinerja yang adil dan transparan. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh imbalan kerja sesuai kontribusinya, tanpa memandang gender. Pada tahun 2024, tidak ditemukan kesenjangan dalam rasio gaji pokok dan remunerasi antara karyawan laki-laki dan perempuan, atau dapat dikatakan 1:1. [GRI 405-2] [13.15.3]

Keberagaman dalam organisasi juga tercermin dalam komposisi karyawan. Hingga akhir tahun 2024, sekitar 12,98% dari seluruh karyawan adalah perempuan, dengan proporsi perempuan dalam posisi manajerial mencapai sekitar 1,2%. Perusahaan terus mendorong peningkatan representasi perempuan dan keberagaman dalam kepemimpinan sebagai bagian dari strategi pengembangan organisasi yang inklusif.

PTPN I terus berupaya memperkuat keberagaman dan peran karyawan perempuan melalui langkah-langkah berikut: [GRI 3-3] [13.15.1]

1. Menerapkan kode etik yang telah ditandatangani oleh manajemen dan disosialisasikan ke seluruh karyawan.
2. Menerapkan *Respectful Workplace Policy* (RWP) untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja.
3. Mendukung dan memfasilitasi berjalannya kelompok-kelompok afinitas seperti "*women support group*"
4. Melaksanakan pelatihan tentang keberagaman untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan akan nilai kesetaraan dan keberagaman.

PTPN I is committed to upholding fair and ethical recruitment practices. Employee compensation is provided transparently, with in-kind payments applied in a limited and proportional manner. The Company also ensures that labor practices across its supply chain comply with national labor laws and international labor standards, including social protection, legal employment status, and the existence of formal employment contracts. Non-compliance with these principles is addressed through regular audits, partner evaluations, and accessible grievance mechanisms. [13.20.1]

All employment processes, from recruitment and career development to performance appraisal, are carried out based on the principle of non-discrimination. The Company ensures that no employee is treated differently based on gender, religion, race, or background. This is in line with Law No. 21 of 1999, which ratifies ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, as well as national guidelines on workplace equality issued by the Ministry of Manpower. [GRI 3-3, 405-1] [13.15.1, 13.15.2] [F.18]

Regarding compensation and rewards, the Company applies a fair and transparent performance-based system. Every employee has an equal opportunity to receive compensation based on their contributions, regardless of gender. In 2024, no gap was found in the ratio of basic salary and remuneration between male and female employees, or 1:1. [GRI 405-2] [13.15.3]

Organizational diversity is also reflected in employee composition. As of the end of 2024, approximately 12.98% of employees were women, with about 1.2% holding managerial positions. The Company continues to promote increased female representation and diversity in leadership as part of its inclusive organizational development strategy.

PTPN I is committed to advancing diversity and the role of female employees through the following initiatives: [GRI 3-3] [13.15.1]

1. Implementing a code of ethics signed by management and communicated to all employees.
2. Enforcing the *Respectful Workplace Policy* (RWP) to prevent discrimination and harassment in the workplace.
3. Supporting and facilitating affinity groups, such as women's support groups.
4. Conducting diversity training to enhance employee understanding and awareness of equality and diversity values.

5. Komunikasi pesan seperti “Perempuan di Perkebunan”, yang bertujuan untuk mempromosikan peran dan kontribusi perempuan dalam industri perkebunan.
6. Mengembangkan *hotline* untuk melaporkan pelecehan seksual, serta menyediakan alat perlindungan diri (*personal protective equipment/PPE*) dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan di *mess* Perusahaan.
7. Memastikan bahwa semua karyawan perempuan mendapatkan akses ke program Srikandi BUMN.
8. Mengembangkan lingkungan pembelajaran yang inklusif dengan menyediakan mentorship, terutama di divisi bisnis yang memiliki perwakilan perempuan cenderung lebih minim.
9. Menyediakan beasiswa dalam jurusan dengan jumlah karyawan perempuan minim, sebagai langkah untuk mendorong lebih banyak partisipasi perempuan di sektor perkebunan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, PTPN I secara aktif melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui partisipasi dalam tim manajemen. Keterlibatan ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan, baik bagi keberlangsungan operasional Perusahaan maupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja. PTPN I mencatat bahwa mayoritas karyawan operasional direkrut dari kota dan kabupaten sekitar lokasi kebun, yang mencerminkan kontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memperkuat peran serta masyarakat setempat dalam berbagai aspek operasional, Perusahaan berupaya memastikan bahwa aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai lokal dapat terakomodasi secara adil dan proporsional. Pendekatan ini tidak hanya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberlanjutan jangka panjang usaha Perusahaan. [GRI 3-3, 413-1] [13.12.1, 13.12.2]

Informasi Tentang Karyawan

Hingga akhir Desember 2024, jumlah karyawan yang tercatat di PTPN I mencapai 39.409 orang. Data disusun berdasarkan sistem kepegawaian internal dan telah diverifikasi oleh unit pengelola data SDM. Fluktuasi tenaga kerja sepanjang periode pelaporan disebabkan oleh penyesuaian strategi organisasi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja dan optimalisasi aset, terutama pada wilayah-wilayah yang mengalami perubahan status atau pengembangan kerja sama strategis. Informasi lebih lanjut terkait komposisi dan distribusi karyawan dapat dilihat pada tabel berikut: [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2]

5. Communicating messages like “Women in Plantations” to promote the roles and contributions of women in the plantation industry.
6. Developing a hotline for reporting sexual harassment and providing personal protective equipment (PPE) and accommodations suited to women’s needs at company housing facilities.
7. Ensuring all female employees have access to the Srikandi BUMN program.
8. Creating an inclusive learning environment by offering mentorship opportunities, especially in business divisions with lower female representation.
9. Offering scholarships in fields with low female participation, to encourage greater involvement of women in the plantation sector.

As part of its commitment to sustainable development, PTPN I actively involves local communities in decision-making processes, including participation in management teams. This engagement aims to generate significant positive impacts both for the continuity of the Company’s operations and the well-being of communities surrounding its operational areas. PTPN I notes that the majority of its operational workforce is recruited from cities and regencies near the plantations, reflecting a direct contribution to job creation and local economic empowerment. By strengthening local community involvement in various operational aspects, the Company seeks to ensure that local aspirations, needs, and values are fairly and proportionally accommodated. This approach not only fosters harmonious and mutually beneficial relationships but also forms a critical foundation for maintaining social stability and supporting the long-term sustainability of the Company’s business. [GRI 3-3, 413-1] [13.12.1, 13.12.2]

Employee Information

As of the end of December 2024, PTPN I recorded a total workforce of 39,409 employees. The data is compiled using the company’s internal human resources system and has been verified by the HR data management unit. Workforce fluctuations during the reporting period were driven by organizational strategy adjustments, including workforce rationalization and asset optimization, particularly in areas undergoing status changes or the development of strategic partnership. Further details regarding employee composition and distribution are presented in the following table: [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2]

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2] [C.3.b]
Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2024	2023*	2022*
Laki-laki Male	34.293	38.919	42.243
Perempuan Female	5.116	5.840	6.617
Total	39.409	44.759	48.860

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023

*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan dan Jenis Kelamin [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2] [C.3.b]
Employee Composition Based on Employment Status and Gender

Status Ketenagakerjaan Employment Status	2024		2023*		2022*	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Tetap Permanent	23.654	3.760	26.885	4.446	30.121	5.086
Kontrak (PKWT) Contract (PKWT)	10.635	1.360	12.034	1.394	12.122	1.531
	34.289	5.120	38.919	5.840	42.243	6.617
Total	39.409		44.759		48.860	

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023

*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja dan Status Ketenagakerjaan [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2] [C.3.b]
Employee Composition Based on Work Region and Employment Status

Wilayah Kerja Work Region	2024		2023*		2022*	
	Karyawan Tetap Permanent Employee	Karyawan Kontrak Contract Employee	Karyawan Tetap Permanent Employee	Karyawan Kontrak Contract Employee	Karyawan Tetap Permanent Employee	Karyawan Kontrak Contract Employee
Kantor Pusat Head Office	193	38	17	-	-	-
Regional 1 Region 1	3.204	2.430	3.678	2.760	4.218	2.513
Regional 2 Region 2	6.040	3.763	6.921	5.420	7.848	5.356
Regional 3 Region 3	6.324	1.409	6.934	1.662	7.219	1.816
Regional 4 Region 4	1.666	139	834	356	1.928	183
Regional 5 Region 5	1.609	18	1.643	184	1.807	210
Regional 6 (KSO) Region 6 (JO)	4.632	259	4.438	289	4.375	323
Regional 7 Region 7	5.235	1.843	6.878	560	7.408	569
Regional 8 Region 8	335	272	1.343	842	1.613	1.474
	29.238	10.171	32.686	12.073	36.416	12.444
Total	39.409		44.759		48.860	

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023

*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2] [C.3.b]

Employee Composition Based on Work Region and Gender

Wilayah Kerja Work Region	2024		2023*		2022*	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Kantor Pusat Head Office	188	43	16	1	-	-
Regional 1 Region 1	5.145	489	5.862	576	6.113	618
Regional 2 Region 2	7.912	1.891	10.202	2.139	10.677	2.527
Regional 3 Region 3	6.270	1.463	6.912	1.684	7.186	1.849
Regional 4 Region 4	1.666	139	1.064	126	1.928	183
Regional 5 Region 5	1.458	169	1.643	184	1.807	210
Regional 6 (KSO) Region 6 (JO)	4.632	259	4.438	289	4.375	323
Regional 7 Region 7	6.563	515	6.878	560	7.408	569
Regional 8 Region 8	459	148	1.904	281	2.747	340
Total	34.293	5.116	38.919	5.840	42.241	6.619
	39.409		44.759		48.860	

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023

*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin [GRI 2-7, 405-1] [13.15.2] [C.3.b]

Employee Composition by Age Group and Gender

Kelompok Usia Age Group	2024		2023*		2022*	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
18-30 Tahun 18-30 Years	3.352	319	4.095	377	4.565	415
31-40 Tahun 31-40 Years	7.763	743	8.963	796	9.993	965
41-50 Tahun 41-50 Years	14.357	2.109	15.855	2.443	16.863	3.041
>50 Tahun >50 Years	8.821	1.945	10.006	2.224	10.725	2.293
Total	34.293	5.116	38.919	5.840	42.146	6.714
	39.409		44.759		48.860	

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023

*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Selama periode pelaporan, Perusahaan juga mencatat keberadaan tenaga kerja non-karyawan, yang terdiri dari peserta magang, tenaga alih daya, dan kontraktor. Seluruh pekerja ini berada dalam pengendalian operasional Perusahaan, meskipun tidak berstatus sebagai karyawan tetap maupun kontrak. Rincian jumlah dan kategorinya disajikan sebagai berikut: [GRI 2-8]

During the reporting period, the Company also recorded the presence of non-permanent workers, which included interns, outsourced workers, and contractors. All of these workers are under the Company's operational control, even though they are not classified as permanent or contract employees. The details of their numbers and categories are presented below: [GRI 2-8]

Komposisi Karyawan Bukan Pekerja Langsung Composition of Non-Permanent Workers

Deskripsi Description	2024	2023*	2022*
Pekerja Magang Interns	1.357	1.343	1.434
Pekerja Alih Daya Outsourced Workers	8.118	2.272	4.398
Kontraktor Contractors	0	0	0
Total	9.475	3.615	5.832

*) Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023
*) Restatement of data for the years 2022 and 2023

Fluktuasi signifikan dalam jumlah pekerja non-karyawan terutama terjadi pada pekerja alih daya, yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan strategi operasional di sejumlah wilayah kerja. Seluruh data dikompilasi dari sistem pelaporan internal unit SDM dan divalidasi oleh Divisi Manajemen Risiko & Sustainability. [GRI 2-8]

A significant fluctuation in the number of non-employee workers occurred primarily among outsourced personnel, which increased more than threefold compared to the previous year. This increase was driven by changes in operational strategy across several work areas. All data were compiled from the internal HR reporting system and validated by the Risk Management & Sustainability Division. [GRI 2-8]

Perekrutan dan Pergantian Karyawan [GRI 3-3, 401-1]

Pergantian karyawan merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam dinamika organisasi yang terus berkembang. Dalam merespons perubahan tersebut, PTPN I senantiasa melakukan proses rekrutmen yang terencana dan terstruktur untuk memastikan kesinambungan operasional serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dari sumber eksternal dan internal. Rekrutmen eksternal memberikan kesempatan bagi talenta baru dari luar organisasi untuk berkontribusi dan membawa perspektif segar, sementara rekrutmen internal membuka peluang bagi karyawan yang telah ada untuk berkembang dan menapaki jenjang karier yang lebih tinggi. Dalam setiap tahapan rekrutmen, PTPN I menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan. Setiap individu diberikan peluang yang sama untuk mengikuti proses seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan integritasnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PTPN I terhadap keberagaman dan inklusivitas dalam lingkungan kerja.

Employee Recruitment and Turnover [GRI 3-3, 401-1]

Employee turnover is an inevitable aspect of a continuously evolving organization. In response to such changes, PTPN I consistently carries out a well-planned and structured recruitment process to ensure operational continuity and meet the need for competent human resources aligned with the Company's values. Recruitment is conducted through two main channels: external and internal. External recruitment provides opportunities for new talents outside the organization to contribute and bring fresh perspectives, while internal recruitment offers existing employees opportunities for growth and career advancement. At every stage of the recruitment process, PTPN I upholds the principles of equality and fairness. Every individual is given equal opportunity to participate in the selection process based on their qualifications, competencies, and integrity. This approach reflects PTPN I's commitment to diversity and inclusivity in the workplace.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, berikut data rekapitulasi pergantian karyawan PTPN I selama tahun 2022 hingga 2024:

As part of transparency and accountability, the following is a summary of employee turnover data at PTPN I from 2022 to 2024:

Jumlah Karyawan Baru dan Karyawan Keluar [GRI 401-1]
New Hires and Employee Turnover

Uraian Description	2024	2023*	2022*
Jumlah Karyawan Total Employees	39.409	44.759	48.860
Karyawan Baru New Hires	479	3.088	1.074
Karyawan Keluar Employee Turnover	3.810	4.679	4.127
Turnover Rate (%) Turnover Rate (%)	9,67	10,45	8,45

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023
*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Pemenuhan Hak Karyawan

PTPN I menyadari bahwa karyawan merupakan aset utama dalam mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian kinerja jangka panjang. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan remunerasi yang adil, layak, dan kompetitif kepada seluruh karyawan. Remunerasi yang diberikan mencakup berbagai komponen, antara lain gaji pokok, program kesehatan, ketenagakerjaan, serta insentif kinerja. Seluruh kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh, serta memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah mereka berikan bagi pertumbuhan Perusahaan.

Dalam menetapkan kebijakan pengupahan, PTPN I senantiasa mengacu pada ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di masing-masing wilayah operasional. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap karyawan menerima penghasilan yang mencerminkan standar kehidupan dan biaya hidup yang berlaku di wilayah tersebut. [F.20]

Selain itu, PTPN I juga menerapkan pemberian hak karyawan yang disesuaikan dengan kategori dan jenjang jabatan, untuk menjamin transparansi dan kesetaraan dalam sistem manajemen SDM. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh kompensasi yang diberikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Rincian hak karyawan berdasarkan kategori dapat dilihat pada tabel berikut: [GRI 3-3, 401-2]

Fulfillment of Employee Rights

PTPN I recognizes that employees are a key asset in supporting business sustainability and achieving long-term performance. Therefore, the Company is committed to providing fair, appropriate, and competitive remuneration to all employees. The remuneration package includes various components such as base salary, healthcare programs, employment benefits, and performance incentives. These policies are designed to comprehensively improve employee welfare and to reward their contributions to the Company's growth.

In determining wage policies, PTPN I always refers to the applicable Regional Minimum Wage (UMR) standards in each operational area. These adjustments ensure that every employee receives income that reflects the standard of living and cost of living in their respective region. [F.20]

Additionally, PTPN I applies employee entitlements based on category and job level to ensure transparency and equity within the human resource management system. This approach guarantees that all compensation is not only in accordance with legal requirements but also reflects fairness and adherence to responsible labor principles. The breakdown of employee entitlements by category is shown in the table below: [GRI 3-3, 401-2]

Jenis Komponen Penghasilan yang Diterima Berdasarkan Status Karyawan
Types of Income Components Received by Employment Status

Komponen Penghasilan & Iuran Wajib Income Components & Mandatory Contributions	Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee	
	Pimpinan Management	Pelaksana Staff	Pimpinan Management	Pelaksana Staff
Gaji Pokok Base Salary	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Tetap Fixed Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Tambahan Biaya Hidup Cost of Living Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Sewa Rumah Housing Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Listrik Electricity Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Air Water Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Transport Transport Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Cuti (Uang Cuti Tahunan/Panjang) Leave Allowance (Annual/Extended Leave)	✓	✓	-	-
Tunjangan Pajak Tax Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Jabatan Position Allowance	✓	-	✓	-
Komponen Prestasi I (Kinerja) Performance Component I (Achievement)	✓	-	✓	-
Komponen Prestasi II (Kompeten) Performance Component II (Competence)	✓	-	✓	-
Komponen Prestasi III (Risiko) Performance Component III (Risk)	✓	-	✓	-
Iuran BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Contributions	✓	✓	✓	✓
Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Contributions	✓	✓	✓	✓
Iuran Pensiun (Dapenbun/DPLK/JIP) Pension Contributions (Dapenbun/DPLK/JIP)	✓	✓	✓	✓
Pemberian Hak Cuti Leave Entitlement	✓	✓	✓	✓
Program Asuransi Kesehatan Health Insurance Program	✓	✓	✓	✓

Selain kebijakan pengupahan, PTPN I juga memberikan perhatian khusus terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga, salah satunya melalui kebijakan cuti melahirkan. Perusahaan memberikan hak cuti melahirkan bagi karyawan perempuan selama 3 bulan, yang terdiri dari 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah proses persalinan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi karyawan perempuan dalam mempersiapkan proses kelahiran serta pemulihan fisik dan mental pasca-melahirkan.

In addition to wage policies, PTPN I also places special emphasis on work-life balance, including through its maternity leave policy. The Company grants female employees three months of maternity leave, consisting of 1.5 months before and 1.5 months after childbirth. This policy aims to provide adequate time for childbirth preparation and postpartum physical and mental recovery.

Tak hanya itu, Perusahaan juga mengakomodasi peran karyawan laki-laki dalam mendukung proses kelahiran dan keluarga. Karyawan laki-laki diberikan cuti kelahiran anak selama dua hari kerja sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya keterlibatan ayah dalam masa awal kehidupan anak. Sebagai bentuk transparansi, berikut disajikan tabel rekapitulasi jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan selama periode pelaporan: [GRI 3-3, 401-2, 401-3]

Moreover, the Company recognizes the role of male employees in supporting childbirth and family care. Male employees are granted two working days of paternity leave, acknowledging the importance of paternal involvement during the early stages of a child's life. As part of our commitment to transparency, the table below presents the recap of employees who took maternity and paternity leave during the reporting period: [GRI 3-3, 401-2, 401-3]

Uraian Description	2024	2023*	2022*
Jumlah karyawan yang diberikan <i>maternity leave</i> Employees entitled to maternity leave	2.591	3.287	3.883
Jumlah karyawan yang mengambil <i>maternity leave</i> Employees who took maternity leave	40	32	43
Jumlah karyawan yang kembali dari <i>maternity leave</i> Employees who returned from maternity leave	36	31	42
Jumlah karyawan yang diberikan <i>paternity leave</i> Employees entitled to paternity leave	12.552	13.298	16.679
Jumlah karyawan yang mengambil <i>paternity leave</i> Employees who took paternity leave	52	38	57
Jumlah karyawan yang kembali dari <i>paternity leave</i> Employees who returned from paternity leave	48	36	53

*)Penyajian kembali data tahun 2022 dan 2023
*)Restatement of data for the years 2022 and 2023

Pengembangan dan Evaluasi Kompetensi Karyawan [GRI 404-2] [F.22]

Salah satu fondasi utama pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan adalah pengembangan kompetensi. PTPN I meyakini bahwa SDM yang kompeten dan adaptif adalah kunci dalam meningkatkan daya saing serta menjawab tantangan industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kerja karyawan. Pelatihan tersebut dirancang untuk mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kebutuhan pasar, perkembangan teknologi, serta dinamika operasional internal. [GRI 3-3]

Selaras dengan arah strategis PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perusahaan juga mengimplementasikan sejumlah program pengembangan kompetensi yang bersifat khusus dan terintegrasi. Berikut adalah program-program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara daring dan luring, antara lain:

Employee Competency Development and Evaluation [GRI 404-2] [F.22]

One of the fundamental pillars of the Company's growth and sustainability is competency development. PTPN I believes that competent and adaptive human resources are key to enhancing competitiveness and addressing the ever-evolving challenges of the industry. Accordingly, the Company consistently organizes various training and development programs to strengthen employees' skills, knowledge, and work capabilities. These training programs are designed to cover multiple aspects aligned with market demands, technological advancements, and internal operational dynamics. [GRI 3-3]

In alignment with the strategic direction of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), the Company also implements several specialized and integrated competency development programs. The competency development programs conducted both online and offline include the following:

1. Leadership Development

Plantation Leadership Development Program (PLDP) untuk semua karyawan pimpinan, CEO *Insight Competency Leadership*, dan Program *Immersion*.

2. Digital Talent Development

Program digitalisasi yang wajib dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan target mencapai bakat digital sebesar 5% dari total karyawan.

3. Nusantara Women Leadership Forum (NWLFF)

Mencakup pengembangan keterampilan melalui webinar & *leader talk*, pelatihan *leader* sebagai pelatih, program pengembangan kepemimpinan kelas wanita, kompetisi wanita, penerapan kebijakan RWP, dan beberapa kerja sama lainnya dengan Srikandi BUMN dan BUMN Perkebunan.

4. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi untuk posisi yang membutuhkan pengakuan atas legitimasi kompetensi yang dimiliki.

5. Competency Development

Mencakup pengembangan kompetensi keras dan kompetensi lunak yang dapat dilakukan secara daring, tatap muka, atau kombinasi keduanya (*blended learning*).

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan SDM yang berkelanjutan, Perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai metode serta teknologi digital terkini. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan mencakup metode *blended learning*, yaitu kombinasi antara pembelajaran daring dan luring, yang dirancang secara adaptif sesuai dengan kebutuhan karyawan dan dinamika operasional.

Sepanjang tahun pelaporan, Perusahaan memanfaatkan berbagai platform digital seperti *Zoom Meeting* untuk pelatihan virtual, serta *AgroNow* sebagai Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System/ LMS*) terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan proses pembelajaran berjalan secara fleksibel, mudah diakses, serta terukur dari sisi efektivitas dan jangkauan. Hasil dari upaya tersebut tercermin dalam peningkatan partisipasi karyawan pada program pengembangan kompetensi. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 15.888 karyawan telah mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, dengan rata-rata waktu pelatihan per karyawan mencapai 30,47 jam dalam setahun. [F.22]

1. Leadership Development

Plantation Leadership Development Program (PLDP) for all management-level employees, CEO *Insight Competency Leadership*, and *Immersion Program*.

2. Digital Talent Development

A mandatory digitalization program initiated by the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) targeting digital talent development equivalent to 5% of the total workforce.

3. Nusantara Women Leadership Forum (NWLFF)

Includes skills development through webinars and leader talks, leadership training for women, women's leadership class programs, women's competitions, the implementation of the RWP policy, and various collaborations with Srikandi BUMN and Plantation SOEs.

4. Competency Certification

Competency certifications for positions requiring formal recognition of skill legitimacy.

5. Competency Development

Covers both hard and soft competency development through online, in-person, or blended learning formats.

As part of its commitment to sustainable human capital development, the Company continues to enhance the efficiency and effectiveness of learning processes by utilizing various methods and the latest digital technologies. The adopted learning approach includes blended learning, a combination of online and offline training, which is adaptively designed according to employee needs and operational dynamics.

Throughout the reporting year, the Company utilized various digital platforms such as *Zoom Meeting* for virtual training and *AgroNow* as an integrated Learning Management System (LMS). These technologies facilitate flexible, accessible, and measurable learning processes in terms of effectiveness and reach. These efforts have resulted in increased employee participation in competency development programs. In 2024, a total of 15,888 employees participated in various training and development programs, with the average training time per employee reaching 30.47 hours annually. [F.22]

Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan, PTPN I juga secara aktif mengembangkan materi pelatihan di bidang ESG. Rangkaian pelatihan ESG ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan seluruh karyawan dalam mewujudkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Materi pelatihan ESG yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dirangkum secara ringkas dalam tabel berikut: [GRI 404-2] [F.22]

As part of its commitment to the implementation of sustainability principles, PTPN I actively develops ESG training materials. These ESG training sessions are aimed at enhancing employees' understanding and involvement in fostering responsible and sustainable business practices. The ESG-related training activities conducted throughout 2024 are summarized in the following table: [GRI 404-2] [F.22]

No	Jenis Program Program Type	Lembaga Pelaksana Implementing Institution	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
1.	Pelatihan Audit Supplier/Pemasok Supplier Audit Training		✓
2.	Bimtek Pengendalian Pencemaran Air Technical Guidance on Water Pollution Control		✓
3.	<i>Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)</i> Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)		✓
4.	<i>Awareness Rainforest Alliance</i> Awareness Rainforest Alliance		✓
5.	<i>Mastering Carbon Trading for Environmental and Economic Growth</i> Mastering Carbon Trading for Environmental and Economic Growth		✓
6.	<i>Webinar Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i> Webinar: "Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability"	✓	
7.	<i>Insight (IT Maturity Networking Session and Highlight): "Seri Oertama Insight COBIT 101: Mastering IT Governance Fundamentals"</i> Insight (IT Maturity Networking Session and Highlight): "Seri Pertama Insight COBIT 101: Mastering IT Governance Fundamentals"		✓
8.	<i>Risk Webinar Series 1: Navigating Uncertainty: Basic Risk Management Essentials</i> Risk Webinar Series 1: Navigating Uncertainty: Basic Risk Management Essentials	✓	
9.	<i>Webinar Bio Series: Economic Circular for Improvement Waste Management</i> Webinar Bio Series: Economic Circular for Improvement Waste Management	✓	
10.	<i>Listen to Your Employee: Work Performance & Mental Health</i> Listen to Your Employee: Work Performance & Mental Health		✓
11.	<i>Feedback Revolution: Transforming Talent Pools</i> Feedback Revolution: Transforming Talent Pools		✓
12.	Pelatihan HR Audit HR Audit Training	✓	
13.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Technical Guidance on Hazardous Waste Reporting System		✓
14.	Pelatihan Tata Kelola QA dan Manajemen Mutu QA Governance and Quality Management Training	✓	

No	Jenis Program Program Type	Lembaga Pelaksana Implementing Institution	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
15.	Lokakarya "Navigating Global Sustainability" Workshop: "Navigating Global Sustainability"		✓
16.	Penerapan Transisi Sirkuler Menuju Ekonomi Perkebunan <i>Regenerative Net-Zero</i> "Penerapan Transisi Sirkuler Menuju Ekonomi Perkebunan Regenerative Net-Zero"		✓
17.	<i>Aligning Strategy Execution with ESG (Environmental, Social, and Governance)</i> Aligning Strategy Execution with ESG (Environmental, Social, and Governance)		✓
18.	Webinar <i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i> Webinar: "Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation"	✓	
19.	Workshop Evaluasi Potensi Bahaya Faktor Ergonomi dan Psikologi di Tempat Kerja Workshop: "Evaluasi Potensi Bahaya Faktor Ergonomi dan Psikologi di Tempat Kerja"		✓
20.	<i>Health, Safety, Security, and Environment Management (HSE) Plantation Edition</i> Health, Safety, Security, and Environment Management (HSE) Plantation Edition		✓
21.	<i>Indonesian National Anti Fraud Conference 2024</i> Indonesian National Anti Fraud Conference 2024		✓
22.	Webinar <i>Security Awareness</i> Webinar: Security Awareness		✓
23.	<i>Awareness ISO 9001 dan 14001</i> Awareness ISO 9001 and 14001		✓
24.	<i>Masterclass Program Series XXIII "A Master Class on Life Cycle Assessment (LCA) & Carbon Reduction Strategy"</i> Masterclass Program Series XXIII "A Master Class on Life Cycle Assessment (LCA) & Carbon Reduction Strategy"		✓
25.	Pelatihan Pengenalan ESG <i>Batch III</i> ESG Introduction Training Batch III	✓	
26.	Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Internal Auditor Training for Integrated Management Systems		✓
27.	<i>Climate Change and How Plantation Industry Should Respond</i> Climate Change and How Plantation Industry Should Respond	✓	

Perusahaan tidak hanya mengandalkan pelatihan formal, tetapi juga mengembangkan berbagai inisiatif strategis untuk memperkaya pengalaman belajar dan pengembangan karyawan secara menyeluruh.

Berikut adalah beberapa inisiatif utama yang telah dijalankan selama tahun pelaporan:

1. Program rotasi ke berbagai lokasi perkebunan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan menghadapi tantangan baru dan mempelajari studi kasus yang beragam.
2. Program *coaching* internal melibatkan pemimpin senior sebagai mentor untuk mendukung pengembangan bakat di dalam organisasi.
3. Program eksposur eksternal untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan harapan dari pihak eksternal.
4. Mendorong konsistensi dalam penerapan sistem evaluasi kinerja dan budaya evaluasi kinerja yang transparan, baik dari perspektif atasan maupun bawahan.
5. Mendukung kelancaran sistem evaluasi kinerja dan manajemen bakat untuk mendapatkan umpan balik terkait kebutuhan pelatihan serta kesenjangan kapabilitas secara menyeluruh.
6. Identifikasi peran kunci secara berkelanjutan untuk menentukan jumlah posisi senior utama yang dapat diisi oleh bakat internal yang ada dalam organisasi.

Berikut merupakan rekapitulasi program pengembangan kompetensi beserta rata-rata jam pelatihan karyawan disajikan dalam tabel berikut: [GRI 404-1] [F.22]

Beyond formal training, the Company has developed several strategic initiatives to enrich learning experiences and support holistic employee development.

Key initiatives implemented during the reporting year include:

1. Rotation programs across various plantation sites to expose employees to new challenges and diverse case studies.
2. Internal coaching programs involving senior leaders as mentors to support internal talent development.
3. External exposure programs to broaden understanding of stakeholder expectations.
4. Performance evaluation system enhancement to foster a transparent evaluation culture from both supervisor and subordinate perspectives.
5. Talent management and evaluation alignment to provide feedback on training needs and capability gaps.
6. Ongoing key role identification to determine critical senior positions that can be filled by internal talent.

The following table presents a summary of competency development programs along with the average training hours per employee: [GRI 404-1] [F.22]

Rekapitulasi Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2022-2024

Summary of Competency Development Programs for 2022-2024

Uraian Description	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan Number of Employees Trained			Jam Pelatihan Training Hours			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hours per Employee		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Keseluruhan Total	15.888	43.395	52.593	378.765	416.098	508.289	30,47	9,59	9,66
Berdasarkan Jenis Kelamin By Gender									
Laki-laki Male	13.823	37.589	45.816	329.526	341.386	429.818	21,15	9,08	9,38
Perempuan Female	2.065	5.806	6.777	49.239	74.712	78.471	17,10	12,87	12,87

Sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, Perusahaan telah mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja talenta yang terstruktur dan terukur. Sistem ini dirancang untuk mendukung karyawan dalam menilai kinerja mereka secara obyektif, berdasarkan pencapaian terhadap tujuan organisasi dan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang telah disepakati secara individual. Evaluasi dilakukan secara periodik dan transparan, dengan melibatkan dialog antara atasan dan bawahan untuk memberikan umpan balik yang membangun. Pendekatan ini tidak hanya mendorong akuntabilitas kinerja, tetapi juga memfasilitasi pengembangan diri karyawan secara berkelanjutan. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam proses evaluasi kinerja antara lain: [GRI 404-3]

1. Aspek Hasil Kerja

Mengukur produktivitas terhadap capaian RKAP, deskripsi pekerjaan, dan standar kerja.

2. Aspek Perilaku

Mengukur tinggi rendahnya budi pekerti yang meliputi aspek kejujuran, keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama.

3. Aspek Kemampuan Teknis

Mengukur keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan kerja.

4. Aspek Kemampuan Manajerial

Mengukur kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi, dan pembinaan bawahan.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang holistik dan berkelanjutan, Perusahaan terus mengembangkan pendekatan yang terintegrasi dalam menilai kinerja, potensi, serta keterlibatan karyawan. Salah satu metode yang digunakan dalam proses evaluasi adalah *Competency Level Index (CLI) online assessment*, yang memungkinkan Perusahaan mengukur kompetensi karyawan secara objektif berdasarkan standar peran masing-masing individu. Penilaian ini berperan penting dalam perencanaan pengembangan karyawan serta penempatan talenta secara strategis.

Selain itu, PTPN I juga secara rutin melaksanakan *Employee Engagement Survey (EES)* kepada seluruh (100%) karyawan sebagai bagian dari mekanisme umpan balik. Survei ini mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek penting seperti budaya perusahaan, lingkungan kerja, hubungan antar karyawan, hingga arah strategis organisasi. Hasil dari EES memberikan wawasan mendalam tentang tingkat keterlibatan karyawan dan persepsi mereka terhadap organisasi, yang menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan inisiatif peningkatan kualitas lingkungan kerja secara berkelanjutan. [GRI 404-3]

As part of the sustainable human capital development strategy, the Company has implemented a structured and measurable talent performance evaluation system. This system is designed to support employees in objectively assessing their performance based on their achievements in relation to organizational goals and individually agreed Key Performance Indicators (KPIs). Evaluations are conducted periodically and transparently, involving dialogue between supervisors and subordinates to provide constructive feedback. This approach not only promotes accountability but also facilitates continuous personal development. Key focus areas of the performance evaluation process include: [GRI 404-3]

1. Work Output Aspects

Measures productivity against business plans (CWPB), job descriptions, and performance standards.

2. Behavioral Aspects

Assesses moral integrity including honesty, role modelling, discipline, responsibility, and teamwork.

3. Technical Skills Aspects

Evaluates skills, abilities, and job-related knowledge.

4. Managerial Capability Aspects

Assesses leadership, decision-making, communication, and subordinate development.

To foster a holistic and sustainable human resource management system, the Company continues to refine its integrated approach to assessing employee performance, potential, and engagement. One method used is the online *Competency Level Index (CLI) assessment*, which enables objective competency measurement based on individual role standards. This assessment is crucial for planning employee development and making strategic talent placements.

Additionally, PTPN I regularly conducts the *Employee Engagement Survey (EES)* to all (100%) employees as part of its feedback mechanism. The survey evaluates various critical aspects, including corporate culture, work environment, interpersonal relationships, and strategic direction. EES results provide valuable insights into employee engagement levels and perceptions of the organization, which form the basis for designing initiatives to continuously improve the quality of the workplace environment. [GRI 404-3]

Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia

[GRI 2-23]

Perusahaan menempatkan Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan dan praktik yang menjunjung tinggi martabat serta hak setiap individu yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PTPN I dengan tegas menolak segala bentuk pekerja anak maupun pekerja paksa. Dalam proses rekrutmen, Perusahaan menetapkan persyaratan bahwa setiap calon karyawan harus berusia minimal 18 tahun. Selain itu, hubungan kerja di lingkungan Perusahaan dijalankan berdasarkan perjanjian formal antara organisasi dan karyawan, sehingga menjamin hak serta kewajiban masing-masing pihak secara adil dan transparan. Langkah ini diambil untuk mencegah segala bentuk pemaksaan, eksploitasi, maupun pelanggaran HAM dalam ruang lingkup kerja. Sepanjang tahun 2024, Perusahaan memastikan tidak terdapat pekerja anak maupun pekerja paksa, serta tidak ditemukan indikasi ke arah pelanggaran tersebut. [GRI 3-3, 408-1, 409-1] [13.16.1, 13.16.2, 13.17.1, 13.17.2] [F.19]

Walaupun hingga saat ini Perusahaan belum melaksanakan proses uji tuntas terhadap HAM secara menyeluruh dalam kegiatan operasionalnya, komitmen untuk melakukan langkah tersebut telah menjadi agenda strategis ke depan. Sebagai bentuk upaya preventif, PTPN I telah mencantumkan klausul-klausul terkait HAM dalam berbagai dokumen legal, termasuk kontrak investasi, proses pengadaan barang dan jasa, serta perjanjian bisnis lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM tetap terjaga dan diterapkan di setiap tahapan proses bisnis. [GRI 3-3]

Sebagai bagian dari penguatan internal, PTPN I secara rutin menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan terkait HAM setiap tahun. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan termasuk petugas keamanan terhadap pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam lingkungan kerja dan operasional Perusahaan. Program pelatihan yang telah diselenggarakan pada tahun 2024 mencakup, antara lain: [GRI 3-3, 2-24, 410-1]

1. Seminar Perlindungan & Kesejahteraan Karyawan
2. Webinar Perlindungan Data Pribadi
3. Seminar Ketentuan Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Commitment to Human Rights [GRI 2-23]

The Company places the protection of human rights as one of its core priorities in the conduct of operational activities. This commitment is realized through policies and practices that uphold the dignity and rights of every individual involved in the Company's business activities.

As part of this commitment, PTPN I firmly rejects all forms of child labour and forced labour. In the recruitment process, the Company requires that all prospective employees must be at least 18 years old. Furthermore, employment relationships within the Company are formalized through agreements between the organization and the employees, ensuring that the rights and obligations of both parties are maintained in a fair and transparent manner. This approach is intended to prevent any form of coercion, exploitation, or human rights violations within the workplace. Throughout 2024, the Company confirmed that no incidents of child labour or forced labour occurred, nor were there any indications of such violations. [GRI 3-3, 408-1, 409-1] [13.16.1, 13.16.2, 13.17.1, 13.17.2] [F.19]

Although the Company has not yet conducted a comprehensive human rights due diligence process within its operational activities, it has identified this as a strategic agenda moving forward. As a preventive measure, PTPN I has included human rights-related clauses in various legal documents, including investment contracts, procurement processes, and other business agreements. This aims to ensure that human rights principles are upheld and implemented throughout every stage of business processes. [GRI 3-3]

As part of internal reinforcement efforts, PTPN I regularly organizes annual human rights education and training programs. These programs aim to enhance employee awareness including security personnel of the importance of respecting human rights in the workplace and in the Company's operations. The training programs conducted in 2024 included, among others: [GRI 3-3, 2-24, 410-1]

1. Seminar on Employee Protection & Welfare
2. Webinar on Personal Data Protection
3. Seminar on Labour Regulations under the Omnibus Law

Pendidikan terkait Kebijakan atau Prosedur terkait HAM Tahun 2024

Education related to Policy or Procedure Related to Human Rights in 2024



965
jam pelatihan
hours of training



408
karyawan berpartisipasi
employees participated

Hubungan Industrial [GRI 2-30]

PTPN I menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap karyawan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 104 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh karyawan untuk berserikat dan berorganisasi secara mandiri. Dalam hal ini, PTPN I mendukung keberadaan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) sebagai wadah komunikasi, aspirasi, dan perlindungan hak-hak pekerja. Hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 29.238 karyawan tetap, atau 100% dari total karyawan tetap PTPN I, telah menjadi anggota SPBun. Keterlibatan penuh ini mencerminkan komitmen kuat Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Seluruh hak dan kewajiban antara Perusahaan dan anggota SPBun diatur secara transparan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dirancang dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjamin kepastian hukum serta prinsip keadilan. Sementara itu, bagi karyawan yang memilih untuk tidak menjadi anggota SPBun, hak dan kewajibannya tetap dilindungi dan dijamin oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PTPN I berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, terbuka terhadap dialog, dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan berserikat dalam upaya menjaga stabilitas hubungan industrial.

Industrial Relations [GRI 2-30]

PTPN I respects and upholds every employee's human rights to assemble and express opinions, as guaranteed by Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia (1945) and Article 104 of Law No. 13 of 2003 on Manpower. In line with these provisions, the Company fully supports employees' freedom of association and the right to organize independently. PTPN I endorses the presence of the Plantation Workers Union (SPBun) as a platform for communication, aspirations, and the protection of workers' rights. As of 31 December 2024, a total of 29,238 permanent employees, or 100% of the total permanent workforce, were members of SPBun. This level of engagement reflects the Company's strong commitment to fostering harmonious, fair, and sustainable industrial relations.

All rights and obligations between the Company and SPBun members are regulated transparently through a Collective Labour Agreement (PKB), jointly developed and agreed upon to ensure legal certainty and fairness. For employees who choose not to become members of SPBun, their rights and obligations remain protected by the Company in accordance with applicable laws and regulations. Thus, PTPN I remains committed to creating an inclusive work environment that embraces dialogue and upholds the principles of freedom of association as part of maintaining stable industrial relations.

Nama | Name

Federasi Serikat Pekerja Perkebunan

Ketua Umum | Chairman

Asmanuddin Sinaga

**Periode Jabatan
Term of Office**

2021 – 2026

**Alamat
Address**

Gd. Gula Negara
Jl. K.H. Fakhruddin No.14, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Telepon | Phone

021 3919392

Faksimile | Fax

021 19392

Sebagai bagian dari komitmen terhadap hubungan kerja yang sehat dan partisipatif, PTPN I secara aktif memfasilitasi dialog antara manajemen dan karyawan melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit). Forum ini menjadi wadah resmi bagi Serikat Pekerja dan Perusahaan untuk bertemu secara berkala setiap tiga bulan guna membahas isu-isu ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan hak-hak karyawan serta inisiatif perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.

Dalam pengelolaan isu ketenagakerjaan, Perusahaan secara konsisten melibatkan Serikat Pekerja sebagai perwakilan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap tenaga kerja. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan mengenai pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Selain itu, PTPN I juga memastikan bahwa seluruh mitra dalam rantai pasokan, termasuk pemasok dan kontraktor, menghormati hak serikat pekerja dengan mencantumkan klausul terkait dalam setiap perjanjian kerja sama. [GRI 3-3, 407-1] [13.18.1, 13.18.2]

PTPN I juga menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan pendapatan hidup dan pembayaran upah hidup bagi seluruh pekerja. Penetapan tingkat upah mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja serta disesuaikan dengan kebijakan nasional dan masukan dari serikat pekerja. Perusahaan secara berkala meninjau sistem pengupahan melalui evaluasi internal untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan layak dan mendukung kesejahteraan pekerja. Selain itu, sistem pengawasan juga diterapkan untuk memantau kesesuaian pembayaran oleh pemasok dan mitra kerja terhadap prinsip-prinsip upah layak. [13.21.1]

Perusahaan memahami pentingnya transparansi dalam pelaporan ketenagakerjaan, termasuk terkait persentase pekerja yang tercakup dalam perjanjian kerja bersama maupun yang menerima upah di atas standar upah hidup. Namun, hingga periode pelaporan tahun 2024, Perusahaan belum mengungkapkan data tersebut secara terperinci karena pertimbangan kerahasiaan informasi ketenagakerjaan dan perlindungan privasi karyawan. [13.21.2, 13.21.3]

As part of its commitment to participatory and healthy labour relations, PTPN I actively facilitates dialogue between management and employees through the Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit). This forum serves as an official platform for regular quarterly meetings between the Workers Union and the Company to discuss labour-related issues, including the fulfillment of employee rights and continuous workplace improvement initiatives.

In managing labour issues, the Company consistently involves the Workers Union as a representative in decision-making processes that directly impact employees. Throughout 2024, there were no reports of violations of freedom of association. Furthermore, PTPN I ensures that all partners in the supply chain, including suppliers and contractors, respect trade union rights by including relevant clauses in every cooperation agreement. [GRI 3-3, 407-1] [13.18.1, 13.18.2]

PTPN I is also committed to ensuring living income and the payment of living wages for all workers. Wage levels are determined by taking into account workers' basic needs and are aligned with national policies and input from labor unions. The Company regularly reviews its wage system through internal evaluations to ensure that compensation remains fair and supports employee well-being. In addition, a monitoring system is in place to ensure that suppliers and business partners comply with fair wage principles. [13.21.1]

The Company recognizes the importance of transparency in labor-related disclosures, including the percentage of employees covered by collective labor agreements and those earning above the living wage benchmark. However, as of the 2024 reporting period, the Company has not disclosed this data in detail due to considerations related to labor information confidentiality and the protection of employee privacy. [13.21.2, 13.21.3]

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi dan perlindungan hak-hak karyawan, Perusahaan menyediakan berbagai saluran pengaduan yang dapat diakses secara langsung maupun daring. Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, PTPN I juga mengelola *Whistleblowing System* (WBS), sebuah *platform* yang memungkinkan karyawan melaporkan secara rahasia berbagai pelanggaran etika, termasuk tindakan diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja. Selama tahun pelaporan, tidak terdapat laporan terkait diskriminasi maupun pelecehan yang diterima melalui WBS. [GRI 3-3, 2-26, 406-1] [13.15.1, 13.15.4]

Di sisi lain, untuk melindungi kepentingan karyawan dalam menghadapi perubahan kebijakan atau dinamika operasional, PTPN I telah menetapkan kebijakan pemberitahuan minimum kepada karyawan atau perwakilan karyawan setidaknya empat minggu sebelum diterapkannya perubahan operasional yang signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu adaptasi yang memadai serta menjaga stabilitas hubungan kerja. [GRI 3-3, 402-1]

Kesehatan dan Keselamatan Kerja [GRI 403-1] [F.21]

PTPN I menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagai fondasi utama dalam setiap aspek operasional. Perusahaan menyadari bahwa keberlangsungan usaha sangat bergantung pada terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, prinsip *zero accident* dijadikan standar dalam menjalankan aktivitas operasional, tidak hanya untuk mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan keselamatan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. [GRI 3-3] [13.19.1]

Sebagai bentuk implementasi nyata, PTPN I telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara menyeluruh di seluruh unit usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini mencakup seluruh lapisan tenaga kerja, termasuk karyawan tetap, kontrak, serta mitra eksternal seperti kontraktor dan vendor. Evaluasi terhadap efektivitas SMK3 dilakukan melalui audit berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi rutin diberikan untuk memastikan setiap individu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi risiko kerja. [GRI 403-4] [13.19.5]

PTPN I juga mengintegrasikan aspek K3 ke dalam strategi bisnis, termasuk dalam proses seleksi dan penilaian mitra kerja. Kinerja keselamatan menjadi salah satu indikator utama dalam menunjuk vendor atau kontraktor, guna memastikan keselarasan komitmen terhadap keselamatan

To promote transparency and safeguard employee rights, the Company has established multiple accessible grievance mechanisms, both online and offline. To strengthen accountability, PTPN I also operates a Whistleblowing System (WBS), a confidential platform for employees to report ethical violations, including discrimination or harassment in the workplace. During the reporting period, no reports related to discrimination or harassment were received through the WBS. [GRI 3-3, 2-26, 406-1] [13.15.1, 13.15.4]

Additionally, to protect employees amid policy changes or operational dynamics, PTPN I has implemented a minimum notification policy. Employees or their representatives will be notified at least four weeks prior to the implementation of any significant operational changes. This policy aims to provide sufficient adaptation time and maintain stable labour relations. [GRI 3-3, 402-1]

Occupational Health and Safety [GRI 403-1] [F.21]

PTPN I places occupational health and safety (OHS) as a fundamental pillar in every aspect of its operations. The Company recognizes that business continuity heavily relies on the creation of a safe and healthy work environment. Therefore, the principle of zero accidents is upheld as a standard in operational activities, not only to prevent workplace accidents but also to foster a culture rooted in safety, care, and shared responsibility. [GRI 3-3] [13.19.1]

As a concrete implementation, PTPN I has adopted a comprehensive Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) across all business units, both at the central and regional levels. This system encompasses all levels of personnel, including permanent employees, contract workers, and external partners such as contractors and vendors. The effectiveness of the OHSMS is evaluated through periodic audits in accordance with Government Regulation No. 50 of 2012. In addition, regular training and awareness campaigns are conducted to ensure that every individual possesses the knowledge and skills required to manage occupational risks effectively. [GRI 403-4] [13.19.5]

PTPN I also integrates OHS aspects into its business strategy, including in the selection and evaluation process of business partners. Safety performance is one of the key indicators in appointing vendors or contractors to ensure alignment in the commitment to workplace safety. Through

kerja. Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, Perusahaan tidak hanya melindungi sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi terus terjaga dan ditingkatkan secara konsisten di seluruh lingkungan kerja. Pengawasan dan penerapan SMK3 dikoordinasikan oleh Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di bawah tanggung jawab Direksi. Cakupan SMK3 di PTPN I meliputi: [GRI 3-3, 403-1, 403-8] [13.19.1, 13.19.2, 13.19.9]

1. Penetapan Kebijakan SMK3;
2. Perencanaan K3;
3. Pelaksanaan Rencana K3;
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.

PTPN I secara aktif melaksanakan berbagai program untuk mendukung keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan karyawan. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan K3 secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam mengenali serta mengelola risiko yang ada di lingkungan kerja. Pelatihan ini terutama difokuskan pada karyawan yang bekerja di area dengan tingkat risiko tinggi, seperti pekerjaan di ketinggian atau di sekitar jalur listrik, di mana mereka membutuhkan izin khusus. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan karyawan dapat mengidentifikasi bahaya, menghindarinya, dan merespons secara tepat jika terjadi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. [GRI 403-5] [13.19.6]

Untuk meningkatkan pengawasan dan investigasi setiap risiko pekerjaan, PTPN I menerapkan sistem *Enterprise Risk Information Nusantara* (ERIN) sebagai *platform* utama manajemen risiko yang memungkinkan identifikasi, pemantauan, dan evaluasi risiko secara sistematis dan *real time* sejak dari unit kerja terkecil. Dengan berbasis pada indikator kinerja utama (KPI) dan proses bisnis, ERIN membantu perusahaan dalam mendeteksi potensi bahaya secara dini, menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif. [GRI 403-2] [13.19.3]

Selain itu, Perusahaan juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan, ruang kerja, dan sarana serta prasarana kerja lainnya untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang digunakan oleh karyawan memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan berkala ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kerusakan atau kondisi yang bisa membahayakan keselamatan kerja, serta memastikan bahwa lingkungan kerja tetap aman. Karyawan yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi

a systematic and participatory approach, the Company not only protects its human resources but also fosters a productive, efficient, and sustainable work ecosystem.

This initiative aims to ensure that high safety standards are consistently maintained and enhanced throughout the workplace. The monitoring and implementation of OHSMS are coordinated by the Occupational Health and Safety Committee (OHSC) under the responsibility of the Board of Directors. The scope of OHSMS at PTPN I includes: [GRI 3-3, 403-1, 403-8] [13.19.1, 13.19.2, 13.19.9]

1. Establishment of OHSMS Policy;
2. OHS Planning;
3. Implementation of OHS Plans;
4. Monitoring and Evaluation of OHS Performance; and
5. Review and Improvement of OHSMS Performance.

PTPN I actively carries out various programs to support occupational health and safety (OHS) as part of its commitment to sustainability and employee well-being. One of the primary efforts includes the regular implementation of OHS training and socialization to enhance employees' knowledge and skills in identifying and managing risks in the workplace. These trainings particularly target employees working in high-risk areas, such as at heights or near electrical lines, where special permits are required. The objective is to ensure employees can identify hazards, avoid them, and respond appropriately in potentially dangerous situations. [GRI 403-5] [13.19.6]

To enhance supervision and investigation of occupational risks, PTPN I utilizes the *Enterprise Risk Information Nusantara* (ERIN) system as its main risk management platform. ERIN allows for systematic and real-time risk identification, monitoring, and evaluation starting from the smallest work units. Based on key performance indicators (KPIs) and business processes, ERIN enables early detection of hazards and supports the development of more effective mitigation strategies. [GRI 403-2] [13.19.3]

In addition, the Company conducts routine inspections of equipment, work areas, and supporting facilities to ensure that all infrastructure used by employees complies with established safety standards. These regular inspections are intended to identify potential hazards or equipment malfunctions that could compromise workplace safety and to maintain a secure and healthy working environment. Employees engaged in high-risk roles also undergo periodic health assessments to confirm they are physically fit and

juga diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang memadai dan siap untuk bekerja dengan aman.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perusahaan tidak hanya berupaya untuk memenuhi kewajiban terkait keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk melindungi karyawan, mencegah kecelakaan kerja, dan mendukung terciptanya operasi yang efisien serta berkelanjutan. Keberlanjutan ini menjadi landasan penting dalam membangun budaya perusahaan yang berfokus pada kesejahteraan karyawan sekaligus menjaga kelangsungan operasional Perusahaan dalam jangka panjang.

Berikut merupakan informasi mengenai kinerja K3 PTPN I:
[GRI 403-9, 403-10] [13.19.10, 13.19.11]

Metrik Metric	Unit	2024	2023	2022
LTIFR	tingkat rate	0,06	0,75	0,73
Fatalitas Fatalities	orang person	0	0	1
Kecelakaan kerja Work-related accidents	kasus cases	42	156	252
Penyakit akibat kerja Occupational illnesses	kasus cases	0	45	38

PTPN I berkomitmen untuk mencapai *zero fatality* dan terus menurunkan tingkat kecelakaan kerja, yang diukur melalui indikator *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR). Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja, berbagai inisiatif telah dikembangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Beberapa merupakan inisiatif yang diambil Perusahaan: [GRI 403-2, 403-5, 403-6, 403-7, 403-10] [13.19.3, 13.19.6, 13.19.7, 13.19.8, 13.19.11]

1. Meningkatkan identifikasi dan penilaian risiko;
2. Mengoptimalkan proses pemantauan dan tanggung jawab atas risiko;
3. Mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja global, salah satunya melalui sertifikasi ISO 450001;
4. Memperluas program kesejahteraan karyawan secara kualitas dan kuantitas;
5. Menyelenggarakan pelatihan keselamatan berbasis *virtual reality* (VR);
6. Merancang program pelatihan keselamatan secara terstruktur;
7. Mengembangkan pusat pembelajaran keselamatan untuk mengumpulkan dan menyebarkan praktik K3 terbaik dari seluruh situs perkebunan;
8. Mengembangkan metode kerja yang terstruktur dan mudah diadopsi oleh kontraktor; dan

capable of performing their duties safely. This proactive approach underscores the Company's commitment to occupational health and safety.

Through these various initiatives, the Company not only seeks to fulfill its OHS obligations but also demonstrates a strong commitment to creating a safe, healthy, and productive workplace. These measures are designed to protect employees, prevent occupational accidents, and support efficient and sustainable operations. This sustainability is a key foundation in building a corporate culture focused on employee well-being and long-term operational resilience.

The following table presents PTPN I's OHS performance:
[GRI 403-9, 403-10] [13.19.10, 13.19.11]

PTPN I is committed to achieving zero fatalities and continuously reducing the rate of work-related accidents, as measured by the Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR). To improve workplace safety, the Company has developed a variety of initiatives aimed at creating a safer and healthier environment for all employees. These initiatives include: [GRI 403-2, 403-5, 403-6, 403-7, 403-10] [13.19.3, 13.19.6, 13.19.7, 13.19.8, 13.19.11]

1. Enhancing risk identification and assessment;
2. Optimizing monitoring processes and accountability for risks;
3. Complying with global occupational health and safety standards, including ISO 45001 certification;
4. Expanding employee wellness programs in both quality and quantity;
5. Implementing safety training using virtual reality (VR) technology;
6. Designing structured safety training programs;
7. Establishing a safety learning center to collect and disseminate best OHS practices from all plantation sites;
8. Developing structured and easily adoptable work methods for contractors; and

9. Memperkenalkan program penghargaan bagi karyawan dengan kinerja keselamatan kerja baik.

Selain itu, Perusahaan memastikan seluruh karyawan mendapatkan perlindungan kesehatan melalui asuransi yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Secara rutin, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Karyawan yang berinteraksi langsung dengan limbah B3 juga menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, guna memastikan kesejahteraan mereka dan mencegah risiko penyakit yang terkait dengan paparan bahan berbahaya. [GRI 403-3] [13.19.4]

Untuk mendukung kebugaran fisik, Perusahaan menyediakan fasilitas olahraga di setiap unit perkebunan dan mempromosikan olahraga kebugaran jantung. Sesi induksi keselamatan dilakukan setiap pagi, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi kebiasaan yang terus ditekankan dengan pengawasan dari pimpinan, petugas keamanan, serta Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di setiap lokasi operasional. [GRI 403-3, 403-6, 403-7, 403-10] [13.19.4, 13.19.7, 13.19.8, 13.19.11]

9. Introducing a safety performance award program for employees.

In addition, the Company ensures that all employees are covered by health insurance provided by the *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (BPJS). Routine medical examinations are conducted to detect potential health issues early and take necessary preventive measures. Employees directly exposed to hazardous and toxic waste (B3) also undergo periodic health assessments to safeguard their well-being and prevent illnesses related to hazardous exposure. [GRI 403-3] [13.19.4]

To support physical fitness, the Company provides sports facilities at each plantation unit and promotes heart-healthy physical activities. Daily safety induction sessions are conducted every morning, and the use of Personal Protective Equipment (PPE) is consistently emphasised and monitored by supervisors, security personnel, and members of the P2K3 at each operational site. [GRI 403-3, 403-6, 403-7, 403-10] [13.19.4, 13.19.7, 13.19.8, 13.19.11]

Sosialisasi P3K, Regional 1
First Aid Socialization, Region 1



Berkontribusi terhadap Masyarakat

[GRI 411-1, 413-1] [13.12.2, 13.14.2]

Contribution to the Community

Hak-hak dan Keterlibatan Masyarakat Lokal

PTPN I berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat lokal dan adat. Perusahaan menyadari bahwa setiap aktivitas operasional mengandung potensi risiko yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah operasional. Oleh karena itu, PTPN I bertekad untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang merugikan, melanggar, atau mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan adat.

Komitmen ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 169, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Perusahaan meyakini bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bagian penting dari tata kelola berkelanjutan dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Tanggung jawab atas implementasi dan pengawasan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal diemban oleh Divisi Sekretariat Perusahaan, di bawah pengawasan langsung Direktur Hubungan Kelembagaan. [GRI 3-3] [13.12.1, 13.14.1]

Untuk mendukung implementasi di lapangan, PTPN I telah menyusun Kebijakan HAM yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM global. Kebijakan ini kemudian diturunkan ke dalam standar operasional dan prosedur pelaksanaan yang relevan, agar dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja dan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal dan adat. Beberapa inisiatif yang telah dan akan dijalankan oleh PTPN I dalam mengelola aspek HAM masyarakat lokal dan adat antara lain: [GRI 3-3] [13.12.1, 13.14.1]

1. Mengimplementasikan Kebijakan HAM yang mencakup perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan adat, termasuk hak atas tanah, pencegahan relokasi paksa, serta perlindungan terhadap wilayah-wilayah budaya yang sensitif.

Rights and Engagement of Local Communities

PTPN I is committed to conducting all operational activities with full responsibility toward local and indigenous communities. The Company recognizes that every operational activity carries potential risks that may impact the fulfillment of the rights of communities surrounding its operational areas. Therefore, PTPN I is determined to ensure that no activities harm, violate, or neglect the rights of local and indigenous communities.

This commitment aligns with the principles enshrined in the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the International Labour Organization (ILO) Convention No. 169, which emphasize the importance of protecting and recognizing the rights of indigenous peoples. The Company believes that the protection of human rights is not only a moral obligation but also a crucial part of sustainable governance and corporate social responsibility. Responsibility for implementing and monitoring the fulfillment of local community rights lies with the Corporate Secretariat Division, under the direct supervision of the Director of Inter-Institutional Relations. [GRI 3-3] [13.12.1, 13.14.1]

To support on-the-ground implementation, PTPN I has developed a Human Rights Policy aligned with global human rights principles. This policy is further translated into operational standards and relevant implementation procedures to ensure consistent application across all work units and activities that directly engage with local and indigenous communities. Key initiatives already undertaken and to be implemented by PTPN I in managing human rights aspects related to local and indigenous communities include: [GRI 3-3] [13.12.1, 13.14.1]

1. Implementing a Human Rights Policy that includes the protection of the rights of local and indigenous communities, including land rights, prevention of forced relocation, and protection of culturally sensitive areas.

2. Melaksanakan analisis dampak sosial secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional berdampak seminimal mungkin terhadap masyarakat sekitar. Proses ini mencakup survei lapangan dan konsultasi dengan komunitas lokal guna memperoleh Kesepakatan Bebas, Diinformasikan, dan Didahulukan (KBDD).
3. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk mekanisme pengelolaan keluhan, saran, dan aspirasi dari pihak internal maupun eksternal.
4. Berkomitmen untuk memperoleh KBDD sebelum melakukan aktivitas operasional yang berpotensi mempengaruhi hak-hak masyarakat lokal dan adat.
5. Menegaskan komitmen terhadap perlindungan pembela HAM, termasuk menolak segala bentuk penahanan terhadap individu yang memperjuangkan HAM dan mencegah penggunaan kekuatan paramiliter dalam penyelesaian konflik.
6. Bekerja sama dengan organisasi eksternal, seperti Bumi Hijau Cemerlang dan Bina Alam Lestari, untuk mengevaluasi potensi dan risiko pelanggaran HAM. Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan tidak ditemukannya kasus atau indikasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat sekitar dan adat.
7. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi karyawan dan pemasok terkait isu HAM dan masyarakat adat guna meningkatkan kesadaran serta mendorong penerapan prinsip-prinsip HAM dalam rantai pasok.
8. Melakukan sosialisasi prosedur pengaduan kepada masyarakat, termasuk penjelasan mengenai mekanisme pelaporan serta proses penyelesaiannya, guna memastikan akses masyarakat terhadap keadilan dan pemulihan.

Selain melaksanakan program-program yang telah berjalan, Perusahaan juga menetapkan berbagai inisiatif tambahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aspek kemasyarakatan. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk menjawab tantangan sosial yang terus berkembang serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan masyarakat sekitar wilayah operasional. Beberapa inisiatif yang direncanakan antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan wajib bagi karyawan yang berfokus pada Kebijakan HAM serta prosedur pengelolaan dan penanganan keluhan.
2. Membangun sistem pemantauan internal untuk memastikan implementasi resolusi HAM berjalan efektif, termasuk penanganan setiap keluhan oleh Penanggung Jawab yang ditunjuk.

2. Conducting comprehensive social impact assessments to ensure that operational activities minimise impacts on surrounding communities. This process includes field surveys and consultations with local communities to obtain Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
3. Developing and applying Standard Operating Procedures (SOPs) for communication and consultation with stakeholders, including mechanisms for managing complaints, suggestions, and feedback from both internal and external parties.
4. Committing to obtain FPIC before conducting any operational activities that may affect the rights of local and indigenous communities.
5. Affirming a commitment to protecting human rights defenders, including rejecting any form of detention of individuals advocating for human rights and condemning the use of paramilitary force in conflict resolution.
6. Collaborating with external organizations, such as Bumi Hijau Cemerlang and Bina Alam Lestari, to assess the potential and risks of human rights violations. The 2024 evaluation found no cases or indications of human rights violations affecting surrounding or indigenous communities.
7. Conducting regular training for employees and suppliers on human rights and indigenous community issues to raise awareness and promote the application of human rights principles throughout the supply chain.
8. Disseminating grievance procedures to the community, including explanations of the reporting mechanisms and resolution processes, to ensure community access to justice and remediation

In addition to ongoing programs, the Company has also initiated various strategic actions to improve the management of community-related aspects. These initiatives are designed to address evolving social challenges and strengthen long-term relationships with communities in operational areas. Planned initiatives include:

1. Conducting mandatory training for employees focused on the Human Rights Policy and procedures for handling complaints.
2. Establishing an internal monitoring system to ensure the effective implementation of human rights resolutions, including the handling of each complaint by designated officers.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan sosialisasi sistem pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System/WBS</i>) kepada masyarakat lokal dan adat guna mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan HAM. 4. Melakukan komunikasi dan dialog berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap mereka. 5. Menerbitkan laporan kemajuan serta rencana tindak lanjut dalam menangani keluhan dan isu-isu HAM yang sedang berlangsung secara transparan dan akuntabel. 6. Menjamin ketersediaan mekanisme pemulihan atau restorasi bagi individu atau kelompok yang terdampak oleh pelanggaran HAM. 7. Melibatkan pihak ketiga independen dalam mengevaluasi risiko serta kinerja HAM Perusahaan, sekaligus menyelidiki isu-isu HAM yang muncul secara objektif. 8. Memastikan seluruh tindakan operasional perusahaan memperoleh Persetujuan Bebas, Diinformasikan, dan Didahulukan (<i>Free, Prior, and Informed Consent/FPIC</i>) dari masyarakat lokal dan adat sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip HAM internasional. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Enhancing the dissemination of the Whistleblowing System (WBS) to local and indigenous communities to encourage active participation in human rights oversight. 4. Conducting ongoing communication and dialogue with all stakeholders prior to undertaking any activities that may impact them. 5. Publishing progress reports and follow-up plans related to complaints and ongoing human rights issues in a transparent and accountable manner. 6. Ensuring the availability of remediation mechanisms for individuals or groups affected by human rights violations. 7. Involving independent third parties to evaluate the Company's human rights risks and performance, and to objectively investigate emerging human rights issues. 8. Ensuring that all company operations obtain Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) from local and indigenous communities as part of the commitment to international human rights principles. |
|---|--|

Hak Atas Tanah dan Sumber Daya

PTPN I beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman budaya dan etnis yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, Perusahaan menyadari bahwa sebagian lokasi operasionalnya mungkin berada di wilayah-wilayah yang berpotensi diakui sebagai wilayah adat oleh negara. Meski demikian, pengakuan resmi atas suatu wilayah sebagai wilayah adat di Indonesia memerlukan pemenuhan sejumlah kriteria hukum dan administratif tertentu, dan hingga periode pelaporan ini, belum terdapat penetapan formal dari pemerintah yang menyatakan bahwa lokasi operasional PTPN I berada dalam wilayah masyarakat adat secara sah. [13.14.3]

PTPN I merupakan perusahaan yang mendapatkan mandat untuk mengelola sejumlah areal milik negara berdasarkan sertifikat HGU yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah. Lokasi kegiatan operasional PTPN I tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Dengan cakupan wilayah yang luas dan beragam, Perusahaan menyadari adanya potensi bersinggungan dengan wilayah-wilayah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat adat, komunitas lokal, atau pihak yang memiliki bentuk penguasaan tanah secara kolektif dan informal. Oleh karena itu, dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, PTPN I senantiasa

Land and Natural Resource Rights

PTPN I operates across various regions in Indonesia, a country known for its rich cultural and ethnic diversity. The Company acknowledges that some of its operational areas may be located in regions that could potentially be recognized by the government as customary land. However, formal recognition of customary land in Indonesia requires the fulfillment of specific legal and administrative criteria. As of the reporting period, no formal government designation has been issued confirming that PTPN I's operational sites are located within officially recognized customary territories. [13.14.3]

PTPN I is mandated to manage several state-owned land areas under legally issued Cultivation Rights Titles (HGU) granted by the Indonesian government. Its operational sites are spread across several regions in Indonesia, including Sumatra, Java, Sulawesi, East Nusa Tenggara (NTT), and Papua. Given this wide and diverse geographical coverage, the Company is aware of the potential overlap with areas of importance to Indigenous Peoples, local communities, or groups holding collective or informal land rights. Therefore, in all stages of planning and operations, PTPN I strives to adopt inclusive and socially responsible approaches that respect these rights and follow the principles of prudence. [13.13.2]

berupaya memastikan pendekatan yang menghormati hak-hak tersebut, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan inklusi sosial. [13.13.2]

Beberapa lahan yang saat ini dikelola oleh PTPN I berasal dari peninggalan era kolonial Belanda dan telah resmi dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, lahan tersebut dikelola oleh Perusahaan berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh negara. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, Perusahaan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya memperoleh Persetujuan Bebas, Diinformasikan, dan Didahulukan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) dari masyarakat lokal maupun masyarakat adat. [13.14.4]

PTPN I berkomitmen untuk menghormati hak atas tanah dan sumber daya alam sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan keberlanjutan, khususnya dalam aspek HAM yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, kolektif, dan pemilik hak informal lainnya. Komitmen ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh aspek operasional, baik kegiatan *on-farm* maupun *off-farm*, serta menjadi bagian dari praktik manajemen berkelanjutan yang dijalankan oleh Perusahaan. [13.13.1] [F.1]

Dalam rantai pasok, PTPN I mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak atas tanah oleh seluruh mitra kerja, termasuk pemasok dan kontraktor. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan terhadap praktik perampasan lahan (*land grabbing*), penggunaan tekanan atau kekerasan dalam akuisisi tanah, serta kewajiban penyediaan informasi yang memadai dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat terdampak. Proses perencanaan, pembebasan lahan, atau pengelolaan sumber daya dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan menjamin adanya mekanisme pengaduan yang adil, transparan, dan dapat diakses. Untuk melindungi pembela HAM dan kelompok pemegang hak, PTPN I juga menyediakan *whistleblowing system* yang aman dan terbuka, serta menerapkan prosedur penyelesaian yang menjamin pendekatan tanpa pembalasan (*non-retaliation approach*) bagi setiap pelapor. [13.13.1] [F.1]

Selama periode pelaporan, tidak terdapat kasus pelanggaran yang tercatat secara resmi terkait hak atas tanah dan sumber daya alam dalam wilayah operasional PTPN I. Namun demikian, Perusahaan menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang menyampaikan klaim atas kepemilikan lahan di beberapa lokasi. PTPN I menindaklanjuti setiap pengaduan tersebut dengan prinsip kehati-hatian, guna memastikan penyelesaian yang adil dan mengedepankan pendekatan non-konflikual. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perusahaan

Some of the land currently managed by PTPN I originates from the colonial Dutch era and has since been officially transferred to the Indonesian government. The Company now operates these lands under valid Cultivation Rights Titles issued by the state. In line with its commitment to international human rights standards, the Company ensures that all operational activities secure Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) from both local and Indigenous communities. [13.14.4]

PTPN I is committed to upholding land and natural resource rights as part of its broader sustainability policy, particularly regarding human rights. This includes the protection of the rights of Indigenous Peoples, collective rights holders, and those with informal claims. This commitment is applied across all operational areas, both on-farm and off-farm, and is embedded in the Company's sustainable management practices. [13.13.1] [F.1]

Within its supply chain, PTPN I requires all partners, including suppliers and contractors, to respect land rights. This includes a strict prohibition on land grabbing, the use of coercion or violence in land acquisition, and an obligation to provide clear, accessible information in a language understood by affected communities. All land planning, acquisition, and resource management processes must involve community participation and ensure the availability of fair, transparent, and accessible grievance mechanisms. To further protect human rights defenders and rights holders, PTPN I provides a safe and open whistleblowing system and applies a non-retaliation approach to all reports received. [13.13.1] [F.1]

During the reporting period, there were no formally recorded violations related to land or natural resource rights within PTPN I's operational areas. However, the Company did receive several complaints from community members claiming ownership of certain land areas. Each complaint was addressed carefully to ensure fair resolution and to avoid conflict. This approach reflects the Company's commitment to respecting community

dalam menghormati hak-hak masyarakat dan menjaga hubungan harmonis dengan komunitas di sekitar wilayah operasi. [13.13.3]

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat [GRI 413-1] [13.12.2] [F.25]

PTPN I menempatkan keberlanjutan operasional sebagai prioritas utama yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan aktivitasnya, PTPN I menyadari bahwa dukungan dan keterlibatan masyarakat sekitar merupakan faktor kunci bagi keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui komunikasi aktif serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program TJSL PTPN I mengacu pada kerangka kerja TJSL BUMN, yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta panduan internasional ISO 26000 mengenai tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, program TJSL dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dan bantuan atau kegiatan lainnya di luar PUMK (non-PUMK). Kedua bentuk program ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun tujuan utama pelaksanaan program TJSL Perusahaan mencakup:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan sosial, perlindungan lingkungan, dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik, sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.
2. Menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pendekatan terintegrasi dan terukur, serta memastikan bahwa setiap program memberikan dampak nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
3. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan masyarakat sekitar agar lebih tangguh dan mandiri, melalui pembinaan yang berkesinambungan dan berbasis pada kebutuhan lokal.

rights and maintaining positive relationships with the surrounding communities. [13.13.3]

Community Development and Empowerment [GRI 413-1] [13.12.2] [F.25]

PTPN I places operational sustainability as a top priority that is inseparable from its corporate social responsibility. The Company recognizes that the support and involvement of surrounding communities are key factors for long-term success. Therefore, the Company is committed to building harmonious relationships with the community through active communication and the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs that deliver tangible and sustainable benefits.

PTPN I's CSR programs are guided by the SOE CSR framework, aligned with the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the international ISO 26000 guidelines on social responsibility. In practice, the CSR program is divided into two main categories: the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other non-PUMK assistance or activities. Both types of programs are designed to make a significant contribution to strengthening community capacity and improving overall quality of life, with the aim of achieving inclusive and sustainable development. The main objectives of the Company's CSR program include:

1. Encouraging economic growth, social advancement, environmental protection, and strengthened corporate governance as part of the Company's commitment to sustainable development.
2. Creating added value for the Company through an integrated and measurable approach, ensuring each program produces tangible, accountable impacts.
3. Supporting the development of micro and small enterprises and surrounding communities to become more resilient and self-reliant through continuous mentoring tailored to local needs.

Dasar Hukum Pelaksanaan TJSL BUMN

Dalam melaksanakan program TJSL, Perusahaan mengacu pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia untuk memastikan seluruh inisiatif sosial dan lingkungan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum pelaksanaan program TJSL mencakup, namun tidak terbatas pada, peraturan berikut: [\[GRI 3-3\]](#) [\[13.12.1\]](#)

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 33 yang menyatakan segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-01/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Implementasi TJSL BUMN Tahun 2024 [\[B.3\]](#)

Perusahaan menjalankan program TJSL dengan berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan ketentuan Menteri BUMN. Fokus implementasi TJSL mencakup tiga bidang prioritas, yaitu pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan program TJSL PTPN I diselaraskan dengan empat pilar pembangunan, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, yang keseluruhannya mencakup 17 TPB.

Seluruh inisiatif TJSL dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pencapaian pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, PTPN I berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi nyata dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif.

Legal Basis for SOE CSR Implementation

In implementing CSR programs, the Company refers to applicable regulations and policies in Indonesia to ensure that all social and environmental initiatives are aligned with good corporate governance principles and support sustainable development. The legal basis for CSR program implementation includes, but is not limited to, the following regulations: [\[GRI 3-3\]](#) [\[13.12.1\]](#)

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Fourth Amendment, Article 33, which stipulates that all natural resources shall be used for the welfare of the people;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility; and
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and the Corporate Social Responsibility Program of State-Owned Enterprises.

SOE CSR Implementation in 2024 [\[B.3\]](#)

The Company implements its TJSL program based on the Sustainable Development Goals (SDGs) and in accordance with the regulations set forth by the Minister of SOEs. The implementation of the CSR program focuses on three priority areas: education, environment, and the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as mandated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of SOEs.

PTPN I's CSR program is aligned with four development pillars, consisting of social, economic, environmental, as well as legal and governance, which are designed to achieve all of 17 SDGs.

All CSR initiatives are carried out in an integrated and sustainable manner to deliver added value to society and support the achievement of national development goals. Through this approach, PTPN I is committed to becoming a catalyst for change, contributing meaningfully to positive social, economic, and environmental impacts.

Metrik Metric	Unit	2024	2023
Penyaluran dana TJSL PUMK PUMK CSR Fund Disbursement	Rp	0	71.403.000.000
Penyaluran dana TJSL Non-PUMK Non-PUMK CSR Fund Disbursement	Rp	9.304.160.896	8.796.007.250

Berikut rincian penyaluran dana TJSL sepanjang tahun 2024:

Details of CSR Fund Distribution in 2024:

1. Program TJSL yang dijalankan oleh unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/Community Involvement and Development (CID)

Bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya di luar Pendanaan UMK pada laporan RKA Perusahaan tahun 2024, sebesar Rp9.304.160.896,- atau 94,36% dari total RKA tahun 2024 yang sebesar Rp9.860.000.000.

1. CSR Programs Implemented by the Community Involvement and Development (CID) Unit

These are funded from a budget categorized as costs outside of MSME Financing in the Company's 2024 Work Plan and Budget (WPB), amounting to Rp9,304,160,896, or 94.36% of the total 2024 WPB of Rp9,860,000,000.

2. Program TJSL yang dijalankan di luar unit CID

Bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp25.263.308.847 atau 18,57% dari total RKA tahun 2024, yaitu sebesar Rp136.021.932.600.

2. CSR Programs Implemented Outside the CID Unit

These are sourced from a budget categorized as costs in the Company's 2024 WPB, amounting to Rp25,263,308,847 or 18.57% of the total 2024 WPB of Rp136,021,932,600.

3. Program TJSL Pendanaan UMK yang berasal dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024

Sebesar Rp0, atau 0% dari RKA tahun 2024 yang sebesar Rp21.746.400.000.

3. CSR MSME Financing Programs Sourced from the 2024 Revolving Fund for MSME Financing Programs

These amounted to Rp0, or 0% of the 2024 WPB of Rp21,746,400,000.

Penyaluran Dana TJSL dari Anggaran PPM (PUMK dan Non-PUMK) dan Non-PPM Tahun 2024, serta Kontribusinya Terhadap TPB [F.25]

Distribution of CSR Funds from the CID (PUMK and Non-PUMK) and Non-CID Budget for the Year 2024, and Their Contributions to the SDGs

Pilar Pembangunan Development Pillar	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	RKA (Rp) WPB (Rp)	Persentase Capaian (Realisasi/ RKA) Achievement Percentage (Realization/WPB)	Pemetaan TPB yang Terkait Relevant SDGs
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Community Involvement and Development (CID)				
Pilar Ekonomi Economic Pillar	853.216.300	2.665.000.000	32,02%	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, dan TPB 5 SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, and SDG 5
Pilar Sosial Social Pillar	6.524.079.215	4.520.000.000	144,34%	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17 SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10, and SDG 17

Pilar Lingkungan Environmental Pillar	1.600.158.431	2.450.000.000	65,31%	TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 14, dan TPB 15 SDG 6, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, and SDG 15
Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	327.206.950	225.000.000	145,20%	TPB 16 SDG 16
Total Realisasi CID CID Realization	9.304.160.896	9.860.000.000	94,36%	
Non-PPM Non-CID				
Pilar Ekonomi Economic Pillar	14.000.000	23.117.170.110	0,06%	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, dan TPB 5 SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, and SDG 5
Pilar Sosial Social Pillar	17.127.449.690	24.322.947.119	70,42%	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17 SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10, and SDG 17
Pilar Lingkungan Environmental Pillar	3.258.155.961	4.428.004.000	73,58%	TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 14, dan TPB 15 SDG 6, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, and SDG 15
Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	4.863.703.196	84.153.811.371	5,78%	TPB 16 SDG 16
Total Realisasi Non-PPM Non-CID Realization (Rp)	25.263.308.847	136.021.932.600	18,57%	
Program Pendanaan UMK (PUMK) SME Funding Program (PUMK)				
Pilar Ekonomi Economic Pillar	-	21.746.400.000	-	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, dan TPB 5 SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, and SDG 5
Pilar Sosial Social Pillar	-	-	-	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17 SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10, and SDG 17
Pilar Lingkungan Environmental Pillar	-	-	-	TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 14, dan TPB 15 SDG 6, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, and SDG 15
Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	-	-	-	TPB 16 SDG 16
Total Realisasi Non-PPM Non-CID Realization (Rp)	-	21.746.400.000	-	

Sumber dan Penggunaan Dana Program Pendanaan UMK Tahun 2024
Sources and Use of Funds for the 2024 MSE Funding Program

Uraian Description	Audited 2023 2023 Audited (Rp)	RKAP Tahun 2024 2024 Budget Plan (Rp)	Audit 2024 2024 Audited (Rp)	Persentase Capaian Percentage of Achievement
Saldo Awal Initial Balance	60.931.221.520	8.012.665.447	18.766.189.582	234,21%
Tambahan Dana dari BUMN Pembina Additional Funds from Supervising SOE	-	-	-	-
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Loan Repayments from Beneficiaries	28.737.456.548	15.049.865.729	9.379.019.570	62,32%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Revenue	1.977.137.575	963.061.106	723.242.328	75,10%
Pendapatan Lain Other Income	1.726.485.975	45.613.986	635.033.185	1.392,19%
Pengeluaran Lain Other Expenditures	(53.112.036)	(93.439.228)	(92.508.564)	99,00%
Dana Tersedia Available Funds	93.319.189.582	23.977.767.040	29.410.976.101	122,66%
Penyaluran Pinjaman Fund Disbursement				
Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Disbursement of Loans to Beneficiaries	-	-	-	-
Pinjaman (Pengembalian Dana BUMN Pembina) Loan Repayment to Supervising SOE	150.000.000	-	-	-
Pengembalian Dana ke BUMN Pembina Lain Return of Funds to Other SOEs	-	-	-	-
Kerja Sama PUMK dengan BRI MSME Program Collaboration with BRI	74.403.000.000	21.746.400.000	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Total Fund Disbursement	74.553.000.000	21.746.400.000	-	-
Saldo Akhir per 31 Desember Ending Balance as of December 31	18.766.189.582	2.231.367.040	29.410.976.101	1.318,07

Sepanjang tahun pelaporan, PTPN I mencatat bahwa sekitar 768 orang telah memperoleh manfaat dari pelaksanaan Program TJSL, khususnya dari kategori PUMK yang dilaksanakan secara kolaborasi bersama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Untuk meningkatkan jangkauan dan dampaknya, Perusahaan terus berupaya agar terjadi peningkatan jumlah penerima manfaat program TJSL dari tahun ke tahun, sebagai bagian dari komitmen memperluas kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Namun, dalam pelaksanaannya, Perusahaan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara strategis agar tidak menjadi hambatan di masa mendatang. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi selama tahun 2024 meliputi: [\[GRI 413-2\]](#) [\[13.12.3\]](#) [\[E.5\]](#)

- Ketidakpastian dalam Pendanaan Program**, yang timbul akibat fluktuasi kondisi ekonomi, perubahan pasar, atau kebijakan Pemerintah, dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya finansial Perusahaan. Pergerakan arus kas Perusahaan juga dapat berdampak pada kelangsungan program TJSL.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan**, seperti potensi konflik, ketidaksepakatan, atau ketidakpuasan dari salah satu pihak, dapat memengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian dampak yang diinginkan.
- Integritas SDM**, seperti potensi pelanggaran etika, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku tidak etis, dapat merugikan program dan reputasi perusahaan. Tindakan seperti korupsi, penyelewengan dana, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan standar etika perusahaan dapat merusak integritas SDM, terutama pada personil pengelola program TJSL.
- Dampak Program**, di mana kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat merugikan pelaksanaan Program TJSL. Hal ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efektif dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh Perusahaan.
- Pengukuran Dampak oleh Pihak Independen**, di mana bantuan atau program yang dijalankan belum diukur dampaknya terhadap Perusahaan oleh pihak yang independen.

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh Perusahaan antara lain:

- Memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan pendanaan agar program TJSL tetap dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif yang diharapkan. Upaya pengelolaannya melibatkan strategi keuangan yang cermat dan rencana cadangan yang fleksibel.

Throughout the reporting year, PTPN I recorded that approximately 768 individuals benefitted from the implementation of the CSR, particularly from the Micro and Small Business Funding (PUMK) category, which was carried out in collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. To enhance its reach and impact, the Company continues to strive for an annual increase in the number of program beneficiaries, as part of its commitment to expanding its positive contribution to surrounding communities.

However, during its implementation, the Company faced several challenges that must be addressed strategically to avoid becoming obstacles in the future. Key challenges identified during 2024 include: [\[GRI 413-2\]](#) [\[13.12.3\]](#) [\[E.5\]](#)

- Uncertainty in Program Funding**, arising from economic fluctuations, market changes, or government policy shifts, which may affect the Company's financial resource availability. Cash flow volatility may also impact the continuity of the CSR program.
- Stakeholder Engagement**, such as potential conflicts, disagreements, or dissatisfaction among parties, may influence program execution and the achievement of desired outcomes.
- Human Resource Integrity**, where potential ethical violations, abuse of power, or unethical behavior may harm the program and the Company's reputation. Acts such as corruption, fund misappropriation, or non-compliance with corporate ethics policies and standards may undermine the integrity of personnel managing the CSR program.
- Program Impact**, where the failure to meet established objectives could jeopardize the effectiveness of the CSR program and result in inefficient resource allocation.
- Impact Measurement by Independent Parties**, where the impact of the assistance or program has not yet been evaluated by an independent entity.

To address these challenges, the Company has taken several measures, including:

- Paying particular attention to the sustainability of program funding to ensure continued implementation and positive impact. This involves prudent financial strategies and flexible contingency planning.

2. Membangun komunikasi terbuka, partisipasi aktif, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, dalam setiap pelaksanaan program TJSL, tidak mungkin semua keinginan pemangku kepentingan dapat dipenuhi.
3. Implementasi dan pemantauan ketat terhadap kebijakan etika perusahaan, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, menjadi langkah kunci dalam membangun integritas SDM, khususnya bagi personil pengelola program TJSL.
4. Melakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi kinerja program secara periodik, serta melibatkan peran aktif dari semua pihak dalam pelaksanaan program TJSL, akan memberikan masukan dan saran positif untuk pengembangan pelaksanaan program TJSL di masa depan.
5. Melakukan perhitungan dampak program yang diberikan kepada masyarakat melalui Pihak Independen, dengan menggunakan metode seperti Social Return on Investment (SROI) atau metode lainnya. Hal ini akan memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap pelaksanaan program, guna membangun citra baik Perusahaan.

Pada tahun 2024, PTPN I telah melakukan pengukuran SROI atas beberapa program prioritas yang dilaksanakan di wilayah operasional utama. Berikut adalah ringkasan hasil pengukuran SROI tahun 2024:

2. Establishing open communication, encouraging active participation, and fostering a deep understanding of stakeholder needs and expectations. Nonetheless, it is acknowledged that not all stakeholder expectations can be fulfilled in every program implementation.
3. Strictly implementing and monitoring corporate ethics policies, along with providing education and training for employees, especially for personnel managing the CSR program, to build human resource integrity.
4. Conducting continuous monitoring and periodic evaluation of program performance, and encouraging active participation from all parties involved, to gather valuable feedback for improving future CSR initiatives.
5. Measuring the impact of the programs provided to communities through independent parties using methods such as Social Return on Investment (SROI) or other relevant methodologies. This approach ensures a more objective assessment of program performance and enhances the Company's public image

In 2024, PTPN I conducted SROI measurements on several priority programs implemented in its main operational areas. The following is a summary of the 2024 SROI measurement results:

Nama Program Program Name	Dampak Impact	Sasaran Target	SROI
Pengembangan UMK melalui Pameran Inacraft pada Oktober 2024	Meningkatkan pendapatan, membangun jaringan dan mengenalkan produk	Masyarakat	3,09
Development of Micro, Small, and Medium Enterprises through the Inacraft Exhibition in October 2024	Risks affecting crop quality due to changes in weather patterns.	Community	
Penanganan Stunting	Membantu memenuhi asupan gizi keluarga yang memiliki balita atau anak	Masyarakat	1,80
Stunting Management	Helping meet the nutritional needs of families with toddlers or children	Community	
Penanaman dan pembagian bibit buah-buahan sebanyak 849 bibit dan penebaran benih ikan sebanyak 12.000 ekor di desa sekitar kebun	Memberdayakan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan	Masyarakat	1,20
Planting and distribution of 849 fruit seedlings and distribution of 12,000 fish fry in villages surrounding the plantation	Empowering communities to manage natural resources sustainably	Community	

Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan [GRI 203-1] [13.22.3] [B.3]

Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan, PTPN I menjadikan pembangunan infrastruktur masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam program TJSI tahun 2024. Infrastruktur yang memadai dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas hidup. Sepanjang tahun pelaporan, Perusahaan menerima berbagai proposal bantuan dari masyarakat dan melakukan seleksi secara cermat untuk memastikan program yang dipilih memberikan dampak nyata dan sesuai kebutuhan lokal.

Hingga akhir tahun 2024, sejumlah infrastruktur berhasil dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbuka. Seluruh fasilitas yang telah dibangun sepenuhnya dibiayai oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung akses masyarakat terhadap sarana yang layak. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial PTPN I, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan [GRI 203-2, 204-1] [13.22.4] [B.3, F.23]

Melalui pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar, PTPN I menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur ekonomi lokal serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial-ekonomi komunitas. Komitmen ini diwujudkan dengan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, baik dalam kegiatan inti operasional maupun kegiatan pendukung lainnya. Kehadiran kesempatan kerja ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan tingkat pengangguran di wilayah sekitar unit usaha.

Selain itu, Perusahaan juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal melalui kemitraan sebagai penyedia barang dan jasa. Keterlibatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan, di mana pelaku usaha lokal memperoleh akses pasar yang stabil, sementara Perusahaan mendapatkan dukungan pasokan yang lebih responsif dan efisien. Partisipasi aktif vendor lokal tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional Perusahaan, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. [GRI 3-3] [13.22.1]

Infrastructure Investment and Support Services [GRI 203-1] [13.22.3] [B.3]

As a demonstration of its commitment to sustainable social development, PTPN I prioritized community infrastructure development as one of the main focuses of its CSR program in 2024. Adequate infrastructure is deemed to play a strategic role in supporting community activities and improving quality of life. Throughout the reporting year, the Company received various community assistance proposals and conducted a thorough selection process to ensure that the chosen programs delivered tangible impacts and aligned with local needs.

By the end of 2024, a number of infrastructure projects had been successfully completed and made publicly accessible. All facilities were fully funded by the Company as a concrete contribution to improving access to proper amenities for local communities. This initiative not only reflects PTPN I's social commitment but also strengthens its relationship with the surrounding communities and supports the creation of a more inclusive and empowered environment.

Significant Indirect Economic Impacts [GRI 203-2, 204-1] [13.22.4] [B.3, F.23]

Through a community empowerment approach, PTPN I has demonstrated its commitment to strengthening local economic structures and contributing positively to the socio-economic development of surrounding communities. This commitment is realized through the creation of employment opportunities for local residents, both within core operational activities and supporting functions. These job opportunities have had a direct impact on increasing community income and reducing unemployment rates in areas near operational units.

Additionally, the Company promotes the involvement of local entrepreneurs through partnerships as suppliers of goods and services. This engagement creates a mutually beneficial economic ecosystem where local businesses gain stable market access, while the Company benefits from a more responsive and efficient supply chain. The active participation of local vendors not only supports operational continuity but also drives more equitable and sustainable regional economic growth. [GRI 3-3] [13.22.1]

Inisiatif Lebih Lanjut

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, PTPN I terus berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Perusahaan percaya bahwa keberlanjutan usaha tidak terlepas dari kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Beberapa inisiatif utama yang menjadi fokus program Perusahaan dalam beberapa tahun mendatang adalah sebagai berikut: [F.23]

1. Program TJSL melalui Unit *Community Involvement and Development* (CID) dan *Non Community Involvement and Development* (Non-CID);
2. Program TJSL Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
3. Penerapan Target TJSL bagi Mitra Kontraktor; dan
4. Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Lokal.

Pengaduan Masyarakat [F.24]

PTPN I memahami bahwa kegiatan operasionalnya berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif guna meminimalkan dampak tersebut. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, PTPN I telah mengimplementasikan sistem yang memungkinkan masyarakat adat dan lokal untuk menyampaikan keluhan serta memberikan masukan terkait kegiatan operasional Perusahaan.

Untuk itu, Perusahaan telah menyiapkan WBS sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran secara langsung. Sistem ini menjadi bagian penting dari upaya transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap keluhan yang diterima akan diselidiki secara menyeluruh oleh pihak terkait untuk memastikan tindak lanjut yang sesuai. Bila diperlukan, Perusahaan juga akan memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga hubungan baik dengan komunitas sekitar.

Pada tahun pelaporan, Perusahaan tidak menerima keluhan yang masuk melalui WBS terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang telah diterapkan oleh PTPN I dalam mengelola dampak sosial operasional Perusahaan telah berjalan dengan baik, dan komitmen Perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tetap terjaga. [GRI 3-3, 411-1, 413-2] [13.12.3, 13.14.2] [F.24]

Further Initiatives

As part of its social responsibility, PTPN I continues to focus on community development and empowerment in areas surrounding its operations. The Company believes that business sustainability is closely tied to contributions to the social and economic well-being of local communities. Key initiatives that will remain a focus of the Company's programs in the coming years include: [F.23]

1. The CSR Program through the Community Involvement and Development (CID) and Non-Community Involvement and Development (Non-CID) units;
2. The CSR Micro and Small Business Funding (UMK) Program;
3. The Implementation of CSR Targets for Contractor Partners; and
4. Training Programs Based on Local Needs.

Community Complaints [F.24]

PTPN I recognizes that its operational activities may potentially have negative impacts on local communities and the environment. As such, the Company is committed to taking effective preventive measures to minimize these impacts. As part of its social responsibility, PTPN I has implemented a system that allows indigenous and local communities to submit complaints and provide feedback related to the Company's operational activities.

To facilitate this, the Company has established a Whistleblowing System (WBS) as a platform for communities to submit complaints or suggestions directly. This system is a critical component of transparency and accountability efforts, ensuring that every submitted complaint is thoroughly investigated by the relevant parties to determine appropriate follow-up actions. Where necessary, the Company may provide compensation to affected parties as a form of accountability and to maintain positive relationships with local communities.

During the reporting year, the Company did not receive any complaints through the WBS related to human rights violations or the rights of indigenous peoples. This indicates that the mitigation efforts implemented by PTPN I to manage the social impacts of its operations have been effective, and the Company's commitment to sustainability and the welfare of surrounding communities remains intact. [GRI 3-3, 411-1, 413-2] [13.12.3, 13.14.2] [F.24]

Tanggung Jawab kepada Pelanggan

Responsibility to Customers

PTPN I menyadari bahwa keberhasilan dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari peran strategis para pemangku kepentingan, khususnya pelanggan. Sebagai elemen kunci dalam rantai nilai perusahaan, kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan pondasi penting yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dalam mewujudkan hal tersebut, PTPN I berkomitmen penuh untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi serta layanan terbaik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku, terutama standar kesehatan dan keselamatan. Komitmen ini lahir dari kesadaran bahwa tanggung jawab terhadap pelanggan bukan sekadar kewajiban moral, namun juga merupakan strategi utama untuk meraih kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari pelanggan. [F.17]

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, PTPN I secara konsisten merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821). Perusahaan meyakini bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen adalah fondasi penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang sehat dan saling menguntungkan.

PTPN I terus melakukan berbagai upaya dan inisiatif untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab ini, antara lain melalui inovasi dalam pengembangan produk dan jasa, peningkatan kualitas pelayanan, strategi pemasaran yang adaptif, serta penyediaan saluran pengaduan yang responsif. Perusahaan juga memastikan bahwa setiap keluhan pelanggan ditangani secara cepat dan tepat, dengan solusi yang mengedepankan kepuasan dan kenyamanan pelanggan. [GRI 3-3]

PTPN I recognizes that achieving sustainable business success is inseparable from the strategic role of stakeholders, particularly customers. As a key component in the company's value chain, customer satisfaction and loyalty serve as essential pillars supporting long-term growth and business continuity.

To this end, PTPN I is fully committed to providing high-quality products and excellent services in accordance with applicable laws, regulations, and prevailing standards—especially health and safety standards. This commitment stems from an awareness that responsibility to customers is not merely a moral obligation, but also a core strategy to gain sustained trust and support from customers. [F.17]

As a tangible manifestation of this commitment, PTPN I consistently refers to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to State Gazette No. 3821). The company believes that protecting consumer rights is a vital foundation for building healthy, long-term, and mutually beneficial relationships.

PTPN I continues to pursue various efforts and initiatives to fulfill this responsibility, including innovations in product and service development, improvements in service quality, adaptive marketing strategies, and the provision of responsive complaint channels. The company ensures that all customer complaints are addressed promptly and appropriately, with solutions that prioritize customer satisfaction and convenience. [GRI 3-3]

Informasi Produk dan Layanan

Dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan, PTPN I senantiasa menempatkan hak-hak pelanggan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis yang bertanggung jawab. Salah satu hak utama pelanggan yang menjadi perhatian Perusahaan adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Komitmen ini selaras dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." [GRI 3-3] [13.10.1]

Sebagai bentuk nyata dalam pemenuhan komitmen tersebut, PTPN I secara aktif melakukan sosialisasi dan penyediaan informasi melalui berbagai saluran, salah satunya adalah melalui *website* resmi Perusahaan. Dalam *platform* digital tersebut, pelanggan dapat mengakses informasi lengkap mengenai produk dan layanan, termasuk penawaran dan pembaruan terkini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam memahami produk, mengambil keputusan, dan menentukan pilihan secara bijak berdasarkan informasi yang transparan. [GRI 417-1]

Dalam mendukung keterbukaan informasi, PTPN I juga memastikan bahwa setiap produk (100%) yang dipasarkan telah dilengkapi dengan pelabelan dan spesifikasi yang jelas. Informasi tersebut mencakup komponen produk, label Standar Nasional Indonesia (SNI), logo halal, Nomor Registrasi Produk (NRP), hingga sertifikasi ISO 9001:2015. Penerapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap produk PTPN I. [GRI 417-1]

Selain itu, PTPN I juga menyediakan informasi perusahaan secara terbuka melalui berbagai saluran resmi. Informasi yang ditampilkan mencakup alamat, nomor telepon, serta email perusahaan. Kehadiran layanan ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam membangun kedekatan dan memberikan respons cepat terhadap kebutuhan informasi pelanggan.

Sepanjang tahun 2024, PTPN I mencatatkan kinerja positif dengan tidak adanya insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait informasi dan pelabelan produk maupun jasa yang ditawarkan. Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan Perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap praktik bisnis yang etis dan transparan. [GRI 417-2, 417-3] [F.17]

Product and Service Information

In operating sustainably, PTPN I consistently upholds customer rights as an integral part of responsible business practices. One of the key rights prioritized by the company is the right to obtain accurate, clear, and honest information about the products and services offered. This commitment aligns with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 4(c), which states that consumers have the "right to accurate, clear, and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services." [GRI 3-3] [13.10.1]

To realize this commitment, PTPN I actively disseminates and provides information through various channels, including the company's official website. On this digital platform, customers can access comprehensive information about products and services, including current offers and updates. This initiative is intended to facilitate customer understanding, decision-making, and wise choices based on transparent information. [GRI 417-1]

To support transparency, PTPN I also ensures that each marketed product (100%) is equipped with clear labeling and specifications. This information includes product components, Indonesian National Standard (SNI) labels, halal logos, Product Registration Numbers (NRP), and ISO 9001:2015 certifications. This practice is in accordance with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 73/M-DAG/PER/9/2015 concerning the Obligation to Include Labels in Indonesian on Goods, as part of efforts to increase customer trust and satisfaction with PTPN I products. [GRI 417-1]

PTPN I also provides open access to company information through various official channels. The information includes the company's address, phone number, and email. The presence of this service reflects the company's commitment to fostering engagement and providing swift responses to customer information needs.

Throughout 2024, PTPN I recorded a positive performance with zero incidents of non-compliance related to information and product/service labeling regulations. This achievement serves as concrete evidence of the company's success in fulfilling its responsibility to consumers and maintaining public trust through ethical and transparent business practices. [GRI 417-2, 417-3] [F.17]



Informasi Information

Kantor Pusat

Gedung Agro Plaza Lantai 14
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1
Jakarta Selatan 12950
Jakarta
☎ (+62) 8113-3333-214
✉ corcom@ptpn1.co.id
🌐 www.ptpn1.co.id

Head Office

Agro Plaza Building, 14th Floor
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1
South Jakarta 12950
Jakarta
☎ (+62) 8113-3333-214
✉ corcom@ptpn1.co.id
🌐 www.ptpn1.co.id



Jam Operasional Operating Hours

Jam Operasional

Senin - Kamis : 08.00 - 17.00 WIB
Jumat : 08.00 - 12.00 WIB
Sabtu - Minggu : Tutup

Operating Hours

Monday - Thursday : 08.00 - 17.00 WIB
Friday : 08.00 - 12.00 WIB
Saturday - Sunday : Closed

PTPN I terus berkomitmen dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, tidak hanya melalui penyediaan produk dan layanan terbaik, tetapi juga dengan menghadirkan informasi yang jelas dan akurat serta penetapan harga yang kompetitif. Strategi ini diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan memperkuat kepercayaan terhadap Perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut tersebut, program sertifikasi produk menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaminan mutu. Sistem ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasar.

PTPN I menerapkan sistem jaminan mutu yang merujuk pada Kebijakan Keamanan dan Kualitas Produk, yang berlaku di seluruh kegiatan operasional. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan berbagai standar dan sertifikasi nasional maupun internasional, antara lain ISO 9001:2015 (Manajemen Kualitas), ISO 22000:2018 (Manajemen Keamanan Pangan), Sertifikasi Halal, Sertifikasi BPOM, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), serta Standar Nasional Indonesia (SNI). Seluruh standar tersebut diintegrasikan dalam kebijakan operasional yang dijalankan secara menyeluruh (100%), meliputi: [GRI 416-1] [13.10.2] [F.27, F.28]

1. Pelaksanaan proses *quality assurance* melalui pemeriksaan hasil panen dan bahan baku secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk kontrol kualitas produk akhir.
2. Penerapan kebijakan ketertelusuran untuk memastikan legalitas dan kualitas produk, mencegah penipuan, mengendalikan ketidaksesuaian produk, serta menjamin perencanaan dan kendali operasional untuk menghasilkan produk yang aman.

PTPN I remains committed to enhancing customer satisfaction not only by offering top-quality products and services but also by ensuring clear and accurate information and setting competitive prices. This strategy is believed to deliver added value to customers and strengthen trust in the company. To support this, product certification programs are an essential component of the quality assurance system. This system represents the company's responsibility to guarantee that its products meet market expectations and needs.

PTPN I implements a quality assurance system guided by the Product Safety and Quality Policy, applicable across all operational activities. This policy adheres to various national and international standards and certifications, including ISO 9001:2015 (Quality Management), ISO 22000:2018 (Food Safety Management), Halal Certification, BPOM Certification, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), and Indonesian National Standard (SNI). All of these standards are integrated into operational policies that are implemented comprehensively (100%), including: [GRI 416-1] [13.10.2] [F.27, F.28]

1. Implementation of *quality assurance* processes through thorough inspection of harvested products and raw materials from upstream to downstream, including final product quality control.
2. Application of traceability policies to ensure product legality and quality, prevent fraud, control product non-conformities, and guarantee operational planning and control to produce safe products.

3. Sosialisasi internal terhadap kebijakan keamanan dan mutu produk agar seluruh lini organisasi memahami dan menerapkannya secara konsisten.
4. Penyampaian informasi kandungan produk secara terbuka sebagai bagian dari perlindungan kesehatan pelanggan.
5. Pengawasan terhadap penggunaan pupuk pada tanaman teh dan kopi guna menjaga kualitas produk sekaligus mencegah pencemaran lingkungan.

Hingga periode pelaporan, Perusahaan belum melakukan perhitungan persentase volume produksi yang berasal dari lokasi-lokasi yang telah disertifikasi dengan standar keamanan pangan internasional. Ke depan, PTPN I berkomitmen untuk memperkuat sistem pemantauan dan pencatatan volume produksi bersertifikasi di seluruh wilayah operasionalnya. Langkah ini diharapkan dapat mendukung transparansi dan peningkatan kontribusi perusahaan dalam penyediaan produk pangan yang aman dan berkualitas sesuai standar internasional. [13.10.4]

Sebagai pelengkap dari sistem mutu, PTPN I juga menetapkan kebijakan pelayanan pelanggan untuk menjamin bahwa setiap pelanggan mendapatkan layanan terbaik. Kebijakan tersebut mencakup: [GRI 3-3] [13.10.1]

1. Ketepatan waktu pengiriman barang sesuai kontrak.
2. Pemenuhan mutu produk sesuai dengan standar SNI.
3. Pengoperasian peralatan pabrik sesuai dengan standar keamanan dan kualitas.
4. Kesesuaian antara produk yang dipesan dengan yang diterima oleh pelanggan.
5. Terjalannya komunikasi efektif antara perusahaan dan pelanggan dalam menghadapi kendala atau kebutuhan informasi tambahan.

Komitmen terhadap keamanan dan kualitas produk juga tercermin dalam penerapan Kebijakan Keamanan dan Kualitas Produk sebagai panduan utama. Kebijakan ini memastikan bahwa pelanggan terlindungi dari potensi dampak negatif produk dan kegiatan operasional Perusahaan. Selama tahun 2024, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa yang ditawarkan, serta tidak ada produk yang ditarik kembali. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen PTPN I terhadap perlindungan pelanggan dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. [GRI 416-2] [13.10.3, 13.10.5] [F.29]

3. Internal dissemination of product safety and quality policies to ensure consistent understanding and implementation across all organizational levels.
4. Disclosure of product content information as part of customer health protection.
5. Supervision of fertilizer use on tea and coffee crops to maintain product quality and prevent environmental contamination.

As of the reporting period, the Company has not yet calculated the percentage of production volume originating from locations certified under international food safety standards. Going forward, PTPN I is committed to strengthening its monitoring and recording systems for certified production volumes across all operational areas. This initiative is expected to promote transparency and enhance the Company's contribution to the supply of safe and high-quality food products in line with international standards. [13.10.4]

As a complement to its quality system, PTPN I has also established a customer service policy to ensure that each customer receives the best possible service. This policy includes: [GRI 3-3] [13.10.1]

1. Timely delivery of goods as specified in contracts.
2. Fulfillment of product quality in accordance with SNI standards.
3. Operation of mill equipment in compliance with safety and quality standards.
4. Accuracy between the products ordered and those received by customers.
5. Effective communication between the company and customers in addressing issues or additional information needs.

The company's commitment to product safety and quality is further reinforced by the implementation of the Product Safety and Quality Policy as a guiding principle. This policy ensures that customers are protected from any potential adverse impacts of the company's products and operations. Throughout 2024, there were no incidents of non-compliance related to the health and safety impacts of the products and services offered, and no products were recalled. This serves as clear evidence of PTPN I's commitment to customer protection and compliance with sustainability standards. [GRI 416-2] [13.10.3, 13.10.5] [F.29]

Layanan Pengaduan Pelanggan [F.24]

PTPN I menyediakan layanan pengaduan yang dapat digunakan oleh pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Fasilitas ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan terkait produk dan layanan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan kinerja pelayanan. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi yang telah disediakan, seperti telepon, *email*, serta fitur *contact* pada situs resmi Perusahaan. Dengan mencantumkan keluhan secara jelas, pelanggan dapat membantu mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian isu yang dihadapi.

PTPN I memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, sejalan dengan implementasi Kebijakan Keamanan dan Kualitas Produk. Penanganan keluhan dilakukan secara profesional dengan tujuan utama memberikan solusi yang tepat, adil, dan memuaskan bagi pelanggan. Sepanjang tahun pelaporan, masih terdapat keluhan terkait aspek keamanan dan kualitas produk. Seluruh keluhan tersebut telah diselesaikan melalui proses yang transparan dan terstruktur, mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Customer Complaint Services [F.24]

PTPN I provides a customer complaint service accessible to customers and other stakeholders. This facility functions as a mechanism for reporting issues related to products and services, while also serving as an evaluation tool to maintain quality and improve service performance. Complaints can be submitted through various communication channels provided by the Company, including telephone, email, and the contact feature on the official website. By clearly outlining the complaint, customers can help expedite the identification and resolution of the issues encountered.

PTPN I ensures that all complaints are followed up systematically in accordance with applicable standard procedures, in line with the implementation of the Product Safety and Quality Policy. Complaint handling is carried out professionally with the primary objective of providing accurate, fair, and satisfactory solutions for customers. During the reporting year, there were still complaints related to product safety and quality aspects. All complaints were resolved through a transparent and structured process, reflecting the Company's commitment to fulfilling its responsibilities in a sustainable manner.

Deskripsi Description	2024	2023	2022
Jumlah Keluhan/Pengaduan terkait Keamanan/ Kualitas Produk Number of Complaints related to Product Safety/ Quality	4	3	11



Survei Kepuasan Pelanggan [F.30]

PTPN I meyakini bahwa peningkatan kualitas produk dan layanan merupakan elemen krusial dalam memenuhi komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Untuk memastikan hal tersebut, Perusahaan secara rutin melaksanakan survei kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index/CSI*) guna menilai persepsi pelanggan terhadap kinerja produk dan layanan yang diberikan. Survei ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi sumber informasi strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Beberapa aspek yang dinilai dalam survei tersebut antara lain mencakup:

1. Penerimaan dan dukungan pelanggan/pasar terhadap produk yang ditawarkan.
2. Strategi dalam mengelola hubungan dengan pelanggan serta menarik dan membangun relasi dengan pelanggan baru.
3. Mengetahui harapan dan tuntutan pelanggan secara detail terhadap produk dan layanan yang diberikan.
4. Mengetahui citra Perusahaan di mata pelanggan.
5. Identifikasi *room to improve* sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja Perusahaan.
6. Menetapkan dasar dalam penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.

Customer Satisfaction Survey [F.30]

PTPN I believes that improving product and service quality is a crucial element in fulfilling its commitment to customer satisfaction. To ensure this, the Company regularly conducts customer satisfaction surveys (*Customer Satisfaction Index/CSI*) to assess customers' perceptions of the products and services provided. These surveys serve not only as evaluation tools but also as strategic sources of information to drive continuous improvement. Several aspects evaluated in the survey include:

1. Customer/market acceptance and support for the offered products.
2. Strategies for managing customer relationships and attracting and building relationships with new customers.
3. Understanding customer expectations and demands in detail regarding the products and services provided.
4. Understanding the Company's image in the eyes of the customers.
5. Identifying areas for improvement as a basis for evaluation and performance enhancement.
6. Establishing a foundation for the formulation and monitoring of follow-up plans.

Metrik Tingkat Kepuasan Satisfaction Metric	Unit	2024	2023	2022
Kepuasan pelanggan – aspek produk Customer satisfaction – product aspect	%	88,26	84,56	83,00
Kelengkapan informasi pada kemasan Completeness of information on packaging	%	88,26	84,67	84,44
Konsistensi kualitas produk Product quality consistency	%	82,00	83,22	81,11
Kualitas pengemasan Packaging quality	%	86,00	84,56	83,22
Kepuasan secara keseluruhan Overall satisfaction	%	88,21	85,70	83,56

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan secara rutin, PTPN I mencatat tingkat kepuasan pelanggan terhadap aspek produk pada tahun 2024 sebesar 88,26%. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 84,56%, dan mencerminkan respons positif atas perbaikan yang terus dilakukan Perusahaan. Kenaikan ini menjadi indikator bahwa langkah-langkah peningkatan kualitas produk dan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak yang

Based on the results of the regularly conducted customer satisfaction survey, PTPN I recorded a customer satisfaction score of 88.26% for the product aspect in 2024. This reflects an increase compared to the 2023 figure of 84.56%, indicating a positive response to the ongoing improvements made by the Company. This increase serves as an indicator that the quality enhancement efforts for products and services have had a tangible impact on customer satisfaction. As a follow-up, PTPN I

nyata bagi kepuasan pelanggan. Sebagai bentuk tindak lanjut, PTPN I berkomitmen untuk terus menyempurnakan kinerja operasional melalui penyediaan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi standar keamanan yang berlaku.

Selain itu, Perusahaan juga senantiasa menjaga dan memperkuat hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai bisnis PTPN I.

Komitmen ke Depan [F.26]

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan, PTPN I memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan melalui produk dan layanan yang ditawarkan. Perusahaan menargetkan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 80% dan terus meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, PTPN I juga berupaya memastikan tidak adanya keluhan atau pengaduan yang berkaitan dengan aspek keamanan dan kualitas produk.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, PTPN I berkomitmen untuk terus mengembangkan proses operasional yang berorientasi pada keamanan produk. Penguatan dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi karyawan serta penerapan *due diligence* dalam rantai operasional. Upaya ini juga akan dilengkapi dengan perolehan sertifikasi yang relevan dan diakui secara internasional, guna memastikan standar kualitas dan keamanan produk yang tinggi dalam seluruh lini usaha Perusahaan.

Selaras dengan komitmen terhadap keamanan dan kualitas, PTPN I juga mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan ataupun memproduksi tanaman yang mengalami proses rekayasa genetika (*Genetically Modified Organism/GMO*). Kebijakan ini berlaku untuk seluruh lini produksi, baik produk yang dikonsumsi langsung maupun yang digunakan dalam proses produksi lainnya. GMO merupakan hasil rekayasa genetika melalui modifikasi DNA, yang meskipun dapat menjadi solusi atas tantangan pangan, tetap menimbulkan berbagai perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat.

Keputusan untuk tidak menggunakan GMO tidak terlepas dari perhatian Perusahaan terhadap isu global terkait keamanan pangan, serta pertimbangan terhadap dampak lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, beragamnya perspektif publik terhadap produk GMO menjadi faktor

remains committed to further improving its operational performance by providing products that are not only of high quality but also meet applicable safety standards.

Moreover, the Company continues to maintain and strengthen harmonious relationships with customers and other stakeholders. This commitment is part of a long-term sustainability effort aimed at increasing competitiveness and creating added value for all parties involved in the PTPN I business chain.

Future Commitment [F.26]

As part of its continuous efforts to improve service quality, PTPN I is committed to consistently enhancing customer satisfaction through its offered products and services. The Company aims to achieve a customer satisfaction rate of 80% and continue increasing it sustainably. Additionally, PTPN I strives to ensure zero complaints or grievances related to product safety and quality.

To support this objective, PTPN I is committed to continuously developing product safety-oriented operational processes. Strengthening efforts include employee training programs and the application of due diligence throughout the operational chain. These initiatives will be complemented by obtaining relevant and internationally recognized certifications to ensure high standards of product quality and safety across all business lines.

Aligned with its commitment to safety and quality, PTPN I has also adopted a policy to neither use nor produce genetically modified organisms (GMOs). This policy applies to all production lines, whether for directly consumed products or those used in other production processes. GMOs are the result of genetic engineering through DNA modification, which, although potentially a solution to food challenges, continues to spark debate and public concern.

The decision to avoid GMO usage reflects the Company's attention to global issues regarding food safety, as well as its consideration of environmental and climate change impacts. Furthermore, the diversity of public perspectives on GMO products is a key factor in this policy decision,

penting dalam pengambilan kebijakan ini, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kehati-hatian Perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Namun demikian, apabila di masa depan penggunaan GMO dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi produksi, PTPN I berkomitmen untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh proses akan mematuhi standar dan pedoman internasional yang berlaku, termasuk pelabelan produk secara akurat dan transparan guna melindungi hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jujur. [E.5]

Melalui berbagai inisiatif ini, PTPN I terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, keamanan produk, dan praktik bisnis yang berkelanjutan serta selaras dengan dinamika isu global.

Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan

[13.9.1]

PTPN I menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas. Hal ini selaras dengan agenda pemerintah dalam menekan inflasi dan mendorong kemandirian pangan nasional.

Salah satu bentuk kontribusi nyata PTPN I adalah melalui penyelenggaraan program pasar murah di berbagai wilayah operasional. Kegiatan ini menghadirkan komoditas pangan pokok seperti gula dan beras dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan dan saat terjadinya fluktuasi harga pangan. Program pasar murah ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah, tetapi juga menciptakan akses pangan yang lebih inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, PTPN I juga menggagas pengembangan komoditas pangan alternatif seperti tanaman jagung, melalui skema kemitraan dengan Koperasi Unit PTPN I dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Inisiatif ini memanfaatkan lahan milik Perusahaan yang dikelola secara produktif bersama masyarakat lokal, untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani mitra. Skema ini dirancang agar saling menguntungkan dan memperkuat ekosistem pangan yang resilien dan inklusif.

representing the Company's social responsibility and precaution in conducting its business.

However, should GMO usage be considered as part of the Company's future production strategy, PTPN I commits to implementing it responsibly. All processes will comply with applicable international standards and guidelines, including accurate and transparent product labeling to protect consumers' rights to honest information. [E.5]

Through these various initiatives, PTPN I continues to strengthen its position as a company committed to customer satisfaction, product safety, and sustainable business practices that are responsive to evolving global issues.

Contribution to Food Security [13.9.1]

PTPN I demonstrates a strong commitment to supporting national food security through various strategic programs based on principles of sustainability, cross-sector collaboration, and community empowerment. These initiatives focus not only on increasing the availability of sufficient and nutritious food but also on ensuring affordability for the broader population. This aligns with the government's agenda to curb inflation and promote national food self-sufficiency.

One of PTPN I's tangible contributions is the implementation of affordable food markets across its operational areas. These events offer essential food commodities such as sugar and rice at more accessible prices, particularly during major religious holidays and times of food price volatility. This initiative not only helps control regional inflation but also improves food access for low-income communities.

Additionally, PTPN I promotes the development of alternative food crops such as corn through partnership schemes with PTPN I Unit Cooperatives and farmer groups (Gapoktan). This initiative utilizes company-owned land to be productively managed in collaboration with local communities. The goal is to increase food production capacity while providing economic value for partner farmers. The scheme is designed to be mutually beneficial and to strengthen a resilient and inclusive food ecosystem.

Komitmen PTPN I dalam memperkuat ketahanan pangan nasional juga diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Pada 25 November 2024, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Teknis terkait Penguatan Pembinaan Teritorial dalam rangka mendukung operasional perusahaan melalui pelaksanaan Program Unggulan TNI AD. Kolaborasi ini selaras dengan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan serta Asta Cita Presiden RI Tahun 2024, yang menekankan pentingnya swasembada dan kemandirian bangsa dalam sektor pangan, energi, dan sumber daya lainnya. TNI AD juga berperan dalam pengamanan aset serta menjaga stabilitas wilayah operasional.

Dari sisi tata kelola produksi, PTPN I terus mendorong penerapan standar mutu yang tinggi guna memastikan hasil produksi yang higienis, halal, dan sesuai regulasi. Seluruh upaya ini tercermin dalam Kebijakan Keberlanjutan PTPN I yang dikaji secara berkala dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Meskipun saat ini belum dilakukan pencatatan khusus mengenai kehilangan pangan (*food loss*), baik dalam bentuk total berat kehilangan (ton metrik), persentase terhadap total produksi, maupun identifikasi kategori produk utama dan metodologi pencatatan. Perusahaan memandang hal tersebut sebagai bagian penting yang akan diperkuat dalam sistem manajemen pangan di masa mendatang.

[13.9.2]

PTPN I's commitment to national food security is further reinforced through strategic cooperation with the Indonesian National Armed Forces (TNI AD). On November 25, 2024, a Technical Cooperation Agreement was signed on Strengthening Territorial Development in support of company operations through the implementation of the TNI AD Flagship Program. This collaboration aligns with the National Food Security Movement and the Presidential Agenda 2024 (Asta Cita), which emphasizes the importance of self-sufficiency and national independence in the sectors of food, energy, and other strategic resources. The TNI AD also supports the safeguarding of company assets and ensures operational stability in the region.

From a production governance perspective, PTPN I continues to uphold high-quality standards to ensure that its products are hygienic, halal-certified, and compliant with regulations. These efforts are embedded in the PTPN I Sustainability Policy, which is reviewed regularly and communicated to all stakeholders. The company has not yet established a formal system for recording food loss, such as total weight loss (in metric tons), percentage of total production, main product categories, or measurement methodologies. It recognizes this as an important area to be developed within its future food management system.

[13.9.2]



06

Kinerja Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Performance





MALABAR



Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG)

Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan kerangka prinsip dan praktik yang memastikan perusahaan dikelola secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan beretika untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Penerapan GCG menjadi dasar dalam memperkuat ketahanan bisnis, meningkatkan reputasi, serta membangun budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi. Dengan mengintegrasikan prinsip GCG dalam setiap aspek operasional, Perusahaan dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Komitmen terhadap GCG

Penerapan prinsip GCG merupakan langkah strategis yang ditempuh Perusahaan untuk memperkuat fondasi operasional, meningkatkan ketahanan bisnis, serta membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan prinsip GCG ke dalam seluruh aktivitas, Perusahaan menegaskan komitmennya untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, baik dari segi kinerja keuangan maupun reputasi. Evaluasi berkala atas penerapan GCG, penyesuaian kebijakan internal terhadap perkembangan regulasi, serta penguatan pemahaman di seluruh tingkat organisasi menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Melalui penerapan GCG, Perusahaan menegaskan bahwa pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan membangun akuntabilitas yang kokoh dan transparansi yang konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Dengan menetapkan standar tinggi dalam aspek keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan integritas, Perusahaan memperkuat hubungan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra usaha, dan masyarakat luas. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap Perusahaan, tetapi juga menyediakan landasan yang kuat untuk menopang pertumbuhan berkesinambungan. Melalui peningkatan

Good Corporate Governance (GCG) is a framework of principles and practices that ensures the company is managed in a professional, transparent, responsible, and ethical manner to achieve sustainable growth. The implementation of GCG serves as a foundation for strengthening business resilience, enhancing reputation, and fostering a culture of integrity and accountability across all levels of the organization. By integrating GCG principles into every aspect of its operations, the Company is able to maintain stakeholder trust, improve operational efficiency, and ensure compliance with applicable regulations.

Commitment to GCG

The implementation of GCG principles is a strategic step taken by the Company to strengthen its operational foundation, enhance business resilience, and cultivate a culture of integrity, transparency, and accountability. By embedding GCG principles into all activities, the Company affirms its commitment to achieving long-term success in both financial performance and reputation. Regular evaluations of GCG implementation, alignment of internal policies with regulatory developments, and efforts to deepen understanding across all organizational levels are integral to the Company's approach in creating sustainable value for its stakeholders.

Through the implementation of GCG, the Company affirms that sustainable growth can only be achieved by establishing strong accountability and consistent transparency across all levels of the organization. By setting high standards in information disclosure, accountability, and integrity, the Company strengthens communication with all stakeholders, including shareholders, employees, business partners, and the wider community. This approach not only fosters greater trust in the Company but also provides a solid foundation to support sustainable growth. Through the enhancement of operational performance and the implementation of highly ethical business practices, the Company strives to

kualitas kinerja operasional dan penerapan praktik bisnis yang berlandaskan etika tinggi, Perusahaan berupaya meningkatkan nilai korporasi secara keseluruhan serta menciptakan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam kerangka tersebut, penerapan prinsip GCG tidak semata-mata dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, melainkan diadopsi sebagai bagian dari strategi korporasi dalam memperkuat ketahanan bisnis dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dengan menempatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan kesinambungan usaha di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Melalui integrasi prinsip GCG secara menyeluruh, Perusahaan tidak hanya menjaga performa operasional yang optimal, tetapi juga membangun ketangguhan struktural untuk mewujudkan pertumbuhan yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan.

Landasan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PTPN I berlandaskan pada sejumlah regulasi, meliputi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham PT Perkebunan Nusantara I No. 3.12/X/63/2014 mengenai implementasi prinsip-prinsip GCG.

increase overall corporate value and generate sustainable benefits for all stakeholders.

Within this framework, the implementation of GCG principles is not merely a matter of regulatory compliance, but is adopted as an integral part of the corporate strategy to strengthen business resilience and drive long-term growth. By embedding the principles of good corporate governance as the foundation of every decision-making process, the Company is committed to ensuring business continuity amid increasingly complex global dynamics. Through the comprehensive integration of GCG principles, the Company not only maintains optimal operational performance but also builds structural resilience to achieve responsible, inclusive, and sustainable growth.

Foundation for GCG Implementation

The implementation of GCG principles at PTPN I is based on several regulations, including the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises; Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; and the Directive Letter from the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), as the shareholder of PT Perkebunan Nusantara I, No. 3.12/X/63/2014 regarding the implementation of GCG principles.

Evaluasi Penerapan GCG GCG Implementation Review



No

Penerapan Prinsip GCG | Implementation of GCG Principles

1. **Transparansi**

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyampaian informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan secara tepat dan akurat.

Transparency

Openness in the decision-making process and in the disclosure of material and relevant information related to the company in a timely and accurate manner.

2. **Kemandirian**

Keadaan di mana perusahaan menjalankan operasionalnya secara independen, bebas dari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

Independence

A condition in which the company operates independently, free from conflicts of interest and undue influence or pressure from any party that may contradict applicable laws or sound corporate governance principles.

3. **Akuntabilitas**

Kejelasan terkait fungsi, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan guna memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Accountability

Clarity in the functions, duties, and responsibilities of each corporate organ to ensure that the company is managed effectively, transparently, and can be held accountable.

4. **Pertanggungjawaban**

Pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

Responsibility

Company management is carried out consistently in accordance with applicable laws and regulations, and based on sound corporate governance principles.

5. **Kewajaran**

Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana diatur dalam perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness

The application of the principles of fairness and equality in fulfilling the rights of all stakeholders, as stipulated in agreements and applicable laws and regulations.

Sebagai perusahaan yang mengemban mandat strategis dalam sektor perkebunan, PTPN I berkomitmen tinggi terhadap penerapan prinsip GCG. Komitmen ini tercermin dalam seluruh aspek operasional, termasuk dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung integritas bisnis, dan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan korporasi mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan. [GRI 3-3]

As a company entrusted with a strategic mandate in the plantation sector, PTPN I is strongly committed to implementing GCG principles. This commitment is reflected in all operational aspects, including compliance with applicable laws and regulations, upholding business integrity, and ensuring that every corporate action and decision is guided by the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. [GRI 3-3]

PTPN I menjaga etika bisnis dan menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. Perusahaan secara konsisten membangun sistem pengawasan internal, memperkuat budaya kepatuhan, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh insan perusahaan guna mencegah potensi praktik usaha yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang wajar. [GRI 3-3, 206-1] [13.25.1, 13.25.2]

Lebih lanjut, PTPN I juga menegaskan komitmennya terhadap netralitas politik. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada partai politik, kandidat politik, organisasi politik, atau kegiatan kampanye. Hal ini berlaku untuk semua bentuk kontribusi, baik berupa dukungan dana (moneter) maupun dalam bentuk natura. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan untuk menjaga profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya dan kebijakan perusahaan difokuskan pada pencapaian tujuan bisnis dan pembangunan berkelanjutan. [GRI 3-3, 415-1] [13.24.1, 13.24.2]

Konsistensi PTPN I dalam menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan etis menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Melalui transparansi pelaporan, penguatan sistem pengawasan, dan kebijakan antipolitik praktis, PTPN I berupaya menjadi perusahaan agribisnis nasional yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjalankan perannya di sektor strategis negara.

PTPN I upholds business ethics and promotes fair business competition as part of its corporate responsibility. The Company consistently strengthens internal control systems, fosters a culture of compliance, and conducts awareness programs for all employees to prevent potential business practices that may violate fair competition principles. [GRI 3-3, 206-1] [13.25.1, 13.25.2]

Furthermore, PTPN I affirms its commitment to political neutrality. The Company does not provide political contributions in any form—either directly or indirectly—to political parties, political candidates, political organizations, or campaign activities. This applies to all forms of support, whether monetary or in-kind. This policy not only reflects compliance with prevailing legal regulations but also represents the Company's moral responsibility to uphold professionalism, avoid conflicts of interest, and ensure that all corporate resources and policies remain focused on achieving business objectives and sustainable development goals. [GRI 3-3, 415-1] [13.24.1, 13.24.2]

PTPN I's consistent adherence to clean and ethical governance principles serves as a foundation for building stakeholder trust. Through transparent reporting, strengthened oversight mechanisms, and a firm anti-political contribution policy, PTPN I strives to be a nationally competitive agribusiness company with high integrity in fulfilling its role in the country's strategic sector.

Rapat Internal PTPN I | PTPN I Internal Meeting



Struktur dan Komposisi Tata Kelola Perusahaan [GRI 2-9]

Corporate Governance Structure and Composition

Struktur dan komposisi tata kelola Perusahaan terdiri atas organ utama dan organ pendukung. Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan organ pendukung mencakup Komite Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). RUPS berfungsi sebagai badan tata kelola tertinggi di Perusahaan, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan, mengingat tidak adanya tumpang tindih peran antara fungsi pengawasan dan eksekusi. [GRI 2-11]

Komposisi badan tata kelola tertinggi Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, disusun dengan memperhatikan prinsip keberagaman dan standar profesionalisme. Dewan Komisaris sepenuhnya bersifat non-eksekutif, dengan beberapa anggotanya merupakan komisaris independen yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan guna memastikan kemampuan melakukan pengawasan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Setiap anggota badan tata kelola memiliki masa jabatan yang ditentukan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan tunduk pada mekanisme pengangkatan serta evaluasi kinerja oleh RUPS. [GRI 2-9]

Pada periode pelaporan, Perusahaan memiliki masing-masing satu perempuan yang menjabat sebagai anggota Komisaris dan satu perempuan sebagai anggota Direksi. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong keberagaman dan inklusi pada tingkat kepemimpinan. Perusahaan terus mendorong terwujudnya keberagaman yang inklusif, termasuk partisipasi dari kelompok sosial yang selama ini kurang terwakili, baik dalam hal gender, latar belakang daerah, maupun kelompok usia produktif. [GRI 2-9]

Dalam hal kompetensi keberlanjutan, anggota badan tata kelola telah dibekali dengan pemahaman mengenai isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), baik melalui pelatihan internal maupun forum eksternal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis dilakukan dengan mempertimbangkan dampak organisasi terhadap keberlanjutan. Selain itu, Perusahaan

The Company's governance structure and composition consist of main and supporting organs. The main organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, while the supporting organs comprise the Board of Commissioners' Committees, the Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit (SPI). The GMS serves as the highest governance body within the Company, helping to minimize potential conflicts of interest, as there is a clear separation of roles between oversight and executive functions. [GRI 2-11]

The composition of the Company's highest governance body, consisting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, is structured with consideration for diversity and adherence to professional standards. The Board of Commissioners is entirely non-executive, with several members serving as independent commissioners appointed in accordance with prevailing regulations to ensure objective oversight and freedom from conflicts of interest. Each member of the governance body serves a term as stipulated in the Company's Articles of Association and is subject to appointment and performance evaluation by the General Meeting of Shareholders (GMS). [GRI 2-9]

During the reporting period, the Company had one female member on the Board of Commissioners and one female member on the Board of Directors. This demonstrates the Company's commitment to promoting diversity and inclusion at the leadership level. The Company continues to foster inclusive diversity, encouraging participation from underrepresented social groups, including in terms of gender, regional background, and productive age groups. [GRI 2-9]

In terms of sustainability competence, members of the governance body have been equipped with an understanding of environmental, social, and governance (ESG) issues through both internal training and participation in external forums. This is essential to ensure that strategic decisions are made with consideration of the organization's sustainability impacts. Furthermore,

juga memperhatikan representasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui mekanisme forum komunikasi dan pelibatan multi-pihak, yang menjadi bagian dari pendekatan tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. [GRI 2-9]

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan tertentu yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PTPN I. RUPS mewakili kekuasaan pemegang saham dalam menetapkan keputusan strategis yang berlandaskan pada kepentingan usaha jangka panjang. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham di Perusahaan. [GRI 2-11]

Penetapan struktur ini dirancang untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan, menjamin independensi proses pengawasan, serta memastikan bahwa arah kebijakan strategis ditetapkan secara objektif dan akuntabel. Dengan demikian, RUPS berfungsi efektif sebagai pengambil keputusan tertinggi yang mengawasi jalannya perusahaan tanpa keterlibatan langsung dalam pelaksanaan operasional. [GRI 2-11]

Berdasarkan Anggaran Dasar PTPN I dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang saham memiliki sejumlah hak, antara lain menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, memperoleh informasi material secara berkala dan tepat waktu, menerima pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen atau bentuk lainnya, memberikan kuasa kepada individu atau entitas hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, serta memperoleh penjelasan dan informasi akurat terkait penyelenggaraan RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang berperan dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan jalannya pengelolaan perusahaan, baik yang berkaitan langsung dengan entitas perusahaan maupun kegiatan usahanya yang dijalankan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan,

the Company takes stakeholder representation into account in strategic decision-making processes through multi-stakeholder engagement forums, as part of its participatory and accountable governance approach. [GRI 2-9]

General Meeting of Shareholders

General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate organ with specific authorities that cannot be delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Articles of Association of PTPN I. The GMS represents the authority of shareholders in making strategic decisions that align with the Company's long-term business interests. The Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) is appointed or authorized to represent the Government as the shareholder in the Company. [GRI 2-11]

The establishment of this structure is designed to minimize potential conflicts of interest, ensure the independence of the oversight process, and guarantee that strategic policy directions are determined objectively and accountably. Accordingly, the GMS functions effectively as the highest decision-making body, overseeing the company's operations without direct involvement in day-to-day execution. [GRI 2-11]

Based on the Articles of Association of PTPN I and applicable laws and regulations, shareholders are entitled to several rights, including the right to attend and vote at the GMS, to receive material information regularly and in a timely manner, to receive profit distribution in the form of dividends or other forms, to authorize an individual or legal entity to represent them at the GMS, and to obtain accurate explanations and information related to the conduct of the GMS.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a corporate organ responsible for supervising and advising the Board of Directors in managing the Company. The Board of Commissioners oversees corporate policies and the overall management of the Company, including both the corporate entity and its business operations carried out by the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners provides guidance to the Board of Directors and supervises the implementation of the Company's Long-Term Plan, the Annual Work Plan and Budget, the provisions of the

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpedoman pada kepentingan perusahaan serta tujuan pendiriannya.

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Direksi juga bertugas mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam semua urusan dan peristiwa, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan wewenang tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Komposisi dan susunan keanggotaan Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-392/MBU/12/2023 serta Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor DSDM/SKPTS/R/245/2023 tanggal 20 Desember 2023.

Pada periode pelaporan, komposisi Direksi terdiri dari 6 (enam) orang, dengan susunan sebagai berikut: [\[GRI 2-9\]](#)

Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and compliance with applicable laws and regulations, while consistently upholding the Company's best interests and founding objectives.

Board of Directors

The Board of Directors is a corporate organ that holds full authority and responsibility for managing the Company in the best interests of the Company, in accordance with its established purpose and objectives. The Board of Directors also represents the Company, both in and out of court, in all matters and affairs, provided that the exercise of such authority is subject to prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.

The composition and membership of the Board of Directors were established based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-392/MBU/12/2023 and the Decree of the President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/R/245/2023 dated December 20, 2023.

During the reporting period, the Board of Directors consisted of 6 (six) members, with the following composition [\[GRI 2-9\]](#)

Teddy Yunirman Danas

Direktur Utama
President Director

Laki-laki | Male

Eksekutif | Executive

Masa Jabatan | Term of Office:
5 tahun | 5 years

Periode Penugasan | Term of Appointment:
2023 - sekarang | 2023 - present

Rangkap Jabatan | Concurrent Position:
Tidak ada | None

Fauzi Omar

Direktur Operasional
Director of Operations

Laki-laki | Male

Eksekutif | Executive

Masa Jabatan | Term of Office:
5 tahun | 5 years

Periode Penugasan | Term of Appointment:
2023 - sekarang | 2023 - present

Rangkap Jabatan | Concurrent Position:
Tidak ada | None

Landi Rizaldi Mangaweang

Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen
Director of Marketing and Asset Management

Laki-laki | Male

Eksekutif | Executive

Masa Jabatan | Term of Office:
5 tahun | 5 years

Periode Penugasan | Term of Appointment:
2023 - sekarang | 2023 - present

Rangkap Jabatan | Concurrent Position:
Tidak ada | None

Doni P. Gandamihardja

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Laki-laki | Male

Eksekutif | Executive

Masa Jabatan | Term of Office:
5 tahun | 5 years

Periode Penugasan | Term of Appointment:
2023 - sekarang | 2023 - present

Rangkap Jabatan | Concurrent Position:
Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiunan
Perkebunan (April 2025 – sekarang).
Member of the Supervisory Board of the
Plantation Pension Fund (April 2025 –
present)

Siwi Peni

Direktur Sumber Daya Manusia dan TI
Director of Human Resources and IT

Perempuan | Female

Eksekutif | Executive

Masa Jabatan | Term of Office:
5 tahun | 5 years

Periode Penugasan | Term of Appointment:
2023 - sekarang | 2023 - present

Rangkap Jabatan | Concurrent Position:
Komisaris PT Kharisma Pemasaran Bersama
Nusantara (KPN) (2020–sekarang)
Commissioner PT Kharisma Pemasaran
Bersama Nusantara (KPN) (2020–present)

Tio Handoko

Direktur Hubungan Kelembagaan
Director of Institutional Relations

Laki-laki | Male

Eksekutif | Executive

Masa Jabatan | Term of Office:
5 tahun | 5 years

Periode Penugasan | Term of Appointment:
2023 - sekarang | 2023 - present

Rangkap Jabatan | Concurrent Position:
Tidak ada | None

Proses Nominasi, Kriteria dan Pemilihan Organ Tata Kelola Perusahaan [GRI 2-10]

Nomination Process, Criteria, and Appointment of Corporate Governance Organs

Perusahaan saat ini belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, calon yang diajukan wajib memenuhi ketentuan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham, serta tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan tugas.

Meskipun Perusahaan belum secara formal melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti pemegang saham publik atau masyarakat dalam proses pencalonan, prinsip keterbukaan tetap dijunjung tinggi melalui transparansi informasi di forum RUPS. Kriteria pencalonan juga memperhatikan unsur keberagaman, termasuk latar belakang profesional dan keahlian yang dibutuhkan, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan dampak organisasi, seperti keberlanjutan, tata kelola, dan manajemen risiko. Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa anggota badan tata kelola memiliki kompetensi strategis yang selaras dengan arah bisnis dan nilai keberlanjutan jangka panjang.

The Company has not yet established a Nomination and Remuneration Committee. In the nomination process for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, candidates must fulfill the criteria of not having financial, managerial, shareholding, and/or familial ties up to the second degree with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders. Additionally, candidates must not be affiliated with other entities that could compromise their independence in fulfilling their duties.

Although the Company has not formally involved external stakeholders, such as public shareholders or the broader community, in the nomination process, it upholds the principle of transparency by disclosing relevant information during the GMS. The nomination criteria also consider elements of diversity, including professional background and expertise required—particularly in areas related to organizational impact such as sustainability, governance, and risk management. In doing so, the Company ensures that members of the governance body possess strategic competencies aligned with the business direction and long-term sustainability values.



Proses Evaluasi Kinerja

Dewan Komisaris dan Direksi [GRI 2-18]

Performance Evaluation Process of the Board of Commissioners and Board of Directors

Perusahaan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi terkait pengawasan atas manajemen dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Evaluasi ini dilakukan secara internal setiap tahun dengan mengacu pada *key performance indicator* (KPI). Proses evaluasi bertujuan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap implikasi keputusan manajerial terhadap pertumbuhan ekonomi, keseimbangan lingkungan, dan kontribusi sosial perusahaan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan, mendorong peningkatan kapasitas anggota badan tata kelola, dan menyesuaikan strategi organisasi secara menyeluruh. Jika diperlukan, hasil evaluasi juga menjadi pertimbangan dalam melakukan rotasi, penyegaran, atau penyesuaian komposisi keanggotaan guna memastikan keberagaman kompetensi dan efektivitas fungsi tata kelola.

The Company conducts performance assessment and evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors in relation to their oversight of the management of economic, environmental, and social impacts. This evaluation is carried out internally on an annual basis, with reference to predetermined Key Performance Indicators (KPIs). The evaluation process aims to ensure that the Board of Commissioners and the Board of Directors possess a comprehensive understanding of the managerial decisions' implications on the Company's economic growth, environmental balance, and social contribution. The follow-up to evaluation results is used to strengthen oversight functions, enhance the capacity of governance body members, and align the overall organizational strategy. When necessary, the evaluation outcomes also serve as a basis for rotation, renewal, or adjustment of board composition to ensure a diverse set of competencies and the effective functioning of the governance structure.



Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan [GRI 2-14]

Pelaporan keberlanjutan PT Perkebunan Nusantara I disajikan melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Tahunan Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Direksi sebagai organ tata kelola tertinggi bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui seluruh informasi yang disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan, termasuk topik material yang sebagaimana disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko & Sustainability selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan.

Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting [GRI 2-14]

Sustainability reporting at PT Perkebunan Nusantara I is presented through the Sustainability Report, which is published alongside the Company's Annual Report. In its implementation, the Board of Directors, as the highest governance body, is responsible for reviewing and approving all information disclosed in the Sustainability Report, including material topics submitted by the Risk Management & Sustainability Division, which is in charge of report preparation.

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan [GRI 2-9]

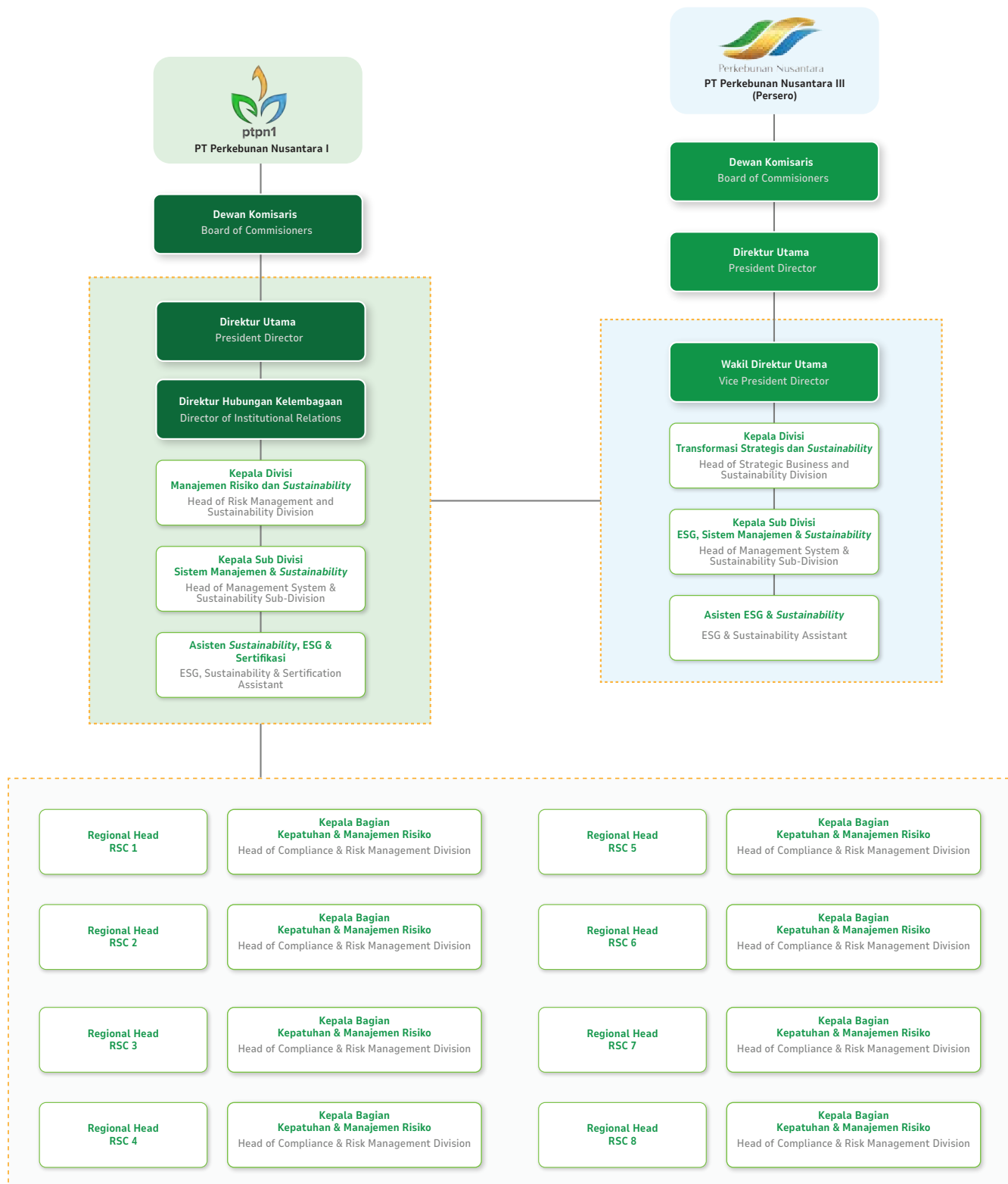
Sustainability Governance Structure

Sebagai bagian dari komitmen PTPN I dalam menempatkan keberlanjutan sebagai landasan utama di setiap aspek operasional, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko & Sustainability. Divisi ini dipimpin oleh Direktur Hubungan Kelembagaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Manajemen Risiko & Sustainability berperan strategis dalam mengelola dampak organisasi terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). [GRI 2-9, 2-12, 2-13]

As part of PTPN I's commitment to embedding sustainability as a core foundation across all operational aspects, the Company has established the Risk Management & Sustainability Division. This division is led by the Director of Institutional Relations and reports directly to the President Director. The Risk Management & Sustainability Division plays a strategic role in managing the organization's impacts on environmental, social, and governance (ESG) aspects. [GRI 2-9, 2-12, 2-13]

Struktur Organisasi ESG PTPN I

Organizational Structure of ESG PTPN I



Pengetahuan Kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi [GRI 2-17] [E.2]

Perusahaan menyediakan akses dan kesempatan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang keberlanjutan. Pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui berbagai program, termasuk pelatihan, lokakarya, seminar, konferensi, dan kursus. Dengan upaya tersebut, setiap pemangku kepentingan dalam struktur tata kelola diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai praktik keberlanjutan yang selaras dengan dinamika industri dan perkembangan lingkungan bisnis.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program pelatihan di bidang keberlanjutan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Collective Knowledge of the Highest Governance Body [GRI 2-17] [E.2]

The Company provides access and opportunities for the Board of Commissioners and the Board of Directors to enhance their understanding and skills in the field of sustainability. This competency development is carried out through various programs, including training sessions, workshops, seminars, conferences, and courses. Through these efforts, each stakeholder within the governance structure is expected to gain a comprehensive understanding of sustainability practices that align with industry dynamics and developments in the business environment.

Throughout 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors have participated in sustainability-related training programs, as detailed in the following table:

Nama Anggota Name of Attendants	Tanggal Date	Tempat Place	Penyelenggara Organizer	Tema Pelatihan Theme of the Training
Seger Budiarmo	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
Dedi Sunardi	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Yogyakarta	GRC Assosiation	<i>GRC Summit 2024 Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs</i>
Noor Ida Khomsiyati	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
Nurhidayat	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Yogyakarta	GRC Association	<i>GRC Summit 2024 Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs</i>
Tri Siswanto	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Yogyakarta	GRC Assosiation	<i>GRC Summit 2024 Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs</i>
Teddy Yunirman Danas	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	28 Mei 2024 Mei 28, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i>
	27 Juni 2024 June 27, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Governance and Risk: Strategic Legal Risk Management</i>

Nama Anggota Name of Attendants	Tanggal Date	Tempat Place	Penyelenggara Organizer	Tema Pelatihan Theme of the Training
Doni P. Gandamihardja	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	28 Mei 2024 May 28, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i>
	27 Juni 2024 June 27, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Governance and Risk: Strategic Legal Risk Management</i>
Fauzi Omar	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	28 Mei 2024 May 28, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i>
	27 Juni 2024 June 27, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Governance and Risk: Strategic Legal Risk Management</i>
Landi Rizaldi Mangaweang	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	28 Mei 2024 May 28, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i>
	27 Juni 2024 June 27, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Governance and Risk: Strategic Legal Risk Management</i>
Siwi Peni	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	28 Mei 2024 May 28, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i>
	27 Juni 2024 June 27, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Governance and Risk: Strategic Legal Risk Management</i>
Tio Handoko	26 Maret 2024 March 26, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	Webinar: <i>Enhancing Risk Awareness for Business Sustainability</i>
	28 Mei 2024 May 28, 2024	Daring	LPP Agro Nusantara	<i>Building Trust in a World of Deception: Strategies to Combat Fraud and Protect Reputation</i>
	27 Juni 2024 June 27, 2024	Daring Online	LPP Agro Nusantara	<i>Governance and Risk: Strategic Legal Risk Management</i>

Kebijakan Remunerasi [GRI 2-19]

Remuneration Policy

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara I didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: DOSG-DIRUT/SKPTS/2024.11.05-3 tentang Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 dan Peraturan Direksi Nomor: DOSG-DIRUT/PERDIR/2024.11.11-1 tentang Penghasilan Tahun 2024. Kedua regulasi ini merujuk pada Surat Direksi PTPN III (Persero) Nomor DSDM/N.I/R/1650/2024 yang mengatur penetapan penghasilan serta insentif kinerja bagi jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pemberian bonus bagi Region Head dan SEVP.

Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan jabatan struktural, namun juga kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (KPI). Perusahaan tidak menerapkan skema pembayaran berbasis saham, penarikan kembali (*clawback*), maupun pembayaran pesangon yang berbeda dari karyawan non-manajerial. Seluruh kebijakan remunerasi disusun dengan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.

The determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara I is based on the provisions outlined in Directors' Decree No. DOSG-DIRUT/SKPTS/2024.11.05-3 concerning Performance Incentives/Bonus for Fiscal Year 2023 and Directors' Regulation No. DOSG-DIRUT/PERDIR/2024.11.11-1 concerning Earnings for 2024. Both regulations refer to the Decree of the Board of Directors of PTPN III (Persero) No. DSDM/N.I/R/1650/2024, which governs the determination of earnings and performance incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners, including bonus allocations for Region Heads and SEVPs.

The formulation and review of remuneration policies are carried out periodically to ensure alignment with the Company's strategic direction, market competitiveness, and applicable regulatory standards. In doing so, PTPN I ensures that the remuneration structure remains responsive to organizational changes and performance expectations, while maintaining its commitment to sustainability values and responsible business practices.

Fasilitas Kantor Regional 2
Regional Office 2 Facilities



Proses Penentuan Remunerasi [GRI 2-20]

Remuneration Determination Process

Dalam menetapkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, PTPN I merujuk pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh *Holding* PTPN III (Persero). Proses penetapan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023.

Penetapan penghasilan dilakukan melalui kajian yang dilakukan oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh Direksi *holding*. Hasil kajian ini kemudian dibahas bersama Dewan Komisaris untuk memperoleh masukan dan disampaikan sebagai usulan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham. Selanjutnya, ketentuan remunerasi ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi yang berlaku.

Penetapan remunerasi bagi jajaran Direksi dan Dewan Komisaris juga mempertimbangkan indikator kinerja manajemen yang dituangkan dalam kontrak manajemen, termasuk target-target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), KPI, pembobotan, dan sasaran tahunan yang harus dicapai. Selain kinerja, proses ini juga mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja dan situasi keuangan perusahaan.

Pada periode pelaporan, PTPN I belum mengungkapkan rasio kompensasi total tahunan antara gaji tertinggi dan median kompensasi seluruh karyawan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan internal terkait kerahasiaan data. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan pada periode pelaporan mendatang. [GRI 2-21]

In determining the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners, PTPN I refers to the policies and guidelines established by the Holding Company, PTPN III (Persero). The process adheres to the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of Directors, Commissioners, and Supervisory Boards of SOEs, as amended by Regulation No. PER-03/MBU/03/2023.

The remuneration is determined based on an assessment conducted by an independent consultant appointed by the holding company's Board of Directors. The results of this assessment are discussed with the Board of Commissioners to gather input and are then submitted as a recommendation to the Minister of SOEs as the shareholder. Final remuneration provisions are determined through the General Meeting of Shareholders (GMS), in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and applicable regulations.

The determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners also considers management performance indicators as outlined in the management contract. These include targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), KPIs, weightings, and annual performance goals. In addition to performance, the process takes into account labor market conditions and the Company's financial situation.

During the reporting period, PTPN I did not disclose the annual total compensation ratio between the highest-paid individual and the median compensation of all employees, due to internal policies related to data confidentiality. The Company is committed to improving the quality of disclosure in future reporting periods. [GRI 2-21]

Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration of the Board of Commissioners

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Jumlah Amount	Keterangan Description
1.	Honorarium per bulan Monthly salary	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of the President Director's salary	Komisaris Utama President Commissioner
		Sebesar 90% dari Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's salary	Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners
2.	Tunjangan Allowances		
	- Tunjangan Hari Raya - Religious Holiday Allowance	1 bulan honorarium 1 month of salary	Tunjangan hari raya Keagamaan Religious holiday allowance
	- Tunjangan Transportasi - Transportation Allowance	20% dari honorarium 20% of the monthly salary	
	- Tunjangan/Asuransi Purna Jabatan - Post-Service Allowance/Insurance	25% dari gaji dalam 1 tahun 25% of one year's salary	Mengacu ketentuan perusahaan Referring to company regulations
3.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 unit mobil beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional 1 unit car including maintenance and operational costs	Standar kapasitas mesin sesuai ketentuan perusahaan Engine capacity standard in accordance with company regulations
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Asuransi kesehatan & penggantian biaya pengobatan (at cost) Health insurance and reimbursement of medical expenses (at cost)	Yang bersangkutan beserta 1 (satu) orang istri dan anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum menikah atau belum bekerja) The individual, along with one (1) spouse and any children under the age of 25 who are unmarried and not employed.
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Dibayarkan sesuai pemakaian (at cost) Paid according to usage (at cost)	Mengacu ketentuan perusahaan Referring to company regulations
	Fasilitas Biaya Operasional Operational Expense Facility	Pakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi Uniforms and professional association membership	Mengacu ketentuan perusahaan Referring to company regulations
4.	Tantiem/Insentif Kinerja Performance Incentive / Bonus	Sebesar 45% dari tantiem Direktur dengan dasar perhitungan pada diktum kedua 45% of the Director's tantiem on the basis of the calculation in the second dictum	Komisaris Utama President Commissioner
		Sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's bonus/performance incentive	Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners

Remunerasi Direksi

Remuneration of the Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Jumlah Amount	Keterangan Description
1.	Gaji per bulan	Rp181.050.000	Direktur (85% dari Gaji Direktur Utama)
	Monthly salary	Rp181,050,000	Director (85% of the President Director's salary)
		Sebesar 90% dari Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris
		90% of the President Commissioner's salary	Members of the Board of Commissioners
2.	Tunjangan Allowances		
	- Tunjangan Hari Raya - Religious Holiday Allowance	1 bulan gaji 1 month of salary	Tunjangan Hari Raya keagamaan Religious Holiday Allowance
	- Tunjangan Perumahan - Housing Allowance	Jika tidak disediakan rumah jabatan: Rp27.500.000 If official residence is not provided: Rp27,500,000	Diberikan jika tidak disediakan rumah jabatan Provided if official residence is not provided
	- Tunjangan/Asuransi Purna Jabatan - Post-Service Allowance/Insurance	25% dari gaji dalam 1 tahun 25% of one year's salary	Mengacu ketentuan perusahaan Referring to company regulations
3.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 unit mobil beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional 1 unit car including maintenance and operational costs	Standar kapasitas mesin sesuai ketentuan perusahaan Engine capacity standard in accordance with company regulations
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Asuransi kesehatan & penggantian biaya pengobatan (at cost) Health insurance and reimbursement of medical expenses (at cost)	Yang bersangkutan beserta 1 (satu) orang istri dan anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum menikah atau belum bekerja) The individual, along with one (1) spouse and any children under the age of 25 who are unmarried and not employed.
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Dibayarkan sesuai pemakaian (at cost) Paid according to usage (at cost)	Mengacu ketentuan perusahaan Referring to company regulations
	Fasilitas Biaya Operasional Operational Expense Facility	Biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/corporate member, dan biaya representasi Communication expenses, uniforms, professional association membership, club membership/corporate membership, and representation expenses	Mengacu ketentuan perusahaan Referring to company regulations
4.	Tantiem/Insentif Kinerja Performance Incentive / Bonus	100% dari dasar perhitungan pada diktum kedua 100% of the calculation basis as stated in the second dictum	

Manajemen

Risiko ^[E.3]

Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko adalah bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, bahwa Direksi wajib menyusun Manajemen Risiko manual dan membangun serta melaksanakan program Manajemen Risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, serta menyampaikan laporan profil Manajemen Risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Akuntabilitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan

Dalam membangun infrastruktur organisasi untuk pengelolaan manajemen risiko, kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab menjadi aspek yang paling utama. Kejelasan tersebut menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan. Penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas tertinggi untuk penerapan manajemen risiko berada pada Direktur yang membidangi manajemen risiko, serta berada pada para pemangku risiko (*risk owner*).

Secara umum, pihak-pihak yang berperan dalam penerapan kebijakan manajemen risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut: ^[GRI 2-12]

1. Direksi sebagai Pimpinan Perusahaan adalah penanggung jawab utama penerapan Manajemen Risiko pada Perseroan.
2. Dewan Komisaris adalah Pengawas Tertinggi dalam pelaksanaan pengawasan (*monitoring* dan *review*) pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko pada Perseroan.
3. Unit yang membidangi Manajemen Risiko selaku unit pengelola risiko dan bertugas mengkoordinir setiap tahapan implementasi Manajemen Risiko.
4. Unit yang membidangi Auditor Internal bertugas untuk

The implementation of Risk Management is an integral part of Good Corporate Governance (GCG). In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises, the Board of Directors is required to develop a Risk Management manual and to establish and implement a comprehensive corporate Risk Management program as part of the GCG implementation, as well as submit a report on the Risk Management profile and its mitigation measures along with the Company's periodic reports.

Accountability in the Implementation of Corporate Risk Management

In developing the organizational infrastructure for risk management, clarity of accountability and responsibility is a key aspect. This clarity serves as the main driver in the execution of risk management within the Company. It is clearly established that the highest accountability for the implementation of risk management lies with the Director responsible for risk management, as well as with the designated risk owners.

In general, the parties involved in the implementation of the Company's risk management policy are as follows: ^[GRI 2-12]

1. The Board of Directors, as the executive management of the Company, holds primary responsibility for the implementation of Risk Management within the Company.
2. The Board of Commissioners serves as the highest supervisory body (monitoring and reviewing) the implementation of Risk Management.
3. The Risk Management unit acts as the risk management coordinator and is responsible for managing and coordinating all stages of Risk Management implementation.

- melaksanakan pengawasan atas setiap pelaksanaan rencana penanganan risiko.
- 5. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada masing-masing unit kerjanya.
- 6. Seluruh karyawan berkewajiban mengimplementasikan proses Manajemen Risiko.

- 4. The Internal Audit unit is responsible for monitoring and supervising the execution of risk mitigation plans.
- 5. Heads of Work Units are accountable for managing risks within their respective units.
- 6. All employees are obligated to implement the Risk Management process.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

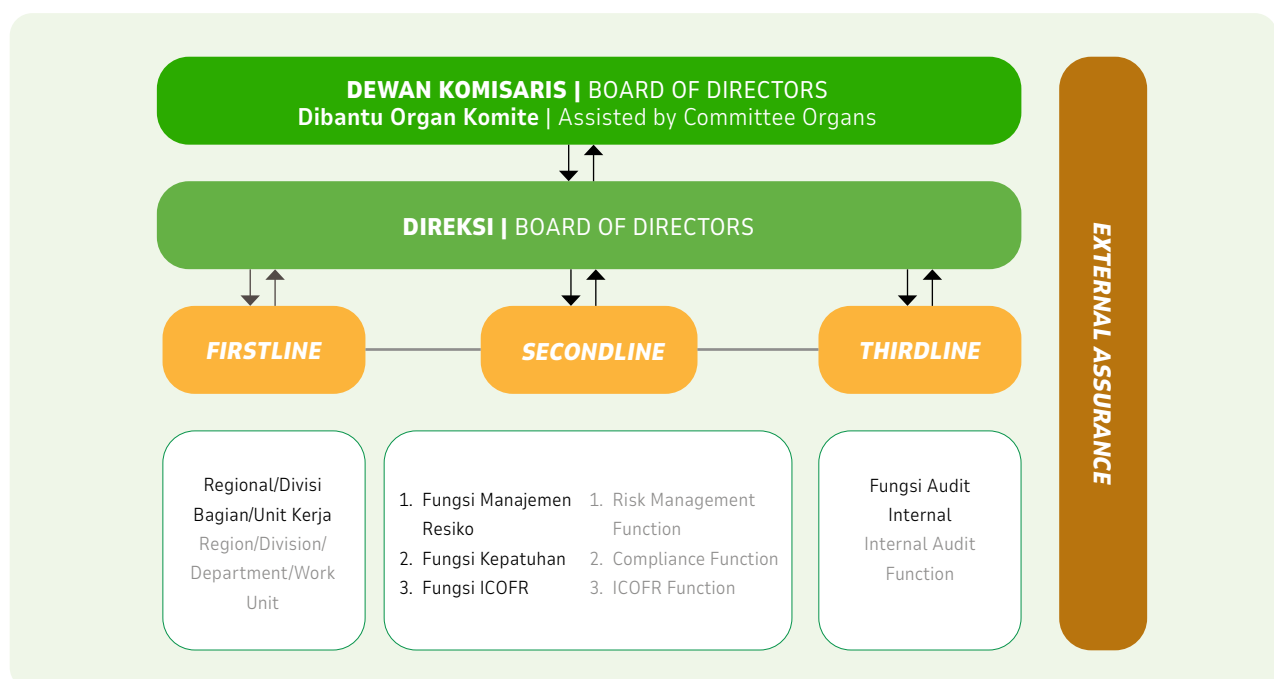
Dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan, ditetapkan struktur tata kelola manajemen risiko menggunakan konsep Tiga Lini Pertahanan (*three lines model*), yang terdiri dari :

- a. Divisi/Regional/Unit Kerja sebagai Lini Pertahanan Pertama yaitu unit pemilik risiko, merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis;
- b. Unit Manajemen Risiko sebagai Lini Pertahanan Kedua yaitu unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan; dan
- c. Satuan Pengawasan Internal sebagai Lini Pertahanan Ketiga yaitu unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan.

Risk Management Governance Structure

the implementation of the Company's risk management, a risk governance structure is established based on the Three Lines of Defense model, consisting of:

- a. Divisions/Regions/Work Units as the First Line of Defense, namely the risk owners, responsible for directly identifying and managing risks within business processes;
- b. Risk Management Unit as the Second Line of Defense, namely the unit that measures, monitors, and treats risks on an aggregate level, and develops the Company's risk management methodologies and policies; and
- c. Internal Audit Unit as the Third Line of Defense, namely the unit that ensures effective implementation of governance and risk controls across the organization.



Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Perusahaan telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang dapat memastikan:

- Eksposur risiko terukur secara akurat, informatif dan tepat waktu.
- Kepatuhan penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan dan prosedur.
- Hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan penerapan manajemen risiko.

Adapun output sistem informasi manajemen risiko berupa laporan manajemen risiko yang disampaikan secara periodik kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Dalam implementasi proses manajemen risiko, saat ini PTPN I telah mempergunakan sistem berbasis teknologi yang terintegrasi dengan seluruh member PTPN Group.

Enterprise Risk Information Nusantara (ERIN) merupakan sistem aplikasi yang dirancang untuk mengakomodasi seluruh tahapan proses manajemen risiko, mulai dari penetapan konteks, asesmen risiko, hingga monitoring dan evaluasi risiko secara sistematis dan berkelanjutan.

Melalui ERIN, identifikasi risiko dilakukan sejak level unit kerja terkecil, disusun berdasarkan *key performance indicators* (KPI) dan bisnis proses, serta teragregasi hingga tingkat korporasi dengan mempertimbangkan signifikansi risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan standar PTPN Group. Dengan mekanisme ini, Perusahaan dapat memperoleh gambaran risiko yang lebih akurat, sehingga memungkinkan perencanaan strategi mitigasi yang lebih efektif.

Selain itu, ERIN juga berfungsi sebagai *platform* pengawasan dan pelaporan risiko yang dapat diakses secara *real-time*, memungkinkan pemantauan perkembangan risiko secara transparan dan terstruktur. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi tata kelola manajemen risiko, mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data, serta memperkuat daya tahan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan risiko, Perusahaan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem ERIN, termasuk integrasi dengan pemenuhan Aspirasi Pemegang

Risk Management Information System

As part of the risk management process, the Company has established a Risk Management Information System that ensures:

- Risk exposures are measured accurately, informatively, and in a timely manner.
- Compliance with risk management policies and procedures is ensured.
- The results (realization) of risk management are compared against the targets set by the Company in accordance with its risk management policy.

The output of the Risk Management Information System consists of risk management reports that are periodically submitted to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders.

In the implementation of the risk management process, PTPN I currently utilizes a technology-based system that is integrated with all members of the PTPN Group.

Enterprise Risk Information Nusantara (ERIN) is an application system designed to accommodate all stages of the risk management process, from context setting and risk assessment to systematic and continuous risk monitoring and evaluation.

Through ERIN, risk identification is carried out starting from the smallest work unit level, structured based on key performance indicators (KPIs) and business processes, and aggregated up to the corporate level by considering the significance of risks as defined by PTPN Group standards. This mechanism enables the Company to obtain a more accurate risk profile, thereby allowing for more effective mitigation strategy planning.

In addition, ERIN also functions as a risk monitoring and reporting platform that can be accessed in real time, enabling transparent and structured tracking of risk developments. The implementation of this system is expected to enhance the integration of risk management governance, accelerate data-driven decision-making processes, and strengthen the Company's resilience in navigating dynamic business challenges.

As part of its efforts to enhance the quality of risk management, the Company continuously develops and refines the ERIN system, including its integration with the fulfillment of other Shareholder Aspirations. This

Saham lainnya guna memastikan bahwa risiko tidak hanya terkelola dengan baik, tetapi juga dapat dikonversikan menjadi peluang strategis bagi pertumbuhan perusahaan.

Tinjauan Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, PTPN I secara konsisten mengimplementasikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses bisnis untuk mendukung pencapaian target kinerja perusahaan. Pada tahun 2024, efektivitas penerapan manajemen risiko dinilai melalui pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) oleh BPKP terhadap Holding PTPN III (Persero), yang didukung oleh data dari PTPN I.

Sebagai bagian dari evaluasi internal, aspek yang ditinjau mencakup infrastruktur pendukung, pemenuhan sumber daya, perencanaan, dokumen *contingency plan*, serta implementasi manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan dan pedoman manajemen risiko tetap relevan, beberapa SOP telah diperbarui, serta unit kerja dan pelatihan manajemen risiko telah dijalankan, meskipun belum merata di seluruh regional dan anak perusahaan. Pengembangan aplikasi manajemen risiko juga sedang berjalan dan ditargetkan mulai digunakan pada Januari 2025.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, PTPN I berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, seperti melakukan peninjauan berkala terhadap kebijakan dan pedoman risiko, menyosialisasikan kembali SOP dan instruksi kerja yang telah diperbarui, serta memastikan pembentukan unit manajemen risiko di semua tingkat. Perusahaan juga akan menyusun program pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh pengelola risiko, mempercepat penyelesaian dan pelatihan penggunaan aplikasi manajemen risiko, serta meningkatkan keseragaman asesmen risiko di seluruh entitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya manajemen risiko yang konsisten dan transparan di lingkungan PTPN I.

is intended to ensure that risks are not only effectively managed but also transformed into strategic opportunities that support the Company's growth.

Review of Risk Management Implementation Effectiveness

To strengthen good corporate governance, PTPN I consistently implements risk management as an integral part of its business processes to support the achievement of corporate performance targets. In 2024, the effectiveness of risk management implementation was assessed through the measurement of the Risk Maturity Index (RMI) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for Holding PTPN III (Persero), with supporting data provided by PTPN I.

As part of the internal evaluation, the review covered supporting infrastructure, resource availability, planning, contingency plan documentation, and the implementation of risk management. The evaluation results indicate that the risk management policies and guidelines remain relevant, several SOPs have been updated, and risk management units and training programs have been implemented, although not yet uniformly across all regions and subsidiaries. The development of the risk management application is currently in progress and is targeted for implementation starting January 2025.

In response to the evaluation results, PTPN I is committed to continuous improvement by conducting regular reviews of risk policies and guidelines, re-socializing updated SOPs and work instructions, and ensuring the establishment of risk management units at all levels. The Company will also develop training and certification programs for all risk managers, accelerate the completion and rollout of the risk management application, and enhance consistency in risk assessments across all entities. These initiatives are expected to strengthen a consistent and transparent risk management culture throughout PTPN I.

Kode Etik

[GRI 2-23]

Code of Conduct

PTPN I menetapkan Kode Etik Perusahaan sebagai kumpulan komitmen yang mencakup etika bisnis perusahaan dan etika kerja seluruh Insan PTPN I. Kode Etik ini disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur, dan menyesuaikan perilaku, sehingga menghasilkan output yang konsisten dengan budaya kerja Perusahaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi.

PTPN I has established a Corporate Code of Conduct as a set of commitments encompassing the business ethics of the Company and the work ethics of all PTPN I employees. The Code of Conduct is designed to influence, shape, regulate, and align behavior to produce outcomes consistent with the Company's work culture, thereby supporting the achievement of its vision and mission.

Tata Nilai Insan PTPN I

Tata nilai Perusahaan mencerminkan karakter, motivasi, serta semangat yang menjadi komitmen bersama seluruh Insan Perusahaan. Tata nilai ini merupakan susunan nilai positif yang berlandaskan prinsip etika yang baik, yang selama ini telah diterapkan, baik secara sadar maupun tidak, sebagai bagian dari budaya Perusahaan. Pada akhirnya, tata nilai tersebut membentuk karakter Perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya dan menjadi jiwa dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan Perusahaan.

Tata Nilai PTPN I terdiri atas enam Nilai Utama (*Core Values*) dan 18 (delapan belas) panduan perilaku, dengan rincian sebagai berikut:

Core Values of PTPN I Employees

The Company's core values reflect the character, motivation, and spirit that represent the collective commitment of all employees. These values are a set of positive principles founded on strong ethical standards, which have been practiced, both consciously and unconsciously as an integral part of the Company's culture. Ultimately, these core values shape the Company's character in carrying out its business operations and serve as the driving spirit in realizing the Company's vision, mission, and objectives.

PTPN I's Core Values consist of six Main Values and 18 (eighteen) behavioral guidelines, detailed as follows:

Kegiatan Operasional Regional 8 Operational Activities of Region 8



AKHLAK

AMANAH

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan Perilaku:

- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan; dan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

TRUST

Definition: Upholding the trust given.

Behavioral Guidelines

- Fulfill promises and commitments;
- Take responsibility for tasks, decisions, and actions; and
- Adhere to moral and ethical values.

KOMPETEN

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan Perilaku:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar; dan
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

COMPETENT

Definition: Continuously learning and developing capabilities.

Behavioral Guidelines

- Enhance personal competencies to meet everchanging challenges;
- Assist others in learning; and
- Complete tasks with the highest quality.

HARMONIS

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku:

- Menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain; dan
- Membangun lingkungan kerja.

HARMONIOUS

Definition: Caring for and respecting differences.

Behavioral Guidelines:

- Respect every person and their background;
- Willingly help others; and
- Foster a positive work environment.

LOYAL

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan Perilaku:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; dan
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL

Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

Behavioral Guidelines:

- Uphold the good name of fellow employees, leaders, state-owned enterprises, and the Nation;
- Willingly sacrifice to achieve greater goals; and
- Obey leaders as long as it does not conflict with laws and ethics.

ADAPTIF

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus-menerus melakukan perbaikan
- Bertindak proaktif.

ADAPTIVE

Definition: Continuously innovating and enthusiastically embracing or driving change.

Behavioral Guidelines:

- Adapt quickly to improve;
- Continuously pursue improvement in line with technological developments;
- Act proactively.

KOLABORATIF

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan Perilaku:

- Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COLLABORATIVE

Definition: Building synergistic collaboration.

Behavioral Guidelines:

- Open opportunities for various parties to contribute;
- Foster collaboration to create added value; and
- Encourage the utilization of diverse resources for shared goals.

Etika Kerja

1. Menjaga Reputasi dan Citra Perusahaan;
2. Melindungi Aset Perusahaan;
3. Melindungi Informasi Perusahaan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
6. Kecurangan (*Fraud*);
7. Gratifikasi;
8. Penghormatan Kepada Hak Intelektual;
9. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan;
10. Perilaku Moral dan Kesusilaan; dan
11. Kegiatan Sosial dan Politik.

Etika Hubungan Kerja Atasan dan Bawahan

1. Insan Perusahaan menyadari bahwa kinerja Perusahaan sangat dipengaruhi oleh terciptanya hubungan antara atasan bawahan. Untuk itu dalam melaksanakan aktivitasnya, selalu berpedoman dan memperhatikan kebijakan struktur organisasi;
2. Sebagai atasan, harus mampu memberikan keteladanan dan panutan yang baik yang dicerminkan dalam sikap, tindakan dan perilaku serta tutur bahasa, selalu mendorong pola komunikasi secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja;
3. Perusahaan sesegera mungkin melaksanakan penunjukan secara resmi apabila terdapat jabatan yang masih lowong sesuai dengan kewenangannya;
4. Perusahaan tidak memperkenankan seorang atasan menugaskan bawahannya untuk melaksanakan kepentingan pribadi di luar kedinasan pada jam kerja;
5. Insan Perusahaan memperhatikan perasaan, harkat dan martabat seseorang, untuk itu Perusahaan membiasakan insannya untuk tidak memberikan hukuman berupa teguran ringan secara terbuka. Tetapi setiap teguran ringan yang disampaikan wajib diadministrasikan/ diagendakan oleh atasan yang bersangkutan dan diketahui oleh bawahan yang bersangkutan sebagai dukungan formal;
6. Perusahaan tetap memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan penjelasan atas penilaian yang dilakukan atasan;
7. Insan Perusahaan yang berposisi sebagai seorang bawahan, harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada atasannya, berani mengambil inisiatif dalam memecahkan permasalahan serta tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi; dan

Work Ethics

1. Safeguarding the Company's Reputation and Image;
2. Protecting Company Assets;
3. Protecting Company Information;
4. Conflict of Interest;
5. Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN);
6. Fraud;
7. Gratification;
8. Respect for Intellectual Property Rights;
9. Ensuring Safety, Health, and Environment;
10. Upholding Moral and Ethical Conduct; and
11. Social and Political Activities.

Workplace Ethics in Superior-Subordinate Relationships

1. Company personnel recognize that the Company's performance is significantly influenced by the relationship between superiors and subordinates. Therefore, in carrying out their activities, they always adhere to and consider the policies of the organizational structure;
2. As superiors, they must set a good example reflected in their attitude, actions, behavior, and language. They should always encourage open, honest, and responsible communication, and create a conducive work environment for performance improvement;
3. The Company promptly carries out official appointments for any vacant positions in accordance with its authority;
4. The Company does not permit superiors to assign their subordinates to perform personal tasks during working hours;
5. Company personnel respect the feelings, dignity, and self-worth of individuals. Therefore, the Company practices not giving reprimands publicly for minor offenses. However, every minor reprimand given must be formally documented and scheduled by the respective superior and acknowledged by the concerned subordinate as formal support;
6. The Company continues to provide employees with the opportunity to receive explanations for evaluations conducted by their superiors;
7. Company personnel in a subordinate position must communicate openly and honestly with their superiors, take initiative in solving problems, and refrain from exerting pressure or intimidation, making derogatory remarks, engaging in harassment, or provocation; and

- Insan Perusahaan menghargai martabat manusia tanpa memandang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan jenis kelamin.

Sosialisasi dan Implementasi Kode Etik [GRI 2-24]

Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Perusahaan disampaikan kepada seluruh pimpinan, termasuk pimpinan kebun dan pabrik, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh karyawan di lingkungan kerja masing-masing. Selain melalui penyampaian formal, sosialisasi Kode Etik juga dilakukan secara berkala dalam berbagai rapat internal sebagai bagian dari upaya penguatan budaya perusahaan. Dalam setiap kesempatan tersebut, Kode Etik kembali diangkat dan diingatkan kepada seluruh karyawan guna memastikan pemahaman yang konsisten dan mencegah potensi pelanggaran. Melalui pendekatan ini, Perusahaan berkomitmen membangun lingkungan kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap standar etika yang telah ditetapkan.

Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor [GRI 2-26]

- Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas *Code of Conduct* yang dilakukan Insan Perusahaan dengan bukti yang cukup kepada pihak yang mengelola sistem pelaporan pelanggaran. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor;
- Pihak yang mengelola sistem pelaporan pelanggaran berkewajiban untuk menerima setiap pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku dan etika, peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan; dan
- Perusahaan menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku dan etika, peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Setiap Insan PTPN I memiliki tanggung jawab untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau kecurangan sesuai dengan ketentuan Kode Etik. Tanggung jawab ini mencerminkan kepercayaan Perusahaan terhadap integritas dan kejujuran seluruh individu di dalam organisasi. Dengan memberikan hak serta mendorong

- Company personnel respect human dignity regardless of ethnicity, religion, race, inter-group affiliation, or gender.

Socialization and Implementation of the Code of Ethics [GRI 2-24]

The Code of Ethics established by the Company is communicated to all leaders, including estate and factory managers, to be further disseminated to all employees within their respective work environments. In addition to formal communication, the Code of Ethics is also periodically socialized through various internal meetings as part of efforts to strengthen the Company's culture. During these sessions, the Code of Ethics is reiterated and reinforced to all employees to ensure consistent understanding and prevent potential violations. Through this approach, the Company is committed to fostering a work environment based on integrity, professionalism, and adherence to established ethical standards.

Violation Reporting and Whistleblower Protection [GRI 2-26]

- Every individual is obligated to report any violation of the Code of Conduct committed by Company employees, supported by sufficient evidence, to the designated whistleblowing management team. Reports from external parties must also be accepted, provided they are supported by clear evidence and the reporter's identifiable information;
- The party responsible for managing the whistleblowing system is obligated to receive all reports concerning violations of business ethics, the code of conduct, company regulations, and applicable laws and regulations, and to report them to the Board of Directors with sufficient and accountable evidence;
- The Company must establish regulations that ensure protection for individuals who report violations of business ethics, the code of conduct, company regulations, and applicable laws and regulations; and
- The Company establishes provisions that regulate the reporting mechanism for violations of business ethics, the code of conduct, company regulations, and applicable laws and regulations.

Every PTPN I employee has the responsibility to report any suspected violation or fraud in accordance with the provisions of the Code of Conduct. This responsibility reflects the Company's trust in the integrity and honesty of every individual within the organization. By granting the right and encouraging the reporting of violations, PTPN

pelaporan pelanggaran, PTPN I menegaskan komitmennya terhadap penerapan standar etika yang tinggi serta membangun lingkungan kerja yang menjunjung keadilan dan kejujuran.

I reinforces its commitment to upholding high ethical standards and fostering a work environment that values fairness and integrity.

Jumlah pelanggaran Kode Etik di lingkungan Perusahaan disajikan dengan rincian sebagai berikut:

The number of Code of Ethics violations within the Company is presented with the following details:

Deskripsi Description	2024	2023	2022
Tindakan Disiplin Ringan Minor Disciplinary Actions	2.757	1.847	1.156
Tindakan Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Actions	236	272	347
Tindakan Disiplin Berat Severe Disciplinary Actions	151	211	137
Tidak Dikenakan Sanksi/ Pengaduan Tidak Terbukti No Sanctions/Accusations Not Proven	-	-	-

Kegiatan Operasional Regional 5 Operational Activities of Region 5



Kebijakan **Hak Asasi Manusia** [GRI 2-23]

Human Rights Policy

Sebagai bagian dari penerapan kebijakan Holding PTPN III, Perusahaan menunjukkan komitmen kuat terhadap penghormatan dan perlindungan HAM. Komitmen ini selaras dengan ketentuan internasional seperti Deklarasi Universal HAM, standar dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), termasuk Konvensi Inti ILO dan Konvensi ILO 169 mengenai hak masyarakat adat dan suku, serta hukum yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan melalui standar dan prosedur yang relevan di seluruh lini operasional guna memastikan konsistensi dalam pelaksanaan penghormatan dan perlindungan HAM.

Kebijakan HAM Perusahaan disusun berlandaskan pada komitmen kuat untuk menghormati dan melindungi HAM, yang kemudian dituangkan ke dalam standar dan prosedur operasional yang berlaku di seluruh aspek kegiatan perusahaan. Kebijakan ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip dasar HAM, tetapi juga mencakup ketentuan khusus mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui inisiatif ini, Perusahaan menegaskan keseriusannya dalam menjunjung tinggi HAM dalam setiap lini operasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman, serta memberikan perlindungan yang layak bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan kelompok rentan.

As part of the implementation of PTPN III Holding's policy, the Company demonstrates a strong commitment to the respect and protection of human rights. This commitment aligns with international provisions such as the Universal Declaration of Human Rights, standards set by the International Labour Organization (ILO), including the ILO Core Conventions and ILO Convention No. 169 on the rights of indigenous and tribal peoples, as well as applicable laws. The policy is implemented through relevant standards and procedures across all operational levels to ensure consistency in the practice of respecting and protecting human rights.

The Company's Human Rights Policy is formulated based on a strong commitment to respect and protect human rights, which is then integrated into applicable operational standards and procedures across all aspects of the Company's activities. This policy not only outlines the fundamental principles of human rights but also includes specific provisions for the protection of vulnerable groups. Through this initiative, the Company reaffirms its commitment to upholding human rights across all operational levels. Its primary objective is to create a fair and safe working environment while providing adequate protection for all stakeholders, including local communities and vulnerable groups.

Kebijakan

Antikorupsi dan Antigratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy

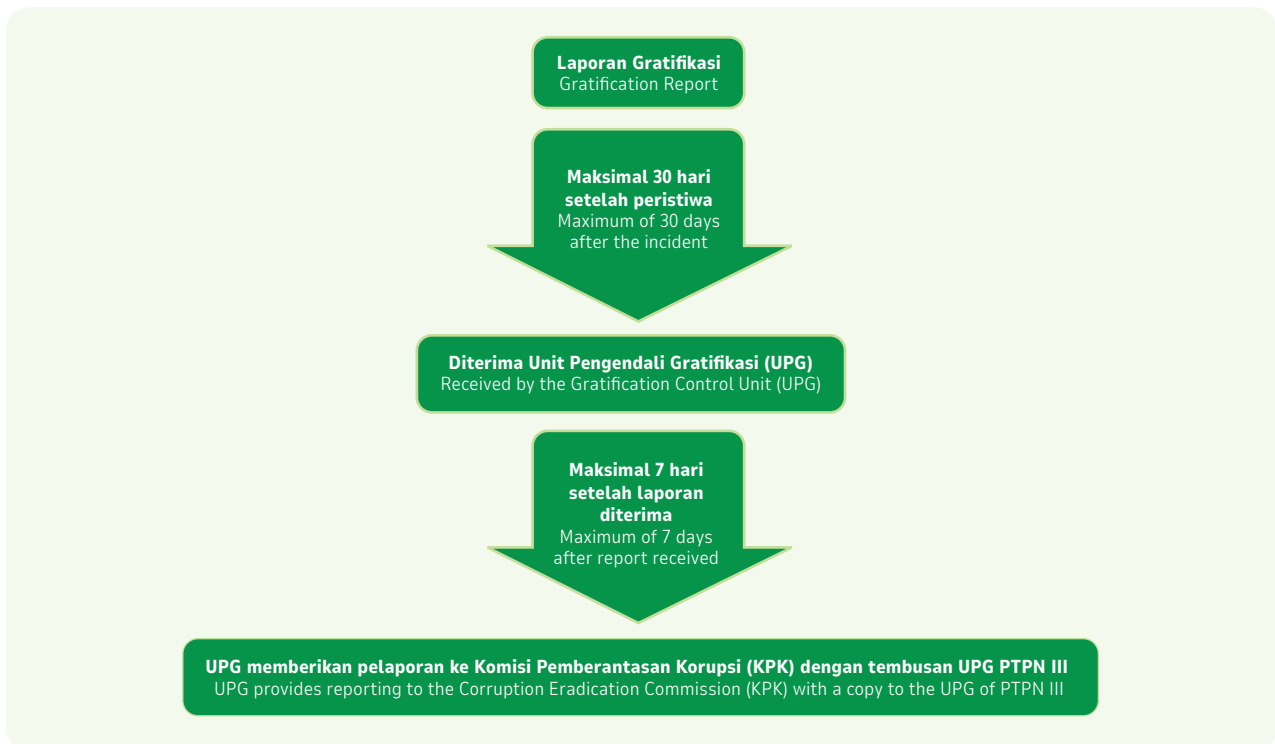
Perusahaan memandang upaya pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut menguraikan bahwa korupsi meliputi berbagai tindakan melawan hukum yang memberikan keuntungan pribadi atau kepada pihak lain dengan mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kerugian negara (Pasal 3), serta berbagai tindak pidana lainnya seperti penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11), penggelapan jabatan (Pasal 8, 9, dan 10), pemerasan (Pasal 12), praktik pemborongan yang menyimpang (Pasal 7), dan gratifikasi (Pasal 12B dan 12C). [GRI 3-3] [13.26.1]

Gratifikasi merupakan salah satu fokus utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena berpotensi menjadi bentuk tindak pidana suap. Pengaturan terkait gratifikasi tercantum dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 2 Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Mengacu pada penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 1 huruf d dan e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat struktural di lingkungan BUMN dan BUMD dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Untuk mendukung upaya pencegahan gratifikasi, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Umum Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara I yang disahkan oleh Direksi pada 4 Januari 2024. [GRI 3-3] [13.26.1]

The Company views anti-corruption efforts as a fundamental pillar in the implementation of good corporate governance principles. This commitment is based on the provisions of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The regulation stipulates that corruption encompasses various unlawful acts that provide personal gain or benefit to others, resulting in financial or economic losses to the state (Article 2). This includes abuse of authority resulting in state losses (Article 3), as well as various other criminal acts such as bribery (Articles 5, 6, and 11), embezzlement in office (Articles 8, 9, and 10), extortion (Article 12), irregular procurement practices (Article 7), and gratification (Articles 12B and 12C). [GRI 3-3] [13.26.1]

Gratification is one of the main focuses of the Corruption Eradication Commission as it has the potential to constitute a form of bribery. Regulations regarding gratification are outlined in Article 12B Paragraph (1) of Law No. 20 of 2001, which amends Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Article 2 of KPK Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. Referring to the explanation of Article 2 point 7 of Law No. 28 of 1999 on State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, as well as Article 1 letters d and e of Law No. 31 of 1999, members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and structural officials within State-Owned and Regional-Owned Enterprises are categorized as state administrators. To support efforts in preventing gratification, the Company has established the General Guidelines for Gratification Control of PT Perkebunan Nusantara I, which were ratified by the Board of Directors on January 4, 2024 [GRI 3-3] [13.26.1]

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi [GRI 2-26] Gratification Reporting Mechanism



- Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara online atau melalui surat apabila saluran *online* belum tersedia atau mengalami kendala, dengan mencantumkan paling tidak informasi berikut:

 - Identitas pelapor, terdiri dari nama lengkap, jabatan dan unit kerja;
 - Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - Nilai gratifikasi yang diterima;
 - Nama pihak/lembaga pemberi, penerima gratifikasi; dan
 - Hubungan dengan pihak pemberi dan alasan pemberian
 - Pelaporan gratifikasi wajib menggunakan formulir Gratifikasi (Formulir 1, 2, 3, dan 4) dan disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi. Setelah laporan diterima, UPG berkewajiban meneruskannya kepada KPK dengan tembusan kepada UPG PTPN III (Persero) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Apabila terdapat pemberian hadiah, cinderamata, dan/atau hiburan kepada mitra Perusahaan dengan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pelaporan wajib menggunakan Formulir 1.
- Gratification reports may be submitted online or via letter if the online channel is unavailable or experiencing technical issues, and must include at least the following information:

 - Reporter's identity, including full name, position, and work unit;
 - Location and time of gratification receipt;
 - Description of the type of gratification received;
 - Value of the gratification received;
 - Name of the individual/entity giving and receiving the gratification; and
 - Relationship with the giver and reason for the gratification.
 - Gratification reports must be submitted using the designated Gratification Forms (Forms 1, 2, 3, and 4) and delivered to the Gratification Control Unit (UPG) no later than 30 (thirty) working days from the date the gratification was received. Once the report is received, the UPG is obligated to forward it to the Corruption Eradication Commission (KPK), with a copy sent to the UPG of PTPN III (Persero), within a maximum of 7 (seven) working days. In cases where gifts, souvenirs, and/or entertainment are provided to the Company's partners with a value exceeding Rp1,000,000 (one million rupiah), the report must be submitted using Form 1.

3. Apabila karyawan menerima hadiah, cinderamata, dan/atau hiburan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, maka karyawan wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - **Atasan Langsung**
Laporan Gratifikasi disampaikan kepada atasan langsung untuk selanjutnya diserahkan kepada UPG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan formulir 2.
 - **Whistleblowing System**
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dilakukan apabila pelapor adalah karyawan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui WBS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme WBS PTPN I.
 4. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah kedaluwarsa, seperti makanan dan minuman, karyawan dapat menyerahkannya kepada lembaga sosial. Penyerahan tersebut harus disertai dengan bukti tanda terima dan disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan, menggunakan Formulir 3.
 5. Untuk penerimaan berupa barang yang tidak mudah kedaluwarsa, seperti uang, emas, dan sejenisnya, wajib disimpan di Bagian Keuangan Kantor Pusat hingga ada penetapan status kepemilikannya oleh KPK. Bukti penyimpanan tersebut harus disampaikan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaporan ke KPK, dengan menggunakan Formulir 4.
 6. UPG wajib membuat rekapitulasi atas penerimaan hadiah dan/atau cinderamata, serta melaporkannya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan, dengan tembusan kepada UPG PTPN III (Persero).
 7. Khusus bagi pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan yang teridentifikasi memiliki potensi benturan kepentingan, diwajibkan untuk secara berkala setiap semester melakukan pelaporan dengan mengisi Formulir Gratifikasi (Formulir 1, 2, 3, dan 4) atau melalui sistem jaringan informasi kepada UPG.
3. If an employee receives gifts, souvenirs, and/or entertainment exceeding the limits set by the Company, the employee is required to report the matter through the following channels:
 - **Direct Supervisor**
The gratification report must be submitted to the direct supervisor and forwarded to the UPG no later than 30 (thirty) working days from the date of receipt, using Form 2.
 - **Whistleblowing System**
Reporting through the Whistleblowing System is intended for employees or other parties (such as customers, business partners, or the public) who are not directly involved but are aware of gratification practices within the Company that may indicate potential abuse of power or position. Such reporting must be conducted in accordance with the PTPN I Whistleblowing System mechanism.
 4. For received items that are perishable, such as food and beverages, employees may donate them to social institutions. The donation must be accompanied by a receipt as proof and reported to the UPG no later than 7 (seven) days from the date of receipt, using Form 3.
 5. For received items that are non-perishable, such as money, gold, or similar valuables, they must be stored in the Finance Department of the Head Office until the ownership status is determined by the KPK. Proof of storage must be submitted to the UPG no later than 7 (seven) days after the report is filed with the KPK, using Form 4.
 6. UPG is required to compile a summary of received gifts and/or souvenirs and report it to the KPK no later than 7 (seven) days from the date of receipt, with a copy submitted to the UPG of PTPN III (Persero).
 7. Specifically for Company leaders and management personnel identified as having potential conflicts of interest, it is mandatory to submit periodic reports every semester by completing the Gratification Forms (Forms 1, 2, 3, and 4) or through the information system to the UPG.

8. UPG menyampaikan laporan penanganan gratifikasi yang diterima dari karyawan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Guna memperkuat komitmen terhadap kebijakan antikorupsi, Perusahaan telah melakukan pemetaan dan evaluasi risiko secara menyeluruh pada rantai pasok dan aktivitas operasional yang berpotensi rawan korupsi. Salah satu upaya yang dijalankan adalah identifikasi terhadap risiko kecurangan (*fraud*), yang kemudian dipantau dan dikelola secara berkala. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejumlah proses, khususnya dalam pengadaan atau pembelian, memiliki tingkat risiko signifikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengendaliannya. [GRI 205-1] [13.26.2]

Berikut adalah jumlah kecurangan (*fraud*) di lingkup Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi Description	2024	2023	2022
Jumlah kasus kecurangan yang masuk Number of fraud cases reported	3	3	20

Pada periode pelaporan ini, Perusahaan tidak mengidentifikasi adanya kasus korupsi. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Perusahaan terhadap prinsip integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasional. [GRI 205-3] [13.26.4]

Dalam upaya mencegah terjadinya tindakan korupsi, Perusahaan mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi, antara lain: [GRI 205-2] [13.26.3]

1. Menyediakan pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku yang harus ditandatangani oleh seluruh karyawan sebagai komitmen untuk mematuhi standar etika yang telah ditetapkan.
2. Menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi.
3. Membuat kebijakan Pengendalian Gratifikasi.

8. UPG submits periodic reports on the handling of gratification received from employees to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

To strengthen its commitment to the anti-corruption policy, the Company has conducted a comprehensive risk mapping and evaluation across the supply chain and operational activities that are potentially vulnerable to corruption. One of the measures taken includes the identification of fraud risks, which are then regularly monitored and managed. The evaluation results indicate that certain processes, particularly procurement and purchasing present significant risk levels and therefore require heightened control measures. [GRI 205-1] [13.26.2]

The number of fraud cases within the Company is presented with the following details:

During this reporting period, the Company did not identify any incidents of corruption. This reflects the Company's strong commitment to integrity and transparency in all operational activities. [GRI 205-3] [13.26.4]

As part of its efforts to prevent corruption, the Company has implemented various mitigation measures, including: [GRI 205-2] [13.26.3]

1. Requiring all employees to sign a compliance statement with the Code of Conduct as a commitment to uphold established ethical standards.
2. Implementing a Whistleblowing System (WBS) that enables employees to report suspected acts of corruption.
3. Establishing a Gratification Control Policy.

Whistleblowing System (WBS) [GRI 2-26] [F.24]

Perusahaan telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) sebagai wadah bagi seluruh Insan Perusahaan maupun pihak eksternal untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran terkait tata kelola maupun nilai-nilai etika yang berlaku. Laporan disampaikan dengan itikad baik, disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ditujukan demi kepentingan Perusahaan. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara I Nomor: UB-DIRUT/SKPTS/2024.01.04-020 dan Nomor: SKB-06/DEKOM-PTPN I/I/2024 tentang Pedoman *Whistleblowing System (WBS)*.

Prosedur Pelaporan

Penyampaian pengaduan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
 - a. Isi pelaporan agar menjelaskan dengan lengkap dan jelas atas pelanggaran yang dilaporkan serta pihak yang diduga sebagai terlapor;
 - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;
 - c. Lokasi, nama, tempat dan waktu terjadinya pelanggaran; dan
 - d. Bukti-bukti pendukung dan proses terjadinya pelanggaran. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan).
2. Seluruh Laporan yang masuk baik yang disertai identitas atau tanpa identitas pelapor tetap diterima dan ditindaklanjuti setelah ditelaah oleh Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan melalui beberapa saluran berikut:



0896 9613 0312



wbs@ptpn1.co.id



atau melalui pelaporan di masing-masing Regional 1-8
or through the reporting boxes located in each of
Regional Offices 1 to 8

Whistleblowing System (WBS) [GRI 2-26] [F.24]

The Company has developed and implemented a Whistleblowing System (WBS) as a platform for all employees and external parties to report suspected violations related to governance practices or applicable ethical standards. Reports must be submitted in good faith, supported by accountable evidence, and intended for the benefit of the Company. This policy is governed by the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara I, Number: UB-DIRUT/SKPTS/2024.01.04-020 and Number: SKB-06/DEKOM-PTPN I/I/2024 concerning the Whistleblowing System (WBS) Guidelines.

Reporting Procedure

Report submissions by the Whistleblower must take into account the following

1. The Whistleblower must provide accountable Initial Indications, including:
 - a. A complete and clear description of the reported violation and the individual(s) suspected of being involved;
 - b. The parties involved, including those responsible for the violation, any witnesses, and any individuals or entities that benefited from or were harmed by the violation;
 - c. The location, names, places, and time the violation occurred; and
 - d. Supporting evidence and a description of how the violation took place, including the estimated amount of loss, if identifiable.
2. All reports submitted, whether with or without the reporter's identity, will be accepted and followed up after being reviewed by the Whistleblowing System Management Unit.

Violation reports may be submitted through the following channels:

Pengelolaan dan Penanganan Pelaporan

[GRI 2-16]

Pengelolaan laporan atas dugaan penyimpangan terbagi atas dua kategori, yaitu:

1. Pelaporan tidak Menyangkut Direksi:
 - a. *Stakeholder* menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran;
 - b. Petugas pengelola laporan melakukan verifikasi terhadap laporan pelanggaran yang masuk/diterima. Jika laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka petugas meneruskan laporan kepada Direksi;
 - c. Direksi mendisposisikan laporan dimaksud kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran untuk ditindaklanjuti serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
 - d. Komisi Pelaporan Pelanggaran bersama Internal Audit atau bagian unit kerja lainnya melakukan investigasi lanjutan selama 14 (empat belas) hari kerja terhadap pelaporan pelanggaran;
 - e. Apabila hasil investigasi dapat dibuktikan maka Komisi Pelaporan Pelanggaran melaporkan pelanggaran tersebut dan memberikan penjelasan kepada Direksi dan jika tidak dapat dibuktikan maka pelaporan pelanggaran selesai; dan
 - f. Direksi mengambil keputusan atas tindakan selanjutnya. Jika laporan pelanggaran tersebut terbukti kebenarannya, maka akan dilakukan penindakan dan/atau perbaikan sistem. Jika tidak terbukti maka proses pelaporan pelanggaran selesai; dan
 - g. Pelaporan pelanggaran yang telah selesai diproses dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Pelaporan tidak Menyangkut Direksi
 - a. *Stakeholder* menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris untuk diverifikasi;
 - b. Dewan Komisaris mendisposisikan laporan dimaksud kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran untuk menindaklanjutinya;
 - c. Komisi Pelaporan Pelanggaran bersama Internal Audit atau bagian unit kerja lainnya melakukan investigasi lanjutan selama 14 hari kerja terhadap pelaporan pelanggaran;
 - d. Apabila hasil investigasi dapat dibuktikan maka Komisi Pelaporan Pelanggaran melaporkan pelanggaran tersebut dan memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan jika tidak dapat dibuktikan maka pelaporan pelanggaran selesai;

Management and Handling of Reports [GRI

2-16]

The management of reports on suspected misconduct is divided into two categories, namely:

1. Reports Not Involving the Board of Directors:
 - a. Stakeholders submit reports of alleged violations to the Whistleblowing Committee;
 - b. The report handling officer verifies the submitted reports. If the report meets the established criteria, it is forwarded to the Board of Directors;
 - c. The Board of Directors assigns the report to the Whistleblowing Committee for follow-up and reports it to the Board of Commissioners;
 - d. The Whistleblowing Committee, together with Internal Audit or other relevant units, conducts a follow-up investigation within 14 (fourteen) working days;
 - e. If the investigation confirms the violation, the Whistleblowing Committee reports the findings and provides an explanation to the Board of Directors. If the violation cannot be substantiated, the case is closed; and
 - f. The Board of Directors makes a decision on the next course of action. If the report is proven to be valid, appropriate action and/or system improvements will be taken. If unproven, the case is closed; and
 - g. Completed reports are submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners.
2. Reports Involving the Board of Directors:
 - a. Stakeholders submit reports of alleged violations to the Board of Commissioners through the Secretary to the Board of Commissioners for verification;
 - b. The Board of Commissioners assigns the report to the Whistleblowing Committee for follow-up;
 - c. The Whistleblowing Committee, together with Internal Audit or other relevant work units, conducts a follow-up investigation within 14 (fourteen) working days;
 - d. If the investigation confirms the violation, the Whistleblowing Committee reports the findings and provides an explanation to the Board of Commissioners. If the violation cannot be substantiated, the case is closed;

- e. Dewan Komisaris mengambil keputusan atas tindakan selanjutnya. Jika laporan pelanggaran tersebut terbukti kebenarannya, maka akan dilakukan penindakan dan/atau perbaikan sistem. Jika tidak terbukti maka proses pelaporan pelanggaran selesai; dan
- f. Dewan Komisaris melaporkan hasil pelanggaran kepada Pemegang Saham.

- e. The Board of Commissioners makes a decision on the next course of action. If the report is proven valid, appropriate action and/or system improvements will be taken. If unproven, the case is closed; and
- f. The Board of Commissioners reports the investigation outcome to the Shareholders.

Perlindungan Pelapor

Perusahaan menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas setiap pelapor atas pengaduan yang disampaikan, guna mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau risiko lain yang dapat membahayakan keselamatan pelapor. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan pelapor, Perusahaan memberikan berbagai bentuk perlindungan, antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan identitas setiap pelapor;
2. Memberikan perlindungan terhadap pelapor dan keluarganya dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun;
3. Memberikan perlindungan kepada Satuan Tugas Aturan Perilaku dan pihak lain yang memberikan informasi, termasuk bagi keluarganya dari segala bentuk ancaman dan intimidasi;
4. Perusahaan akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan pelapor dari ancaman tindak kejahatan; dan
5. Selain perlindungan dan kerahasiaan pelapor, Perusahaan juga memberikan penghargaan (*reward*) atas tindakan menyelamatkan aset Perusahaan.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses [GRI 2-16, 2-26]

Pada tahun 2024, unit pelaporan pelanggaran yang bertanggung jawab atas manajemen sistem pelaporan penyimpangan tidak menerima laporan adanya penyimpangan.

Whistleblower Protection

The Company guarantees the security and confidentiality of the identity of every whistleblower to prevent any form of intimidation, threats, or other risks that may endanger the whistleblower's safety. As part of its commitment to whistleblower protection, the Company provides various forms of safeguards, including the following:

1. Ensuring the confidentiality of every whistleblower's identity;
2. Providing protection to the whistleblower and their family from any form of threats, intimidation, or adverse actions by any party;
3. Extending protection to the Code of Conduct Task Force and other individuals who provide information, including their families, from threats and intimidation;
4. Coordinating with the Witness and Victim Protection Agency to ensure the whistleblower's safety from criminal threats; and
5. In addition to protection and confidentiality, the Company also grants rewards for actions that contribute to safeguarding Company assets.

Number of Reports Received and Processed [GRI 2-16, 2-26]

In 2024, the whistleblowing unit responsible for managing the reporting system did not receive any reports of misconduct.

Kebijakan Konflik Kepentingan [GRI 2-15]

Conflict of Interest Policy

Perusahaan telah mengesahkan Pedoman Perilaku Etika yang memuat ketentuan dan prosedur yang jelas terkait penanganan konflik kepentingan. Dalam pedoman tersebut, Perusahaan menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan, serta mencegah segala bentuk situasi yang dapat menimbulkan atau terindikasi sebagai konflik kepentingan antara individu dan Perusahaan. Kebijakan ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepanjang periode pelaporan, Perusahaan tidak mengidentifikasi adanya konflik kepentingan, termasuk dalam hal keanggotaan lintas dewan, kepemilikan saham lintas organisasi dengan pemasok atau pemangku kepentingan lainnya, keberadaan pemegang saham pengendali, maupun keterkaitan dalam bentuk hubungan, transaksi, dan saldo terutang dengan pihak-pihak terkait. Informasi mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali telah diuraikan secara lengkap dalam Laporan Tahunan 2024.

The Company has enacted a Code of Ethical Conduct that outlines clear provisions and procedures for managing conflicts of interest. This guideline emphasizes the importance of maintaining a strict separation between personal interests and those of the Company, and of preventing any situation that may create or appear to create a conflict between individual and corporate interests. This policy applies comprehensively to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Throughout the reporting period, the Company did not identify any conflicts of interest, including cross-board memberships, cross-organizational share ownership with suppliers or other stakeholders, the presence of controlling shareholders, or affiliations through relationships, transactions, or outstanding balances with related parties. Information regarding affiliations between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and controlling shareholders is disclosed in detail in the 2024 Annual Report.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan [GRI 2-27]

Compliance with Laws and Regulations

Perusahaan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang mengatur kegiatan operasionalnya, mencakup aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berkat komitmen tersebut, sepanjang tahun 2024 Perusahaan berhasil menjaga kinerja kepatuhannya tanpa menerima sanksi maupun denda material akibat pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

The Company consistently ensures compliance with all regulations governing its operations, covering economic, social, and environmental aspects. As a result of this commitment, throughout 2024 the Company successfully maintained its compliance performance without incurring any sanctions or material fines due to violations of applicable laws and regulations in Indonesia.

Kompas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals Compass

PTPN I berkomitmen mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai acuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta bertanggung jawab di tingkat internasional.

PTPN I is committed to supporting the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The SDGs, also referred to as Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) in Indonesia, represent a global development agenda established by the United Nations (UN) as a framework to achieve inclusive, sustainable, and responsible economic growth at the international level.

TPB SDGs	Kontribusi Contribution
	• Renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) • Bantuan sembako untuk masyarakat pra-sejahtera • Program PUMK (Pendanaan Usaha Mikro & Kecil) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi • Home Renovation Assistance for uninhabitable houses (RTLH) • Basic Food Aid Program for underprivileged communities • Micro and Small Business Funding Program (PUMK) to support economic independence
	• Pabrik Minyak Makan Merah untuk ketahanan pangan dan pengentasan <i>stunting</i> • Bantuan bibit kopi untuk meningkatkan produktivitas petani • Revitalisasi industri gula untuk mendukung swasembada gula nasional • Red Cooking Oil Plant to strengthen food security and reduce <i>stunting</i> • Coffee Seedling Assistance to enhance farmers' productivity • Sugar Industry Revitalization to support national sugar self-sufficiency
	• Donor darah rutin di berbagai regional • Bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana • Pembagian kursi roda untuk penyandang disabilitas • Regular Blood Donation Drives across various regions • Healthcare Assistance for communities affected by disasters • Wheelchair Distribution Program for persons with disabilities
	• <i>Training of Trainers & Social Mapping</i> untuk instruktur internal • Pelatihan manajemen risiko bersama LPP Agro Nusantara • <i>Workshop</i> pemberdayaan perempuan perkebunan dalam program <i>Our Tea Our Voice</i> (OTOV) • Training of Trainers & Social Mapping program for internal instructors • Risk Management Training in collaboration with LPP Agro Nusantara • Women Empowerment Workshop in plantations through the <i>Our Tea Our Voice</i> (OTOV) program
	• Program <i>Our Tea Our Voice</i> (OTOV) bersama Ethical Tea Partnership (ETP), mendorong kepemimpinan perempuan • Kegiatan sosial dengan partisipasi aktif perempuan di wilayah operasional • Mendukung dan memfasilitasi berjalannya kelompok-kelompok afinitas seperti "<i>women support group</i>" • <i>Our Tea Our Voice</i> (OTOV) Program in collaboration with the Ethical Tea Partnership (ETP), promoting women's leadership • Community Engagement Initiatives with active participation of women in operational areas • Support and Facilitation of Affinity Groups, such as women support groups
	• Mendukung akses terhadap air bersih melalui pengelolaan air limbah • Program konservasi daerah aliran sungai (DAS) melalui penanaman pohon • Supporting Access to Clean Water through wastewater management initiatives • Watershed Conservation Program through tree planting activities
	• Efisiensi energi di operasional • Diversifikasi ke energi terbarukan (bioenergi & agroindustri hilir) • Energy efficiency in operations • Diversification into renewable energy (bioenergy and downstream agro-industry)

TPB SDGs	Kontribusi Contribution
	• Program PUMK untuk UMKM sekitar wilayah operasional • Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penguatan hubungan industrial • Penyerapan tenaga kerja lokal di proyek hilirisasi • PUMK program to support MSMEs around the operational areas • Collaboration with local government to strengthen industrial relations • Employment of local workers in downstream projects
	• Hilirisasi sawit dan revitalisasi industri gula • Digitalisasi proses bisnis dan manajemen rantai pasokan • Downstream development of palm oil and revitalization of the sugar industry • Digitalization of business processes and supply chain management
	• Bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas • Akses kesempatan kerja yang inklusif untuk masyarakat lokal • Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan PUMK • Wheelchair assistance for persons with disabilities • Inclusive employment opportunities for local communities • Empowerment of MSMEs through PUMK financing
	• Renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) • Pencegahan penggarapan liar di lahan Hak Guna Usaha (HGU) • Home Renovation Assistance for uninhabitable houses (RTLH) • Prevention of illegal land use on cultivation rights (HGU) areas
	• Sertifikasi <i>Rainforest Alliance</i> untuk kebun teh • Sertifikasi halal produk teh dan kopi • Program manajemen limbah dan ekonomi sirkular di perkebunan • Rainforest Alliance certification for tea plantations • Halal certification for tea and coffee products • Waste management and circular economy program in plantations
	• Penanaman pohon • Penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang • Penerapan kebijakan tanpa bakar (<i>zero burning</i>) • Partisipasi dalam <i>High Level Meeting</i> Pengendalian Inflasi & La Niña • Tree planting initiatives • Mangrove planting and coral reef transplantation • Implementation of a zero-burning policy • Participation in the High-Level Meeting on Inflation Control and La Niña
	• Pengelolaan air limbah yang sesuai standar lingkungan • Penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang • Kolaborasi dengan komunitas selam dan masyarakat pesisir • Wastewater management in compliance with environmental standards • Mangrove planting and coral reef transplantation • Collaboration with diving communities and coastal residents
	• Program keanekaragaman hayati dan konservasi hutan • Penanaman pohon dan pembagian bibit kopi • Program Agroforestry di wilayah operasional • Biodiversity and forest conservation programs • Tree planting and distribution of coffee seedlings • Agroforestry programs in operational areas
	• Sosialisasi <i>Whistleblowing System</i> • Sertifikasi ISO 37001:2016 Antipenyuapan • Penguatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko • Socialization of the Whistleblowing System • ISO 37001:2016 Anti-Bribery certification • Strengthening of corporate governance and risk management
	• Kolaborasi dengan pemerintah provinsi & Kementerian Koperasi (pabrik minyak merah) • Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Ethical Tea Partnership (ETP) • Kerja sama dengan komunitas lokal dan perguruan tinggi dalam program konservasi • Collaboration with the provincial government and the Ministry of Cooperatives on the red oil factory initiative • Partnership with non-governmental organizations (NGOs) and the Ethical Tea Partnership (ETP) • Collaboration with local communities and universities on conservation programs

Indeks Standar GRI dan Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

GRI Standard Index and Financial Service Authority (OJK) Reference

Indeks Standar GRI

GRI Standard Index

Pernyataan Penggunaan Statement of Use	PT Perkebunan Nusantara I telah melaporkan sesuai dengan Standar GRI untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 PT Perkebunan Nusantara I has reported in accordance to the GRI Standards for the period 1 January until 31 December 2024
GRI 1 yang Digunakan GRI 1 Used	GRI 1: Landasan 2021 GRI 1: Foundation 2021
GRI Sektor yang Digunakan GRI Sector Used	GRI 13: Sektor Pertanian, Akuakultur, dan Perikanan 2022 GRI 13: Agriculture, Aquaculture, and Fishing Sectors 2022

Standar GRI GRI Standard		Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
				Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Pengungkapan Umum General Disclosures							
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 2: General Disclosures 2021	2-1	Detail organisasi Organizational details	58, 60, 66				
	2-2	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	42				
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point	42, 43				
	2-4	Penyajian kembali informasi Restatement of information	42				
	2-5	Penjaminan oleh pihak eksternal External assurance	43				
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain, and other business relationship	59, 60, 67, 68, 71, 140				
	2-7	Karyawan Employees	58, 146-148				
	2-8	Pekerja yang bukan karyawan Workers who are not employees	149				
	2-9	Struktur tata kelola dan komposisi Governance structure and composition	64-65, 194- 197, 200-203				

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
2-10	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	198				
2-11	Pejabat badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	194-195				
2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	45, 98-99, 200, 208-209				
2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	46-48, 99, 200				
2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	200				
2-15	Konflik kepentingan Conflict of interest	225				
2-16	Mengkomunikasikan hal-hal kritis Communication of critical concerns	54, 223-224				
2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	202-203				
2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	199				
2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	204				
2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	205-207				
2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	-	Rasio kompensasi tahunan Annual total compensation	Batasan kerahasiaan Confidentiality constraints	Terdapat kebijakan internal terkait kerahasiaan data There is an internal policy regarding data confidentiality	
2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	30-35				

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	62, 158, 212, 217			
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	158, 215			
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif Process to remediate negative impacts	128-130, 134-135, 137, 138			
	2-26	Mekanisme untuk mendapatkan saran dan meningkatkan isu Mechanisms for seeking advice and raising concerns	53, 54, 161, 215-216, 219, 222			
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	225			
	2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	73			
	2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	49-53			
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	159-161			
Topik Material Material Topics						
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 2: General Disclosures 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	44-45			
	3-2	Daftar topik material List of material topics	46-48			
ASPEK EKONOMI ECONOMIC ASPECT						
Kinerja Ekonomi Economic Performance						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	76			13.2.1, 13.22.1
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	77-78			13.22.2
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	101-104, 105			13.2.2

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	201-3	Kewajiban pada program imbalan pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	82			
	201-4	Bantuan finansial dari pemerintah Financial assistance received from government	80-81			
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	176			13.22.1
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported	176			13.22.3
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	176			13.22.4
Praktik Pengadaan Procurement Practices						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	83			
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 GRI 204: Procurement Practices 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	83-84, 176			
ASPEK TATA KELOLA GOVERNMENTAL ASPECT						
Antikorupsi Anti-corruption						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	218			13.26.1
GRI 205: Antikorupsi 2016 GRI 205: Anti-corruption 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption	221			13.26.2
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	221			13.26.3
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	221			13.26.4

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Perilaku Antipersaingan Anti-competitive Behavior						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	193			13.25.1
GRI 206: Antipersaingan 2016 GRI 206: Anti- competitive Behavior 2016	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli Legal actions for anti- competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	193			13.25.2
ASPEK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL ASPECT						
Energi Energy						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	94			
GRI 302: Energi 2016 GRI 302: Energy 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization	95			
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside of the organization	95			
	302-3	Intensitas energi Energy intensity	96			
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption	97			
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa Reductions in energy requirements of products and services	97			
Air dan Efluen Water and Effluents						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	115, 116			13.7.1
GRI 303: Air dan Efluen 2018 GRI 303: Water and Effluents 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama Interactions with water as a shared resource	116			13.7.2
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air Management of water discharge-related impacts	116-117			13.7.3

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	303-3	Pengambilan air Water withdrawal				13.7.4
	303-4	Pembuangan air Water discharged				13.7.5
	303-5	Konsumsi air Water consumption				13.7.6
Keanekaragaman Hayati Biodiversity						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics				13.3.1
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 GRI 304: Biodiversity 2016	304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas				13.3.2
	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity				13.3.3
	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi Habitats protected or restored				13.3.4
	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations				13.3.5
Konversi Ekosistem Alami Natural Ecosystem Conversion						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics				13.4.1

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Persentase volume produksi dari lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola oleh organisasi yang ditentukan bebas penggundulan hutan atau konversi, berdasarkan produk, dan menjelaskan metode penilaian yang digunakan Percentage of production volume from land owned, leased or managed by the organization determined to be deforestation- or conversion-free, by product, and describe the assessment methods used	127				13.4.2
	- Persentase volume sumber yang ditentukan bebas penggundulan hutan atau konversi, dan menjelaskan metode penilaian yang digunakan - Persentase volume sumber yang asalnya tidak diketahui sampai pada titik di mana dapat ditentukan apakah itu bebas penggundulan hutan atau konversi, dan menjelaskan tindakan yang diambil untuk meningkatkan ketertelusuran - Percentage of sourced volume determined to be deforestation- or conversion-free, and describe the assessment methods used; - Percentage of sourced volume for which origins are not known to the point where it can be determined whether it is deforestation- or conversion-free, and describe actions taken to improve traceability	127				13.4.3
	Ukuran dalam hektar, lokasi, dan jenis ekosistem alami yang dikonversi sejak batas akhir lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola oleh organisasi Size in hectares, the location, and the type of natural ecosystems converted since the cut off date on land owned, leased, or managed by the organization	127, 168				13.4.4

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	Ukuran dalam hektar, lokasi, dan jenis ekosistem alami yang dikonversi sejak batas akhir oleh pemasok atau di lokasi pengadaan Size in hectares, the location, and the type of natural ecosystems converted since the cut-off date by suppliers or in sourcing locations	127				13.4.5
Kesehatan Tanah Soil Health						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	135				13.5.1
Penggunaan Pestisida Pesticides Use						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	136-137				13.6.1
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Volume dan intensitas pestisida yang digunakan berdasarkan tingkat bahaya toksisitas	137	Volume dan intensitas pestisida yang digunakan berdasarkan tingkat bahaya toksisitas	Data belum tersedia	Sedang dalam tahap memastikan bahwa informasi terkait dapat disediakan dalam laporan yang akan datang.	13.6.2
	Volume and intensity of pesticides used by the following toxicity hazard levels		Volume and intensity of pesticides used by the following toxicity hazard levels	Data unavailable	Currently in the process of ensuring that this information can be included in the upcoming report.	
Emisi Emissions						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	106, 109				13.1.1
GRI 305: Emisi 2016 GRI 305: Emissions 2016	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct (Scope 1) GHG emissions	107-110				13.1.2
	305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	107-110				13.1.3

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Other indirect (Scope 3) GHG emissions				13.1.4
	305-4	Intensitas emisi GRK GHG emissions intensity				13.1.5
	305-5	Pengurangan emisi GRK Reduction of GHG emissions				13.1.6
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS) Emissions of ozone depleting substance				13.1.7
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions				13.1.8
Limbah Waste						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics				13.8.1
GRI 306: Limbah 2020 GRI 306: Waste 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah Waste generation and significant waste-related impacts				13.8.2
	306-2	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah Management of significant waste-related impacts				13.8.3
	306-3	Timbulan limbah Waste generated				13.8.4
	306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir Waste directed from disposal				13.8.5
	306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir Waste directed to disposal				13.8.6
Penilaian Lingkungan Pemasok Supplier Environmental Assessment						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics				84, 140
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016 GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan New suppliers that were screened using environmental criteria				84, 86, 87, 140

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	87, 141			
ASPEK SOSIAL SOCIAL ASPECT						
Kepegawaian Employment						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	149, 150, 152			
GRI 401: Kepegawaian 2016 GRI 401: Employment 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover	149-150			
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	150, 152			
	401-3	Cuti melahirkan Parental leave	152			
Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen Labor/Management Relations						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	161			
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016 GRI 402: Labor/Management Relations 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional Minimum notice periods regarding operational changes	161			
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	161, 162, 163, 164			13.19.1
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety management system	161-164			13.19.2

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	162, 163-164				13.19.3
	Layanan kesehatan kerja 403-3 Occupational health services	164				13.19.4
	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja 403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	161				13.19.5
	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 403-5 Worker training on occupational health and safety	162, 163				13.19.6
	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja 403-6 Promotion of worker health	163, 164				13.19.7
	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	163, 164				13.19.8
	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 403-8 Workers covered by an occupational health and safety	162				13.19.9
	Kecelakaan kerja 403-9 Work-related injuries	163				13.19.10
	Penyakit akibat kerja 403-10 Work-related ill health	163, 164				13.19.11
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	152				
GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016 GRI 404: Training and Education 2016	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai Average hours of training per year per employee	156				

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.	
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation		
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	152-153, 154-155				
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	157				
Keberagaman dan Kesempatan yang Setara Diversity and Equal Opportunity							
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	144, 145			13.15.1	
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016 GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance bodies and employees	145, 146-148			13.15.2	
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women to men	145			13.15.3	
Non Diskriminasi Non Discrimination							
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	161			13.15.1	
GRI 406: Non Diskriminasi 2016 GRI 406: Non Discrimination 2016	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Incidents of discrimination and corrective actions taken	161			13.15.4	
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures		Perbedaan dalam kontrak kerja dan pendekatan kompensasi berdasarkan kewarganegaraan atau status migran pekerja, sesuai lokasi operasi organisasi	-	Kompensasi berdasarkan kewarganegaraan atau status migran pekerja, sesuai lokasi operasi organisasi	Tidak berlaku	100% karyawan WNI dan tidak terdapat pekerja migran	13.15.5
		Differences in employment terms and approach to compensation based on workers' nationality or migrant status, by location of operations		Compensation based on workers' nationality or migrant status, by location of operations	Not applicable	100% Indonesian employees and no migrant workers	

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Freedom of Association and Collective Bargaining						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	160			13.18.1
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016 GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	160			13.18.2
Pekerja Anak Child Labor						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	84, 158			13.17.1
GRI 408: Pekerja Anak 2016 GRI 408: Child Labor 2016	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	84, 158			13.17.2
Kerja Paksa atau Wajib Kerja Forced or Compulsory Labor						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	84, 158			13.16.1
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016 GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	84, 158			13.16.2
Praktik Keamanan Security Practices						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	158			
GRI 410: Praktik Keamanan 2016 GRI 410: Security Practices 2016	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Security personnel trained in human rights policies or procedures	158			

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Hak atas Tanah dan Sumber Daya Land and Resource Rights						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	168			13.13.1
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures		Lokasi operasi, tempat hak atas tanah dan sumber daya alam (termasuk hak penguasaan adat, kolektif, dan informal) mungkin dipengaruhi oleh operasi organisasi Locations of operations, where land and natural resource rights (including customary, collective, and informal tenure rights) may be affected by the organization's operations	167-168			13.13.2
		Jumlah, ukuran dalam hektare, dan lokasi operasi tempat terjadinya pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya alam (termasuk hak penguasaan adat, kolektif, dan informal) dan kelompok pemegang hak yang terpengaruh Number, size in hectares, and location of operations where violations of land and natural resource rights (including customary, collective, and informal tenure rights) occurred and the groups of rightsholders affected	168-169			13.13.3
Hak-Hak Masyarakat Adat Rights of Indigenous People						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	165			13.14.1
GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016 GRI 411: Rights of Indigenous People 2016	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	177			13.14.2
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures		Lokasi operasi di mana masyarakat adat ada atau terpengaruh oleh aktivitas organisasi Locations of operations where indigenous peoples are present or affected by activities of the organization	167			13.14.3

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	Melaporkan jika organisasi telah terlibat dalam proses mencari persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat untuk setiap aktivitas organisasi Report if the organization has been involved in a process of seeking free, prior, and informed consent (FPIC) from indigenous peoples for any of the organization's activities	168				13.14.4
Masyarakat Lokal Local Community						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	146, 165			13.12.1
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 GRI 413: Local Communities 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	146, 165, 168			13.12.2
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	174, 177			13.12.3
Penilaian Sosial Pemasok Supplier Social Assessment						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	84			
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016 GRI 414: Supplier Social Assessment 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial New supplier that were screened using social criteria	84, 87			
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Negative social impacts in the supply chain and actions taken	84, 87			
Praktik Ketenagakerjaan Employment Practices						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	145			13.20.1

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Pendapatan Hidup dan Upah Hidup Living Income and Living Wage						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	160				13.21.1
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Persentase karyawan dan pekerja yang bukan karyawan dan mereka yang pekerjaannya dikendalikan dan dilindungi oleh perjanjian perundingan bersama Percentage of employees and workers who are not employees and whose work is controlled covered by collective bargaining agreements	160	Persentase karyawan dan pekerja bukan karyawan yang dicakup perjanjian kerja bersama Percentage of employees and non-employees covered by collective bargaining agreements	Batasan kerahasiaan Confidentiality constraints	Terdapat kebijakan internal terkait kerahasiaan data There is an internal policy regarding data confidentiality	13.21.2
	Persentase karyawan dan pekerja yang bukan karyawan dan mereka yang pekerjaannya dikendalikan dan dibayar di atas upah hidup, dengan perincian jenis kelamin Percentage of employees and workers who are not employees and whose work is controlled paid above living wage, with a breakdown by gender	160	Persentase karyawan dan pekerja bukan karyawan dengan upah di atas upah hidup, menurut jenis kelamin. Percentage of employees and non-employees paid above living wage, by gender	Batasan kerahasiaan Confidentiality constraints	Terdapat kebijakan internal terkait kerahasiaan data There is an internal policy regarding data confidentiality	13.21.3
Ketertelusuran Rantai Pasokan Supply Chain Traceability						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	86				13.23.1
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Tingkat ketertelusuran yang diterapkan untuk setiap produk yang dibeli Level of traceability in place for each product sourced	86, 87				13.23.2
	Persentase volume yang dibeli yang disertifikasi sesuai dengan standar yang diakui internasional Percentage of sourced volume certified to internationally recognized standards	86				13.23.3

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	Proyek peningkatan kualitas untuk membuat pemasok disertifikasi sesuai standar yang diakui internasional yang mengawasi jalur produk hingga rantai pasokan untuk memastikan bahwa semua volume produk yang dibeli sudah disertifikasi Improvement projects to get suppliers certified to internationally recognized standards that trace the path of products through the supply chain to ensure that all sourced volume is certified	86				13.23.4
Kebijakan Publik Public Policy						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	193			13.24.1
GRI 415: Kebijakan Publik 2016 GRI 415: Public Policy 2016	415-1	Kontribusi politik Political contributions	193			13.24.2
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customer Health and Safety						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	179, 181			13.10.1
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016 GRI 416: Customer Health and Safety 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	180			13.10.2
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	181			13.10.3

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Keamanan Pangan Food Safety						
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Persentase volume produksi dari lokasi-lokasi yang disertifikasi dengan standar keamanan pangan yang diakui internasional	181	Persentase volume produksi yang berasal dari lokasi yang telah disertifikasi dengan standar keamanan pangan internasional	Data belum tersedia	Sedang dalam tahap memastikan bahwa informasi terkait dapat disediakan dalam laporan yang akan datang.	13.10.4
	Percentage of production volume from sites certified to internationally recognized food safety standards		Percentage of production volume originating from locations that have been certified with international food safety standards	Data unavailable	Currently in the process of ensuring that this information can be included in the upcoming report.	
	Jumlah penarikan produk yang dilakukan karena alasan keamanan pangan dan total volume produk yang ditarik Number of recalls issued for food safety reasons and the total volume of products recalled	181				13.10.5
Ketahanan Pangan Food Security						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3 Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	185-186				13.9.1
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Berat total kehilangan pangan dalam ton metrik dan persentase kehilangan pangan, berdasarkan kategori produk atau produk utama organisasi, serta menjelaskan metodologi yang digunakan untuk penghitungan	186	Perhitungan berat total kehilangan pangan dalam metrik ton dan persentase kehilangan pangan	Data belum tersedia	Sedang dalam tahap memastikan bahwa informasi terkait dapat disediakan dalam laporan yang akan datang.	13.9.2
	Total weight of food loss in metric tons and the food loss percentage, by the organization's main products or product category, and describe the methodology used for this calculation		Calculation of total food loss in metric tons and percentage of food loss	Data unavailable	Currently in the process of ensuring that this information can be included in the upcoming report.	

Standar GRI GRI Standard	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Tidak Mencantumkan Omission			No. Ref. Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan Tidak Mencantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labeling						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Pengelolaan terhadap topik material Management of material topics	179			
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016 GRI 417: Marketing and Labeling 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa Requirements for product and service information and labeling	179			
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	179			
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran Incidents of non-compliance concerning marketing communications	179			

Topik Topic	Topik dalam Standar Sektor GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai bukan material Topics in the applicable GRI Sector Standards determined as not material				
Keanekaragaman Hayati Biodiversity					
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Pengungkapan sektor tambahan untuk organisasi di sektor akuakultur	Sektor akuakultur	Tidak berlaku	Topik tidak relevan untuk perusahaan	13.3.6
	Additional sector disclosure for organizations in the aquaculture sector	Aquaculture sector	Not applicable	The topic isn't relevant to the company	
	Pengungkapan sektor tambahan untuk organisasi di sektor perikanan tangkap	Sektor perikanan tangkap	Tidak berlaku	Topik tidak relevan untuk perusahaan	13.3.7
	Additional sector disclosure for organizations in the fishing sector	Fishing sector	Not applicable	The topic isn't relevant to the company	
Kesehatan dan kesejahteraan hewan Animal Health and Welfare					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	Pengelolaan terhadap topik material	Pengungkapan kesehatan dan kesejahteraan hewan	Tidak berlaku	Topik tidak relevan untuk perusahaan	13.11.1
	3-3 Management of material topics	Animal health and welfare disclosure	Not applicable	The topic isn't relevant to the company	
Pengungkapan Sektor Tambahan Additional sector disclosures	Persentase volume produksi dari lokasi-lokasi organisasi yang disertifikasi sesuai dengan standar kesehatan dan kesejahteraan hewan pihak ketiga	Persentase volume produksi yang disertifikasi sesuai dengan standar kesehatan dan kesejahteraan hewan pihak ketiga	Tidak berlaku	Topik tidak relevan untuk perusahaan	13.11.2
	Percentage of production volume from sites of the organization certified to third-party animal health and welfare standards	Percentage of production certified to third-party animal health and welfare standards	Not applicable	The topic isn't relevant to the company	
	Persentase hidup hewan akuatik yang dibudidayakan dan sebab utama kematian	Persentase hidup hewan akuatik yang dibudidayakan dan sebab utama kematian	Tidak berlaku	Topik tidak relevan untuk perusahaan	13.11.3
	Survival percentage of farmed aquatic animals and the main causes of mortality	Survival percentage of farmed aquatic animals and the main causes of mortality	Not applicable	The topic isn't relevant to the company	

Referensi SEOJK SEOJK Reference	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Surat Edaran No. 16/SEOJK.04/2021 Circular No. 16/SEOJK.04/2021	Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy	
	A.1 Penjelasan Strategi Keberlanjutan Descriptions of Sustainability Strategy	32, 36, 40
	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	
	B.1 Aspek Ekonomi Economic Aspects	6, 76-77, 95
	B.2 Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspects	6, 95, 122, 133
	B.3 Aspek Sosial Social Aspects	7, 170-176
	Profil Perusahaan Company Profile	
	C.1 Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Sustainability Values	62-63
	C.2 Alamat Perusahaan Company's Address	58-59
	C.3 Skala Usaha Scale of Business	60, 66, 71, 147-148
	C.4 Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang dijalankan Products, Services, and Business Activities Conducted	67-71
	C.5 Keanggotaan pada Asosiasi Membership of Associations	73
	C.6 Perubahan organisasi bersifat signifikan Significant Changes in Organization	60
	Penjelasan Direksi Directors Statement	
	D.1 Penjelasan Direksi Explanations from the Board	30-35
	Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	
	E.1 Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsibility in the Implementation of Sustainable Finance	32-33
	E.2 Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Development of Finance-Related Competency	202-203
	E.3 Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance	208-211
	E.4 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relations	49-54
	E.5 Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues Surrounding the Implementation of Sustainable Finance	31-32, 105, 174
	Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	
	F.1 Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities in Building a Culture of Sustainability	32-33, 85, 87
	Kinerja Ekonomi Economic Performance	
	F.2 Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison between Production Target and Performance, Portfolio, Financing Target, or Investment, Income and Profit and Loss	77, 78

Referensi SEOJK SEOJK Reference	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison between Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Compatible with Sustainable Finance	77, 78
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Cost	78
Aspek Material Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	85
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	95, 96
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Fulfillment of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	96-97
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	114, 117
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts from operational areas that are near or located in conservation areas or have biodiversity	126, 129, 130
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity conservation	126, 128-130, 133
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Amount and Intensity of Emissions Produced by Type	106, 110, 111
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Emission Reduction Efforts and Achievements	105, 111-113
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The amount of waste and effluent generated by type	117, 122
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and effluent management mechanisms	114-120, 121-125
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spills (if any)	125
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Environmental Complaints Aspects		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and material of environmental complaints received and settled	125

Referensi SEOJK SEOJK Reference	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Kinerja Sosial Social Aspects		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment of financial services institutions, issuers, or public companies to provide equal services for products and/ or services to customers	178, 179
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	145
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	158
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	150
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	161-164
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pekerja Employee Capability Training and Development	152-157
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	84, 141, 177
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	177, 182, 222
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility Activities (TJSL)	169, 171-172
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility on the development of Sustainable Finance products and/or services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	84, 85, 184
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Safety Evaluated Products/Services for Customers	180
F.28	Dampak Produk/Jasa Impact of Product/Service	180
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recalled	181
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	183-184
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen Written Verification from Independent Party	43
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	251-252
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response towards Feedback on Previous Year's Sustainability Report	43
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies	248-250

Lembar Umpan Balik [G.2]

Feedback Sheet

PT Perkebunan Nusantara I senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan dan nilai bagi para pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perusahaan mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari para pembaca dan pengguna laporan ini untuk menjadi bahan perbaikan ke depannya.

PT Perkebunan Nusantara I is always committed to improving sustainability performance, and value for stakeholders. In order to realize this, the Company expects input, criticism, and suggestions from readers and users of this report to provide material for future improvements.

Profile Pembaca

Reader's Profile

Nama | Name :

Nama Institusi/Perusahaan | Name of Institution/Company :

Telepon | Phone :

Kategori Pemangku Kepentingan

Category of Stakeholders

Mohon beri tanda (✓) pada jawaban yang sesuai. Please mark (✓) in the appropriate answer.

☐ Pemerintah
Government

☐ Karyawan
Employee

☐ Masyarakat
Community

☐ Pemegang Saham
Shareholders

☐ Media
Media

☐ Pelanggan
Customer

☐ Lain-lain, mohon sebutkan:
Others, please mention:

Mohon beri tanda (✓) pada jawaban yang sesuai. Please mark (✓) in the appropriate answer.

Laporan ini sudah menggambarkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial Perusahaan secara berimbang:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Laporan ini bermanfaat:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Laporan ini menarik:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

This report has described the Company's economic, environmental and social performance in a balanced manner:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

This report is useful:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

This report is interesting:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda terhadap kinerja keberlanjutan Perusahaan:

☐ Sangat Setuju
Strongly Agree

☐ Setuju
Agree

☐ Netral
Neutral

☐ Tidak Setuju
Disagree

☐ Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

This report increases your confidence in the Company's sustainability performance:

Mohon dapat tuliskan jawaban pada kotak yang tersedia di bawah ini.

Please write your answer in the box provided below.

1. Bagian informasi mana yang paling berguna dan menarik?

1. Which piece of information is the most useful and interesting?

2. Bagian informasi mana yang kurang berguna sehingga perlu dilakukan perbaikan?

2. Which part of the information is less useful and needs to be improved?

3. Apakah data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya, dan berimbang?

3. Is the data presented transparent, reliable, and balanced?

4. Saran/usul/komentar untuk perbaikan laporan ke depan:

4. Suggestions/advices/comments for the improvement of future reports:

Umpan balik yang diberikan sangat berharga bagi Perusahaan. Oleh karenanya, mohon dapat mengirimkan lembar umpan balik ini ke:

The feedback provided is very valuable for the Company. Therefore, please send this feedback sheet to:

 Gedung Agro Plaza Lt. 14, | Agro Plaza Building, 14th Floor,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No.1,
Setia Budi, Jakarta 12950

 (+62-21) 291 83300

 corcom@ptpn1.co.id

 www.ptpn1.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

2024

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report



PT Perkebunan Nusantara I
Gedung Agro Plaza Lt. 14
Jalan H. R. Rasuna Said Kav X2-1, Jakarta, 12950

Telepon Phone	: 0811 33333 214
Surel Email	: corcom@ptpn1.co.id
Situs Web Website	: www.ptpn1.co.id